LKPJ TAHUN 2023

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waroh matullohi wabarokatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan hidayah, taufiq dan kekuatan serta kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dinas kita sehari-hari, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kediri Akhir Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LKPJ oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui LKPJ diharapkan DPRD Kabupaten Kediri memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mencerminkan kinerja Kepala Daerah Tahun 2023, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023.

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup LKPJ ini ada dua. *Pertama,* hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. *Kedua,* hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu kami selaku Kepala Daerah bersama jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri menyadari segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tahun 2023 yang perlu terus disempurnakan dan tentunya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

membutuhkan kerja sama, sinergi, kalaborasi dengan seluruh stakeholders dan peran aktif masyarakat, sehingga urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik guna terwujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

Demikian LKPJ ini disusun untuk kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri. Semoga data yang kami sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menerima LKPJ Bupati Kediri Tahun 2023. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka, dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah guna mewujudkan Kabupaten Kediri berbudaya, maju dan sejahtera.

Wassalamu'alaikum warah matullahi wabarakatuh,

Kediri, 20 Maret 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI KEDIRI



Hanindhito Himawan Pramana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....1
DAFTAR ISI....II
DAFTAR TABEL....IV
DAFTAR GAMBAR....V
BAB I....1
PENDAHULUAN....1
1.1. Dasar Hukum....1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah....1
1.3. Data Umum Daerah....3
a. Data Geografis Wilayah....3
b. Jumlah Penduduk....5
c. Laju Pertumbuhan Penduduk....5
d. Jumlah PNS....6
e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan....8
f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja....9
g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan....9
1.4. Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri....10
BAB II....16
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH....16
2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah....16
2.1.1. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah....16
2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah....16
2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah....16
2.2. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah....19
2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah....19
2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah....26
2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah....27
2.2.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah....27
2.3. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan....28
2.3.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan....28
2.3.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan....29
2.3.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan....29

BAB III....31
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH....31
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan....31
3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja....31
3.1.2. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja....34
3.2. Analisa Efisiensi Sumber Daya....58
3.3. Akuntabilitas Kinerja....75
3.3.1. Analisa Akuntabilitas Kinerja....76
3.3.2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Masalah yang Dihadapi serta Solusi Pemecahannya....89
3.4. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan....374
3.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri....384
3.6. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya....399
BAB IV....399
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN....478
4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan....478
4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian sebagai berikut:....478
BAB V....488
P E N U T U P....488

DAFTAR TABEL

Table 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 s.d. 2023 5
Table 2 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 s.d 2023 6
Table 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri Menurut Perangkat Daerah Tahun 2023 6
Table 4 Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 8
Table 5 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 9
Table 6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 10
Table 7 Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri Selama Tahun 2023 10
Table 8 Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 22
Table 9 Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 27
Table 10 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 29
Table 11 Skala Kategori Capaian Kinerja 33
Table 12 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023 34
Table 13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Dengan Capaian Dua Tahun Terakhir 43
Table 14 Perbandingan Realisasi Tahun 2023 Dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Kediri 53
Table 15 Rentang Kategori Efisiensi 59
Table 16 Perbandingan Kinerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023 60
Table 17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Capaian Provinsi dan Nasional Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023 67
Table 18 Matrikulasi Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 76
Table 19 Rekapan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2023 90
Table 20 Rekapan Data Usia Harapan hidup di Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2023 107
Table 21 Matrikulasi Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan Serta Rencana Tindak Lanjut 366
Table 22 Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 375
Table 23 Tujuan dan Sasaran Masing-masing Misi 385
Table 24 Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah 390
Table 25 Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 399
Table 26 Penggunaan BKK Pemberdayaan BUM Desa 484

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Kediri 4
Gambar 2 Bupati Kediri berdiskusi dengan salah satu siswa dari SMPN 1 Pare 89
Gambar 3 Bupati Kediri bersama dengan jajaran meninjau pelayanan kesehatan di RSUD SLG, Kecamatan Ngasem 105
Gambar 4 Bupati Kediri tengah bercengkrama dengan pegawai pabrik rokok saat kunjungan ke Pabrik Rokok di Kabupaten Kediri 125
Gambar 5 Bupati Kediri memberikan Bantuan Sosial BLT-DBHCHT kepada masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Ngasem 139
Gambar 6 Kegiatan Bupati Kediri Bersama Anggota Forkopimda dan Toko Agama/Tokoh Masyarakat 151
Gambar 7 Kegiatan Bupati Kediri dalam evaluasi kinerja OPD 166
Gambar 8 Bupati Kediri berdiskusi dengan Guru PPPK di Joglo Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri 188
Gambar 9 Bupati Kediri dengan jajaran melakukan *Focus Group Disscussion* terkait digitalisasi administrasi pemerintahan 197
Gambar 10 Bupati Kediri dalam kegiatan cek progres PSN 210
Gambar 11 Bupati Kediri mengunjungi Pasar Buah Mangga Podang di Kecamatan Banyakan 222
Gambar 12 Kegiatan Bupati dalam ketahan pangan 240
Gambar 13 Kegiatan Bupati bersama Gapoktan 256
Gambar 14 Alat berat sedang melakukan normalisasi sungai di Kecamatan Banyakan sebagai upaya perbaikan jalan irigasi 279
Gambar 15 Bupati Kediri bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pembangunan Bandar Udara Dhoho di Kecamatan Tarokan 297
Gambar 16 Kegiatan Bupati dalam sektor pariwisata 306
Gambar 17 Sumber Mata Air 315
Gambar 18 Kegiatan Bupati dalam penyelenggraan kegiatan penanggulangan bencana 331
Gambar 19 Bupati kediri bersama komunitas seniman 340
Gambar 20 Lomba Kediri Half Marathon 349
Gambar 21 Kegiatan dialog Bupati bersama masyarakat Desa 356

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi DjawaTimur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

1.2. Visi Misi Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu

pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana;
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda; dan

9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

1.3. Data Umum Daerah

a. Data Geografis Wilayah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111o 47′ 05″ s.d. 112o 18′ 20″ Bujur Timur dan 7o 36′ 12″ s.d. 8o 0′ 32″ Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 1.523,563 km2.

Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara dengan ketinggian rata-rata 81 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

- Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha, merupakan jenis tanah yang Sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang, dan Gampengrejo.
- Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan, dan Kandangan.
- Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti di Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen, dan Mojo.
- Mediteran coklat merah, grumusol kelabu seluas 13.556 Ha terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare, dan

Kunjang.

- Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Kandangan.

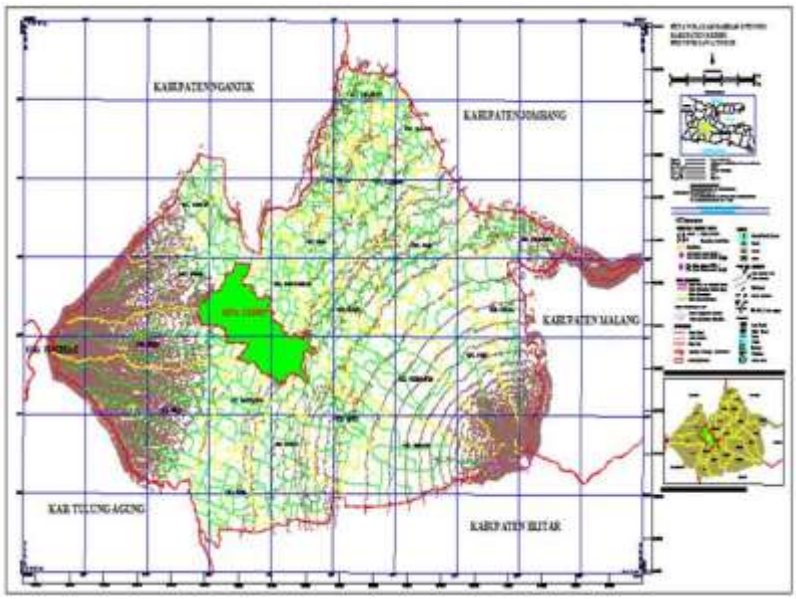
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kediri didominasi untuk lahan pertanian seluas 98.208 Ha atau sekitar 70,85% dari total luas wilayah dimana luas lahan pertanian tersebut terdiri dari lahan sawah seluas 51.968 Ha dan lahan bukan sawah seluas 86.637 Ha. Penggunaan lahan lainnya adalah guna lahan bukan pertanian seluas 40.397 Ha atau sebesar 29,15% dari total luas wilayah.

Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Peta administrasi Kabupaten Kediri, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 1
Peta Administrasi Kabupaten Kediri



Sumber : BPS Kabupaten Kediri

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan Kementerian Dalam Negeri dalam melayani administrasi kependudukan masyarakat didapatkan pada tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.684.454 jiwa terdiri dari laki-laki 849.958 (50,46%) dan perempuan 834.496 (49,54%). Hal tersebut berarti sex ratio Kabupaten Kediri tahun 2023 adalah 101,85, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Table 1
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 s.d 2023

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Laki-laki	845.152	845.526	849.958
2	Perempuan	828.006	829.292	834.496
J u m l a h		1.673.158	1.674.818	1.684.454
Sex Ratio		102,1	102,0	101,9

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2023 Kabupaten Kediri
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Table 2
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 s.d 2023

No	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jumlah penduduk	1.644.400	1.656.020	1.684.454
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,74	0,71	0,72

Sumber : Jumlah Penduduk dari SIAK Kementerian Dalam Negeri

d. Jumlah PNS

Jumlah ASN Kabupaten Kediri menurut sumber data dari Badan Kepegawaian Daerah pada akhir tahun 2023 adalah 9.393. Berikut adalah gambaran ASN Kabupaten Kediri Menurut Perangkat Daerah :

Table 3
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri
Menurut Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	ESELON	NON ESELON			JUMLAH
			JF	STAF	SEKDES	
1	Sekretariat Daerah	13	16	118		147
2	Sekretariat Dewan	5	8	15		28
3	Inspektorat	6	26	14		46
4	Dinas Pendidikan	15	5.617	270		5.902
5	Dinas Kesehatan	19	1039	261		1.319
6	Dinas PUPR	15	15	74		104
7	Dinas PERKIM	8	5	21		34
8	Satpol PP	16	5	36		57
9	B P B D	4	1	7		12
10	Dinas Sosial	6	8	8		22
11	Dinas Tenaga Kerja	8	8	5		21
12	Dinas P2KBP3A	8	3	11		22
13	Dinas KPP	7	11	42		60

14	Dinas Lingkungan Hidup	7	6	63		139
15	Dinas Dukcapil	5	6	15		26
16	Dinas PMPD	8	3	16		27
17	Dinas Perhubungan	15	9	16		40
18	Dinas Kominfo	7	4	16		27
19	Dinas Kopusmik	6	6	12		24
20	Dinas PMPTSP	3	10	7		20
21	Dinas Parbud	7	7	25		39
22	Dinas Kearsipan & Perpust.	4	3	9		16
23	Dinas Perikanan	6	4	11		21
24	Dinas Peratabun	5	63	60		128
25	Dinas Perdagangan	9	9	40		58
26	Kecamatan Semen	6		5	1	12
27	Kecamatan Mojo	7		5	4	16
28	Kecamatan Kras	8		6	4	18
29	Kecamatan Ngadiluwih	7		6	4	17
30	Kecamatan Kandat	7		4		11
31	Kecamatan Wates	6		7	4	17
32	Kecamatan Ngancar	7		5	11	13
33	Kecamatan Ngancar	7		5	1	13
34	Kecamatan Puncu	7		5	6	18
35	Kecamatan Plosoklaten	6		5	3	14
36	Kecamatan Gurah	7		4	2	13
37	Kecamatan Pagu	7		4	4	22
38	Kecamatan Gampengrejo	7		3		10
39	Kecamatan Grogol	7		6		13
40	Kecamatan Papar	8		4	3	15
41	Kecamatan Purwoasri	9		3	8	20
42	Kecamatan Plemahan	8		7		15
43	Kecamatan Pare	12		7	1	20
44	Kecamatan Kepung	7		3	4	14

45	Kecamatan Kandangan	7		6	5	18
46	Kecamatan Tarokan	8		7	1	16
47	Kecamatan Kunjang	8		6	2	16
48	Kecamatan Banyakan	7		12		19
49	Kecamatan Ringinrejo	7		4	1	12
50	Kecamatan Kayenkidul	6		5	1	12
51	Kecamatan Ngasem	9		3		12
52	Kecamatan Badas	8		4	3	15
53	R S U D	9	322	89		420
J U M L A H		468	7.343	1.520	62	9.393

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023

e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 3.060.891.450.606,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.163.467.890.431,88 atau 103,35% (*Unaudited*). Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Table 4
Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	TA 2023		%	Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	586.353.720.275,00	636.075.970.326,88	108,48	649.630.917.159,76
2.	Pendapatan Transfer	2.471.381.349.331,00	2.526.670.467.437,00	102,24	2.378.321.143.873,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.156.381.000,00	721.452.668,00	22,86	31.906.419.118,00
Jumlah		**3.060.891.450.606,00**	**3.163.467.890.431,88**	**103,35**	**3.059.858.480.150,76**

Sumber : BPKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 22 Februari 2024 – Unaudited)

f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada TA 2023 Belanja Daerah Kabupaten Kediri dialokasikan sebesar Rp 3.521.886.388.405,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.288.924.911.656,40 atau 93,39 % dari anggaran. Rincian Belanja menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

Table 5
Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023
dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

No.	Uraian	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Belanja Operasi	2.388.440.438.915,00	2.196.425.893.300,31	91,96	2.146.482.941.015,11
b	Belanja Modal	514.825.900.280,00	483.080.137.961,09	93,83	370.827.255.677,20
c	Belanja Tak Terduga	9.188.359.260,00	709.476.100,00	7,72	3.063.084.500,00
d	Belanja Transfer	609.431.689.950,00	608.709.404.295,00	99,88	633.728.601.882,00
Jumlah		**3.521.886.388.405,00**	**3.288.924.911.656,40**	**93,39**	**3.154.101.883.074,31**

Sumber : BPKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 22 Februari 2024 – Unaudited)

g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, antara lain berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain untuk

pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kewajiban lainnya. Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 sebagaimana berikut :

Table 6
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022

NO.	PEMBIAYAAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1)	Penerimaan Pembiayaan	520.994.937.799,94	559.022.029.423,49
2)	Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000,00	33.783.900,00

Sumber : BPKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 22 Februari 2024 – Unaudited)

1.4. Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri

Prestasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2023 sebagai berikut :

Table 7
Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/Provinsi)	Ket.
1.	Instansi Terbaik Ketiga dalam pemanfaatan Aplikasi Srikandi	Kementerian Komonikasi dan Informatika Republik Indonesia	Nasional	
2.	Evaluasi SPBE (Kategori Memuaskan)	Kementerian PAN RB	Nasional	
3.	Pengawasan Kearsipan (Kategori Memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia	Nasional	
4.	Sertifikat Penerima Hijau - Pemerintah Kabupaten Kediri	OMBUDSMAN RI	Nasional	
5.	Sertifikat PEKPPP Kabupaten Kediri	Kementerian PAN RB	Nasional	
6.	Sertifikat LKE KEMENPAN RB	Kementerian PAN RB	Nasional	

7.	LHE AKIP Kab Kediri Tahun 2023	Kementerian PAN RB	Nasional	
8.	Kader Terbaik Kabupaten/Kota	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	
9.	Kader Terbaik Kabupaten/Kota	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	
10.	Juara 3 Nasional Lomba Video Layanan Inspiratif (Inovasi Layanan) Fasilitas Kesehatan	BPJS Kesehatan	Nasional	
11.	Top 7 Finalist of Central Sterilization Indonesia Hero Award 2023	I-CSPA	Nasional	
12.	Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Nasional	
13.	PenghargaanPemerintah Daerah denganDukungan Tinggi dalamPelaksanaan IKM oleh Satuan Pendidikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
14.	PenghargaanPemerintah Daerah denganPencapaian Target Aksi NyataTransisi PAUD ke SD yang MenyenangkanLebih Awal di Jenjang SD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
15.	Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Capaian Tinggi untuk Aksi NyataTransisi PAUD SD di Jenjang SD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
16.	PenghargaanPemerintah Daerah denganCapaian Tinggi untuk Aksi NyataTransisi PAUD SD di Jenjang PAUD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin	Nasional	

		Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur		
17.	PenghargaanPemerintah Daerah denganPemanfaatanRapor Pendidikan oleh SatuanSekolahMenengahPertama Tertinggi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
18.	PenghargaanPemerintah Daerah denganPartisipasi dan Kontribusidalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023.	Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam	Nasional	
19.	Penilaian Kota/Kabupaten Sehat KKS) Tinukat Swasta Saba Padaoa	Kemenkes	Nasional	
20.	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	
21.	Penilaian Kota/Kabupaten Layak Anak(KLA) Tingkat Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	
22.	Finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023	Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Nasional	
23.	DUKCAPIL HEBAT	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	
24.	Penghargaan kategori pembangunan sosial berkelanjutan pada program Jumat Ngopi atau Ngobrol Persoalan dan Solusi.	B-Universe	Nasional	
25.	Penghargaan dengan predikat BAIK pada capaian Predikat	Komisi Aparatur Sipil		

	Sistem Merit dan Kualitas Pengisian JPT	Negara (KASN)	Nasional	
26.	Instansi Terbaik Ketiga dalam Pemanfaatan SRIKANDI Tingkat Pemerintah Kabupaten	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Nasional	
27.	KLA (Kabupaten/Kota LayakAnak)	KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindanganAnak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	
28.	APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindangan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	
29.	Swasti Saba Pada (Kabupaten Sehat)	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	
30.	Implementasi Anaku Sehat dan Cerdas " Early Childhood Care, Nutrition and Education" (ECCNE) awards untuk penurunan stunting	SEAMEO RECFON dan BKKBN	Nasional	
31.	Universal Health Coverage	BPJS Kesehatan	Nasional	
32.	Mitra Bhakti Husada (K3 perkantoran)	kementerian Kesehatan	Nasional	
33.	SMK3 perkantoran	kemeterian tenaga kerja	Nasional	
34.	akreditasi LABKES (PARIPURNA)	kementrian kesehatan republik indonesia	Nasional	
35.	Akreditasi Puskesmas (Untuk 34 PKM)	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	
36.	Rekor Penyajian Sate Lele Terbanyak	Musium Rekor Dunia Indonesia (Muri)	Nasional	
37.	Pelaksanaan Brawijaya Aquatic 2023	Ketua Pelaksana Brawijaya Aquatic	Nasional	
38.	Juara 2 Tenaga Kesehatan Teladan Profesi Apoteker Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
39.	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	

	Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022			
40.	Juara 1 Think Bureaucracy (Lomba Cerdas Cermat ASN Berkinerja)	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
41.	Pengumuman TOP FINALIS KOVABLIK 2023	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
42.	Sertifikat Radar Kediri	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	Provinsi	
43.	Open Defecation Free (ODF} Award	Dinkes Provinsi Jatim	Provinsi	
44.	Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Peringkat Ill Kategori Pemerintah Daerah Pembina Desa	Gubernur Provinsi Jatim	Provinsi	
45.	Patriot Jawi Wetan Kategori Inovasi Pertahanan Negara	Gubernur Provinsi Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V / Brawijaya	Provinsi	
46.	Penghargaan Public Service of The Years Jawa Timur 2023	Markplus Institute	Provinsi	
47.	Juara Iii Kabupaten Dengan Jumlah Desa Yang Telah Tervaksin Pmk Terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
48.	Markplus Institute Awards "Publik Services of The Year Jawa Timur 2023"	Markplus Institute	Provinsi	
49.	Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Pemenang Kategori Wisata Desa	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
50.	Anugrah Patriot Jawi Wetan Tahun 2023	Polda Jatim Dan Pemprov Jatim	Provinsi	
51.	UKM Berprestasi 2023 Kategori Kuliner	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
52.	Jenis Koperasi Pemasaran Lomba Koperasi Berprestasi Provinsi Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	

53.	Piagam Prov. Kirei Na Hana Kesbang	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
54.	Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji detikJatim Awards 2023 dalam kategori Pembangunan Infrastruktur Daerah	Detikcom	Provinsi	
55.	Peringkat V ASN Achievement Awards Kategori Lembaga Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2023	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
56.	Penghargaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK dan SKD CPNS 2023	Kanreg II BKN Surabaya	Provinsi	
57.	Kabupaten/Kota Menuju Informatif	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
58.	Juara Ketiga Website Pemda Terbaik pada Berita Jatim Digital Award 2023	PT. Beritajatim Cyber Media	Provinsi	
59.	Juara 1 Lomba Duta Genre TkJawaTimur	BKKBN ProvinsiJawaTimur	Provinsi	
60.	Juara 2 Lomba APE BKB TkJawaTimur	BKKBN ProvinsiJawaTimur	Provinsi	
61.	Pelaksanaan Hari Ikan Nasional Ke 10	Ketua Forikan Jawa Timur	Provinsi	
62.	Pembinaan Terbaik Pengembangan Budidaya Lele Sistem Sirkulasi	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	

Sumber :

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Daerah diberikan hak otonomi sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Dalam kenyataannya daerah sangat tergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah dikarenakan prosentase komponen dana perimbangan yang sangat besar dibanding dengan komponen lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.1. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, permasalahan utama perubahan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Estimasi Kenaikan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Perubahan Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
3. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Perangkaan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp.

3.060.891.450.606,00 naik sebesar Rp. 219.759.372.634,00 atau 7.73% dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.841.132.077.972,00. Pendapatan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 586.353.720.275,00 terdiri dari:
   a. Pajak Daerah sebesar Rp. 257.953.317.700,00.
   b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 29.589.373.500.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 11.940.999.505,00.
   d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.286.870.029.570,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.471.381.349.331,00 terdiri dari:
   a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.216.065.128.110,00
   b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 255.316.221.221,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 3.156.381.000,00 terdiri dari:
   a. Hibah sebesar Rp. 3.156.381.000,00.
   b. Dana Darurat sebesar Rp. 0,00.
   c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 0,00.

2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan dengan melaksanakan perhitungan ulang target PAD APBD TA 2023 dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan PAD semester I TA 2023 untuk digunakan sebagai acuan target PAD semester II TA 2023;

2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan transfer daerah dengan melaksanakan penyesuaian Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2023 dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi tahun 2023 sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan yaitu :

a. Adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 440/784/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
2) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 412.2/304/112.3/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Program Pemberdayaan BumDes kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
3) Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
4) Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Maret 2023 Nomor 900/5272/70312023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 untuk Pembangunan Jalan PB Sudirman dan Jalan Jawa untuk mendukung akses menuju Bandara Kediri.

b. Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023

berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 2 November 2022 Nomor: 903/21988/201.1/2022 perihal Pagu Indikatif DBHCHT Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

c. Perubahan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/894/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.
d. Alokasi Pengalokasian Silpa Pajak Rokok Tahun Anggaran 2023.

2.2. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Belanja Daerah

2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangannyanya.

Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD. Perubahan-perubahan tersebut antara lain disebabkan :

1. Adanya penyempurnaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Adanya perubahan perencanaan belanja yang disebabkan:
    a. Perhitungan dengan pergeseran anggaran untuk ketersediaan anggaran gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNSD.
    b. Pergeseran kebutuhan anggaran dari belanja tidak terduga ke kegiatan SKPD untuk mendukung penangan wabah mulut dan kuku di Kabupaten Kediri.
    c. Penyesuaian anggaran dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk teknis dari Kementrian Teknis.
    d. Penyesuaian kegiatan yang bersumber dana DAU spesifik bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Pekerjaan Umum dan DAU spesifik penggajian P3K.
    e. Penyesuaian anggaran dengan pergeseran untuk untuk mendukung program-program prioritas.
    f. Penyesuaian pergeseran belanja BLUD.
    g. Pemenuhan anggaran Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang tahapan pemenuhan dana sesuai dengan Peraturan Daerah no 10 tahun 2021.
    h. Perubahan sasaran SKPD terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang harus digunakan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Disamping itu, sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 3.521.886.388.405,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 139.226.201.398,00 atau 4,12% dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Belanja Daerah disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang diformulasikan ke dalam :

1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. urusan pemerintahan pilihan;
4. unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. unsur kewilayahan;
8. unsur pemerintahan umum;

Disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang dirinci sebagai berikut:

Table 8
Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintahan Tahun 2023

NO.	SKPD	APBD	PAPBD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	**2**	**3**	**4**	**5 = 4-3**
1	1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan	963.233.151.589,00	-12.817.193.521,00	-12.817.193.521,00
2	1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan	166.518.706.265,00	54.584.147.889,00	54.584.147.889,00
3	1.02.0.00.0.00.02.0001 RSUD Kabupaten Kediri	255.867.512.448,00	-6.356.487.611,00	-6.356.487.611,00
4	1.02.0.00.0.00.02.0002 RSUD SLG	119.392.640.820,00	21.484.552.946,00	21.484.552.946,00
5	1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158.974.286.593,00	-5.548.935.140,00	-5.548.935.140,00
6	1.04.1.03.2.10.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	252.333.835.400,00	13.263.168.440,00	13.263.168.440,00
7	1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	21.161.313.905,00	1.912.426.502,00	1.912.426.502,00
8	1.05.0.00.0.00.29.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.654.625.200,00	-1.408.056.942,00	-1.408.056.942,00
9	1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial	15.978.792.773,00	20.458.593.784,00	20.458.593.784,00
10	2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja	7.682.246.458,00	11.927.489.503,00	11.927.489.503,00
11	2.09.3.27.0.00.08.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	13.274.552.419,00	11.451.416.552,00	11.451.416.552,00

12	2.11.0.00.0.00.09.0000 Dinas Lingkungan Hidup	58.374.521.744,00	-19.517.848.800,00	-19.517.848.800,00
13	2.12.0.00.0.00.10.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.867.129.040,00	420.812.479,00	420.812.479,00
14	2.13.0.00.0.00.11.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13.347.683.871,00	2.219.655.129,00	2.219.655.129,00
15	2.14.2.08.0.00.12.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.820.591.249,00	-458.296.190,00	-458.296.190,00
16	2.15.0.00.0.00.13.0000 Dinas Perhubungan	16.583.049.773,00	-746.420.543,00	-746.420.543,00
17	2.16.2.21.2.20.14.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika	22.672.434.440,00	747.764.379,00	747.764.379,00
18	2.17.0.00.0.00.15.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	13.164.559.684,00	-2.097.168.430,00	-2.097.168.430,00
19	2.18.0.00.0.00.16.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.943.962.621,00	-1.232.048.866,00	-1.232.048.866,00
20	2.24.2.23.0.00.17.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.244.526.444,00	-466.549.039,00	-466.549.039,00
21	3.25.0.00.0.00.18.0000 Dinas Perikanan	8.312.617.230,00	-1.084.141.418,00	-1.084.141.418,00
22	3.26.2.22.0.00.19.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.655.652.326,00	403.332.978,00	403.332.978,00

23	3.27.0.00.0.00.20.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	66.597.461.280,00	-8.671.143.605,00	-8.671.143.605,00
24	3.30.3.31.0.00.21.0000 Dinas Perdagangan	30.953.456.100,00	-3.569.896.942,00	-3.569.896.942,00
25	4.01.5.06.0.00.25.0000 Sekretariat Daerah	107.012.728.248,00	14.538.303.342,00	14.538.303.342,00
26	4.02.0.00.0.00.26.0000 Sekretariat DPRD	69.837.948.870,00	-6.035.165.587,00	-6.035.165.587,00
27	5.01.0.00.0.00.22.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.032.037.873,00	-3.826.153.606,00	-3.826.153.606,00
28	5.02.0.00.0.00.23.0000 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	641.109.161.043,00	-3.851.925.134,00	-3.851.925.134,00
29	5.02.0.00.0.00.24.0000 Badan Pendapatan Daerah	23.986.262.537,00	1.694.046.572,00	1.694.046.572,00
30	5.03.5.04.0.00.25.0000 Badan Kepegawaian Daerah	252.333.835.400,00	6.658.339.740,00	6.658.339.740,00
31	5.05.0.00.0.00.26.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.865.605.861,00	-139.008.461,00	-139.008.461,00
32	6.01.0.00.0.00.27.0000 Inspektorat	12.345.898.098,00	-1.539.386.098,00	-1.539.386.098,00
33	7.01.0.00.0.00.30.0000 Kecamatan Mojo	2.435.492.922,00	-131.413.722,00	-131.413.722,00
34	7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Kras	2.889.441.191,00	-364.245.112,00	-364.245.112,00
35	7.01.0.00.0.00.32.0000 Kecamatan Ngadiluwih	3.019.983.297,00	-295.957.281,00	-295.957.281,00
36	7.01.0.00.0.00.33.0000 Kecamatan Kandat	2.234.419.334,00	-218.795.070,00	-218.795.070,00

37	7.01.0.00.0.00.34.0000 Kecamatan Wates	2.695.030.496,00	-207.043.484,00	-207.043.484,00
38	7.01.0.00.0.00.35.0000 Kecamatan Ngancar	2.110.157.124,00	-94.431.824,00	-94.431.824,00
39	7.01.0.00.0.00.36.0000 Kecamatan Puncu	2.741.638.119,00	-117.844.148,00	-117.844.148,00
40	7.01.0.00.0.00.37.0000 Kecamatan Plosoklaten	2.421.251.631,00	-263.317.331,00	-263.317.331,00
41	7.01.0.00.0.00.38.0000 Kecamatan Gurah	2.388.763.551,00	-208.475.920,00	-208.475.920,00
42	7.01.0.00.0.00.39.0000 Kecamatan Pagu	2.634.573.273,00	-309.587.002,00	-309.587.002,00
43	7.01.0.00.0.00.40.0000 Kecamatan Gampengrejo	2.113.023.637,00	-19.567.966,00	-19.567.966,00
44	7.01.0.00.0.00.41.0000 Kecamatan Grogol	2.793.300.842,00	-218.129.022,00	-218.129.022,00
45	7.01.0.00.0.00.42.0000 Kecamatan Papar	2.948.806.648,00	-306.185.629,00	-306.185.629,00
46	7.01.0.00.0.00.43.0000 Kecamatan Purwoasri	3.197.519.442,00	-251.842.100,00	-251.842.100,00
47	7.01.0.00.0.00.44.0000 Kecamatan Plemahan	2.590.104.042,00	-37.638.926,00	-37.638.926,00
48	7.01.0.00.0.00.45.0000 Kecamatan Pare	4.607.271.653,00	-192.000.390,00	-192.000.390,00
49	7.01.0.00.0.00.46.0000 Kecamatan Kepung	2.906.111.106,00	-487.713.171,00	-487.713.171,00
50	7.01.0.00.0.00.47.0000 Kecamatan Kandangan	2.710.800.105,00	-257.344.617,00	-257.344.617,00
51	7.01.0.00.0.00.48.0000 Kecamatan Tarokan	2.683.639.262,00	-164.614.842,00	-164.614.842,00
52	7.01.0.00.0.00.49.0000 Kecamatan Kunjang	2.463.702.300,00	-136.263.000,00	-136.263.000,00
53	7.01.0.00.0.00.50.0000 Kecamatan Banyakan	2.764.978.220,00	-34.727.100,00	-34.727.100,00

54	7.01.0.00.0.00.51.0000 Kecamatan Ringinrejo	2.207.701.000,00	-298.510.000,00	-298.510.000,00
55	7.01.0.00.0.00.52.0000 Kecamatan Kayen Kidul	2.427.318.242,00	-197.583.600,00	-197.583.600,00
56	7.01.0.00.0.00.53.0000 Kecamatan Ngasem	1.906.658.622,00	18.091.871,00	18.091.871,00
57	7.01.0.00.0.00.54.0000 Kecamatan Badas	2.534.217.633,00	-184.528.600,00	-184.528.600,00
58	7.01.0.00.0.00.55.0000 Kecamatan Semen	2.697.041.033,00	-366.306.320,00	-366.306.320,00
59	8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.418.037.517,00	90.926.582.812,00	90.926.582.812,00
TOTAL		**3.382.660.187.007**	**3.521.886.388.405,00**	**139.226.201.398,00**

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kediri

Sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, total Belanja Daerah sebesar Rp.3.521.551.188.405,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 3.060.556.250.606,00 terdapat Defisit Anggaran sebesar (Rp. 460.994.937.799,00). Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah.

2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam menyusun Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1) Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, penyesuaianPendapatan Asli Daerah dan perubahan alokasi Pendapatan Transfer Antar Daerah.
2) Penyesuaian belanja pada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan.
3) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait

dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah untuk membiayai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan berlaku dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

2.2.4. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Table 9
Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	APBD	PAPBD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5 =4-3
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	2.202.189.016.141,00	**2.388.440.438.915,00**	**186.251.422.774,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.128.988.233.066,00	1.110.496.478.164,00	-18.491.754.902,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	872.776.654.563,00	958.092.889.022,00	85.316.234.459,00
5.1.05	Belanja Hibah	148.353.120.912,00	261.057.084.129,00	112.703.963.217,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	52.071.007.600,00	58.793.987.600,00	6.722.980.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	561.801.218.366,00	**514.829.900.280,00**	**-46.971.318.086,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.400.000.000,00	5.482.500.000,00	-1.917.500.000,00

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.595.570.158,00	101.891.256.023,00	1.295.685.865,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	332.150.626.476,00	292.690.852.986,00	-39.459.773.490,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.833.566.236,00	110.863.157.004,00	-7.970.409.232,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.681.455.520,00	3.813.134.267,00	1.131.678.747,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	139.999.976,00	85.000.000,00	-54.999.976,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	24.621.877.500,00	**9.188.359.260,00**	**-15.433.518.240,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.621.877.500,00	9.188.359.260,00	-15.433.518.240,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	594.048.075.000,00	**609.431.689.950,00**	**15.383.614.950,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	24.509.268.000,00	24.509.268.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	569.538.807.000,00	24.509.268.000,00	-545.029.539.000,00
Jumlah Belanja		3.382.660.187.007	3.521.551.188.405	**139.226.201.398,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri

2.3. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan

2.3.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiri atas:

   1) penerimaan pembiayaan; dan

   2) pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Adapun pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Table 10
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

Kode	Jenis Pembiayaan Daerah	APBD	PAPBD	Bertambah / (berkurang)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.01	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**581.528.109.035,00**	**520.994.937.799,94**	-60.533.171.235,06
6.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	581.528.109.035,00	430.994.937.799,94	-150.533.171.235,06
6.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00
6.02	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**40.000.000.000,00**	**60.000.000.000,00**	20.000.000.000,00
6.02.01	**Pembentukan Dana Cadangan**	40.000.000.000,00	60.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah		**621.528.109.035,00**	**581.528.109.035,00**	**-40.533.171.235,06**

Sumber Data : BPKAD Kabupaten Kediri

2.3.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan

Permasalahan utama pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 yang harus digunakan dan dianggarkan kembali pada tahun berjalan dalam, Pencairan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 dan penambahan Pembentukan Dana Cadangan.

2.3.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sisa lebih penerimaan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa dana yang berasal dari sumber dana spesifik, dianggarkan kembali atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sisa dana yang berasal dari sumber dana non spesifik digunakan untuk pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam perubahan kebijakan umum APBD.
4. Sisa Lebih Anggaran Tahun 2022 dana BLUD.
5. Pembentukan Dana Cadangan untuk pendanaan pemilihan Bupati Kediri dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip dan sistematika yang diinformasikan memuat hal-hal sebagai berikut;

a. Perbandingan antara target dan realiasi tahun ini berdasarakan kinerja kepala daerah.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.
c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
g. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam mengukur persentase capaian, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut;

a. Persentase capaian positif

   Rumus persentase capaian positif digunakan untuk mengukur target yang meningkat adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \; x\,100$$

b. Persentase capaian negative

   Rumus persentase capaian negatif digunakan untuk mengukur target yang menurun adalah sebagai berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \; x\,100$$

Dalam menentukan keberhasilan capaian kinerja dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri, skala kategori capaian yang digunakan sebagai berikut:

Table 11
Skala Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian (%)	Kategori
1	$\geq$ 100	Sangat Baik
2	80 $\leq$ x < 100	Baik
3	60 $\leq$ x $\leq$ 80	Cukup Baik
4	60 <	Kurang Baik

Sumber : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

3.1.2. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja

Table 12
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**						
1	Tujuan :	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73.46	74.96	100.68%	Sangat Baik
			Tingkat Pengangguran Terbuka (Menurun)	4.95	5.79	83.03%	Cukup Baik
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.61	13.62	100.07%	Sangat Baik
			Rata-rata lama sekolah	8.23	8.24	100.12%	Sangat Baik
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan	Indeks Kesehatan (UHH)	72.97	74.85	102.58%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
		kesehatan Masyarakat					
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71	68.74	96.82%	Baik
2	Tujuan :	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan (Menurun)	9.385	10.72	85.78%	Baik
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	71.61	84.78	118.39%	Sangat Baik
3	Tujuan :	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76.61	77.86	101.63%	Sangat Baik
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**						
4	Tujuan :	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	72	77	106.94%	Sangat Baik
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	70.5	68.21	96.75%	Baik
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85.77	86.35	100.68%	Sangat Baik
			Opini BPK	WTP	WTP*	100.00%	Sangat Baik
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.72	3.49	93.82%	Baik
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	63	70.1	111.27%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.28	4.27	99.77%	Baik
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**						
5	Tujuan :	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.90	4.53*	92.45%	Sangat Baik
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	28%	26.16%	93.43%	Baik
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,145,155	996,000	86.98%	Baik
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**						
6	Tujuan :	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0.43	3.03	704.65%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	144.65	128.08	88.54%	Baik
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103.5	104.44	100.91%	Sangat Baik
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**						
7	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	67.5	66.69	99.11%	Baik
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	88.91%	79.08%	88.94%	Baik
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	81.10%	69.18%	85.30%	Baik
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	62.50%	62.50%	100%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	82%	86%	104.88%	Sangat Baik
			Persentase Rumah Layak Huni	29.95%	41.14%	137.36%	Sangat Baik
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86	86.59	100.69%	Sangat Baik
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**						
8	Tujuan :	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	12.40	9.79	78.95%	Cukup Baik
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	95%	70.74%	74.50%	Cukup Baik
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**						
9	Tujuan :	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64.79	67.42	104.06%	Sangat Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
		Sumber Daya Alam					
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.82	62.97	100.24%	Sangat Baik
			IKU	80.94	86.12	106.40%	Sangat Baik
			IKL	39.34	40.49	102.92%	Sangat Baik
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	112.47	104.53	107.06%	Sangat Baik
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**						
10	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	83	57.3	69.04%	Cukup Baik

No	Tujuan/Sasaran		Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori
		Membangun Daerah					
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	84	30.35	36.13%	Kurang Baik
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	85%	59.50%	70.00%	Cukup Baik
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	25.57%	35.86%	140.24%	Sangat Baik
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**						
11	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.73	0.75	103%	Sangat Baik
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	63.56	84.55	133%	Sangat Baik

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2023 ini terdapat 26 indikator kinerja yang masuk dalam kategori sangat baik, 14 indikator kinerja masuk dalam kategori baik, dan 3 indikator kinerja masuk dalam kategori cuku p baik, serta 1 indikator kinerja yang masuk dalam kategori kurang baik. Dengan hal tersebut, 59,09% masuk dalam kategori sangat baik, 31,8% masuk dalam kategori baik, 6,8% masuk dalam kategori cukup baik dan 2,27% masuk dalam kategori kurang baik. Dengan demikian, mayoritas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kediri dicapai dengan kategori sangat baik.

Table 13
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DENGAN CAPAIAN DUA TAHUN TERAKHIR

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**											
1	Tujuan:	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	72,784	72,56	99%	73,358	73,46	100,14%	73.46	74.68	101.66%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5,1	5,15	99,01%	5	6,83	136,6 %	4.95	5.79	83.03%
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,2	13,44	98,46	13,25	13,61	102,72%	13.61	13.62	100.07%
			Rata-rata lama sekolah	8,05	8,08	100,3%	8,10	8,23	101,60%	8.23	8.24	100.12%
		Meningkatnya aksesibilitas dan	Indeks Kesehatan	72,55	72,65	100,1%	72,61	72,97	100,4%	72.97	74.85	102.58%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		kualitas layanan kesehatan masyarakat										
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,75	69,34	103,5	70,9%	68,73%	96,93%	71	68.74	96.82%
2	Tujuan:	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	10,279	11,64	86,7%	9,832	10,65	91,68%	9.385	10.72	85.78%
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	70,61	70,51%	99,8%	71,11%	70,8%	99,56%	71.61	84.78	118.39%
3	Tujuan:	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	**	**	**	60%	76,71	127,68%	76.61	77.86	101.63%
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		semangat demokrasi di masyarakat										
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	64	63,36	99%	68	65,66	96,55%	72	77	106.94%
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	68	68,21	85,26%	69,5	68,33	98,3%	70.5	68.21	96.75%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,23	101,48%	84	85,77	102,10%	85.77	86.35	100.68%
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	WTP	WTP*	100%	WTP	WTP*	100.00%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,69	3,33	90%	3,7	3,49	94,32%	3.72	3.49	93.82%
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	57,00	54.41	95%	60	54,91	91,5%	63	70.1	111.27%
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	3,88	3.12	80%	4.04	2.61	64,60%	4.28	4.27	99.77%
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	-0,88	3,06	347%	2.34	4.90	209,40%	4.90	4.53	92.45%
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	517. 830,71	636. 142,00	122,85%	5%	28,48%	569,6%	28%	26.16%	93.43%
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	979. 746	927. 250	94.69%	1.062.451	963.750	90.71%	1.145.155	996.000	86.98%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	0.42	0.71	169%	0.43	0.02	4,65%	0.43	3.03	704.65%
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	141.80	144.58	101.96%	143,22	117.48	82.03%	144.65	128.08	88.54%
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	102	100.02	98%	103	103.5	100.4%	103.5	104.44	100.91%
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**											
1	Tujuan:	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,45	66,69	100,36%	66,90	66,82	99%	67.5	66.9	99.11%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	86,95	88,63	104,61%	88,17	87,99	99,79%	88.91%	79.08%	88.94%
			Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	73,23	76,61	101,93%	77,12	74,68	96,83%	81.10%	69.18%	85.30%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	50%	**	**	62,50	50	80%	62.50%	62.50%	100%
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	74,57	84,89	113,8%	78,28%	85,23%	108,87%	82%	86%	104.88%
			Persentase Rumah Layak Huni	**	15,22%	**	16,48%	29,95%	181,72%	29.95%	41.14%	137.36%
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit	60	84,15	140,25%	65	86	132,30%	86	86.59	100.69%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			pelayanan perhubungan									
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	-5.32	2.35%	441.72%	1.41	14.52	1029,78 %	12.40	9.79	78.95%
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	0,5%	25,43%	5086%	1%	94,59%	9459,00 %	95%	70.74%	74.50%
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**											

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tujuan:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	50	62,84	125%	53	64.79	122,2%	64.79	67.42	104.06%
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62,72	62,77	100,07%	62,77	62,22	99,12%	62.82	62.97	100.24%
			IKU	77,44	76,68	99,01%	77,5	80,94	104,43%	80.94	86.12	106.40%
			IKL	37,42	37,34	99,78%	37,42	39,34	105,13%	39.34	40.49	102.92%
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	**	121,46	**	123,59	112,47	109,00%	112.47	104.53	107.06%
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**											
1	Tujuan:	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	80%	87%	108,7%	82%	37,65%	45,91%	83	57.3	69.04%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Membangun Daerah										
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	70,00	48,37	**	79,00	73,96	93,62	84	30.35	36.13%
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	5%	66,67%	**	6%	25,57%	426,16%	85%	59.50%	70.00%
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	75%	80%	**	80,00%	58,26%	72,83%	25.57%	35.86%	140.24%

No	Keterangan		Indikator	Capaian 2021			Capaian 2022			Capaian 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**											
1	Tujuan:	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	**	**	**	0,71	0,73	102,81%	0.73	0.75	103%
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	33,82	**	**	40,82	63,56	155,70%	63.56	84.55	133%

*) Data resmi belum dirilis lembaga terkait, menggunakan data tahun 2022

**) Indikator yang digunakan adalah indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang tidak ada pada RPJMD sebelumnya.

***) Data Sementara

Table 14
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2021 – 2026
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	74.68	75.65	98.72%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5.79	4.6	74.13%
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.62	13.65	99.78%
			Rata-rata lama sekolah	8.24	8.3	99.28%
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (UHH)	74.85	72.87	102.72%
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68.74	71.5	96.14%
2	**Tujuan:**	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	10.72	8.04	66.67%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78	73.11	115.96%
3	**Tujuan:**	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.86%	70	111.23%
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	77	80	96.25%
	Sasaran:	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	68.21	82	83.18%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86.35	86	100.41%
			Opini BPK	WTP*	WTP	100%
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	3.49	3.8	91.84%
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	82.23**	71	98.73%
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4.27	5	85.40%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.53	6.22	72.83%
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	21.6% (PSN: 14.7%, Non PSN: 6.9%)	9%	240.00%
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	996000	1,393,267	71.49%
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3.03	0,44	688.64%
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	128.08	149.04	85.94%
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104.44	105	99,47%
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**					
1	**Tujuan:**	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66.9*	69.3	96.54%
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	79,08%	89.69%	88.17%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
			Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,18%	92.20%	75.03%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	62,50%	100%	62.50%
			Cakupan desa/kelurahan yang mendapat air minum	86%	90.15%	95.40%
			Persentase Rumah Layak Huni	41.14%	82.51%	49.86%
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Layanan Perhubungan	86.59	86.25	100.39%
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	9.79	5.04	194.25%
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	70.74%	9%	786.00%
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67.42	65	103.72%
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.97	62.97	100.00%

No		Keterangan	Indikator	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian
			IKU	86.12	77.68	110.87%
			IKL	40.49	37.42	108.20%
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	104.53	116.32	110.14%
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**					
1	**Tujuan:**	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	57.3	99	57.88%
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	30.35	90	33.72%
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase Kepemudaan dan Olahraga yang dicapai	59.50%	100%	59.50%
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	35.86%	10%	358.60%
	Misi 9 Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat					
1	**Tujuan:**	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.75	0.75	100.00%
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri didasarkan IDM	84.55	68.8	122.89%

*) Data resmi belum dirilis lembaga terkait, menggunakan data tahun 2021
**) Data Sementara.

3.2. Analisa Efisiensi Sumber Daya

Analisa efisiensi digunakan untuk mengukur ketepatan cara dalam mencapai target dalam menjalankan sesuatu dengan memerhatikan waktu, tenaga, biaya. Analisa dalam hal ini menggunakan pendekatan perbandingan hasil realisasi kinerja dan realisasi anggaran. Hasil perbandingan tersebut dikategorisasikan menggunakan penedekatan jika perhitungan efisiensi menghasilkan angka lebih dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut efisien. Namun jika perhitungan yang dihasilkan kurang dari 0 maka proses yang dihasilkan dalam mencapai indikator tersebut tidak efisien.

Efisiensi merupakan hal penting untuk meninjau proses yang telah dilaksanakan. Dari analisa efisiensi tersebut menggambarkan ketepatan dalam sisi manajemen waktu, tenaga yang terfokus, dan penggunaan biaya yang sesuai. Apabila hasil analisa masuk kedalam kategori efisien, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kinerja tersebut memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi, ketepatan tenaga, dan ketepatan alokasi biaya yang tinggi. Namun, apabila hasil analisa masuk kedalam kategori tidak efisien maka didapati adanya proses pelaksanaan kinerja yang memiliki tingkat ketepatan waktu yang rendah, ketepatan tenaga yang rendah, serta ketepatan alokasi biaya yang rendah.

Kendati demikian, tidak mengesampingkan pula terdapatnya faktor-faktor eksternal yang berdampak besar terhadap pencapaian kinerja. Baik itu berdampak positif ataupun berdampak negatif, diluar proses internal yang telah dilaksanakan. Oleh karena demikian, faktor-faktor eksternal tersebut turut dijadikan variabel pencapaian kinerja disamping faktor- faktor proses pelaksanaan kinerja secara internal. Faktor penunjang dan penghambat tersebut dijelaskan dalam penjelasan pelaksanaan sasaran strategis.

Analisa efisiensi Sumber Daya dianalisa dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} \times 100 - \frac{Realisasi\ Anggaran}{Alokasi\ Anggaran} \times 100 = Hasil\ Efisiensi$$

Rentang kategorisasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Table 15
Rentang Kategori Efisiensi

No	Hasil Analisa Efisiensi	Kategori
1	≥ 0	Efisien
2	0 <	Tidak Efisien

Sumber data : Bag. Organisasi SETDA Kab. Kediri

Analisa efisiensi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2023 terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Table 16
PERBANDINGAN KINERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**									
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.61	13.62	100.07%	307,275,443,124.00	300,428,791,271.00	97.77%	2.33%	Efisien
		Rata-rata lama Sekolah	8.23	8.24	100.12%					Efisien
2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	72.97	74.85	102.58%	335,490,905,340.00	278,270,679,676.00	82.94%	19.63%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71	68.74	96.82%	15,536,298,912.00	14,994,881,531.00	96.52%	0.30%	Tidak Efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	71.61	84.78	118.39%	54,665,230,938.00	53,856,167,505.00	98.52%	19.87%	Efisien
5	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di Masyarakat	Tingkat kondusivitas daerah	100%	100%	100%	118,077,569,115	63,694,968,027	53.94%	46.06%	Efisien
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**									
6	Membangun Institusional Pemerintahan	Nilai SAKIP	70.5	68.21	96.75%	30,674,690,721.00	28,619,143,545.00	93.30%	4.51%	Tidak Efektif, Rata-Rata Kinerja = 98,28

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
	yang Efektif dan Bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.77	86.35	100.68%					
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100.00%					
		Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.72	3.49	93.82%					
7	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	63	70.1	111.27%	4,480,219,410.00	3,926,773,146.00	87.65%	23.62%	Efisien
8	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4.28	4.27	99.77%	16,742,326,977.00	16,081,256,476.00	95%	4.77%	Tidak Efiektif
	Misi 3 **Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**									
9	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan investasi daerah	28%	26.16%	93.43%	1,457,254,756.00	1,399,597,278.00	96.04%	-2,61%	Tidak Efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
10	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1,145,155	996,000	86.98%	58,305,102,237.00	55,660,919,666.00	95.46%	-8.49%	Tidak Efektif
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**									
11	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	144.65	128.08	88.54%	24,725,968,971.00	24,026,205,933.00	97.17%	-8.63%	Tidak Efektif
12	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103.5	104.44	100.91%	32,893,182,895.00	28,733,916,174.00	87,35%	13,07%	Efisien
	Misi 5 **Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**									
13	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	88.91%	79.08%	88.94%	63,082,283,562.00	62,811,507,872.00	99.57%	-10.63%	Tidak Efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	81.10%	69.18%	85.30%	8,537,589,200.00	8,525,087,700.00	99.85%	-14.55%	Tidak Efektif
		Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	62.50%	62.50%	100%	1,501,039,100.00	1,435,819,335,00	95.66%	4%	Efisien
		Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	82%	86%	104.88%	259,350,744,952.00	253,969,797,933.00	97.93%	23.19%	Efisien
		Persentase Rumah Layak Huni	29.95%	41.14%	137.36%					
14	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86	86.59	100.69%	9,348,175,529.00	9,219,487,750.00	98.62%	2.06%	Efisien
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**									

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
15	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	94.59%	70.74%	74.50%	6,887,418,139.00	6,632,212,936.00	96.29%	-21.79%	Tidak Efektif
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**									
16	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.82	62.97	100.24%	29,448,030,507.00	27,924,119,609.00	94.83%	8.36%	Efisien
		IKU	80.94	86.12	106.40%					
		IKL	39.34	40.49	102.92%					
17	Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	112.47	104.53	107.06%	2,198,922,800.00	1,967,352,782.00	89.47%	17.59%	Efisien
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**									
18	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	85%	59.50%	70.00%	1,327,587,700.00	1,262,823,400.00	95.12%	-25.12%	Tidak Efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
19	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	25.57%	35.86%	140.24%	7,058,985,304.00	6,893,349,655.00	97.65%	42.59%	Efisien
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**									
20	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	63.56	84.55	133%	15,567,339,000.00	14,846,757,843.00	95.37%	38%	Efisien

*) Data resmi belum dirilis lembaga terkait, menggunakan data tahun 2021
**) Data Sementara

Dari perhitungan diatas, mayoritas capaian efisiensi sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kediri masuk dalam kategori efisien.

Table 17
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN CAPAIAN PROVINSI DAN NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**							
1	**Tujuan:**	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	74.68	74.39	73.38	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	5.79	4.88	5.32	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13.62	13.37	13.15	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
			Rata-rata lama sekolah	8.24	8.11	8.77	BPS	Provinsi (+) Nasional (-)
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74.85	72.11	73.93	BPS	Provinsi (+) Nasional (-)
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68.74	72.56	69.48	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)
2	**Tujuan:**	Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	10,65	9.36	10.35	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran :	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Persentase Keluarga Sejahtera	84.78	No Data	No Data	-	
3	**Tujuan:**	Meningkatkan harmonisasi dan kondusifitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	77.86	84,92*	80,43*	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di Masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	No Data-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur	Provinsi (=)
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**							
4	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	77 (BB)	(Predikat A)	No Data-	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-)
	Sasaran :	Membangun Institusional Pemerintahan yang Efektif dan Bersih	Nilai SAKIP	68.21	83,17*	No Data	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86.35	90.5*	No Data-	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi (-)
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP*	WTP	No Data-	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)r	Provinsi (=)
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.49	-3,72	3,93	Inspektorat Provinsi Jawa Timur/ BPS	Nasional (-)
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	70.1	-74,533	No Data	BKD Provinsi Jawa Timur	
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4.27	3,62	2,34	Kementerian PAN & RB	Provinsi (-) Nasional (-)
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**							
5	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	4.53	4.95	5.05	BPS	Provinsi (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
								Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	26.16%	56,3%	47,6%	Kementerian Investasi/ BKPM	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	996.000	1.155.833	1.327.782 *	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**							
6	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	3.03	2.25	1.3	BPS	Provinsi (+) Nasional (+)
	Sasaran :	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	128.08	No Data	No Data	BPS	
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104.44	109,44	112,46	BPS	Provinsi (-) Nasional (-)
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**							
7	**Tujuan:**	Menurunkan Kesenjangan antar Wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	66,82	-No Data	No Data-		
	Sasaran :	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	79.08%	89,61	91,27%	Kementerian PUPR	Provinsi (-) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	69.18%	No Data	No Data-		
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	62.50%	-No Data	No Data-		
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86%	95,02	91,05	Dinas PRKPCK Jawa Timur Kementerian PUPR	Provinsi (-) Nasional (-)
			Persentase Rumah Layak Huni	41.14%	66,93*	60,66%	Dinas PRKPCK Jawa Timur Kementerian PUPR	Provinsi (-) Nasional (-)
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86	87.35	-No Data	Dinas Perhubungan Jawa Timur	Provinsi (-)
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**							
8	**Tujuan:**	Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.79	8.05	10.01	BPS	Provinsi (+) Nasional (-)

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran :	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	70.74%	No Data-	No Data-		
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**							
9	**Tujuan:**	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	67.42	69.92	72,42	Kementerian LHK	Nasional (-)
	Sasaran :	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	IKA	62.97	48.56-	53,88	Kementerian LHK	Nasional (+)
			IKU	86.12	83.38-	88,06	Kementerian LHK	Nasional (-)
			IKL	40.49	46.00-	60,72	Kementerian LHK	Nasional (-)
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana	104.53	101.65	132.25	BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur	Provinsi (-) Nasional (+)
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**							

No		Tujuan/Sasaran	Indikator	Kabupaten Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Sumber Data	Keterangan
10	**Tujuan:**	Meningkatkan Potensi dan Budaya Generasi Muda Untuk Membangun Daerah	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	57.3	-No Data	No Data-		
			Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	30.35	-No Data	No Data-		
	Sasaran :	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	25,57%	-No Data	No Data-		
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten	35.86%	-No Data	No Data-		
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**							
11	**Tujuan:**	Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	0.75	0,78	0,65-	Kementerian Desa & PTT	Provinsi (-) Nasional (+)
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	84.55	No Data	No Data		

*) Data resmi belum dirilis lembaga terkait, menggunakan data tahun 2021

**) Indikator yang digunakan adalah indikator dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang tidak ada pada RPJMD sebelumnya.

***) Data Sementara

Keterangan:

1. (+) Lebih tinggi

2. (-) Lebih rendah

3.3. Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2023 ini akan ditinjau dari berbagai perspektif. Terutama dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama, pelaksanaan agenda kinerja, capaian kinerja organisasi, realisasi agenda kinerja dan benchmarking, realisasi anggaran dan analisa efisiensi sumber daya, analisa faktor penunjang dan penghambat, gap analysis, kinerja lain-lain, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Merujuk pada konsep akuntabilitas, penjelasan tentang akuntabilitas kinerja dalam penjelasan berikutnya didasarkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), prosedur dan alur manajemen, menakisme komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan operasional, dan manajemen kinerja yang bermutu. Konsep-konsep secara operasional akan dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang relevan dengan sistem akuntabilitas.

3.3.1. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Analisa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Table 18
MATRIKULASI PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KINERJA

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**					
1	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Sangat Baik	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Capaian Kinerja 187,87, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengembangan Kurikulum	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pembinaan Perpustakaan	Capaian Kinerja 57,63%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Sangat Baik	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rata-rata Capaian Kinerja 107%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Capaian Kinerja 88%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Perlindungan Khusus Anak	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Sangat Menunjang
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Baik	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Capaian Kinerja 172.41%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Capaian Kinerja 112.31%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Capaian Kinerja 94.44%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Hubungan Industrial	Capaian Kinerja 132.56%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Capaian Kinerja 200.00%, Efisien	Sangat Menunjang
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Sangat Baik	Program Pemberdayaan Sosial	Capaian Kinerja 127,5%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Capaian Kinerja 0%	Kurang Menunjang
				Program Rehabilitasi Sosial	Capaian Kinerja 101,03%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Capaian Kinerja 89,42%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Penanganan Bencana	Capaian Kinerja 82,22%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengendalian Penduduk	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Capaian Kinerja 93,45%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Capaian Kinerja 86,12%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Sangat Baik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Kinerja 121%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Capaian Kinerja 167%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rata-rata Capaian Kinerja 122%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik SOsial	Capaian Kinerja 111%, Efisien	Sangat Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Capaian Kinerja 82%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**					
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Capaian 100%, Efisien	Menunjang
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Capaian 100%, Efisien	Menunjang
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata Capaian Kinerja 78,22, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Pencatatan Sipil	Rata-rata Capaian Kinerja 99,2%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Program Profil Kependudukan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Kinerja 99,69%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian Kinerja -35,66%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Sangat Baik	Program Kepegawaian Daerah	Capaian Kinerja 101,01%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Capaian Kinerja 156,64%, Efisien	Sangat Menunjang
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Baik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Capaian Kinerja 141%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Aplikasi Informatika	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengelolaan Arsip	Capaian Kinerja 108.27%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
	Misi 3					

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah					
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	Baik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Capaian Kinerja 124,10%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Baik	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Capaian Kinerja 179,27%, Efisien	Sangat Menunjang
				program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Capaian Kinerja 875,88%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Capaian Kinerja 205,56%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Capaian Kinerja 139,36%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Capaian Kinerja 99,17%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Program Pengembangan UMKM	Capaian Kinerja 118,62%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Capaian Kinerja 110%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengembangan Ekspor	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Capaian Kinerja 78%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Capaian Kinerja 143%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Capaian Kinerja 526%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Capaian Kinerja 526%, Efisien	Sangat Menunjang
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**					
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Capaian Kinerja 100,00%, Efisien	Menunjang
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Rata-rata Capaian Kinerja 140,03%, Efisien	Sangat Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Pangan Masyarakat		
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Capaian Kinerja 131,58%, Efisien	Sangat Menunjang
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Sangat Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja 101,72%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Penyuluhan Pertanian	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja 105.74%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Kinerja 120%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Rata-rata Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rata-rata Capaian Kinerja 101,09%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian Kinerja 106,98%, Efisien	Sangat Menunjang
	Misi 5 **Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah**					
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Sangat Baik	Program Penyelenggaraan Jalan	Capaian Kinerja 88.94%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Capaian Kinerja 85.18%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Kinerja 104.88%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Capaian Kinerja 144.44%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Capaian Kinerja 0.00%, Tidak Efektif	Kurang Menunajng
				Program Penataan Bangunan Gedung	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Program Kawasan Permukiman	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Capaian Kinerja 50%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang
				Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Capaian Kinerja 141.34%, Efisien	Sangat Menunjang
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Sangat Baik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rata-rata Capaian Kinerja 94.02%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**					
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Cukup Baik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Capaian Kinerja 162.53%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Capaian Kinerja 268.00%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pemasaran Pariwisata	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**					
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Sangat Baik	Program Perencanaan	Capaian Kinerja 123.88%, Efisien	Sangat Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Lingkungan Hidup		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Capaian Kinerja 129.23%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Capaian Kinerja 87.50%, Tidak Efisien	Cukup Menunjang
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Capaian Kinerja 72.77%, Tidak Efisien	Cukup Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Capaian Kinerja 156.52%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Capaian Kinerja 0%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Kinerja 87.89%, Efisien	Kurang Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan	Capaian Kinerja 33.33%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
				Hidup Untuk Masyarakat		
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Capaian Kinerja 117.65%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengelolaan Persampahan	Capaian Kinerja 52.49%, Tidak Efektif	Kurang Menunjang
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Sangat Baik	Program Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**					
	Sasaran:	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Cukup Baik	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Capaian Kinerja 100.48%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Capaian Kinerja 95.92%, Tidak Efektif	Cukup Menunjang
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Sangat Baik	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Capaian Kinerja 1203.50%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pengembangan Kebudayaan	Rata-rata Capaian Kinerja 186.25%, Efisien	Sangat Menunjang
				Program Pembinaan Sejarah	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pengelolaan Permuseuman	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang

No		Tujuan/Sasaran	Kategori Kinerja	Program	Analisa	Keterangan
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**					
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Sangat Baik	Program Penataan Desa	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Capaian Kinerja 100%, Efisien	Menunjang

Dari Tabel Analisa tersebut dijelaskan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2023 diperoleh hasil Kinerja rata-rata dengan katagori Sangat Baik, Capaian Kinerja yang Efisien dan program-program yang rata-rata sangat menunjang tercapainya kinerja yang ditetapkan.

3.3.2. Capaian Kinerja Keluaran Kegiatan dan Masalah yang Dihadapi serta Solusi Pemecahannya



Gambar 2 : Bupati Kediri berdiskusi dengan salah satu siswa dari SMPN 1 Pare

1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Dalam mempersiapkan masyarakat Kabupaten Kediri yang baik dan berdaya saing di masa depan, pendidikan memiliki peran dan fungsi utama dalam pembangunan. Dalam upayanya mencapai Indonesia emas tahun 2045, anak-anak di masa sekarang harus mendapatkan pendidikan yang layak dengan keilmuan yang baik. Urgensi untuk aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang meningkat terlihat dari prediksi perekonomian dari banyak lembaga penelitian internasional seperti WEF (World Economics Forum) dan World Bank, yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju nomor 4 di dunia pada tahun 2045 dengan syarat mayoritas masyarakatnya mengenyam pendidikan lebih dari 12 tahun.

Meninjau teori Human Capital (Sumber Daya Manusia) Menurut Todaro (2015) menyatakan bahwa konsep dari sebuah Human Capital dapat dilihat melalui yang investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa

yang akan datang. Investasi dalam Human Capital berupa investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:

a. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
b. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
c. Melestarikan kebudayaan.
d. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar. Mengacu pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kemerdekaan diartikan sebagai adanya kemampuan untuk hidup melalui kekuatan sendiri menuju arah yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Artinya Merdeka Belajar tidaklah semata-mata diartikan sebagai kebebasan, tetapi dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang, keberdayaannya agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik.

Table 19
Rekapan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Kediri Tahun 2016-2023

TAHUN	HLS	RLS
2016	12,57	7,58
2017	12,86	7,65
2018	12,87	7,68
2019	12,88	8,01

TAHUN	HLS	RLS
2020	13,15	8,02
2021	13,44	8,08
2022	13,61	8,23
2023	13,62	8,24

a. Upaya Tindak Lanjut Permasalahan Tahun Sebelumnya dan Permasalahan Tahun Berkenaan

No	Permasalahan Tahun Sebelumnya (Merujuk LKjIP Tahun 2022)	Upaya Tindak Lanjut Permasalahan Tahun Sebelumnya
1	Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket) bagi Anak Putus Sekolah	Pendistribusian hasil pendataan Anak Putus Sekolah ke PKBM (Kejar Paket A, B dan C) berbasis pelatihan ketrampilan
2	Penambahan Kuota Beasiswa Pendidikan GNOTA	Penyaluran beasiswa yang tepat sasaran untuk masyarakat tidak mampu (SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Becak Kari STIKES Pamenang, mahasiswa berprestasi, mahasiswa baru, siswa SMA/SMK/MA dan SMP/MTs dari keluarga tidak mampu)
3	Penambahan Kuota Guru PPPK	Pengangkatan Guru PPPK sebanyak 819 orang
4	Penerima Insentif GTT/PTT dan Bisyaroh Keagamaan	Penyaluran insentif GTT/PTT sebanyak 6.444 orang; Penyaluran Bisyaroh bagi Guru Keagamaan dan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 8.000 orang
5	Regrouping SD Negeri untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah	Proses Perbup Regrouping SDN untuk efisiensi anggaran rehabilitasi bangunan sekolah dan pendistribusian guru
6	Mendekatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat dengan menghadirkan perpustakaan digital panjalu	Sudah dibuat perpustakaan digital Kabupaten Kediri (Panjalu e-library)
7	Memperbanyak pelayanan perpustakaan keliling pada tempat berkumpulnya masyarakat seperti dalam *car free day,*	Penambahan pelayanan perpustakaan keliling di Taman Hijau SLG, CFD Pare dan ke Sekolah-Sekolah yang jauh dari jangkauan pelayanan

	taman kota, tempat wisata.	Perpustakaan Daerah

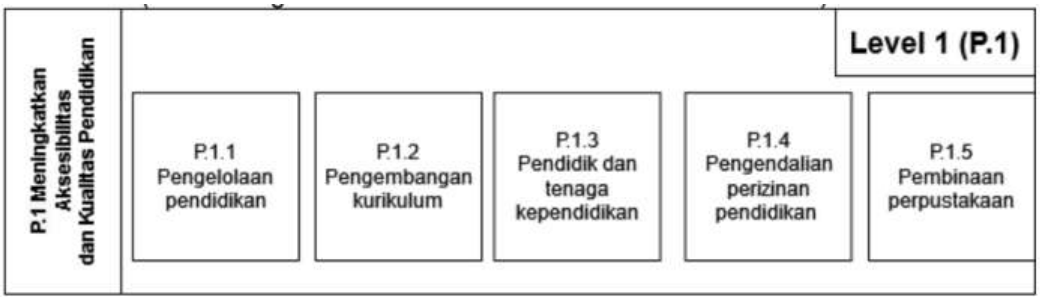
b. Permasalahan

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana, Kurangnya sosialisasi dan minat baca masyarakat terkait perpustakaan digital, Kurangnya tenaga perpustakaan
2. Kurangnya Minat Masyarakat melakukan kunjungan ke perpustakaan

c. Program dan Penjelasan Proses Pencapaian

Upaya pencapaian Sasaran meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, telah dijelaskan alur prosesnya dalam Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Keputusan Bupati Kediri nomor 188.45/172/418.08/2022 tentang Penetapan Proses Bisnis, dijelaskan bahwa P.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan didukung oleh Sub Proses sebagai berikut:

PERAGA 2.3.1.2 Peta Proses Bisnis Level 1 (P.1)



Sumber : Keputusan Bupati Kediri 188.45/172/418.08/2022 tentang Penetapan Proses Bisnis

d. Pelaksanaan Program

1) Pengelolaan Pendidikan

Pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber

manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif.

Fungsi pengelolaan pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan UU tersebut, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

2) Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional.

Kurikulum adalah inti pendidikan yang berisikan rumusan tujuan dan rencana kegiatan belajar yang mempersiapkan siswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan berbagai nilai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pekerjaan di masa depan. Maka dari itu, kurikulum sangatlah penting dalam pendidikan karena

menjadi dasar bagi pengemban kemampuan profesional dan kepribadian dalam menetapkan kualitas sumber daya manusia dan insan suatu bangsa.

Pentingnya kurikulum dalam pendidikan pun tertuang dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berisi tentang kurikulum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfokus pada: meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia, meningkatkan minat dan potensi kecerdasan siswa, berbagai macam potensi lingkungan dan daerah, tuntutan dalam membangun nasional dan daerah, tuntutan dalam dunia kerja, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kesenian yang mengalami perkembangan, perkembangan global yang penuh dinamika, dan persatuan berbagai nilai kebangsaan dan nasional.

3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun dalam kondisi yang menyenangkan.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa “Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan

pendidikan", dan ayat (6) "Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan".

Pasal 39 ayat (1) selanjutnya menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan itu adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi.

4) Pengendalian Perizinan Pendidikan

Izin operasional merupakan bukti konkret dan sah bagi sebuah instansi. Lembaga yang telah memiliki izin operasional ini berhak untuk menjalankan fungsi-fungsi yang melekat pada lembaga, seperti fungsi pendidikan, fungsi transformasi ajaran agama, dan fungsi sosial lainnya dan diakui oleh negara. Izin operasional penyelenggaraan pendidikan diberikan selama proses belajar mengajar berlangsung, satuan pendidikan harus melakukan daftar ulang untuk izin operasional. Dinas Pendidikan menerbitkan rekomendasi teknis sesuai atau tidak

dan layak untuk diterbitkan atau tidak. Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan, Surat Izin Operasional akan diterbitkan.

5) Pembinaan Perpustakaan

Tujuan pembinaan perpustakaan :

Melakukan kegiatan pembinaan perpustakaan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, perbaikan manajemen perpustakaan, peningkatan pengetahuan bagaimana pengelola perpustakaan sekolah, update informasi, mendorong atau memotivasi untuk peningkatan minat baca siswa

Manfaat pembinaan perpustakaan :

1. Meningkatkan mutu perpustakaan
2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna perpustakaan
3. Menyelenggarakan program perpustakaan sesuai kebutuhan pembangunan
4. Mewujudkan mutu perpustakaan sesuai standar yang ditentukan dengan memiliki NPP, akreditasi dan pengelolaan perpustakaan yang baik.

Maksud Pembinaan perpustakaan

Untuk peningkatan SDM pengelola perpustakaan menjadi berdaya guna lebih baik sehingga mampu mengelola perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan yg di tentukan.

e. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**

1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8 (7/6*100)
Sasaran 1.1.1 : ***Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan***	***Harapan Lama Sekolah***	**13.35**	**13.62**	**102.02%**	**949.088.370.368**	**890.082.650.176**	**93,78%**
	Rata-rata Lama Sekolah	**8.15**	**8.24**	**101.10%**			
Sasaran OPD Dinas Pendidikan: **Meningkatkan Layanan Pendidikan yang merata, murah dan bermutu**	**APK PAUD**	**128.75**	**105.68**	**82.08%**	**949.088.370.368**	**890.082.650.176**	**93,78%**
	APM PAUD	**99.15**	**92.71**	**93.50%**			
	APK SD	**106.6**	**100.82**	**94.58%**			
	APM SD	**99.85**	**98.57**	**98.72%**			
	APK SMP	**102.8**	**108.48**	**105.53%**			
	APM SMP	**89.5**	**89.85**	**100.39%**			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	30	16.18	53.93%	288.925.392.150.	282.538.343.539	97,79%
	Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	50	32.19	64.38%			
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	53	79.18	149.40%			
	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	30	62.12	207.07%			
	Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	15	85.68	571.20%			

	Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	50	94.06	188.12%			
	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	35	28.21	80.60%			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100	100	100.00%	582.483.600	505.619.000	86,80%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1:16	1:16	100.00%	17.010.211.624	16.669.150.805	97,99%
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase kelayakan izin operasional SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	100.00%	132.735.000	132.501.000	99,82%
Sasaran OPD Disarpus: **Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Kediri**	**Indeks Minat Baca Masyarakat**	**64**	**62.2**	**97.19%**	**624.620.750**	**583.176.927**	**93.36%**
	Persentase Masyarakat yang Melakukan Kunjungan ke Perpustakaan	**9.25%**	**11.8%**	**127.57%**			

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang terkelola dengan baik	29.57%	17.04%	57.63%	624.620.750	583.176.927	93.36%

f. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Keterangan	Kategori
Capaian Kinerja > 100% dan Efisien	Sangat Menunjang
Capaian Kinerja = 100% dan Efisien	Menunjang
Capaian Kinerja 60% > 100%	Cukup Menunjang
Capaian Kinerja < 60%	Kurang Menunjang

PROGRAM	PENCAPAIAN SASARAN						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			EFISIENSI SUMBER DAYA			\KETERANGAN
	REALISASI KINERJA	TARGET RPJMD	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI	
1	3	4	5 (3/4*100)	6	7	8 (6-7)	9

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	53.93%	50	32.36	53.93%	97.79%	90.02%	Sangat Menunjang
	64.38%	70	45.99	64.38%			
	149.40%	70	113.11	149.40%			
	207.07%	50	124.24	207.07%			
	571.20%	30	285.60	571.20%			
	188.12%	70	134.37	188.12%			
	80.60%	50	56.42	80.60%			
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100.00%	100	100.00	100.00%	86.80%	13.20%	Menunjang
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.00%	1:15	101.33	100.00%	97.99%	2.01%	Menunjang
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100.00%	100	100.00	100.00%	99.82%	0.18%	Menunjang
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	17.04%	29.57%	57.63%	57.63%	93.36%	-35.73%	Kurang Menunjang

g. Benchmarking

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah perbandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/**Indikator**	**Harapan Lama Sekolah (HLS)**	**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**
Kabupaten Kediri	13,62	8,24

Kota Kediri	15,45	10,69
Kabupaten Tulungagung	13,34	8,66
Kabupaten Malang	13,48	7,75
Provinsi Jawa Timur	13,38	8,11
Agregat Nasional		

h. Faktor-faktor Pendukung

Upaya untuk mendukung capaian-capaian seperti HLS dan RLS ditunjang dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal yang telah dilaksanakan tersebut diupayakan dengan meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu pula, pengangkatan PPPK Guru, distribusi guru berbasis zonasi serta peningkatan kesejahteraan para guru melalui penyaluran Insentif GTT (Guru Tidak Tetap)/PTT (Pegawai Tidak Tetap) serta Bisyaroh bagi guru keagamaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Untuk mengupayakan peningkatan angka rata-rata lama sekolah, Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan cukup banyak beasiswa pendidikan. Baik itu beasiswa untuk anak SMP, SMA serta bantuan beasiswa kuliah melalui GNOTA (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh). Selain itu pula, pendirian SMPN 2 Ngasem di kawasan Ibukota Kabupaten Kediri dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan serta kemudahaan bagi anak putus sekolah untuk mengenyam pendidikan non formal melalui Kejar Paket A, B, dan C berbasis keterampilan semakin ditingkatkan sehingga menambah kuantitas masyarakat Kabupaten Kediri yang mendapatkan ijazah pendidikan 12 tahun.

Upaya untuk mendukung capaian gemar membaca pada masyarakat Kabupaten Kediri ditunjang dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, hal yang telah dilaksanakan tersebut yaitu dengan dibuatnya perpustakaan digital yang diberi nama Panjalu E-Library. Panjalu E-Library dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, hal tersebut dapat meningkatkan gemar membaca terutama bagi yang jauh dari jangkauan perpustakaan.

Untuk mengupayakan pelayanan perpustakaan melalui mobil perpustakaan keliling, perpustakaan telah mengupayakan penambahan layanan perpustakaan keliling ke sekolah-sekolah, Taman Hijau SLG, dan Car free day Pare. Hal tersebut untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Kediri sehingga dapat menambah pengetahuan.

i. Faktor-faktor Penghambat

Secara umum, faktor-faktor penghambat dalam bidang pendidikan tidak memiliki kendala yang berarti. Apalagi dukungan Bupati Kediri dalam meningkatkan aksesibilitas, kuantitas, dan kualitas pendidikan sangat tinggi. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari Bupati Kediri tersebut menjembatani masalah-masalah yang menghambat permasalahan pendidikan di Kabupaten Kediri.

Faktor penghambat dalam bidang perpustakaan tidak memiliki kendala yang berarti, hanya saja kurangnya sarana prasarana untuk perpustakaan keliling sehingga pelayanan yang diberikan terbatas. Bahwa diketahui luas wilayah kabupaten kediri yang termasuk daerah yang luas dan memiliki instansi pendidikan yang cukup banyak tersebar

di kabupaten kediri ini sehingga sarana pelayanan untuk menjangkau seluruh penjuru kabupaten kediri termasuk kurang.

j. Kesimpulan

Capaian Kinerja angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 13,62 melewati target yang telah ditentukan yakni 13,35. **Selain itu, angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 8,24 melewati target yang telah ditentukan yakni 8,15. Capaian tersebut dicapai dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.890.082.650.176,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.949.088.370.368,00.**

Kabupaten Kediri memiliki cakupan wilayah yang begitu luas. Sebenarnya banyak masyarakat yang ingin tetap menjaga literasi nya, hanya saja beberapa daerah yang bisa dibilang jauh dari jangkauan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kediri sulit untuk berkunjung ke Perpustakaan yang berada di daerah Pare. Maka dari itu, Perpustakaan Daerah menyediakan fasilitas seperti Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital untuk bisa menjangkau masyarakat yang jauh dari jangkauan Perpustakaan Daerah. Hanya saja untuk saat ini dengan fasilitas yang telah disediakan tetap masih belum bisa menjangkau secara maksimal dengan berbagai kendalanya. Capaian tingkat kegemaran membaca pada tahun 2023 Kabupaten Kediri yaitu 62.2 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 61.3.

k. Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut: Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan

(Kejar Paket) Inovatif bagi Anak Putus Sekolah, Penambahan kuota penerima bantuan/beasiswa Pendidikan GNOTA yang tepat sasaran (SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Becak Kari STIKES Pamenang, Mahasiswa dan Atlet Berprestasi, Mahasiswa Baru, Siswa SMA/SMK/MA dan SMP/MTs dari keluarga tidak mampu), Penambahan kuota Guru PPPK, Penambahan kuota penerima Insentif GTT/PTT dan Bisyaroh Guru Keagamaan, Regrouping SDN untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar, Pendirian SMPN di kawasan blank zonasi, Pemerataan distribusi guru berdasarkan zonasi, Pembinaan minat dan bakat siswa baik kemampuan literasi, numerasi dan non akademik serta Peningkatan kompetensi GTK melalui Platform Merdeka Mengajar dan Guru Penggerak untuk meningkatkan kualitas SPM Pendidikan dan Rapor Pendidikan.

Terus meningkatkan pelayanan perpustakaan digital dengan menambahkan judul-judul yang diinginkan oleh masyarakat. Terus meningkatkan sosialisasi perpustakaan digital agar masyarakat bisa mengakses bahan pustaka yang telah perpustakaan sediakan dan terus mencoba tambahkan.



Gambar 3 : Bupati Kediri bersama dengan jajaran meninjau pelayanan kesehatan di RSUD SLG, Kecamatan Ngasem

2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat

Merujuk pada penjelasan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan mengadakan penilaian teknologi kesehatan. Upaya ini diadakan bersama oleh tenaga kesehatan di bidang kedokteran dan bidang kesehatan. Peningkatan kualitas meliputi aspek promosi, preverensi, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi serta perawatan jangka panjang. Penerapan penilaian teknologi kesehatan semakin dianjurkan seiring dengan peningkatan program jaminan kesehatan.

Aksesibilitas pelayanan kesehatan pada suatu wilayah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor ketersediaan dan faktor penghalang. Faktor ketersediaan berkaitan

dengan ketersediaan pelayanan kesehatan. Aspek yang mempengaruhi ketersediaan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. Sedangkan faktor penghalang merupakan faktor yang dapat menghalangi proses pelayanan kesehatan. Faktor ini meliputi permasalahan geografi seperti luasnya wilayah pelayanan, persebaran dan kepadatan penduduk serta ketersediaan alat transportasi. Faktor penghalang juga meliputi ketersediaan pembiayaan kesehatan dan kepemilikan asuransi jaminan kesehatan oleh masyarakat.

Beberapa permasalahan kesehatan menurut Kementerian Kesehatan masih perlu untuk ditindaklanjuti seperti Gizi Buruk dengan prevalensi Stunting dan Wasting yang cukup tinggi, upaya eradikasi TBC, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Prevalensi penyakit menular, dan penyakit tidak menular, serta kesehatan mental. Perkembangan tersebut menjadi perlu untuk ditindaklanjuti dengan intervensi-intervensi spesifik yang bersifat medis maupun non-medis dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Namun demikian, merujuk pada dokumen dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat selama ini lebih kepada pelayanan kesehatan. Padahal, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan bukan pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu ditindaklanjuti dengan promosi dan advokasi kesehatan.

Program atau gerakan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Beberapa gerakan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat menjadi sebuah sebuah gerakan yang sukses dengan dukungan promosi kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah.

Table 20
Rekap Data Usia Harapan Hidup
di Kabupaten Kediri 2016 - 2023

TAHUN	Usia Harapan Hidup
2016	72,2
2017	72,25
2018	72,37
2019	72,54
2020	72,61
2021	72,65
2022	73,46
2023	74,68 (LF 2023)

Sumber Data: Badan Pusat Statistik

Trend usia harapan hidup di Kabupaten Kediri dari tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Pada awal periode, usia harapan hidup berada pada angka 72,2 tahun dan kemudian mengalami kenaikan yang bertahap setiap tahun hingga mencapai 73,46 tahun pada tahun 2022. Tren positif ini merupakan indikator penting bagi kesejahteraan dan perkembangan Kabupaten Kediri. Peningkatan usia harapan hidup berarti masyarakat dapat menikmati masa hidup yang lebih panjang dan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi pada pembangunan wilayah.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan masyarakat.

Upaya Kesehatan Masyarakat meliputi upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Upaya Kesehatan Perorangan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. Upaya Kesehatan Perorangan meliputi upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan pada perorangan.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Pemenuhan sarana dan prasarana, mutu layanan sesuai standar, dan tenaga kesehatan	- Belanja jasa kalibrasi UPT Labkesda - Pengadaan alat fotometer klinik, hematology analyzer, lemari es, urine analyzer, alat HBA1c,

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
	yang sesuai standar kompetensi serta menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektor	centrifuge, filler - Rehab dan Pembangunan Puskesmas Plosoklaten, Kandangan, Bendo, Purwoasri, Kunjang, Keling, Pagar, Pustu Seang (Pagar, kanopi dan pavingingisasi) - Rehab dan pemeliharaan Puskesmas Tiron, Wonorejo, Pranggang, Banbgsongan, Pustu Jerukwangi, Ngletih, Sumberagung, Canggu, Asmorobangun, Gurah - Partisi puskesmas blabak, Tempat parkir Puskesmas Sidorejo, Ruang persalinan Pustu Plosorejo, Tempat parkir Puskesmas Silir, Pagar Puskesmas Tanon, Tempat parkir Puskesmas Ngadiluwih, Pagar dan paving Pustu Pandansari, Pagar Pustu Klampisan - Pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas Pembantu Selang, Puskesmas Sidorejo, Puskesmas Keling, Puskesmas Pelas, Puskesmas Tiron - Pengadaan genset untuk Puskesmas Sidorejo, Keoung, Pare, Sumberjo, Bangsongan dan Kras - Pengadaan ambulance untuk Puskesmas Ngancar, Puskesmas Puncu, Puskesmas Tarokan dan PSC 119 - Pemenuhan alat Antropometri Kit pada semua posyandu (sejumlah 931 alat antropometri kit dari DAK Fisik tahun 2023 dan 517 alat antropometri kit droping dan pusat) - Pemenuhan kebutuhan Bed Pasien sejumlah 13 unit dan 37 unit baby basket untuk ruang nifas di puskesmas - Pemenuhan strip Hb sejumlah - Pemenuhan BMHP TB berupa mesin TCM sebanyak 1 buah, modul TCM sebanyak 2 buah, dan cartridge TCM TB sebanyak 3565 buah. - pengadaan RDT HIV untuk ibu hamil sebanyak 22.975 tes - Pengadaan BMHP sebagai penunjang pemeriksaan laboratorium P2PM seperti RDT HIV 1, RDT HIV 2, RDT HIV 3, alcohol swab, vacu needle, hand gloves, parafilm, reagan NS1, insektisida, larvasida, alcohol swab, kapas lidi, spekulum, dan object glass - Pengadaan IPAL untuk Puskesmas Sambi dan Puncu - Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Kediri yang mencakup 12 indikator - *Universal Health Coverage* (UHC) untuk menjamin pembiayaan kesehatan masyarakat Kab Kediri - Mengusulkan CASN TA 2023 terutama prioritas Tenaga Kesehatan di Puskesmas - Segera mengusulkan penetapan Perbup

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
		Pengangkatan tenaga Non ASN BLUD Puskesmas
2	Meningkatkan Mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standard dan terpetakan dengan baik pada fasilitas kesehatan yang membutuhkan	- Memfasilitasi SDM Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Kediri untuk mengikuti pelatihan - melakukan kerja sama dengan instansi pendidikan dan instansi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi - Pemahiran kompetensi tenaga medis melalui pelaksanaan program internship di wahana RS dan Puskesmas di wilayah Kab. Kediri - Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional kesehatan - Mendukung tenaga kesehatan untuk selalu melakukan inovasi - Tahun 2023 telah terlaksana 31 pelatihan (1 - pelatihan sumber dana DBHCHT, 1 pelatihan DAU, 5 pelatihan DAK NF, dan 24 pelatihan undangan dari instansi/lembaga lain) - Melaksanakan pelatihan bagi tenaga kesehatan khususnya pada pengelola program TB - Melaksanakan pelatihan bagi pengelola program imunisasi di puskesmas
3	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan	- Melaksanakan kredensial tenaga kesehatan di Puskesmas - Pengelolaan data tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kediri melalui SISDMK - Monitoring dan evaluasi tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kediri - Penerbitan SIP/SIK

b. Permasalahan dan Tantangan

1. Rujukan pasien dari wilayah barat sungai masih banyak yang masuk ke rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Kediri, hal ini karena aksesnya yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau
2. Semakin banyaknya sektor swasta yang berminat untuk mengembangkan bisnis di bidang pelayanan kesehatan rujukan (pendirian klinik utama dan rumah sakit baru)

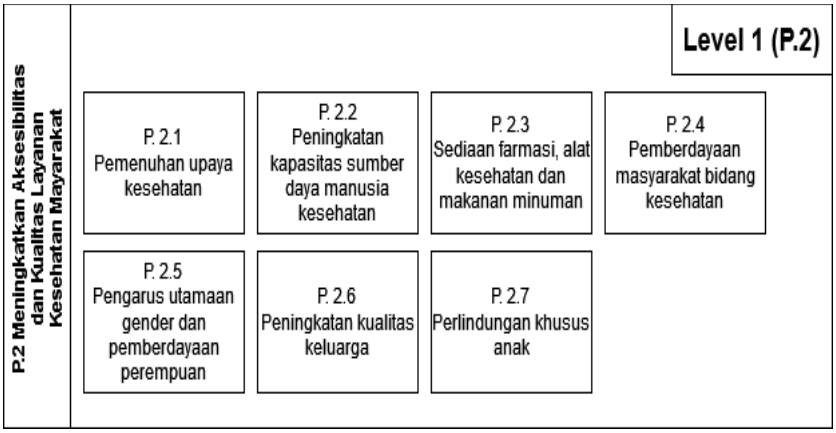
3. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu masih belum terintegrasi dengan Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah
4. Masih ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh JKN yang memerlukan perhatian dari Pemerintah Daerah
5. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM masih sangat diperlukan
6. Keterbatasan anggaran untuk merealisasikan pemenuhan SDM melalui formasi CASN serta jumlah SDM yang memasuki purna tugas baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan sangat tidak sebanding dengan beban kerja saat ini. Kesehatan merupakan urusan dasar yang sangat kompleks, sehingga program dan pelayanan yang ditangani sangatlah luas. Sangat diperlukan SDM yang memadai baik jumlah maupun kompetensinya untuk dapat mencapai program dan memberikan pelayanan yang optimal.
7. Upaya pemenuhan SDM melalui anggaran BLUD Puskesmas sudah dilaksanakan, akan tetapi kemampuan anggaran BLUD Puskesmas juga masih belum sebanding dengan kebutuhan SDM, sehingga masih banyak tenaga BLUD Puskesmas yang menerima gaji belum sesuai dengan standar UMK Kabupaten Kediri
8. Keterbatasan tenaga profesional yang mendampingi masalah KDRT dan Kekerasan Anak
9. Kekerasan terhadap anak dan perempuan belum sepenuhnya bisa dicegah karena kompleksnya penyebab kekerasan
10. Masih adanya kasus kekerasan yang belum dilaporkan

11. Sistem pelayanan permasalahan perempuan dan anak belum dilaksanakan secara berjenjang
12. Faktor sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu pemicu KDRT dan perkawinan anak
13. Belum adanya filterisasi tayangan di sosial media yang tidak baik untuk anak

c. Program dan Penjelasan Proses Pencapaian

Upaya pencapaian Sasaran, telah dijelaskan alur prosesnya dalam Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri dalam Keputusan Bupati Kediri nomor 188.45/172/418.08/2022 tentang Penetapan Proses Bisnis, didukung oleh Sub Proses sebagai berikut;

Peraga 2.3.2.1.1 Proses Bisnis Sasaran 2 (P.2) Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat



1. Pemenuhan Upaya Kesehatan

Pemenuhan Upaya kesehatan merupakan upaya kesehatan yang didasarkan pada standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan bagi Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Upaya pelayanan tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta memelihara dan meningkatkan kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 pasal 203 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Pada ayat 3 disebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Pada ayat 4 disebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran (JPL) dalam 1 (satu) tahun.

Dalam hal ini sub substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai tupoksinya meningkatkan kompetensi dan pemenuhan SDM Kesehatan di wilayah kerjanya, memberikan kesempatan kepada ASN dan non ASN untuk mengikuti pelatihan pada Lembaga yang terakreditasi. Selain itu sub substansi SDM Kesehatan juga melakukan pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan di wilayah Kabupaten Kediri.

3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

   Penyelenggaraan pengawasan terhadap apotek, toko obat dan sarana pelayanan kefarmasian lainnya dilakukan dengan pemeriksaan ke sarana baik secara rutin maupun insidentil (jika terjadi indikasi pelanggaran. Pengawasan juga dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, pembinaan terhadap penanggungjawab atau pelaku usaha.

   Pengawasan dan pembinaan dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pengkajian izin kepada sarana pelayanan kefarmasian. Kemudian petugas penanggung jawab kefarmasian memberikan informasi kepada petugas kefarmasian Dinas Kesehatan tentang pemenuhan standar dan persyaratan serta informasi lainnya di bidang kefarmasian. Sehingga melalui penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan diharapkan adanya kepatuhan sarana pelayanan kefarmasi dalam memenuhi standasesuai persyaratan.

   Untuk pengawasan dan pembinaan Restoran, jasa boga dan Depot air minum dalam rangka penjaminan layak dikonsumsi oleh konsumen maka diperlukan adanya SLHS (Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi) . Dan untuk makanan

jajanan, warung, pedagang Kaki Lima , kantin dengan adanya stikerisasi untuk kegiatan tersebut.

4. Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan

   Pemberdayaan Masyarakat kesehatan di bidang kesehatan merupakan salah satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan (*empowerment*) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan dan melindungi diri baik secara individual, kelompok dan atau masyarakat dari ancaman kesehatan. oleh sebab itu dilakukan kegiatan UKBM (Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat) yang telah dilaksanakan kegiatan, Posyandu Balita, Posbindu, SBH, Poskestren dan desa siaga aktif , masyarakat akan semakin sadar pentingnya pemeliharaan kesehatan.

   Untuk peningkatan produktivitas dan bisa terpantaunya kesehatan mulai dari sejak dalam kandungan, bayi, balita , remaja , usia produktif dan lansia. dengan program pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tingkat Kabupaten telaah strata UKBM, pembinaan Poskestren, pembinaan poskesdes di lokus stunting, pembinaan penyelenggaraan SBH, sosialisasi pengelolaan posyandu ILP bagi petugas Promkes.

5. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatkan anggaran OPD yang responsif gender, agar menjadikan OPD yang responsif gender. Hal tersebut dibuktikan dengan bahwa setiap OPD telah melaksanakan anggaran yang responsif gender. Diharapkan dengan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan gender dan pengembangan Kabupaten Kediri yang responsif terhadap kebutuhan gender.

6. Peningkatan Kualitas Keluarga

   Mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kab/kota. Kegiatan kesetaraan gender dan hak anak yang dilaksanakan di tingkat desa. Terwujudnya kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kab/kota, hal tersebut sebagaimana peran keluarga selain dalam hal kesejahteraan namun juga dalam hal kesehatan keluarga.

7. Perlindungan Khusus Anak

   Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak dengan upaya menurunkan kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A baik menggunakan pendekatan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat ataupun hal-hal yang lainnya. Diharapkan dengan hal tersebut akan menyebabkan turunnya kasus kekerasan terhadap anak.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**

1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8 (7/6*100)
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan mayarakat	**Indeks Kesehatan**	**72.97**	**74.85**	**74.85**	**335.490.905.340**	**278.270.679.676**	**82.94%**
Sasaran OPD: **Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan**	**74%**	**96%**	**129,72%**	**68.728.953.079**	**64.553.122.359**	**94%**
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang Terakreditasi Minimal Utama**	**64%**	**92,31%**	**118,27%**	**98.425.729.119**	**74.030.686.346**	**75%**
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	100%	100%	100%	161.648.720.065	134.400.537.449	83%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	100%	100%	1.613.413.600	1.503.176.446	93%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. ALKES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	85.7%	114%	142.233.660	56.201.600	40%
	PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG	75%	75%	100%			

	BERSERTIFIKAT P-IRT						
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	67%	59%	88%	3.138.641.593	2.169.001.756	69%
Sasaran OPD: **Meningkatnya Kesetaraan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan**	**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**93,25**	**92,85 (data tahun 2022)**	**99,57**	**943.567.112**	**820.811.314**	**86,99**
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100%	166.503.510	142.212.968	85,41
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	85%	85%	100%	218.309.400	188.365.100	86,28
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	82%	82%	100%	464.834.202	406.564.338	87,46

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	PENCAPAIAN SASARAN						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			EFISIENSI SUMBER DAYA			KETERANGAN
	REALISASI KINERJA	TARGET RPJMD	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI	
1	3	4	5 (3/4*100)	6	7	8 (6-7)	9
Sasaran OPD: **Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat**	**96%**	**74%**	**129,72%**	**129,72%**	**94%**		

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	100%	100%	100%	100%	83%	17%	Menunjang
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100%	100%	100%	100%	93%	7%	Menunjang
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	85.70%	75%	114%	114%	40%	67%	Sangat Menunjang
	75%	75%	100%	100%			
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	59%	70%	84%	88%	69%	19%	Cukup Menunjang
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	100%	100%	100%	100%	85,41%	14.53%	Sangat Menunjang
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	85%	85%	100%	100%	86,28%	13.72%	Sangat Menunjang
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	82%	82%	100%	100%	87,46%	12.54%	Sangat Menunjang

f. Benchmarking/ Perbandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah perbandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/**Indikator**	**Usia Harapan Hidup**	***Universal Health Coverage* (UHC)**	**Indeks Pem bangunan Gender (IPG)**
Kabupaten Kediri	73,27	96,48	92,85
Kota Kediri	74,67	98,71	94,53
Kabupaten Tulungagung	74,91	67,92	95,63
Kabupaten Malang	73,26	97,26	88,35
Provinsi Jawa Timur	72,11	95	92,08
Agregat Nasional	73,93	90,3	91,63

Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada di atas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. (Narasi silahkan diganti atau disesuaikan)

g. Faktor-faktor Pendukung Kinerja

Komitmen pimpinan yang besar terhadap berjalannya pelayanan kesehatan di Kabupaten Kediri menjadi faktor pendukung yang utama. Dengan komitmen dari pimpinan tersebut, proses perjalanan program dan kegiatan yang telah ditargetkan menjadi lebih solid dan kolaboratif terutama dari dinas-dinas terkait.

Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pasca Covid-19 menjadi hal yang juga mendukung kinerja di Kabupaten Kediri. Dengan hal tersebut,

banyak masyarakat yang mulai aktif merawat kesehatannya, seperti berolahraga, bersepeda, menjalani *work-life balance,* yang memiliki dampak besar dalam perkembangan kesehatan di Kabupaten Kediri.

h. Faktor-faktor Penghambat Kinerja

Pemenuhan Sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kompetensi baik tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi umum masih sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan program.

Dasar hukum, peraturan dan kebijakan yang seringkali berubah Pentingnya *updating* (pemutakhiran) data kependudukan secara berkala belum menjadi perhatian masyarakat. sehingga setiap perubahan data kependudukan (kelahiran, kematian, pernikahan, pindah domisili dll) tidak terekam dengan baik.

Keberlanjutan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga kurang didukung dengan seringnya terjadi kendala pada aplikasi Keluarga Sehat sehingga menghambat tersedianya data yang mutakhir yang berdampak juga pada proses perencanaan dan pengambilan kebijakan digitalisasi sektor kesehatan

i. Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjamin setiap warganya agar mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bermutu, adil serta dengan biaya terjangkau telah berhasil dengan tercapainya target *Universal Health Coverage* (UHC) yaitu 96% dari target 72%. Keberhasilan tersebut berkat dukungan penuh lintas program lintas sektor yang bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing sebagaimana

diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Tim Percepatan Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Lebih jauh lagi Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum telah dilaksanakan dengan baik. **Capaian Kinerja/indikator peningkatan UHH mencapai 73,27 melewati target yang telah ditetapkan yakni 72,92. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kediri akan pentingnya kesehatan.**

j. Rencana Tindak Lanjut

Komitmen semua pihak untuk mempertahankan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Kediri perlu dijaga agar semua warga Kabupaten Kediri memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.

Perlu juga meluruskan kesalahpahaman dalam mengartikan UHC yang selama ini bahwa bila seluruh penduduk telah menjadi peserta JKN maka cakupan Kesehatan semesta dianggap tercapai. Padahal terdapat hal yang lebih kompleks dari sekedar kepesertaan jaminan pembiayaan Kesehatan, namun juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Rencana tindak lanjut dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan UHC yaitu melalui pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan, ketersediaan obat, pemerataan distribusi SDM Kesehatan di FKTP dan FKRTL, jaminan ketersediaan anggaran untuk pembayaran iuran peserta serta regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN di Kabupaten Kediri.

Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan kualitas layanan di bidang kesehatan. Upaya peningkatan kualitas kesehatan akan tetap mengacu pada RPJMD tahun 2021-2026 yang targetnya meningkat setiap tahunnya dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Sistem Kesehatan Nasional.



Gambar 4 : Bupati Kediri tengah bercengkrama dengan pegawai pabrik rokok saat kunjungan ke Pabrik Rokok di Kabupaten Kediri

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja berarti penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Definisi lain tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk orang-orang yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja dan lapangan pekerjaan masih menjadi bahasan yang menarik di Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan bonus

demografi yang seharusnya punya potensi dan peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional.

Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia menurut Kementerian Tenaga Kerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Aspek tersebut berkaitan dengan masalah produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi disrupsi teknologi seperti ini, perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia harus mendapatkan perhatian penuh terutama dalam upaya optimalisasi tenaga kerja di Indonesia.

Upaya untuk mencapai masyarakat yang optimal tersebut diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang dapat mengukur partisipasi masyarakat yang masuk dalam angkatan kerja untuk dapat berproduktif dalam perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengukur sampling dengan pendekatan masyarakat yang bekerja penuh dan masyarakat yang bekerja paruh waktu (dengan klasifikasi setengah penganggur dan pekerja paruh waktu). Berikut perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Kediri dalam beberapa tahun terakhir:

Tahun	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
TPAK	67.93	N/A	71.05	67.81	71.76	70.65	69.34	68.73	68.74

Dari perkembangan diatas, dapat dilihat bahwa angka TPAK di Kabupaten Kediri fluktuatif dengan berada di kisaran 68 - 69. Mengalami titik tertinggi pada tahun 2019 (pra-Covid 19) yakni 71.76 dan mengalami titik terendah pada tahun 2018 yakni 67.81.

Dalam beberapa penjelasan seperti yang dijelaskan oleh , perlu dipahami bahwa TPAK tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah faktor tunggal, terdapat beberapa variabel-variabel anteseden dan prediktor yang dapat mempengaruhi nilai TPAK, seperti faktor PDRB, ketersediaan potensi ekonomi, kemudahan jangkauan pekerjaan, dan kemudahan permodalan.

a. Upaya Tindak Lanjut Perbaikan Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi kebutuhan pasar kerja.	Pelatihan berbasis kompetensi untuk kebutuhan tenaga kerja formal di industri dan pelatihan berbasis masyarakat untuk kebutuhan tenaga kerja informal
2	Pelatihan wirausaha pada kelompok masyarakat.	Memberikan pelatihan kewirausahaan baru bagi PMI Purna dan keluargannya dengan tujuan mengurangi pengangguran serta agar PMI tidak kembali bekerja ke luar negeri
3	Meningkatkan jalinan kerjasama dengan perusahan-perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja formal melalui Smartnaker.	Mendorong perusahaan yang di Kabupaten Kediri menggunakan aplikasi e-kerja.kedirikab. go.id agar informasi ketenagakerjaan (lowongan kerja) dapat segera terpenuhi dari pencari kerja
4	Membatasi TKA yang masuk Kabupaten Kediri.	Dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam negeri, khususnya tenaga kerja Kabupaten Kediri sudah diusulkan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya ada Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
5	Upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja.	Mendorong kepada perusahaan/badan usaha yang ada di Kabupaten Kediri untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja, serta berperan aktif dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sekitar perusahaan melalui penyaluran dana TSLP/CSR perusahaan, serta memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada pekerja rentan/informal. melalui Dana DBHCHT.

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
6	Menjaga hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan baik dari pekerja dan pengusaha.	Mendorong perusahaan/badan usaha agar meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan syarat kerja (pengesahan Peraturan Perusahaan) untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja.

b. Permasalahan dan Tantangan

Secara umum ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri terdapat banyak permasalahan dan hambatan dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri. Hambatan-hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya koordinasi antar *stakeholder* tentang pentingnya data dan informasi, baik mengenai pelatihan dan penempatan tenaga kerja baik level pencari kerja baru, pencari kerja pengalaman, dsb..
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pelatihan standar kompetensi dalam dunia industri.
3. Masih minimnya penyebarluasan serta kurangnya akses informasi terkait pasar kerja.

Selain hambatan-hambatan secara umum diatas, masih terdapat permasalahan teknis yang masih menjadi permasalahan teknis di Kabupaten Kediri. Permasalahan teknis yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

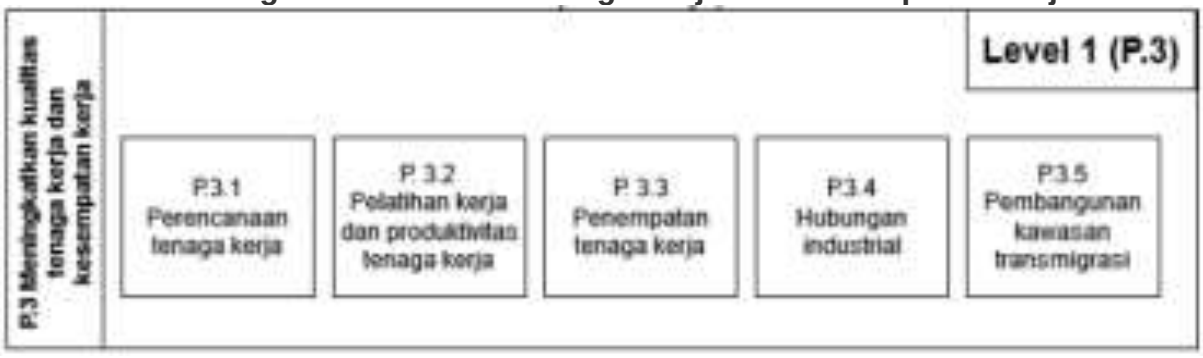
1. Kurangnya koordinasi untuk lulusan siap kerja jenjang SMA/SMK ataupun Kuliah yang akan dijadikan dasar pelatihan, penempatan, dan kesesuaian kerja baik di secara formal maupun informal.

2. Alumni pelatihan Dinas Tenaga Kerja masih membutuhkan pembinaan lebih lanjut kepada dinas terkait, agar mampu melakukan manajemen bisnis dan jaringan pemasaran skala kecil agar bisa menjadi wirausaha baru.
3. Masalah pengangguran secara umum bukan hanya permasalahan bagi Dinas Tenaga Kerja saja, namun juga perlu melibatkan banyak *stakeholder* dari banyak perspektif terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Kediri..
4. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan di Kabupaten Kediri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
5. Menurunnya angka rekrutmen perusahaan dan badan organisasi lain terhadap *fresh-graduate* lulusan SMK dan kuliah baru.
6. Masih ada pengusaha yang kurang memperhatikan pentingnya norma ketenagakerjaan (kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan).

c. Pelaksanaan Program Kegiatan

Guna mencapai sasaran dengan indikator target TPAK yang dikehendaki, peta proses bisnis yang telah disusun adalah sebagai berikut;

PERAGA 3.3.1 Peta Proses Bisnis Level 1 (P.3)
Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja



Ditinjau dari Proses Bisnis Sasaran Strategis 3, terdapat 5 Program yang menunjang pencapaian sasaran tersebut yakni;

1) Perencanaan Tenaga Kerja

Program perencanaan Tenaga Kerja bertujuan untuk menyediakan data dan Informasi kebutuhan Tenaga Kerja dan informasi Ketenagakerjaan lainnya dalam rangka peningkatan pembangunan bidang ketenagakerjaan meliputi ; Perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Adapun maksud dari Program ini antara lain untuk mempermudah Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan visi Misi dalam RPJMD. Dengan program ini diharapkan dapat sebagai acuan dalam perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan yang efektif, tepat sasaran, dan acuan program penciptaan kesempatan kerja serta peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka penurunan angka pengangguran

2) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Pelatihan dan produktivitas tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja dan berwira usaha baru dan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dilingkungan kerja. Sedangkan manfaat kegiatan ini antara lain meningkatnya kompetensi kerja pencari kerja dalam persaingan mencari kerja, dan meningkatnya efisiensi dan efektivitas dalam proses kerja dilingkungan kerja.

3) Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja bertujuan untuk membantu mencapai tujuan organisasi dan bisnis khususnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri. Adapun maksud dari program ini antara lain untuk membantu melaksanakan tugas

pengembangan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja dan penyelenggaraan informasi pasar kerja. Dengan program ini diharapkan memberikan manfaat yaitu mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan

4) Hubungan Industrial.

Program Hubungan Industrial bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Adapun maksud dari program ini menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dengan program ini diharapkan memberikan manfaat yaitu Menjamin keberlangsungan usaha, peningkatan produktivitas kerja, daya saing dan kualitas kerja serta Tercapainya perlindungan terhadap hak - hak pekerja dan kesejahteraan pekerja.

5) Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi bertujuan untuk Perluasan kesempatan kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin (penganggur). Adapun maksud dari program ini untuk Penempatan tenaga kerja melalui transmigrasi. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (pengangguran) melalui mekanisme transmigrasi dalam rangka penurunan angka pengangguran.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)***	71	68.74	**96.81%**	15,536,298,912.00	14,994,881,531.00	96.52%
Meningkatnya produktifitas dan penempatan tenaga kerja	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	95	89.72	**94.44%**			
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	**Persentase penyelesaian perselisian Hubungan Industrial**	87	100	**114.95%**			
Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	58.%	100%	172.41%	88.026.750	85.228.732	96.82
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	13%	14.60%	112.31%	14.030.159.850	13.511.131.111	96.30
Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	95%	89.72%	94.44%	717.508.414	701.841.291	97.82
Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian	9%	11.93%	132.56%	617.200.198	614.055.711	99.49

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
	perselisihan hubungan industrial						
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	10%	20%	200.00%	83.403.700	82.624.686	99.07

e. Analisa Program yang Mendukung Capaian Sasaran

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	**Keterangan**
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	**68.74**	**71.5**	**96.14%**	**96.82%**	**96.52**	**-**	**Tidak Efektif**
Perencanaan Tenaga Kerja	100%	61%	164%	172.41%	96.82	75.59%	Sangat Menunjang
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	14.60%	15%	97%	112.31%	96.30	16.01%	Sangat Menunjang
Penempatan Tenaga Kerja	89.72%	92%	98%	94.44%	97.82	-3.37%	Cukup Menunjang
Hubungan Industrial	11.93%	10%	119%	132.56%	99.49	33.07%	Sangat Menunjang
Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20%	90%	22%	200.00%	99.07	100.93 %	Sangat Menunjang

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/**Indikator**	**TPT**	**(TPAK)**
Kabupaten Kediri	5,79	68,74
Kota Kediri	4,06	71,83
Kabupaten Tulungagung	5,65	74,70
Kabupaten Malang	5,70	70,66
Kabupaten Nganjuk	4,68	66,89
Kabupaten Bangkalan	5,85	71,49
Kabupaten Gresik	6,82	70,12
Provinsi Jawa Timur	4,88	72,56
Agregat Nasional	5,32	69,48

Capaian Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maupun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian TPT dan TPAK Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka melalui perluasan kesempatan kerja (Kegiatan Padat Karya Infrastruktur) dan kegiatan Bursa Kerja.

g. Faktor-Faktor Pendukung Kinerja

Program kegiatan Padat Karya Infrastruktur tahun 2023 menyerap tenaga kerja sebanyak 4.020 orang. Tak sekedar bermanfaat dalam hal penyerapan tenaga kerja atau menekan pengangguran, program padat karya juga memberikan manfaat dalam peningkatan akses untuk pertumbuhan potensi ekonomi, membuka akses desa dan

peningkatan infrastruktur pertanian. Ada sebanyak 67 Desa dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri menjadi penerima manfaat Bantuan Keuangan Khusus untuk kegiatan Padat Karya Infrastruktur. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di fokuskan pada pembangunan infrastruktur sederhana seperti : Pembangunan MCK, saluran irigasi, drainase, rabat beton jalan desa, dan tembok penahan tanah (TPT).

Kegiatan padat karya yang ada di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan cukup besar. Utamanya dengan adanya pembangunan Bandara di Kecamatan Banyakan, Grogol dan Tarokan. Proporsi masyarakat Kabupaten Kediri yang bekerja di Bandara yang cukup besar menunjang peningkatan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kediri.

Upaya untuk meningkatkan entrepreneurship dengan pelatihan kompetensi dari berbagai OPD dan CSR. Upaya tersebut dipilih karena tingginya minat masyarakat muda untuk menjadi entrepreneur dan membuka lapangan kerja. Baik dalam skala Usaha Kecil ataupun Usaha Menengah.

Selain itu pula, Festival Bursa Kerja serta kegiatan-kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan pengusaha semakin gencar. Baik itu melalui skema festival bursa kerja online, offline ataupun melalui skema-skema lain seperti pengumuman lowongan kerja pada Dinas Tenaga Kerja. Serta dengan digitalisasi layanan ketenagakerjaan. Pembukaan batas negara untuk PMI (Pekerja Migran Indonesia) juga turut berperan dalam peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

h. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja

Investasi yang masuk di Kediri didominasi padat modal dengan skema PPP (Public, Private, Partnership) dengan nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yang tinggi. Nilai investasi yang tinggi namun peranannya terhadap ekonomi jangka pendek yang rendah menyebabkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja stagnan. Hal tersebut juga berpengaruh pada ILOR (*Incremental Labor Output Ratio*) yang tinggi.

Terdapat penurunan permintaan tenaga kerja dari korporasi-korporasi yang ada di Kabupaten Kediri. Hal tersebut terjadi karena sedang ada upaya penghematan menyebabkan permintaan tenaga kerja baru *fresh graduate* mengalami penurunan.

Kompetensi dan keahlian calon tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja seringkali tidak bertemu. Hal tersebut seringkali menjadi penyebab perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri tidak dapat berjalan optimal.

Tidak akuratnya data dari sektor informal menyebabkan kebijakan-kebijakan yang diambil masih belum dapat menggambarkan kondisi real di lapangan. Meningkatnya Wirausahawan Baru (WUB) hasil peralihan dari sektor formal juga memerlukan pendekatan-pendekatan lanjutan, terutama oleh stakeholder terkait baik dari segi pelatihan, perizinan, bantuan, dsb.

i. Kesimpulan

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri indikator Realisasi TPAK pada tahun 2023 sebesar 68,74% meningkat 0,01 dari realisasi TPAK Tahun 2022 sebesar 68,73. Hal tersebut masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni 71,1%. Kendati demikian, tren menurunnya partisipasi angkatan kerja juga terjadi di banyak tempat skala nasional maupun internasional. Tingginya angka alih fungsi tenaga

kerja dari sektor formal menjadi sektor informal ketika Covid-19, menyebabkan partisipasi angkatan kerja menurun. Selain itu, disrupsi teknologi juga menyebabkan penurunan partisipasi angkatan kerja pada sektor industri dan sektor formal.

j. Rencana Tindak Lanjut

Mencermati kondisi sebagaimana dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui DInas Tenaga Kerja bersama dengan lintas sektor terkait tengah merencanakan upaya tindak lanjut sebagai berikut;

1. Kerja sama antara SKPD terkait untuk berperan aktif dalam pemberian info lowongan kerja serta penempatan tenaga kerja.

2. Kerja sama antara SKPD terkait akses data badan usaha/UMKM yang ada.



Gambar 5 : Bupati Kediri memberikan Bantuan Sosial BLT-DBHCHT kepada masyarakat yang membutuhkan di Kecamatan Ngasem

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga

Kesejahteraan berbasis keluarga adalah hal yang penting, menurut PBB keluarga adalah sebuah sistem yang memiliki fungsi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam sistem keluarga, terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anak serta anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, dsb. Dengan hal tersebut, didapati bahwa keluarga memiliki efek yang panjang terutama dalam bidang kesejahteraan manusia.

Menurut PBB keluarga adalah institusi pertama pembangunan manusia. Pembangunan manusia dalam keluarga berdampak pada banyak aspek mulai dari aspek rata-rata sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, indeks konsumsi, kecukupan gizi, serta hal-hal lain yang menunjang pembangunan manusia. Anak-anak

yang tumbuh dari keluarga sejahtera akan memiliki kesempatan pembangunan manusia yang lebih baik daripada anak-anak yang tumbuh dari keluarga pra-sejahtera.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) keluarga memiliki delapan fungsi sebagai berikut: Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta kasih, Melindungi, Reproduksi, Sosialisasi dan pendidikan, Ekonomi, dan Pembinaan lingkungan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan basis keluarga. Upaya peningkatan berbasis keluarga ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Keluarga sejahtera telah melingkupi status sosial, status **budaya**, status gender, dan status perekonomian.

a. Upaya Perbaikan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Mengoptimalkan kinerja kader PPKBD dan Sub PPKBD melalui sistem-sistem yang dibentuk di lapangan	Kader PPKBD dan Sub PPKBD mempunyai data base berjenjang mulai dari desa sebagai dasar kegiatan menurunkan untuk menurunkan kemiskinan, stunting dan bangga kencana
2	Sosialisasi dan pendampingan pencatatan melalui aplikasi dengan memberikan fokus pada kecamatan yang masih kurang capaiannya	Keterlibatan kader dalam pengisian Inkelud dan new siga sebagai bahan pencatatan
3	Sosialisasi Kabupaten Layak Anak dan PUG	Menurunkan kekerasan dalam keluarga dan perkawinan anak dimulai dari desa dengan Geprak

Data LKjIP DP2KBP3A Tahun 2022

b. Permasalahan dan Tantangan

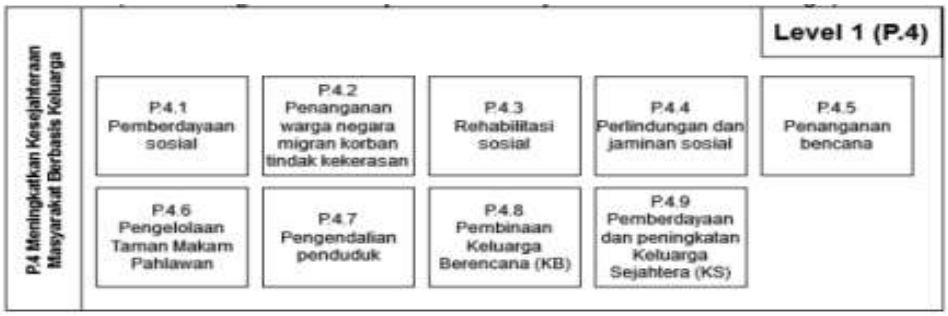
Namun begitu, upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga masih menemui berbagai macam hambatan. Hambatan tersebut diidentifikasikan sebagai berikut;

1. Kurangnya keterlibatan aktif, advokasi, dan koordinasi terhadap kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG).
2. Masih adanya pelanggaran terhadap hak anak, dimana sosialisasi terhadap hak anak dan peran strategis PPA masih belum optimal.
3. Unmet Need masih tinggi dimana masih tingginya angka keengganan penggunaan alat kontrasepsi baik untuk laki-laki ataupun perempuan.
4. Usia perkawinan dibawah 20 tahun masih tinggi.
5. Angka kelahiran belum dapat dikontrol secara optimal, terutama kurangnya koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Guna mencapai sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga dengan Persentase Keluarga Sejahtera yang dikehendaki, peta proses bisnis yang telah disusun adalah sebagai berikut;

PERAGA 3.4.1 Peta Proses Bisnis Level 1 (P.4) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga



Ditinjau dari Proses Bisnis Sasaran Strategis 4, terdapat 9 Program yang menunjang pencapaian sasaran tersebut yakni;

1) Program Pemberdayaan Sosial

   Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan dengan tujuan Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial, peningkatan kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan dengan manfaat Terlaksananya kegiatan pelatihan Karang Taruna guna mendukung peningkatan kemampuan PSKS, Terbitnya Surat Rekomendasi, Peningkatan Kemampuan/Kompetensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Peningkatan pemahaman masyarakat terkait aturan PUB

2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Kekerasan

   Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan dengan upaya Fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan Asal Pelatihan Bantuan Sosial Pangan/Sembako dan atau Peralatan/barang. Diharapkan dapat Penanganan Eks Migran Bermasalah

3) Program Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan tujuan Penanganan orang terlantar, Layanan pemberian Rujukan, Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas (ABM), Bantuan Sosial bagi Orang Dengan Kecacatan Berat (ODKB) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Bantuan Sosial Pengembangan Usaha, Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas, Pemberian Bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, dan Pemberian Layanan Kedaruratan. Diharapkan dapat Pemberian sandang, Reunifikasi keluarga, Rujukan, Paket Bantuan Sosial Permakanan untuk ODGJ dan ODKB, Paket Bantuan Sosial Pengembangan Usaha, dan Sosialisasi Program Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja.

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing berkaitan dengan penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial Meningkatnya Perlindungan dan pemberdayaan dengan tujuan Pendataan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Terpadu Verifikasi dan Validasi Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI D) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Penyaluran Program Bansos pangan Pemberian Layanan Kedaruratan. Diharapkan dapat memberikan tersedianya Data DTKS yang valid dan Tertanganinya PPKS

5) Program Penanganan Bencana

Pengurangan resiko yang diakibatkan Bencana Membangun Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana. Dengan maksud dapat Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat setelah terjadi Bencana Pemulihan Resiko Sosial

Masyarakat yang terdampak Bencana. Upaya perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman dan Resiko Bencana yang dilakukan pada saat Bencana, tanggap darurat bencana dan Pasca Bencana. Diharapkan dengan hal tersebut dapat Terbangunnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana Terbentuknya pemulihan fungsi sosial Masyarakat yang terdampak Bencana Tercukupinya kebutuhan dasar Masyarakat terdampak Bencana.

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

   Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap TMP dengan maksud Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota diharapkan dapat Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dan terawat dan memberikan penghargaan kepada para pahlawan

7) Program Pengendalian Penduduk

   Meningkatnya capaian desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga dengan maksud Terpenuhinya data mikro keluarga yang sampai tingkat desa/kelurahan yang akurat dan dinamis. Dengan hal tersebut diharapkan Tersedianya data parameter pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera

8) Program Pembinaan Keluarga Berencana

   Menurunkan unmet need (masyarakat yang ingin mendapatkan layanan Keluarga Berencana namun tidak dapat dipenuhi) dengan maksud Mencegah kehamilan tidak diinginkan dengan harapan Terlayaninya PUS (Pasangan Usia Subur) yang ingin ber KB.

9) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Meningkatan cakupan keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL) dengan maksud Terpenuhinya cakupan keluarga sasaran yang menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL) sesuai target diharapkan dapat Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8 (7/6*100)
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	***Persentase Keluarga Sejahtera***	**71,61**	**84.78**	**118.40%**	**54,665,230,938.00**	**53,856,167,505.00**	**98.52 %**
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	**Persentase Persentase PMKS/PPKS yang tertangani**	**48,47%**	**96,6%**	**199%**	25.246.502.991,00	25.338.194.474,00	100.36 %
	Persentase PSKS yang diberdayakan	**55.53%**	**102%**	**183%**			
Pemberdayaan sosial	Persentase Potensi masyarakat yang diberdayakan	100%	128	128	1.908.810.900	1.905.690.100	99.83 %
Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Migran korban kekerasan yang ditangani	100%	0	0	0	0	0
Rehabilitasi sosial	Persentasi Pemerlu	100%	101	101	3.		98,38

	Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang direhabilitasi				651.084.800	3.590.078.796	%
Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Sosial yang mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	89	89	24.422.312.532	24.404.557.911	99,93 %
Penanganan bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100%	100	100	668.796.550	667.033.000	99,74 %
Pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	100%	100	100	176.192.331	171.330.110	97,24 %
Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk	**Crude Birth Rate (CBR)**	**15,39**	**8,05**	**147,69**	**29.418.727.947**	**28.517.973.031**	**96,94 %**
Pengendalian penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	1.949.365.250	1.881.037.901	96,49 %
Pembinaan Keluarga Berencana	Unmet need	10,38	11,06	93,45%	13.030.844.875	12.417.590.487	95,29 %
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB: 31,93% BKR : 27,1% BKL : 34,87%	BKB: 34,19% BKR : 18,80% BKL : 28,57%	86,12%	8.857.823.700	8.818.849.200	99,56 %

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Pemberdayaan sosial	128	100	128	128	86	42	

Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	0	100	0	0	0	0	Tidak ada kasus migran tindak kekerasan
Rehabilitasi sosial	101	100	101	101	63	38	
Perlindungan dan jaminan sosial	89	100	89	89	88	1	
Penanganan bencana	82	100	82	82	90	-8	
Pengelolaan taman makam pahlawan	100	100	100	100	89	11	
Pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	96,49%		Menunjang
Pembinaan Keluarga Berencana	10,38	11,06	93,45%	93,45%	95,29%		Cukup Menunjang
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	27,19%	31,3%	86,12%	86,12%	99,56%		Cukup Menunjang

f. Faktor-faktor Penunjang

Dukungan kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga memiliki dampak yang besar, terutama pada para perempuan. Hal tersebut terjadi karena dukungan pelatihan kepada ibu-ibu semakin masif dijalankan. Selain itu pula, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui pembinaan dan kelompok organisasi perempuan juga semakin ditingkatkan.

Upaya lain dalam rangka pendampingan terhadap ibu melahirkan dan bayi umur 0 – 59 bulan terus dilaksanakan untuk menekan angka stunting dengan menjaga kualitas

gizi bayi dan ibu. Serta peningkatan pelayanan KB secara gratis dalam upaya meningkatkan kepesertaan KB masyarakat Kabupaten Kediri.

Koordinasi dengan OPD-OPD terkait memberikan satu kemudahan dalam lingkup kolaboratif, terutama dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan pencegahan stunting. Kolaborasi tersebut secara umum telah memberikan dampak nyata dalam upaya pencapaian one digit stunting Kabupaten Kediri. Dukungan anggaran dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kediri secara simultan mendukung operasionalisasi kinerja di Kabupaten Kediri.

g. Faktor-faktor Penghambat

Tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan kinerja. Hambatan-hambatan tersebut telah diidentifikasikan sebagai berikut;

1. Rasio SDM Penyuluh KB dengan Desa/Kelurahan yang rendah. Diharapkan 1 : 2, sedangkan realisasinya masih 1: 6-7 menyebabkan kinerja tidak dapat bergerak optimal.
2. Kurangnya keterlibatan aktif, advokasi, dan koordinasi terhadap kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG).
3. Kelompok Tribina sudah terbentuk , namun belum berjalan optimal karena saat ini fokus kegiatan program percepatan penurunan stunting
4. Perubahan sistem pencatatan dari BKKBN yang sering terkendala sistem aplikasi menyebabkan data tidak bisa di analisis real time. Hal ini berdampak pada performa kinerja program Bangga Kencana.

h. Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan persentase keluarga sejahtera mengalami peningkatan sebesar 0,29. Meskipun peningkatan tersebut belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni 71,61% dengan realisasi anggaran sebesar 29.338.784.345 dari 30.362.295.059 anggaran yang telah ditetapkan.

i. Rencana Tindak Lanjut

Melihat semakin meningkatnya target pada tahun 2023, upaya tindak lanjut untuk memperbaiki kualitas kinerja adalah sebagai berikut;

1. Kolaborasi dan koordinasi bersama dengan pemangku kepentingan;
2. upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas
3. Mempermudah pemberian akses pelayanan KB ke masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai dari desa



Gambar 6 : Kegiatan Bupati Kediri Bersama Anggota Forkopimda dan Toko Agama/Tokoh Masyarakat

5. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Semangat Demokrasi di Masyarakat

Penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi ditinjau dari tingkat pemahaman elemen masyarakat mulai menurun baik dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter bangsa. Disamping itu, diwarnai dengan mulai memudarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga dan memelihara kondusifitas lingkungan dan kondusifitas wilayah/daerah. Sedangkan dari aspek tingkat partisipasi demokrasi, masyarakat pun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif.

Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan dimensi sebagai berikut;

1. Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam peribadatan.
2. Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan
3. Menumbuhkan semangat kepahlawan dalam sadar bela negara
4. Meningkatnya partisipasi demokrasi masyarakat khususnya bagi pemilih pemula di Kabupaten Kediri.

Demokrasi dalam hal ini menekankan sebuah sistem sosial dan budaya yang menurut BPS terbagi atas beberapa aspek. Aspek tersebut sesuai dengan kebijakan dari BPS Pusat terjadi perubahan metode penilaian dan indikator Indeks Demokrasi Indonesia diantaranya aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, peran lembaga demokrasi menjadi aspek

1. Aspek kebebasan sipil,
2. Aspek kesetaraan,
3. Aspek kapasitas kelembagaan demokrasi.

Dengan semangat demokrasi, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah berupaya untuk mengembalikan marwah demokrasi di Kabupaten Kediri. Demokrasi yang bertanggung-

jawab dan saling mengawasi. Dengan semangat tersebut, diupayakan akan adanya rasa persatuan dan kesatuan dari masyarakat di Kabupaten Kediri.

a. Upaya Perbaikan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Hal yang akan menjadi *concern* bagi Pemerintah Kabupaten Kediri adalah keterwakilan perempuan dalam dewan yang belum mencapai 30%.	● 18 Parpol di Kabupaten Kediri telah berkomitmen dan mengajukan Caleg perempuan, dimana rata-rata mencapai 40%. Prosentase ini lebih tinggi dari ketentuan yang hanya 30% di DPRD Kabupaten Kediri; ● Dengan harapan agar terpilih, caleg Perempuan ditempatkan di nomor-nomor awal urutan caleg tiap Dapilnya ● Parpol menempatkan satu caleg perempuan diantara dua caleg laki-laki di tiap Dapil
2	Menjalin kerjasama yang aktif dengan instansi terkait maupun swasta di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Kebakaran/Rescue	- Menjalin kerjasama dengan instansi terkait yaitu Polri, TNI, BNN terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. - Membuat Perjanjian Kerjasama antara Pemkab Kediri dengan Pemkot Kediri terkait Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan (Perjanjian Kerjasama Nomor : PP.05_663/418.40/III/2023, Nomor : 364.1/353/419.117/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan)

Data LKjIP Bakesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja

b. Permasalahan dan Tantangan

Secara umum, permasalahan yang menjadi penghambat upaya peningkatan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat telah diidentifikasikan sebagai berikut:

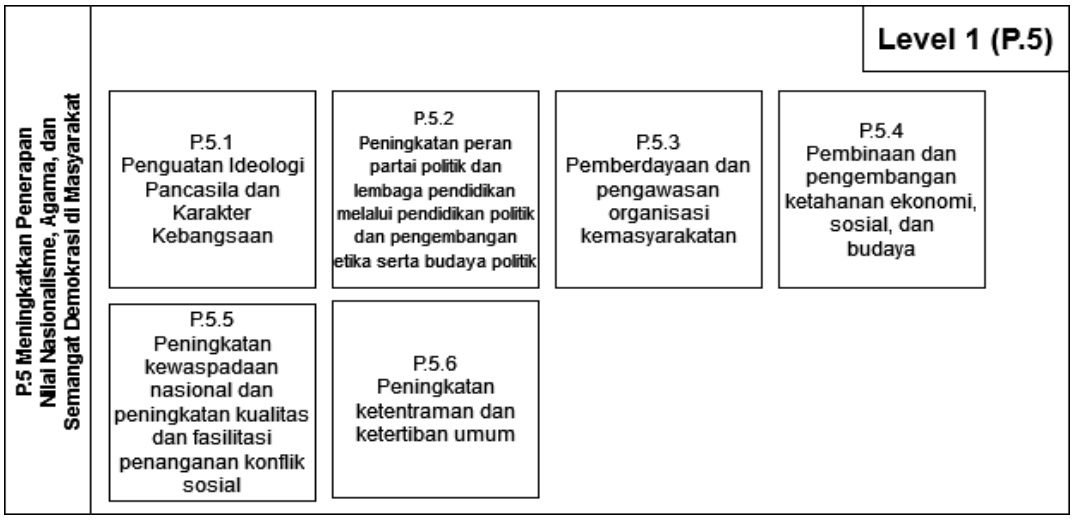
1. Kurang optimalnya peran aparatur, elite politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tenaga pendidik, pelajar dan mahasiswa dalam memperkokoh wawasan kebangsaan.
2. Kurang optimalnya peran-peran masyarakat dalam menjaga inklusivitas dan demokrasi di Kabupaten Kediri.
3. Perlunya peningkatan keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar *stakeholder.*
4. Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah perlu untuk ditingkatkan.
5. Perlunya sosialisasi terkait upaya pemecahan dan solusi atas upaya memberikan pemahaman terkait pentingnya persatuan dan kesatuan.
6. Perlunya sosialisasi ketahanan nasional melalui penanaman ideologi bangsa kepada masyarakat.

Sedang permasalahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut;

1. Masih kurang idealnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Kediri
2. Kurang tertibnya administrasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

c. Pelaksanaan Program Kegiatan

Guna mencapai sasaran dengan indikator target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikehendaki, peta proses bisnis yang telah disusun adalah sebagai berikut;



Ditinjau dari Proses Bisnis Sasaran Strategis 3, terdapat 5 Program yang menunjang pencapaian sasaran tersebut yakni;

1) Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

   Tujuan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri guna menumbuhkan karakter yang berdasarkan pada setiap sila-sila Pancasila.

   Melalui aktualisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi lebih membumi di masyarakat Indonesia dengan melibatkan tiga ranah pendidikan yaitu informal, formal dan non formal guna membentuk karakter yang baik pada generasi bangsa, sehingga akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila dapat terjaga dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab generasi muda terhadap masa depan yang berkualitas, cerdas dan berkarakter.

   Untuk itu Pancasila harus menjadi pandangan hidup generasi muda. Pandangan hidup mengandung konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa,

pikiran- pikiran terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik, yang akan membawa hidup dan kehidupan bangsa pada tujuan bersama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralis dan multikultural serta memberikan petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat.

2) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Tujuan peningkatan peran parpol melalui pendidikan politik adalah untuk menelorkan dan mencetak politisi-politisi yang santun dan beretika baik dari kalangan anggota parpol maupun dari masyarakat, utamanya dengan menggunakan dana Banpol yang telah diberikan oleh Pemerintah dan dana atas inisiatif Parpol sendiri.

Maksud diadakannya Kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik agar kesadaran politik anggota parpol maupun masyarakat luas semakin baik. Selain itu masyarakat diharapkan bisa lebih berpartisipasi dalam demokrasi dan dalam pelaksanaan pemilu. Efeknya, Indek Demokrasi Indonesia di daerah akan semakin baik.

Adapun manfaat dari program ini yaitu timbul pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga muncul kesadaran dan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan politik serta demokrasi di Kabupaten Kediri. Selain itu terfasilitasinya

kegiatan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan perwakilan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, serta terwujudnya sinergitas antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan partai politik dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024.

3) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah dengan Ormas/LSM untuk membicarakan sekaligus membahas berbagai isu yang beredar dan berkembang di masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan sosial masyarakat. Hal tersebut selain untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan implementasi demokrasi, namun demikian untuk mengurangi resiko atas instabilitas politik dan kebangsaan akibat hal-hal yang tidak bertanggung-jawab.

Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu pemecahan masalah ataukah sebaliknya partisipasi peran Parpol/Ormas/LSM sangat penting sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama sama mencapai tujuan dan bersama sama bertanggungjawab.

4) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Hal tersebut dilakukan agar Pembangunan akhlak yang mulia membutuhkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesalehan sosial dalam beragama juga akan menciptakan iklim kondusif bagi terciptanya harmonisasi kehidupan

sosial, sehingga ketegangan sosial dan antisipasi terjadinya multi konflik di daerah secara dini dapat dicegah tanpa harus merusak tatanan kehidupan masyarakat. Diharapkan dengan hal tersebut dapat meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.

5) Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

   Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka permasalahan dan gangguan di dalam masyarakat juga menunjukan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk dapat mengantisipasi setiap permasalahan / gangguan yang mungkin timbul. maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini (TKD).

6) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman tertib dan teratur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diharapkan dengan hal penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

7) Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

   Upaya pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran dilaksanakan untuk melakukan hal-hal yang dapat mencegah, menanggulangi, dan menyelamatkan terjadinya bencana kebakaran dan kebakaran. Hal tersebut bertujuan agar angka kasus kebakaran dapat dimitigasi dan diminimalkan, selain

itu upaya penyelamatan juga dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan dengan hal tersebut, angka kebakaran di Kabupaten Kediri dapat tertangani dengan baik.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	**Tingkat Kondusivitas Daerah (TKD)**	100%	**100%**	**100%**			
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	**100%**	**100%**	**2.390.653.220**	**2.271.534.839**	**95,02%**
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang difasilitasi	100%	**100%**	**100%**	**95.903.880.520**	**45.657.253.199**	**47,61%**
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas	60%	100%	167%	2,514,013,900	2,501,711,722	99.5
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan beragama dan	75%	100%	133%	538,111,800	518,541,400	96

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
	kepercayaan						
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditindak lanjuti	90%	100%	111%	2,367,363,400	2,290,015,739	97
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	100%	100%	12.093.276.775	8.332.410.132	69%
Pencegahan, Penanggulangan, Penyalamtan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang direspon kurang dari 15 Menit	72.82%	59.42%	82%	2,270,269,500.00	2,213,500,996.00	97.50%

e. Analisa Program yang Mendukung Capaian Sasaran

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	**Keterangan**

Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusifitas Daerah	**100%**	**100%**	**100%**				
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	97%	90%	108%	121%	95.02%	26%	Sangat Menunjang
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%	100%	100%	47.51%	52%	Menunjang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	90%	111%	167%	99.51%	67%	Sangat Menunjang
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100%	90%	111%	133%	96.36%	37%	Sangat Menunjang
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan	100%	100%	100%	111%	96.73%	14%	

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	69%	31%	Menunjang
Pencegahan, Penanggulangan, Penyalamtan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	59.42%	100%	59%	82%	97.50%	Mon	

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ **Indikator**	**Indeks Demokrasi Indonesia**	**Tingkat Kondusifitas Daerah**
Kabupaten Kediri	77,86 (IDI tahun 2022)	100%
Kabupaten Blitar	-	No Data

Provinsi Jawa Timur	84,92 (IDI tahun 2022)	100%
Agregat Nasional	80,09 (IDI tahun 2022)	No Data

Capaian Persentase Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada di atas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

g. Faktor-faktor Pendukung

Dalam upaya pencapaian Tingkat Kondusifitas Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kediri didukung dengan komitmen bersama dari para pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kediri pada saat-saat terjadinya konflik diantaranya telah dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta Tim Deteksi Dini yang melibatkan masyarakat itu sendiri dengan jaringan intelijen instansi terkait. Dengan komitmen bersama untuk menjaga kebersamaan tersebut, ketercapaian tingkat kondusifitas di Kabupaten Kediri mencapai 100%.

Dalam pencapaian indikator tujuan Indeks Demokrasi Indonesia, beberapa dimensi dalam Indeks tersebut mendapat nilai yang tinggi. Seperti aspek kebebasan, aspek kesetaraan dalam pelayanan sebesar dan aspek kapasitas Lembaga demokrasi. Hal-hal tersebut juga secara langsung menunjang tingkat kondusifitas daerah di Kabupaten Kediri.

Dalam aspek lain pula, adanya dukungan dari stakeholder dan pemerintah daerah mendukung pencapaian kinerja menjadi lebih baik. Dalam penanggulangan dan penanganan kebakaran Adanya kerjasama yang terjalin baik dengan pemerintah daerah sekitar terkait penanganan kebakaran, masyarakat mulai sadar dan dapat bekerja dengan baik.

h. Faktor-faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pencapaian penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri masih memiliki kelemahan. Nilai yang cukup rendah berada dalam dimensi keterbukaan informasi publik (KIP) dan indikator kesempatan kerja antar wilayah. Selain itu, keterwakilan perempuan dalam dewan masih berada dibawah 30%. Hal tersebut juga menjadi perhitungan dalam penerapan demokrasi di Kabupaten Kediri.

Selain hal diatas, terdapat beberapa hambatan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikutl

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan perundangan di daerah
- Kurang optimalnya fungsi Satlinmas dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- Sarana dan prasarana serta personel yang belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan pelayanan
- Terbatasnya jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran dibandingkan luas wilayah
- Keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana bidang pencegahan kebakaran

i. Kesimpulan

Capaian kinerja Tingkat Kondusifitas Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2023 ini mencapai 100%, hal tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan. Capaian tersebut didukung dengan anggaran sebesar 118.077.569.115,00 dengan realisasi sebesar 63.694.968.027,00. Ketercapaian ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni Tingkat Kondusifitas Daerah sebesar 100%.

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat dari kompleksnya permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mencapai kondusifitas daerah. Dengan hal tersebut akan ditindaklanjuti sebagai berikut;

1. koordinasi dengan partai politik, Sekretariat DPRD, serta pemangku kepentingan yang lain menjadi perlu untuk ditingkatkan
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait terkait pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia anggota Satpol PP dan Satlinmas
4. Penambahan sarana prasarana serta personel pemadam kebakaran
5. Menambah kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang berbatasan terkait penanganan kebakaran
6. Membentuk relawan kebakaran di desa-desa
7. Peningkatan kapasitas personel pemadam kebakaran



Gambar 7 : Kegiatan Bupati Kediri dalam evaluasi kinerja OPD

6. Sasaran Strategis 6

Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih

Sasaran ini terbagi atas lima indikator yakni Nilai SAKIP, Nilai IKM, Opini BPK, Indeks Profesionalisme ASN, dan Indeks SPBE. Dari keempat indikator tersebut diupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan bersih dapat dilaksanakan dengan baik. Karena dari ke-empat indikator tersebut dapat menggambarkan telah efektif dan bersihnya penyelenggaraan pemerintah.

Sudah menjadi upaya bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengembangkan upaya pembangunan pemerintahan yang efektif dan bersih. Tidak dapat dipungkiri bahwa ekspektasi masyarakat dewasa ini terhadap kinerja pemerintahan yang baik dan bersih

semakin tinggi. Sebagai penyelenggara pemerintahan sesuai dengan marwah demokrasi yakni dari rakyat, untuk rakyat, dan kepada rakyat harus dilaksanakan dalam upaya memenuhi ekspektasi masyarakat.

Dalam mengukur sasaran ini, digunakan empat indikator utama dalam pelaksanaannya, yakni Nilai SAKIP untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja, IKM untuk mengukur kepuasan masyarakat, Opini BPK untuk mengukur kesehatan keuangan, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi untuk mengukur tingkat persepsi anti korupsi pada tingkat masyarakat. Dalam laporan ini akan dimuat penjabaran kinerja atas masing-masing pencapaian indikator.

Data Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2018 - 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	66.44	67.18	68.21	68.33	68.21
IKM	84.14	84.14	84.23	85.77	86,35
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
IPAK	N/A	3.68	3.88	3.49	3.49

*) Data Tahun 2023 belum dirilis, menggunakan data Tahun 2022

Dari penjabaran data diatas, terdapat stagnasi bahkan penurunan yang signifikan antara lain dalam bidang SAKIP yang tetap berada dalam predikat B selama 2018 - 2023 (dalam kurun waktu 6 tahun). Selain itu, nilai IKM juga mengalami fluktuasi penurunan pada tahun 2018 dan perlahan-lahan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Predikat Opini BPK tetap mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Namun

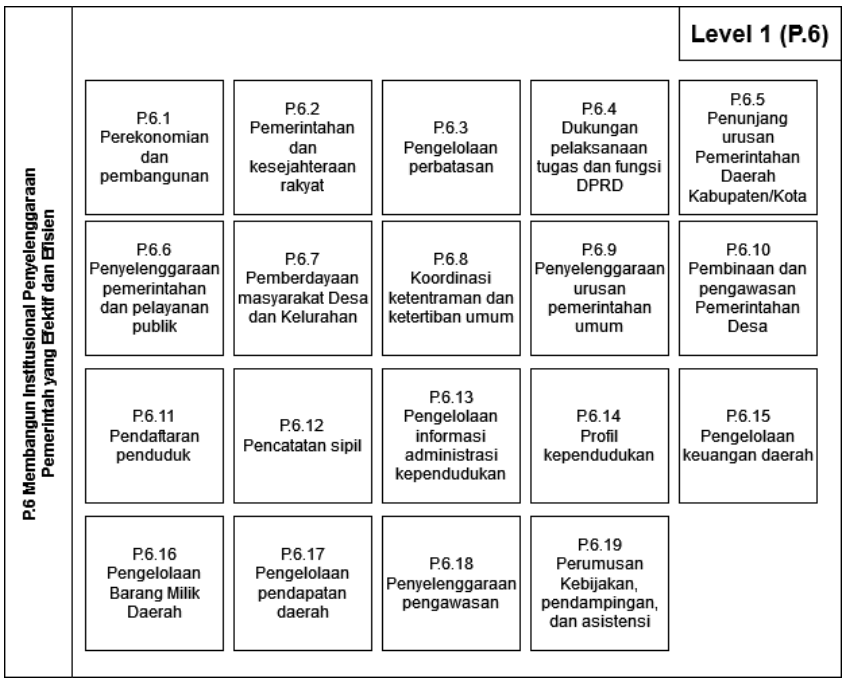
demikian nilai IPAK Kabupaten Kediri mengalami kemerosotan cukup dalam pada tahun 2021 ke tahun 2022.

a. Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Menyamakan Persepsi antar OPD terkait konsep Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Internal)	Telah disusun Dokumen Draft Arsitektur Kinerja sebagai upaya perbaikan implementasi akuntabilitas sesuai rekomendasi KemenPANRB
2	Meninjau Kembali titik-titik lemah dalam Laporan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Pengambilan sampel populasi telah menggunakan aplikasi Sukma-e Jatim dengan interface yang lebih ramah bagi masyarakat
3	Menindaklanjuti Rekomendasi Audit Keuangan BPK	Lebih meningkatkan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memanggil skpd.
4	Meningkatkan Sosialisasi IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi)	Lebih meningkatkan sosialisasi IPAK kepada masyarakat , lembaga, dan instansi pemerintah

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kediri, dijelaskan bahwa sub-proses untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut;



c. Realisasi Program dan Kegiatan

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	**Nilai SAKIP**	**71,5**	**68,21**				
	IKM	**84,2**	**85,7**				
	Opini BPK	**WTP**	**WTP**	**100%**			
	IPAK	**3.72**	**3.49**	**93.82%**			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	903.522.647	890.039.747	96.03%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Tingkat Keterpaduan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	1.624.736.058	1.621.111.396	99.78%

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
PEMBANGUNAN DAERAH (Bappeda)							
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Bappeda)	Cakupan Sinkronisasi Program Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.823.806.999	2.791.538.179	98.86%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK (Dispendukcapil)	Kepemilikan Dokumen Kependudukan	81.66% (Rata-rata)	81.60% (Rata-rata)	99.92%	3.002.261.000	2.980.107.097	99.26%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL (Dispendukcapil)	Cakupan Kepemilikan Dokumen Akta Catatan Sipil	99.25	98.88	99.63%	1.282.080.000	1.261.751.112	98,14%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Dispendukcapil)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk	100	100	100	124.552.000	114.312.900	91,78%
PROGRAM PROFIL KEPENDUDUKAN (Dispendukcapil)	Tersusunnya buku profil kependudukan	100	100	100	7.525.000	4.900.000	65,11%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	3,763,022,800.00	3,064,247,058.00	
Program Pengelolaan Barang Milik	Persentase Aset Pemerintah	54,78%	54.61	99.69%	4,556,977,500.00	4,509,803,398.00	98.96%

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
Daerah (BPKAD)	daerah yang diamankan						
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)	Persentase Peningkatan PAD	5.95%	-2.12%	-35.63%	7,861,604,917.00	7,501,118,159.00	95.41%
Program Penyelenggaraan Pengawasan (Inspektorat)	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	331.446.000	263.108.907	79,38 %
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Inspektorat)	1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3	Level 3	100	624.103.000	552.858.534	88,58 %
	2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100			

d. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN DAN EFISIENSI**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA (Sekretariat Daerah/Bagor)	100%	100%	100%	100%	96,03%	3,97%	Menunjang
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Bappeda)	100%	100%	100%	100%	99.78%	0.22%	Menunjang
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Bappeda)	100%	100%	100%	100%	98.86%	1.14%	Menunjang
PROGRAM PENDAFTARAN	97.53	99.5	98.02%	99.92%	99.26%	Tidak Efektif	Kurang Menunjang

PENDUDUK (Dispendukcapil)							
PROGRAM PENCATATAN SIPIL (Dispendukcapil)	95.52	99.5	96.00%	99.63%	98,14%	Tidak efektif	Kurang Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Dispendukcapil)	100	100	100.00%	100	91,78%	8.22%	Menunjang
PROGRAM PROFIL KEPENDUDUKAN (Dispendukcapil)	100	100	100.00%	100	65,11%	34.88%	Menunjang
Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	81.43%	18.57%	Menunjang
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKAD)	54.61	60.25	90.64	99.69%	98.96%	Tidak Efektif	Kurang Menunjang
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)	-2.12%	2.92%	-73%	-35.63%	95.41%	Tidak Efektif	Kurang Menunjang
Program Penyelenggaraan Pengawasan (Inspektorat)	WTP	WTP*	100%	100%	79,38%	21%	Menunjang
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (Inspektorat)	Level 3	Level 4	75%	100	88,58%	11%	Menunjang

e. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ **Indikator**	**Nilai SAKIP**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**Opini BPK**	**Indeks Persepsi Anti Korupsi**
Kabupaten Kediri	Predikat B (68,21)	85,7	WTP	3.49 (surveik edirikab)
Kota Kediri	Predikat BB		WTP	3,93
Kabupaten Tulungagung	Predikat BB		WTP	No Data
Kota Malang	Predikat A		WTP	No Data
Provinsi Jawa Timur	Predikat A		WTP	3.88 (Data BPS)
Agregat Nasional	Agregat Predikat B (70,01)		WTP	3.92 (Data BPS)

f. Urusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus berjalan dengan pertanggungjawaban atas apa yang dilaksanakannya.

Akuntabilitas adalah prinsip yang selalu diterapkan oleh seluruh individu dalam satu organisasi, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pegawai terendah dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan akuntabilitas dengan prinsip transparancy, effectiveness, efficiency, dan strategic vision, karena terkait dengan aktivitas pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Prinsip-prinsip akuntabilitas dalam sektor publik adalah:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
2. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
5. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

Dalam hal ini, SAKIP di Pemerintah Kabupaten Kediri mengalami stagnasi selama 6 tahun berturut-turut. Perkembangan stagnasi ini tidak dapat dipungkiri karena adanya rekomendasi dari Kementerian PANRB sebagai evaluator SAKIP yang tidak ditindaklanjuti dengan baik. Perkembangan rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk dapatnya menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian PANRB dengan baik.

g. Permasalahan dan Tantangan

Dengan perhatian terhadap hal tersebut, didapati berbagai macam permasalahan dalam pembangunan institusional Pemerintahan yang efektif dan bersih. Dengan hal tersebut, didapati beberapa permasalahan dan isu-isu sebagai berikut:

1. Penerapan Good Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kediri belum Optimal.
2. Kurangnya optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja di masing-masing OPD.
3. Tingginya perbedaan persepsi mengenai makna dan hakikat akuntabilitas pada masing-masing OPD.

h. Faktor-faktor Pendukung

Dengan ditetapkannya RPJMD baru tahun 2021-2026 memiliki pendekatan-pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reliable, Time Specific) yang mana dapat meningkatkan peran akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kediri.

i. Faktor-faktor Penghambat

Evaluator KemenPANRB menilai keselarasan hubungan operasional antara Tujuan dan Sasaran Bupati dengan Tujuan dan Sasaran OPD belum terlihat. Selain itu, munculnya Permen PANRB nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menghapus komponen capaian kinerja. Perhitungan SAKIP hanya mengukur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengevaluasian Instansi Pemerintah dan Organisasi Perangkat Daerah

j. Urusan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur penyelenggara pelayanan public. Selain itu pula, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing- masing.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Selain itu ,data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya terutama dari citizen perspective atau perspektif masyarakat. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya.

Kepuasan masyarakat dewasa ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di pemerintahan. Dengan hal tersebut, kepuasan telah ditetapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Kediri. Urusan ini secara langsung diampu oleh hampir seluruh OPD mulai dari Dinas, Badan, Bagian, Kecamatan. Oleh karena demikian, dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kediri telah menargetkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84 pada tahun 2022.

k. Faktor-faktor Pendukung

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Kediri mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Ketersediaan layanan yang semakin ditingkatkan waktu demi waktu, inovasi yang ditingkatkan oleh masing-masing OPD menunjang capaian IKM tahun 2022 ini melampaui target yang telah direncanakan.

Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengisi angket SKM. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan aplikasi yang digunakan yang awalnya menggunakan e-Survey kini menggunakan Sukma-e Jatim yang memiliki interface yang lebih modern dan mudah dipahami. Selain itu pula, aplikasi

Sukma-e Jatim memiliki keunggulan dimana administrator Kabupaten Kediri dapat memonitor kinerja kepuasan masyarakat dari masing-masing OPD secara real time yang juga dapat dipantau oleh pimpinan daerah.

l. Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan IKM di Kabupaten Kediri masih terjadi beberapa hambatan, terutama pada hal-hal yang menyangkut pada kualitas pelayanan seperti waktu penyelesaian dan perilaku petugas yang perlu ditingkatkan menjadi service excellent. Selain itu pula, pentingnya ketepatan waktu juga menjadi perhatian sebagaimana keterbukaan informasi publik yang perlu untuk dimonitor secara berkala.

Namun demikian, beberapa rencana tindak lanjut yang telah dilaporkan oleh masing-masing OPD masih banyak yang belum dapat direalisasikan. Hal tersebut diindikasikan dengan samanya rencana tindak lanjut dalam laporan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut akan menjadi *concern* bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memperbaiki kinerja pelayanan dan untuk kepuasan masyarakat.

m. Urusan Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah istilah atau opini yang diberikan oleh Auditor kepada suatu entitas keuangan, khusus untuk pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap tahunnya BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran baik kepada Pemerintah Pusat berupa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun

kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Opini audit merupakan pernyataan dari auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang sudah diaudit, kewajaran ini menyangkut hal-hal berkaitan materialitas, posisi keuangan, serta arus kas.

Opini auditor atas laporan keuangan dari entitas yang diaudit dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Memberi gambaran bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Upaya pengembangan pemerintahan yang efektif dan bersih secara umum harus melakukan efektivikasi di bidang keuangan. Pemerintah Kabupaten Kediri telah

menetapkan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2022.

n. Permasalahan dan Tantangan

Namun begitu, permasalahan yang menghambat upaya pembangunan pemerintahan yang efektif dan bersih masih cukup kompleks, terutama dalam urusan keuangan daerah. Hasil identifikasi permasalahan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan belum maksimal mengacu pada aturan yang ada baik di entitas akuntansi maupun di entitas pelaporan.
2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kediri tahun Anggaran 2022 sebesar 90,78% yang terinci dalam Belanja Operasi 92,52%, Belanja Modal 72,32%, BTT 22,29% dan Belanja transfer 99,91% dari anggaran sebesar Rp3.428.699.159.232,00 sedangkan realisasi terbesar pada belanja transfer mencapai 99,91 % dari total anggaran belanja transfer.
3. Dengan realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar 90 % dari total anggaran belanja daerah, hal ini masih menjadi catatan bahwa realisasi belanja operasi masih lebih tinggi dari belanja Modal, yang mana belanja pegawai masih dominan realisasinya sebesar 96,39 %;

o. Faktor Penunjang

Secara umum, intensifnya koordinasi dengan OPD dalam melaksanakan rencana dan kegiatan yang sesuai dengan rencana menjadi faktor kunci dalam tercapainya predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK. Selain itu pula, meningkatnya

peran OPD dalam menindaklanjuti Rekomendasi BPK juga menunjang pencapaian Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

p. Faktor Penghambat

Secara umum, hambatan bersifat teknis dan koordinatif, namun demikian dapat diatasi karena karena tingginya antusias SKPD.

q. Urusan Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

KPK merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Represif. Menurut KPK, pelaksanaan prinsip anti korupsi yang ideal adalah sebagai berikut; penanganan laporan pengaduan masyarakat, perbaikan sistem, edukasi dan kampanye, strategi preventif, strategi detektif.

Menurut BPS, berbagai macam unsur yang mampu menggambarkan perilaku korupsi sehari-hari atau (petty corruption) masyarakat Indonesia.Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.

Data yang dikumpulkan melalui IPAK mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan pelayanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan (extortion) dan nepotisme. Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang

dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. Pemerasan (extortion) yakni permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik.

r. Permasalahan dan Tantangan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan persepsi anti korupsi masih menemui beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko

   Penentuan target dan sasaran pengawasan masih berdasarkan jumlah objek pemeriksaan (obrik) dan amanat dari peraturan perundang-undangan saja, belum berdasarkan skala prioritas dari hasil analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik atau pengawasan belum berbasis risiko. Hal tersebut menyebabkan kinerja pengawasan belum efektif dan efisien artinya belum menyentuh kepada permasalahan-permasalahan yang strategis kepada perangkat daerah.

2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah

   Masih terdapatnya temuan berulang hasil pemeriksaan APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP belum terselenggara secara efektif. Tentu, hal tersebut memerlukan tindak lanjut SPIP yang efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum Optimal

   Reformasi Birokrasi dalam upaya pencapaian *good governance* dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan akan memberikan satu asumsi baru tentang pemerintahan yang efektif dan efisien. Dari efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah tersebut, diharapkan dapat meminimalisir korupsi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

s. Faktor Penunjang

Hal yang menjadi penunjang pelaksanaan IPAK ini secara umum adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap persepsi anti korupsi. Dengan meningkatnya tanggung-jawab, pengetahuan akan konsekuensi hukum, serta pendekatan kearifan lokal dan keagamaan menyebabkan adanya tren peningkatan persepsi anti korupsi meskipun tidak signifikan. Sosialisasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri ataupun sosialisasi dari berita dan media sosial telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi.

Hal lainnya yang menunjang meningkatnya persepsi anti korupsi adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi dari APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) dimana dengan pendampingan dari APIP dapat meningkatkan kualitas persepsi anti korupsi di Kabupaten Kediri. Selain demikian, hal tersebut juga sejalan dengan Grand Design SPBE yang menitikberatkan penggunaan teknologi dalam prosedural-prosedural lainnya.

t. Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran anti korupsi memerlukan banyak elemen. Terutama elemen-elemen lain yang berada di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Pada tahun 2022 ini, koordinasi dan sosialisasi terhadap *stakeholder* masihlah rendah. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang persepsi anti korupsi, serta meningkatnya sentimen negatif masyarakat akan kecenderungan praktik korupsi di Kabupaten Kediri/

Hal yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya layanan pengaduan terkait dengan pelanggaran administrasi yang ada. Padahal optimalisasi layanan pengaduan terkait dengan pengaduan administrasi menjadi hal yang penting dalam peningkatan nilai IPAK di Kabupaten Kediri.

u. Kesimpulan

Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Kabupaten Kediri diumumkan mendapatkan predikat B. Dimana predikat tersebut masih belum secara resmi diumumkan oleh Kementerian PANRB. Capaian tersebut masih sesuai dengan target yang tengah ditetapkan yakni 69,5

atau dalam predikat B. Selain hal tersebut, perbedaan persepsi mengenai makna SAKIP masih tinggi antar OPD.

Capaian IKM Pemerintah Kabupaten Kediri melalui 63 OPD yang ada didapati nilai yang cukup tinggi yakni 85,77 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 85. Hal tersebut akan senantiasa ditingkatkan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi titik lemah kepuasan masyarakat untuk ditingkatkan lagi kedepannya.

Secara umum pelaksanaan capaian Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK telah dicapai. Hal tersebut dapat tercapai karena intensifnya koordinasi, ketepatan waktu, ketepatan penyerapan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. Selain itu, meningkatnya kepatuhan prosedural data keuangan yang dilakukan oleh OPD menambah bertahannya capaian WTP di Kabupaten Kediri.

Upaya peningkatan IPAK di Kabupaten Kediri secara umum masih fluktuatif namun memiliki tren yang meningkat setiap waktunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Kediri pada tahun-tahun sebelumnya dengan tahun 2023 ini berkembang namun tidak signifikan. Tetapi demikian, capaian IPAK tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya yakni 3,49.

v. Rencana Tindak Lanjut

Upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri terus diupayakan dengan berbagai upaya tindak lanjut sebagai berikut;

1. Meningkatkan implementasi akuntabilitas dengan menggunakan Arsitektur Kinerja Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri
2. Mendampingi dan mengawal pengupayaan realisasi tindak lanjut peningkatan kinerja pelayanan dari masing-masing OPD
3. Lebih meningkatkan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan memanggil SKPD
4. Meningkatkan Sosialisasi tentang Persepsi Anti Korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat



Gambar 8 **:** *Bupati Kediri berdiskusi dengan Guru PPPK di Joglo Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri*

7. Sasaran Strategis 7

Meningkatkan Profesionalitas ASN

ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan motor penggerak pelaksanaan pemerintahan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam hal ini pegawai ASN juga bertugas dalam melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pemangku jabatan pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh banyak pakar pemerintahan dan administrasi negara, berhasil atau tidaknya perjalanan pemerintahan ditentukan '*man behind the gun*' jika dalam pemerintahan maka para ASN.

Maka diperlukan adanya pengukuran tingkat profesionalitas pada ASN itu sendiri. Pengukuran tersebut dilakukan melalui/diatur dalam Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019-Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini sejatinya ditetapkan dalam tujuan melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas ASN juga memiliki standar dasar dengan kriteria yang digunakan dalam mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Terdapat instrumen pengukuran indeks profesionalitas ASN seperti bahan, alat, dan cara yang akan digunakan dalam mendapatkan data indeks profesional berupa dimensi, identitas dari pegawai ASN, dan deskripsi indikator.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas organisasi, manajemen Sumber Daya Manusia menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebagai faktor utama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) profesionalitas dan integritas menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.

a. Upaya Perbaikan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Melakukan koordinasi terkait permasalahan update data pada aplikasi SAPK,	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Setiap OPD telah dilakukan
2	Meningkatkan kuantitas kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, serta jalur pengembangan kompetensi lainnya,	Mendorong OPD dan menyelenggarakan peningkatan pegawai yang mengikuti pelatihan kompetensi
3	Melaksanakan manajemen kinerja ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku,	Penyesuaian atas Peraturan yang Berlaku telah dilaksanakan lintas sektor
4	Meningkatkan disiplin ASN melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin	Disiplin ASN telah disosialisasikan, bimbingan teknis telah dilaksanakan
5	Meningkatkan kualifikasi pendidikan dengan mendorong ASN untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.	Pengumuman dan Pendampingan Pendidikan Lebih Tinggi kepada ASN telah dilakukan
6	Upaya peningkatan kualitas layanan Administrasi bidang kepegawaian	Rekomendasi SAKIP dan Rencana Tindak Lanjut IKM telah dilaksanakan

Data LKjIP Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan LKjIP BKD Kabupaten Kediri 2023

b. Permasalahan dan Tantangan

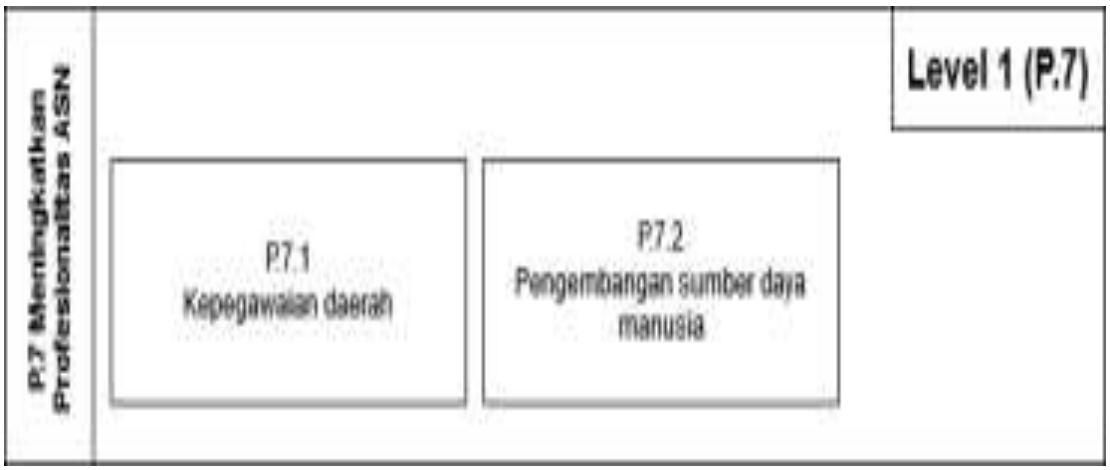
Namun begitu, permasalahan mengenai peningkatan profesionalitas ASN di Pemerintah Kabupaten Kediri masih cukup kompleks. Adapun hasil identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah akibat terjadinya pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan diklat, sosialisasi dan sejenisnya, serta kegiatan lainnya yang bersifat tatap muka tidak dapat dilakukan sesuai rencana.
2. Belum memiliki database terkait informasi kediklatan sehingga tidak dapat mengetahui secara akurat terkait kompetensi ASN.
3. Kurangnya pemahaman ASN terkait pentingnya peningkatan kompetensi ASN, sehingga saat kegiatan diklat, tidak mengikuti dengan baik, bahkan menolak saat diperintahkan untuk mengikuti diklat.
4. Kurangnya pemahaman pejabat struktural di beberapa SKPD terhadap pentingnya peningkatan kompetensi ASN, sehingga penerapan peningkatan kompetensi di masing-masing SKPD tidak merata.

c. Pelaksanaan Program Kegiatan

Guna mencapai sasaran dengan indikator target IP ASN yang dikehendaki, proses pencapaian tersebut ditinjau melalui peta proses bisnis yang telah disusun adalah sebagai berikut;

PERAGA 3.7.1 Peta Proses Bisnis Level 1 (P.7) Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja



d. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan kompleksnya permasalahan yang menyangkut profesionalisme ASN di Pemerintah Kabupaten Kediri. Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan rencana Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021 ini sebesar 60,00. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan rencana program dan sasaran dalam rangka meraih IP ASN sebesar 62,50 adalah sebagai berikut:

1) Kepegawaian Daerah

   Program Kepegawaian Daerah ini digunakan untuk memberikan penatausahaan administrasi kepegawaian menjadi lebih baik. Selain itu, kepegawaian juga mengatur kinerja dan disiplin pegawai serta hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan-urusan kepegawaian. Program Kepegawaian daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penatausahaan, administrasi, dan kesejahteraan pegawai.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan dapat memberikan peningkatan kompetensi kepada para ASN di Kabupaten Kediri. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan agar para pegawai mampu beradaptasi dan berkinerja dengan optimal. Dengan hal ini, diharapkan dapat mendongkrak kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri

e. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**

1	2	3	4	5 (4/3*100)	6	7	8 (7/6*100)
Meningkatnya Profesionalitas ASN	***Indeks Profesionalitas ASN***	**63**	**70.1**	**111.27%**	**4,480,219,410.00**	**3,926,773,146.00**	**87.65%**
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29.58	24.71	101.01%	1.427.034.390	1.142.295.645	80,05
Program engembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	33.42	45.47	156.64%	3.053.185.020	2.784.477.501	91,20

f. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Kepegawaian Daerah		30,3	81.55%	84	80.50	Tidak Efektif	Kurang Menunjang
Pengembangan Sumber Daya Manusia		40,7	111.72%	136	91.20	44.86%	Sangat Menunjang

Dari data diatas dapat dilihat bahwasanya Program yang berdampak signifikan atas pencapaian target adalah;

g. Faktor Penunjang

Pelaksanaan ASN Day, Webinar, serta kegiatan-kegiatan kediklatan lainnya melalui *Panjalu Jayati Corporate University* telah dilaksanakan secara masif selama tahun 2022 ini. Pelaksanaan Panji CorpU tersebut diupayakan dapat meningkatkan kuantitas IP ASN di Kabupaten Kediri. Melihat hal tersebut, *Panjalu Jayati Corporate University* dapat turut serta meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.

Penyelenggaraan 13 seri webinar, 1 seri talkshow dan 5 seri podcast selama tahun 2023 ; Pengiriman peserta pelatihan dan magang ; Penyelenggaraan Diklat PKP, PKA dan Pengiriman Peserta diklat PKN ke BPSDM Jawa Timur dan Pelaksanaan ASN DAY.

Selain hal tersebut, Sosialisasi Peraturan Disiplin ASN, Perbaikan Layanan Kepegawaian serta upaya dalam menyajikan 1 data kepegawaian yang andal dengan membangun Sistem Informasi Kepegawaian

h. Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya *update data* di MySAPK mengalami berbagai macam kendala. Seperti *update* data kepegawaian yang terkendala menyebabkan data kepegawaian yang ada di MySAPK tidak dapat berjalan optimal. Upaya untuk meningkatkan IP ASN masih memerlukan peningkatan disiplin ASN dengan mendorong pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin. Dimana hal tersebut masih belum dapat berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Untuk saat ini, Proses pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian masih pada tahap akan dilakukan uji coba user.

Belum terjalinnya koordinasi antara BKD yang memiliki tugas di bidang kediklatan dengan SKPD lain dalam hal pengiriman dan atau penyelenggaraan diklat mandiri sehingga data pegawai yang mengikuti diklat secara mandiri maupun dikirim oleh SKPD lain belum terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut ditambah dengan rendahnya motivasi mayoritas ASN untuk melanjutkan pendidikan.

i. Kesimpulan

Dengan penjelasan sebagaimana diatas, Capaian Indeks Profesionalisme ASN tahun 2023 mendapatkan nilai 70.1 dibawah target yang telah ditetapkan yakni 63 dengan catatan data tersebut masih sementara. Hal tersebut terjadi karena data yang resmi belum dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Capaian tersebut

ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 3.926.773.146,00 dari 4.480.219.410,00

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat dinamika pengupayaan peningkatan profesionalisme ASN, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Kepegawaian Daerah tengah mengupayakan pencapaian target IP ASN dengan langkah-langkah yang ditetapkan sebagai berikut; (silahkan disesuaikan ulang, ini data tahun 2022)

1. Melakukan koordinasi terkait permasalahan update data pada aplikasi SAPK,
2. Meningkatkan sosialisasi terkait peraturan disiplin ASN, kode etik ASN dan mempercepat proses uji coba user sehingga sistem dapat segera digunakan secara massal
3. Meningkatkan kuantitas kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, serta jalur pengembangan kompetensi lainnya,
4. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan/mengirim peserta pada kegiatan pengembangan kompetensi untuk memberikan tembusan ke BKD
5. Melaksanakan manajemen kinerja ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku,
6. Meningkatkan disiplin ASN melalui pengawasan, pencegahan, dan penegakan disiplin
7. Meningkatkan kualifikasi pendidikan dengan mendorong ASN untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Memberikan dorongan/motivasi kepada ASN untuk dapat melanjutkan pendidikannya



Gambar 9 ***:*** *Bupati Kediri dengan jajaran melakukan Focus Group Disscussion terkait digitalisasi administrasi pemerintahan*

8. Sasaran Strategis 8

Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik

SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang di mana memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan terpercaya. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.

Semakin tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan dan pelayanan yang lebih cepat, dapat diandalkan, dan terpercaya. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK dapat memberikan layanan

kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Merujuk Kementerian PANRB, SPBE memberikan peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Selain itu, pelaksanakan SPBE juga meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, penggunaan teknologi informasi menjadi hal yang penting. Kecepatan dan ketepatan menjadi marwah dalam pembangunan organisasi yang modern dewasa ini. Mengenai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mengupayakan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.

a. Upaya Perbaikan Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Intensifikasi Koordinasi dengan jaringan lintas sektor pengampu SPBE	Meningkatkan koordinasi, menyiapkan dan mengimplementasikan program kerja tim koordinasi SPBE dengan lebih baik
2	Memperbaiki dokumentasi Pelaksanaan SPBE sesuai dengan indikator evaluasi	Melengkapi dan mengusahakan dokumentasi Pelaksanaan SPBE sesuai dengan indikator evaluasi

3	Membuat dan Memperbaiki aplikasi-aplikasi yang masuk pada evaluasi SPBE sesuai dengan arsitektur SPBE	Menindaklanjuti hasil evaluasi dari aplikasi-aplikasi yang jadi indikator evaluasi SPBE serta menyusun dokumentasinya sesuai dengan kebutuhan

Data LKjIP Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan LKjIP Diskominfo Kabupaten Kediri 2022

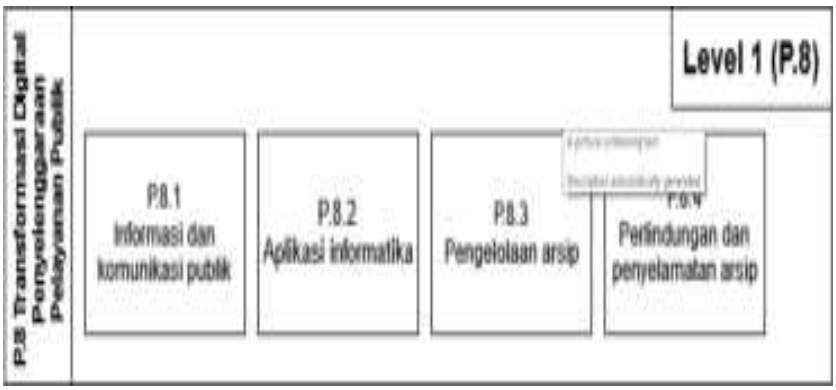
b. Permasalahan dan Tantangan

Upaya untuk melaksanakan transformasi digital masih cukuplah kompleks baik dari sektor SDM, *hardware,* maupun *software*nya. Adapun masalah yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Jumlah aplikasi penunjang e-Government yang berfungsi baik menurun.
2. Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui komunikasi publik masih rendah.
3. Masih ada OPD yang belum siap dalam penyelenggaraan e-Government. Baik dari segi kultur, *hardware, software,* SDM, dan hal-hal lain yang menunjang.
4. Statistik sektoral yang terintegrasi masih belum optimal dilaksanakan.
5. Banyaknya Serangan terhadap web serta aplikasi pemerintah (kedirikab.go.id)
6. Terbatasnya resource hardware untuk pengelolaan server dibandingkan kebutuhan aplikasi terhadap resource hardware yang dibutuhkan

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Guna mencapai sasaran Transformasi Digital Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikehendaki, peta proses bisnis yang telah disusun adalah sebagai berikut;



Dengan permasalahan yang ada diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan dalam RPJMD tahun 2022 ini dengan target Indeks SPBE sebesar 4,52. Angka tersebut akan ditunjang dengan strategi dan program sebagai berikut:

1) Informasi dan Komunikasi Publik

   Program ini mengupayakan agar terdapatnya informasi dan komunikasi publik yang berkualitas. Perkembangan kualitas ini digunakan agar masyarakat dapat mengetahui akan kinerja dan transparansi pemerintahan, sebagaimana amanat Reformasi Birokrasi. Mendorong PPID untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi Informasi, diharapkan melalui strategi ini nilai indeks PPID bisa semakin baik.

2) Aplikasi Informatika

   Program ini bertujuan agar tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kediri berjalan dengan baik dengan basis elektronifikasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi dalam hal ini SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Program ini dimaksudkan agar aplikasi informatika yang ada di Kabupaten Kediri dapat berjalan dengan holistik, objektif, integratif, dan structural.

Penyusunan Arsitektur dan Peta rencana SPBE agar pelaksanaan SPBE semakin terpadu pada aspek integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE

3) Pengelolaan Arsip

Menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut digunakan sebagai pengendalian arsip dinamis dan statis. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Sedangkan pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. Terciptanya penataan informasi arsip, Terciptanya penataan fisik arsip, dan Terciptanya sarana bantu temu kembali arsip.

4) Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Menjamin terwujudnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah perlindungan dan penyelamatan arsip dari kemungkinan kehilangan, kerusakan arsip yang disebabkan oleh faktor alam, biologi, fisika dan tindakan terorisme, spionase, sabotase, perang dan perbuatan vandalisme lainnya. Diharapkan dengan hal tersebut, terwujudnya perlindungan arsip, Terwujudnya pengamanan arsip, Terwujudnya penyelamatan arsip, dan Terwujudnya pemulihan arsip

Dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan target nilai SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) oleh Kementerian PAN & RB sebesar 4,04 dan juga nilai Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) dengan nilai D.

Dalam operasionalnya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami penurunan Indeks SPBE sebesar 0,51 dari target yang telah ditetapkan yakni 4.04. Secara umum, hal tersebut terjadi karena evaluasi SPBE tahun 2022 ini tidak diberi waktu wawancara kepada Pemerintah Kabupaten Kediri. Padahal, wawancara adalah faktor paling krusial dalam meningkatkan Indeks SPBE.

Dalam operasionalnya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Secara umum, semua kegiatan program tersebut telah berhasil dilaksanakan.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Transformasi Digital Penyelenggaran Pelayanan Publik	***Indeks SPBE***	**4,28**	**4,27**	**99,77%**	**19.832.254.017**	**18.910.492.341**	**95%**
Meningkatnya kualitas	**Indeks Kategori PPID**	**62**	**84,53**	**141%**	**19.832.254.017**	**18.910.492.341**	**95%**

pelayanan informasi publik							
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	100%	100%	100%	6.681.695.277	6.445.851.385	96%
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	9.780.841.600	9.363.854.332	96%
Meningkatnya tertib administrasi kearsipan di kabupaten kediri	**Persentase OPD yang Tertib Arsip**	**62.86%**	**68.06%**	**108.27%**			
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat tertib pengelolaan arsip organisasi perangkat	62.86%	68.06%	108.27%	255.696.700	248.372.659	94.14%
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Autentisitas Arsip Statis yang Ditetapkan	100%	100%	100%	24.093.400	23.178.100	96.20%

e. Analisa **Efisiensi**, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien

Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	100%	100%	100%	100%	96%	4%	Menunjang
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	100%	100%	100%	100%	96%	4%	Menunjang
Program Pengelolaan Arsip	68.06%	62.86%	108.27%	108.27%	94.14%	14.13%	Sangat Menunjang
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100%	100%	100%	100%	96.20%	3.8%	Menunjang

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ **Indikator**	**Indeks SPBE**	**Indeks PPID**	**Indeks Pengelolaan Arsip**
Kabupaten Kediri	4,27	84,53	A (Memuaskan)
Kota Kediri	3,65	24,25	B (Baik)
Kabupaten Tulungagung	3,09	10,8	A (Memuaskan)
Kabupaten Malang	3,36	15,21	BB (Sangat Baik)
Provinsi Jawa Timur	3,62	No Data	AA (Sangat Memuaskan)
Agregat Nasional	No Data	No Data	AA (Sangat Memuaskan)

Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri meningkat tajam dan unggul dibandingkan capaian Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa Kabupaten/Kota. Pencapaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan dukungan Bupati Kediri untuk pengembangan Kabupaten Kediri yang digital.

Capaian Indeks Pengelolaan Arsip Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada satu tingkat dibawah capaian Indeks Pengelolaan Arsip Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat (ANRI). Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Kendati demikian, capaian Indeks

Pengelolaan Arsip Pemerintah Kabupaten Kediri berada di peringkat 55 dari 514 Kab/Kota se Indonesia). Kendati peringkat Indeks Pengelolaan Arsip Pemerintah Kabupaten Kediri lebih rendah daripada tahun sebelumnya yaitu dari 34 menjadi 55, nilai Indeks Pengelolaan Arsip mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 79.44 menjadi 81.64.

g. Faktor Penunjang

Secara umum, pelaksanaan kegiatan mengenai komunikasi dan informatika di Kabupaten Kediri telah dilaksanakan dengan baik. Hampir keseluruhan rencana yang telah direncanakan sudah dilaksanakan. Hal tersebut memengaruhi capaian serapan anggaran serta capaian kinerja agar dapat berjalan secara optimal.

h. Faktor Penghambat

Perkembangan evaluasi SPBE bertambah ketat setiap tahunnya. Hal tersebut terbukti dengan menurunnya nilai Indeks SPBE di banyak instansi. Hal tersebut terjadi karena proses evaluasi yang berbeda dengan proses evaluasi pada tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya terdapat sesi wawancara, pada tahun 2022 ini sesi wawancara tersebut tidak disediakan lagi. Padahal sesi wawancara menunjang nilai yang cukup besar terutama dengan membuktikan data-data dukung yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.

Format evaluasi Indeks SPBE tahun 2022 ini hanya mengirimkan dokumen data dukung. Hal tersebut masih terkendala karena sebagian dokumen pendukung yang berupa kebijakan seperti Perbup/SK serta kebijakan-kebijakan lainnya masih dalam proses penyusunan. Dengan demikian, data dukung yang masih dalam tahap

penyusunan tersebut belum dapat dicantumkan dalam evaluasi Indeks SPBE tahun 2022.

Evaluasi Hambatan-hambatan yang terjadi dalam peningkatan Indeks PPID yaitu:

1. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
2. Proses pengenalan produk layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri perlu ditingkatkan. Pemanfaatan Media sosial sangat diharapkan bisa mempercepat arus informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengerjaan promosi kepada masyarakat yang lebih serius.

Perkembangan Pengelolaan Arsip bertambah ketat setiap tahunnya. Hal tersebut terbukti dengan naik turunnya peringkat Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional tiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena proses evaluasi yang berbeda dengan proses evaluasi pada tahun sebelumnya. Instrumen penilaian selalu berubah-ubah setiap tahun dan selalu ada penambahan aspek penilaian baru menjadikan faktor utama dari gejolak penilaian tiap tahunnya.

Penilaian Pengelolaan Arsip ini disertai dengan mengirimkan dokumen data dukung. Hal tersebut masih terkendala karena sebagian dokumen pendukung yang berupa kebijakan seperti Perda/Perbup/SK serta kebijakan-kebijakan lainnya masih dalam proses penyusunan. Dengan demikian, data dukung yang masih dalam tahap penyusunan tersebut belum dapat dicantumkan dalam penilaian Indeks Pengelolaan

Arsip. Selain itu, Indeks Penilaian Arsip juga terakumulasi dari penilaian arsip internal dan eksternal dengan perbandingan nilai 40% dan 60%.Nilai penilaian internal didapat dari nilai SKPD tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari 72 objek penilaian, 23 objek masih mendapatkan nilai tertib arsip di bawah rata-rata.

i. Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Indeks SPBE secara umum terkendala dalam masalah-masalah pemenuhan data dukung administratif. Kendala tersebut menyebabkan penurunan Indeks SPBE sebesar 0,51 menjadi 2,61. Hal tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran sebesar 22.427.677.662,00 atau 86,41% dari total alokasi anggaran.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Indeks Pengelolaan Arsip secara umum terkendala dalam masalah-masalah pemenuhan data dukung administratif dan belum optimalnya ketertiban arsip pada internal SKPD.

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat dari kompleksnya penurunan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kediri, beberapa rencana tindak lanjut telah direncanakan. Upaya-upaya tindak lanjut tersebut adalah;

1. Melanjutkan implementasi Smart City dan SPBE sesuai dengan Peta Arsitektur SPBE
2. Melanjutkan Koordinasi dan pelaksanaan Program Kerja SPBE 2024 dan melaksanakan program kerja Tim sesuai dengan pengembangan tugas

3. Smart City untuk dilanjutkan dengan implementasi teknis Quick Wins dan Penyusunan Masterplan
4. Meningkatkan peningkatan sosialisasi dan menangani sengketa informasi publik terkait dengan PPID

Melihat dari kompleksnya Indeks Penilaian Arsip Pemerintah Kabupaten Kediri, beberapa rencana tindak lanjut telah direncanakan. Upaya-upaya tindak lanjut tersebut adalah;

1. Pemenuhan dokumen data dukung seperti Perda/Perbup/SK serta kebijakan-kebijakan lainnya
2. Pembinaan kearsipan pada internal SKPD
3. Pendampingan SDM kearsipan SKPD



Gambar 10 : Bupati Kediri dalam kegiatan cek progres PSN

9. Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Investasi di Daerah

Sebagian ahli ekonomi memandang investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa.

Menurut kajian dari Kementerian Sekretariat Negara, peningkatan investasi diyakini memberikan andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi

memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun.

Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi, ditengah keterbatasan APBD dan APBN menjadi pilihan strategis yang tepat dalam membalikkan perlambatan ekonomi. Melalui optimalisasi dukungan investasi dalam mempercepat berbagai program pembangunan ekonomi produktif. Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengantarkan Indonesia menjadi Negara Maju

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan potensi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan realisasi investasi yang baik. Nilai realisasi investasi di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 direncanakan akan tumbuh sebesar 5%. Hal tersebut ditinjau dari ekspektasi pertumbuhan di sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Peningkatan investasi di Kabupaten Kediri diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

a. Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Dengan adanya Proyek Strategis Nasional, target akhir RPJMD telah tercapai pada tahun 2022. Sehingga diperlukan adanya evaluasi/ perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026;	Telah dilakukan perhitungan dua lajur, yakni model pelaporan perhitungan PSN dan perhitungan realisasi Non-PSN. evaluasi perencanaan melalui perubahan target tahunan dengan mengacu pada proyeksi realisasi investasi tahunan non-PSN. Maka monitoring dan evaluasi akan dititik-beratkan pada investasi non-PSN, sebagaimana kewenangan Kabupaten/Kota.
2	Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP)	Pembangunan MPP sudah mencapai tahapan perencanaan teknis dengan DED (Detail Engineering Design) sudah ditetapkan dan dilanjutkan oleh Dinas

		Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3	Penyusunan draft Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal yang diperkirakan selesai tahun 2023, sebagai upaya memberikan kemudahan investasi di daerah	Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal telah disusun bersama dengan DPRD, untuk saat ini sedang diproses oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan Kajian Potensi dan Peluang Investasi;	Kajian Potensi dan Investasi telah disusun pada tahun 2023, untuk selanjutnya disusun kajian IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) di Kabupaten Kediri.
5	Perluasan investasi dengan pengembangan pelaku usaha lokal;	Upaya pengembangan pelaku usaha lokal telah berjalan dengan baik, terutama kerjasama perdagangan antara UMKM dan usaha besar oleh Dinas Perdagangan.

b. Permasalahan dan Tantangan

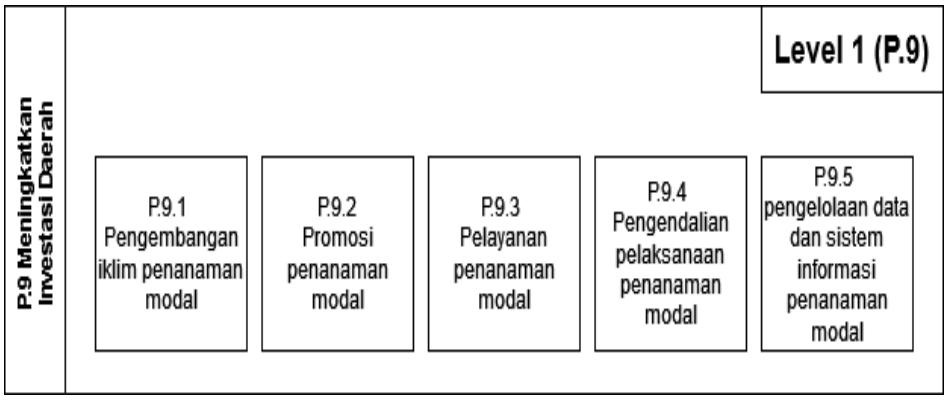
Dalam perkembangannya, investasi di Pemerintah Kabupaten Kediri bergerak dengan isu-isu utama dalam penanaman modal. Hal tersebut telah diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terbatasnya informasi tentang calon lahan investasi,
2. Sistem informasi penanaman modal yang belum terintegrasi
3. Proses persyaratan dan alur perizinan yang perlu disederhanakan
4. Perlunya meningkatkan promosi investasi
5. Optimalisasi pembinaan, pengawasan, pengendalian penanaman modal
6. Serta perlunya integrasi antara Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam sistem perizinan dan penanaman modal.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upayanya meningkatkan kinerja di bidang investasi, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan strategi-strategi pencapaian tujuan. Strategi yang digunakan yakni pemberian fasilitas/intensif di bidang penanaman modal, pembuatan peta potensi investasi, penyelenggaraan dan promosi penanaman modal, peningkatan kualitas layanan perizinan, pengendalian dan *engaging* perusahaan, serta hal-hal lain yang menunjang peningkatan investasi daerah.

Dalam Peta Proses Bisnis, pencapaian kinerja meningkatnya investasi daerah dapat digambarkan melalui peraga sebagai berikut;



Dalam upaya mencapai target yang telah ditentukan tersebut, perkembangan kinerja diturunkan dengan Program-program sebagai berikut;

1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal

   Analisis Potensi Investasi: Bidang ini melakukan analisis menyeluruh terkait potensi investasi di suatu wilayah atau sektor ekonomi tertentu. i. Penyusunan Rencana Strategis: Setelah potensi investasi teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana strategis untuk mengarahkan pengembangan iklim

penanaman modal. Studi Kelayakan: Bidang ini melakukan studi kelayakan untuk mengevaluasi potensi investasi. Perbaikan Regulasi dan Kebijakan: Regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi perlu dievaluasi dan diperbaharui secara teratur.

Hal diatas bertujuan untuk memastikan adanya kerangka hukum yang jelas, transparan, dan ramah bagi investor. Perbaikan regulasi dan kebijakan dapat meliputi penyederhanaan prosedur perizinan, insentif fiskal, perlindungan hukum, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

2) Promosi Penanaman Modal

Analisis Sektor Investasi; mengidentifikasi sektor-sektor yang menarik bagi investor berdasarkan potensi, keunggulan komparatif, dan kebijakan pemerintah. Untuk itu hal-hal yang dievaluasi adalah faktor faktor seperti ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif lainnya yang mempengaruhi daya tarik investasi.

Perencanaan Strategi Promosi; Merumuskan rencana strategis untuk mempromosikan potensi investasi provinsi: Bidang ini merencanakan strategi promosi yang mencakup tujuan jangka panjang dan pendek, target pasar, serta segmen investor yang ingin mereka jangkau, dimana pihak Pemerintah Kabupaten Kediri dapat memfasilitasi terkait kebutuhan data untuk potensi komoditas, tenaga kerja, kondusifitas, dan pasar.

3) Pelayanan Penanaman Modal

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka program ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan dan diimplementasikan kepada masyarakat menjadi lebih mudah baik dalam segi aksesibilitas maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pelayanan penanaman modal ini dilakukan agar pelaku usaha dapat merasa nyaman dalam mengatur jalannya badan usaha tersebut.

4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelaksanan penanaman modal perlu dikendalikan agar hal tersebut sesuai dengan perencanaan terutama memiliki dampak ekonomi langsung. Selain itu pula diharapkan penanaman modal yang dilakukan tidak mengganggu ekonomi, sosial, lingkungan masyarakat yang ada, bahkan berkontribusi terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ada di sekitar lokasi usaha.

5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Data yang terhimpun baik dalam OSS-RBA (Risk Based Assessment) ataupun dalam data-data Potensi Investasi Daerah dengan menggunakan aplikasi Sidapotik perlu dikelola dengan baik. Diharapkan dengan pengelolaan yang baik tersebut dapat meningkatkan minat investasi daerah di Kabupaten Kediri.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Meningkatnya investasi di daerah	***Pertumbuhan Investasi Daerah***	6%	26.16% (PSN: 16,37 ; Non PSN: 9,79%)	436.00%	1,457,254,756.00	1,399,597,278.00	96.04%
Sasaran OPD DPMPTSP: **Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah**	**Nilai realisasi investasi di daerah (Juta Rupiah)**	736,059.82	3,204,083.37	435.30	1,457,254,756.00	1,399,597,278.00	96.04%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayan perizinan	79.65	84.25	105.78			
	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	1 MoU	1 MoU	100			
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang diberikan insentif	25%	25%	100	254,203,056.00	251,652,056.00	99.00
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	100%	100	178,452,200.00	162,537,350.00	91.08
PROGRAM PELAYANAN	Prosentase pelayanan	100%	100%	100	504,413,200	477,249,635	94.61

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
PENANAMAN MODAL	perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu				.00	.00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	82%	101.76%	124.10	398,789,200.00	387,216,137.00	97.10
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	100%	100	121,397,100.00	120,942,100.00	99.63

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	**Keterangan**
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien

Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Meningkatnya investasi di daerah	26.16% (PSN: 16,37 ; Non PSN: 9,79%)	9%	240.00%				
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	25%	25%	100.00%	100	99.00	1.00	Menunjang
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	100%	100.00%	100	91.08	8.92	Menunjang
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100%	100%	100.00%	100	94.61	5.39	Menunjang
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	101.76%	85%	119.72%	124.10	97.10	27.00	Sangat Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100%	100%	100.00%	100	99.63	0.37	Menunjang

f. Benchmarking/Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/**Indikator**	**Persentase Pertumbuhan Investasi**
Kabupaten Kediri	26.16%
Provinsi Jawa Timur	42,1% (Data 2022)
Agregat Nasional	30,3% (Data 2022)

Capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada di atas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Namun demikian data perbandingan Pertumbuhan Investasi di level Provinsi ataupun Level Pusat tidak terlepas dari akumulasi Kabupaten Kediri. Tidak dapat dipungkiri pula, perkembangan investasi di Kabupaten Kediri yang didominasi oleh PSN (Proyek Strategis Nasional) yang bersifat Padat Karya dan Padat Modal juga mampu menunjang realisasi di level Provinsi dan Nasional. Namun demikian secara agregat,

pertumbuhan investasi di Kabupaten Kediri lebih baik dibandingkan daerah-daerah lain baik untuk capaian investasi PSN (Proyek Strategis Nasional) ataupun Non-PSN.

g. Faktor Penunjang

Secara umum, pelaksanaan kegiatan mengenai investasi di Kabupaten Kediri telah dilaksanakan dengan baik. Hampir keseluruhan rencana yang telah direncanakan sudah dilaksanakan. Hal tersebut memengaruhi capaian serapan anggaran serta capaian kinerja agar dapat berjalan secara optimal. Terdapatnya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara Dhoho Kediri menyumbang realisasi investasi yang tinggi di Kabupaten Kediri.

Selain adanya pertumbuhan dari sektor pembangunan bandara atau PSN, terdapat pelaporan LKPM sektor Perumahan yang pada tahun-tahun sebelumnya belum melaksanakan pelaporan, baru melaksanakan pelaporan pada tahun 2023. Jadi, pelaporan sektor perumahan menumpuk pada tahun 2023. Menyebabkan kinerja penanaman modal melonjak tajam.

Dengan berbagai macam prestasi yang didapatkan seperti WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan Natamukti Awards, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya untuk meningkatkan kinerja penanaman modal dan perizinan.

h. Faktor Penghambat

Hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penanaman modal di Kabupaten Kediri adalah belum adanya kawasan Industri di wilayah Kabupaten Kediri, Belum adanya kajian tentang Investment Project Ready to Offer (IPRO). Karena dengan kawasan industri dapat memudahkan proses perizinan tata ruang dan lingkungan bagi badan usaha yang ingin mendirikan perusahaan di Kabupaten Kediri.

i. Kesimpulan

Dengan capaian kinerja yang tinggi sebesar 28,48%, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah bekerja dengan baik. Apalagi ditambah dengan capaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2022. Melihat hal tersebut, perizinan dan layanan investasi akan senantiasa ditingkatkan.

Kedepannya, pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Kediri akan mengedepankan pada isu-isu sektor primer (pertanian, produksi aneka industri, dsb.), sektor sekunder (perdagangan dan jasa). Hal tersebut sebagai langkah antisipasi berakhirnya pembangunan Bandara di Kecamatan Tarokan yang dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2024.

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan investasi di Kabupaten Kediri, maka tindak lanjut yang akan direncanakan adalah sebagai berikut;

1. Menyusun Kajian Potensi Penanaman Modal di Kabupaten Kediri
2. Menyusun IPRO (Investment Project Ready to Offer) di Kabupaten Kediri kepada para badan usaha atau investor.



Gambar 11 : Bupati Kediri mengunjungi Pasar Buah Mangga Podang di Kecamatan Banyakan

10. Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Merujuk penjelasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian daya beli masyarakat adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, struktur industri hulu ke hilir mulai dari rantai pasok, SDM, penelitian dan pengembangan, hingga akses pasar baik pasar tradisional maupun pasar non tradisional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelemahan daya beli masyarakat pada masa pandemic covid-19 secara umum menyebabkan penurunan ekonomi. Hal tersebut terjadi akibat turunnya kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi. Penyebab dari

menurunnya kemampuan daya beli adalah tingginya angka PHK dan menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi fluktuasi daya beli masyarakat sebagai berikut;

1. Perubahan Harga
2. Inflasi
3. Pendapatan Riil Masyarakat
4. Nilai Tukar Mata Uang
5. Pajak
6. Lapangan Pekerjaan
7. Ketersediaan Kredit
8. Suku Bunga

Daya beli masyarakat secara umum dapat ditinjau sebagai faktor kunci dalam perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Secara langsung daya beli masyarakat memiliki korelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat dapat diasumsikan pula semakin sejahtera masyarakat dengan tetap memperhatikan tingkat inflasi dan satuan komoditas. Semakin tinggi indeks pengeluaran masyarakat, semakin masyarakat dapat mengonsumsi apa yang mereka butuhkan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan sektor perdagangan adalah dengan acuan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan terkait dengan meningkatnya sektor perdagangan dan meningkatnya pertumbuhan Industri

Kecil Mikro (IKM) dengan pendekatan strategis yakni kestabilan harga dan jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dalam pasar ekonomi di Kabupaten Kediri.

a. Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Pemberian Stimulus Modal Usaha untuk Usaha Mikro sebagai Upaya untuk menangani dampak Inflasi terhadap Usaha Mikro	Pemberian hibah uang untuk pembelian alat dan bahan penunjang produksi bagi kelompok UMKM (24 kelompok UMKM) dan bantuan untuk modal usaha koperasi (55 koperasi) untuk peningkatan kapasitas usaha
2	Pemberian Pendampingan, Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan untuk Pelaku Usaha Mikro	Sosialisasi dan fasilitasi perizinan PIRT untuk 90 UMKM produk makanan, sosialisasi perizinan BPOM (30 UMKM produk minuman), sertifikasi merek untuk 100 produk UMKM dan 23 sertifikasi BPOM untuk produk minuman
3	Pelaksanaan Kurasi Produk untuk usaha mikro untuk mengidentifikasi kebutuhan utama agar produk usaha mikro dapat terstandarisasi	Pendampingan usaha mikro melalui standarisasi dengan kegiatan kurasi 30 produk makanan, minuman dan craft
4	Pemberian bimbingan teknis tentang diversifikasi usaha koperasi	FGD pengembangan model ritel di koperasi sektor riil untuk 20 koperasi serta bimtek tata kelola koperasi mandiri bagi koperasi ritel untuk 60 pengurus koperasi ritel
5	Pemberian pelatihan untuk SDM koperasi agar dapat lebih dekat teknologi	Bimbingan teknis tata kelola modernisasi koperasi bagi 40 pengurus koperasi UKM serta 40 pengurus koperasi rintisan koperasi modern
6	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Ekspor Impor di Wilayah Kabupaten kediri	Monitoring pelaksanaan export-import dilaksanakan
7	Melaksanakan Fasilitasi dan Pelatihan Ekspor Impor	Pelatihan dan Fasilitasi Ekspor Impor dilaksanakan dengan pemberian informasi

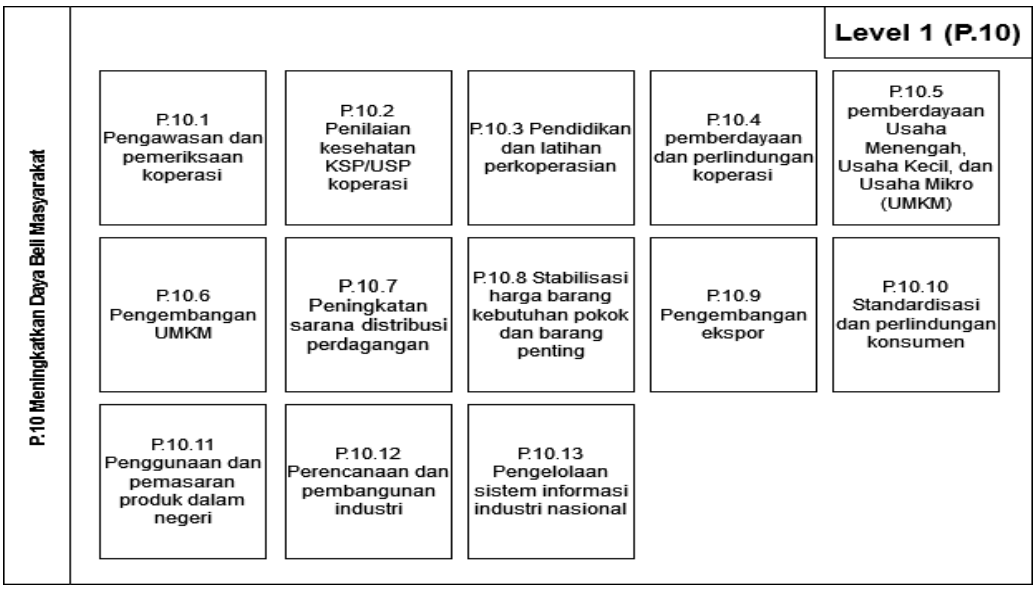
Sumber LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 dan LKjIP Dinas Perdagangan Tahun 2022

b. Permasalahan dan Tantangan

1. Menurunnya aktivitas usaha mikro akibat dampak inflasi sehingga berdampak pada pendapatan dan permodalan usaha
2. Kurangnya pemahaman legalitas usaha sebagai upaya untuk memberikan identitas dan perlindungan terhadap produk usaha mikro
3. Perlunya peningkatan kualitas/standar produk usaha mikro agar berdaya saing dan berdaya jual
4. Kurangnya diversifikasi terhadap usaha koperasi
5. Kurangnya SDM koperasi yang terlatih dalam penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas dan kinerja koperasi.
6. Penurunan nilai ekspor dikarenakan turunnya permintaan pasar luar negeri.
7. Belum mampunya produk-produk daerah untuk menembus pasar luar negeri.
8. Pengetahuan Pelaku Usaha terkait Ekspor Impor masih rendah.
9. Munculnya barang-barang impor dengan harga murah dan meningkatnya supermarket dan minimarket modern.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upayanya meningkatkan kinerja di bidang investasi, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Mikro menetapkan strategi-strategi pencapaian tujuan. Dalam Peta Proses Bisnis, pencapaian kinerja meningkatnya investasi daerah dapat digambarkan melalui peraga sebagai berikut;



1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

bertujuan untuk melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten Kediri sehingga pelaksanaan kegiatan koperasi di wilayah Kabupaten Kediri sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Bertujuan untuk melaksanakan penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi KSP/USP dalam Kewenangan Kabupaten Kediri sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 sehingga dapat diketahui tingkat kesehatan usaha simpan pinjam dari koperasi yang di nilai

3) Pendidikan dan Latihan Perkooperasian

Bertujuan untuk meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dalam wilayah kewenangan

Kabupaten Kediri sehingga dapat meningkatkan kinerja koperasi dalam berperan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya

4) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

   Bertujuan untuk meningkatkan produktivitas koperasi, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi di Kabupaten Kediri sehingga diharapkan koperasi dapat dengan mandiri dan berkinerja baik dalam melaksanakan usaha koperasinya

5) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

   Upaya agar Usaha Mikro dapat naik kelas terutama dapat meningkatkan omzet UMKM tentu memerlukan pemberdayaan pada sektor usaha mikro. Melalui pemberdayaan usaha mikro dengan bantuan modal dan peralatan produksi dengan hibah. Diharapkan dapat membantu meningkatkan produksi dan ekspansi pasar.

6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

   Bertujuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan serta penguatan kelembagaan usaha mikro sehingga diharapkan usaha mikro dapat menjadi usaha mandiri yang berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja

7) Pengembangan UMKM

   Bertujuan untuk melakukan pengembangan usaha mikro melalui fasilitasi pemasaran sehingga diharapkan usaha mikro dapat meningkatkan omset dan

pendapatannya sehingga usahanya terus dapat berjalan dan diharapkan dapat naik kelas menjadi usaha kecil

8) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan, agar perdagangan dalam wilayah Kabupaten Kediri menjadi lebih baik, utamanya pelayanan pasar. Diharapkan peningkatan sarana tersebut dapat meningkatkan kinerja.

9) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Harga komoditas penting yang dinamis dan terkadang sulit diprediksi, dimaksudkan agar program tersebut dapat menstabilkan harga. Diharapkan dengan kestabilan harga tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor perekonomian umum.

10) Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pasar ekspor yang masih terbuka lebar. Perkembangan ini dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten Kediri tidak terpaku pada pasar domestik, namun juga pasar internasional.

11) Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini bertujuan agar pihak produsen dapat menjadi mitra yang baik dalam melakukan produksi agar para konsumen dapat menerima layanan produksi sesuai dengan standar. Standarisasi ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman saat melakukan kegiatan ekonomi konsumsi.

12) Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Program ini bertujuan agar produksi dalam negeri dapat menemukan pasar dalam negeri yang tepat dan akurat. Perkembangan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan peran ekonomi masyarakat terutama usaha baru.

13) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dalam upaya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja melalui sektor industri padat modal, penentuan perencanaan dan pembangunan industri merupakan hal yang tepat untuk meningkatkan industri terutama dalam hal izin bangunan, izin kondusifitas, dan izin lingkungan.

14) Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sistem informasi industri nasional diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang ada dalam industri nasional. Diharapkan dengan hal tersebut dapat menjelaskan kondisi *real* di lapangan dan dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	***Indeks Pengeluaran***	**1,145,155**	**996,000**	**86.98%**	**58,305,102,237.00**	**55,660,919,666.00**	**95.46%**
Sasaran OPD Dinas Koperasi dan Usaha	**Persentase Koperasi Aktif**	**61.58%**	**61.67%**	**100.15%**	**2.196.157.128**	**2.153.922.640**	**98.08%**

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Mikro: **Meningkatnya Kelembagaan, Usaha, dan Kinerja Koperasi**							
Meningkatnya Jumlah dan Volume Usaha Mikro	**Pertumbuhan Usaha Mikro**	**5.93%**	**9.99%**	**168.47%**	**4.447.089.900**	**4.212.961.836**	**94.74%**
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	11.53%	20.67%	179.27%	196.161.750	186.446.474	95.05%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	1.7%	14.89%	875.88%	51.557.860	46.759.260	90.69%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	0.18%	0.37%	205.56%	502.918.208	494.317.508	98.29%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	20.25%	28.22%	139.36%	1.445.519.310	1.426.399.398	98.68%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	25.22%	24.96%	99.17%	2.694.383.100	2.563.596.246	95.15%

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	7.95%	9.43%	118.62%	1.752.706.800	1.649.365.590	94.10%
Sasaran OPD Dinas Perdagangan: **Meningkatkan sektor industri**	**Persentase pertumbuhan IKM**	1.94%	4.74%	244.33%	2,280,908,450.00	1,761,856,074.00	77.24%
Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan	**Persentase pertumbuhan ekspor**	2.07%	1.75%	85%	25,102,650,708.00	24,307,510,485.00	96.83%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50%	55%	110%	14,087,371,848.00	13,878,993,051.00	98.52%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90%	90%	100%	371,004,000.00	345,116,133.00	93.02%
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70%	70%	100%	503,466,025.00	495,311,499.00	98.38%
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90%	69.78%	78%	217,298,700.00	209,467,398.00	96.40%
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran	70%	100%	143%	175,000,000.00	167,040,000.00	95.45%

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Negeri	Produk Dalam Negeri						
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15%	79%	527%	2,255,739,550.00	1,738,428,174.00	77.07%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	15%	79%	527%	25,168,900.00	23,427,900.00	93.08%

e. Analisa **Efisiensi**, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Meningkatkan Daya Beli Masyarakat							
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	20.67%	17.36%	119%	179.27%	95.05%	84.22%	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	14.89%	1.86%	801%	875.88%	90.69%	785.19 %	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0.37%	0.24%	154%	205.56%	98.29%	107.27 %	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	28.22%	37.55%	75%	139.36%	98.68%	40.68%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	24.96%	28.48%	98.97%	99.17%	95.15%	4.02%	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	9.43%	10.08%	94%	118.62%	94.10%	24.52%	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	55%	50%	110%	110%	98.52%	11%	

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	90%	90%	100%	100%	93.02%	7%	
Program Pengembangan Ekspor	70%	70%	100%	100%	98.38%	2%	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	69.78%	90%	78%	78%	96.40%	-19%	
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	70%	143%	143%	95.45%	47%	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	79%	20%	395%	527%	77.07%	450%	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	79%	20%	395%	527%	93.08%	434%	

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ **Indikator**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Indeks Pengeluaran**
Kabupaten Kediri		996.000
Kota Kediri		1.106.333

Provinsi Jawa Timur		1.155.833
Agregat Nasional		1.327.782* (Data 2022)

Capaian Persentase Indeks Pengeluaran Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Indeks Pengeluaran Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada di atas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. (Narasi silahkan diganti atau disesuaikan)

g. Faktor Penunjang

Operasi pasar murah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022 sebanyak 7 kali, memberikan satu kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses barang-barang kebutuhan pokok. Pemberian bansos kepada pedagang yang terdampak kebakaran pasar di Pasar Ngadiluwih serta pelaksanaan operasi pasar dan pameran produk unggulan daerah secara langsung memberikan dampak pengendalian harga dan peningkatan kesejahteraan secara langsung.

Selain itu, analisa faktor penunjang telah diidentifikasikan sebagai berikut;

1. adanya kegiatan self declare sebagai pendorong koperasi untuk melaksanakan RAT
2. adanya kegiatan pelatihan wirausaha baru serta identifikasi usaha mikro baru melalui kegiatan sinkronisasi data dengan lintas OPD terkait
3. adanya kegiatan pendampingan koperasi dengan pembagian wilayah kerja yang sudah berjalan dengan baik

4. pelaksanaan RAT koperasi sudah di lengkapi dengan data laporan keuangan yang memadai
5. adanya koperasi baru serta pemberian materi yang sesuai dengan kebutuhan SDM koperasi yang telah diidentifikasi melalui kegiatan pengawasan, penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi
6. adanya sinergitas antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan gerakan koperasi di Kabupaten Kediri
7. adanya rumah produksi di gerai rumah inkubasi pare
8. adanya dukungan lintas SKPD dalam pemasaran produk usaha mikro melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain.

h. Faktor Penghambat

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemulihan pasca Covid-19 di Kabupaten Kediri masih menjadi salah satu penghambat daya beli masyarakat. Upaya penghematan yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan konsumsi yang mereka gunakan terbatas pada bahan-bahan pokok. Hal yang menjadi perhatian pula adalah pengeluaran masyarakat di sektor-sektor yang memang masih dirasa berat bagi masyarakat untuk mengonsumsi.

Tingkat ekspor yang bergantung dengan kondisi pasar global, dengan fluktuasi yang signifikan. Sehingga nilai persentase ekspor sulit untuk diprediksi dengan tingginya angka impor di setiap sektor perdagangan. Peningkatan Industri Kecil Menengah masih terkendala masalah produksi, dimana bahan baku terbatas dan fluktuasi harga input yang tinggi, menyebabkan harga *output* meningkat. Di Lain sisi, pelaku IKM juga enggan

mengurus perizinan industri, meskipun tingginya kemudahan izin usaha melalui OSS (*One Single Submission*).

Selain hal diatas, terdapat beberapa hal yang menghambat sebagaimana berikut;

1. kurangnya kesadaran koperasi untuk melaporkan pelaksanaan RAT kepada dinas
2. belum ada nya format satu data dari lintas OPD terkait
3. kurangnya kemampuan pengawas koperasi untuk melakukan pengawasan koperasi secara mandiri
4. kurangnya SDM terlatih dalam penilaian kesehatan koperasi
5. kurangnya kesadaran dan kemampuan SDM koperasi terkait peningkatan kinerja koperasi
6. belum terjalinnya kemitraan usaha antar koperasi
7. masih kurangnya kemampuan SDM usaha mikro dalam melakukan pengelolaan usaha secara mandiri, akuntabel dan efektif
8. kurangnya kemandirian usaha mikro dalam meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing

i. Kesimpulan

Capaian Indeks Pengeluaran masyarakat Kabupaten Kediri secara simultan tumbuh dalam tiga tahun terakhir. Sebagai bagian dari pemulihan pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Kediri, capaian Indeks Pengeluaran sebesar 996000 meningkat tidak terlalu signifikan dari kemampuan daya beli tahun sebelumnya yakni 963.850. Hal tersebut masih berada dibawah target yakni 1.145.155. Pendekatan-pendekatan baru dalam upaya meningkatkan Indeks Pengeluaran di

Kabupaten Kediri akan diupayakan dengan baik di tahun-tahun berikutnya dalam RPJMD tahun 2021-2026 ini.

Kedepannya, pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Kediri akan mengedepankan pada isu-isu sektor primer (pertanian, produksi aneka industri, dsb.), sektor sekunder (perdagangan dan jasa). Hal tersebut sebagai langkah antisipasi berakhirnya pembangunan Bandara di Kecamatan Tarokan yang dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2024.

j. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti upaya pencapaian sasaran meningkatnya daya beli masyarakat bahwasanya terdapat upaya fiskal dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjaga kestabilan harga agar komoditas menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun demikian, upaya tersebut perlu untuk ditingkatkan dengan perkembangan yang lainnya.

Dalam urusan perdagangan, upaya untuk meningkatkan kinerja perdagangan dapat mengupayakan perbaikan dan renovasi pasar tradisional agar menjadi bersih dan sehat. Diharapkan dengan renovasi tersebut dapat menarik minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Selain demikian, terdapat beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut;

1. mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT melalui online dan memanfaatkan aplikasi sappakop sebagai media pelaporan RAT

2. pemanfaatan aplikasi data SISDATUM untuk sinkronisasi data dengan usaha mikro terkait serta pembinaan terhadap wirausaha baru sehingga tumbuh usaha mikro dengan memanfaatkan komoditas yang ada di Kabupaten Kediri
3. mendorong SDM pengawas koperasi untuk memiliki kompetensi pengawasan koperasi yang terstandarisasi dan mendorong koperasi untuk melaporkan laporan keuangan setiap triwulan di sappakop
4. mendorong SDM yang ada untuk dapat memiliki kompetensi yang sama dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi
5. pelaksanaan kegiatan bimtek yang memanfaatkan hasil evaluasi dan identifikasi disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan koperasi
6. melaksanakan kegiatan focus group discussion secara rutin dan memanfaatkan bimtek untuk menguatkan sinergitas antar koperasi dan mendorong kolaborasi antar koperasi
7. melaksanakan bimtek untuk meningkatkan kemampuan SDM usaha mikro baik dari sisi pengelolaan usaha ataupun pemasaran usaha untuk dapat menjalankan usaha nya dengan mandiri, akuntabel dan efektif
8. identifikasi pasar yang ada serta menjalin sinergitas dengan masyarakat (reseller dan pelaku usaha perdagangan) untuk meningkatkan pemasaran usaha mikro serta pemanfaatan tenant bandara untuk memperkenalkan produk usaha mikro di Kabupaten Kediri secara lebih luas



Gambar 12 : Kegiatan Bupati dalam ketahan pangan

11. Sasaran Strategis 11

Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercapainya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur.

Ketahanan Pangan terbangun melalui 3 (tiga) pilar, yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), keterjangkauan pangan (*food accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing.

Pilar ketersediaan pangan didefinisikan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta impor dan bantuan pangan. Pilar akses atau keterjangkauan pangan pada tingkat rumah tangga didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber pangan seperti produksi sendiri, persediaan pangan yang dimiliki rumah tangga, pembelian, barter, hadiah dan sajian dalam suatu pertemuan, pinjaman dan bantuan pangan. Dalam kerangka ketahanan pangan, akses atas pangan menjadi penting karena pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup di suatu wilayah belum tentu dapat dimanfaatkan apabila rumah tangga tersebut memiliki keterbatasan akses fisik, ekonomi atau sosial. Pilar pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk mengkonsumsi pangan dan tubuh dapat menyerap dan metabolisme zat gizi dengan baik. Pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan pemenuhan persyaratan keamanan makanan dan minuman. Pemanfaatan pangan juga berkaitan dengan kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam

meningkatkan status gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur kualitas pemanfaatan pangan rumah tangga.

Untuk mendukung berjalannya ketiga pilar tersebut secara konvergen, diperlukan lingkungan strategis yang kondusif, diantaranya situasi politik dan ekonomi makro yang kondusif, perdagangan internasional dan domestik yang berkeadilan bagi pelaku usaha, termasuk produsen (petani) dan konsumen (masyarakat), ketersediaan sumber daya alam yang pengelolaannya mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan kondisi iklim, serta ketersediaan infrastruktur dan teknologi serta inovasi yang mendukung bagi peningkatan produksi pangan dengan pertumbuhan yang berlanjut setiap tahun. Pencapaian ketahanan pangan dan gizi tercermin dari status pangan dan gizi individu atau perseorangan yang memiliki kemampuan menjalani hidup sehat, aktif, dan produktif serta kreatif secara berkelanjutan. Dengan kualitas individu seperti itu, kualitas SDM Indonesia secara keseluruhan diharapkan mampu berkiprah dan bersaing dalam tataran pergaulan global.

Ketahanan pangan diperlukan sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). Merujuk Badan Urusan Logistik (BULOG) dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan

yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

2. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
3. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Ketahanan pangan tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Dari sisi tataniaga, panjangnya rantai pasokan dapat mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar. Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran).

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan upaya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat pengembangan ketersediaan pangan

dan akses pangan masyarakat harus dilaksanakan lebih massif, terutama yang berdampak langsung kepada tersedianya dan kemudahan akses pangan masyarakat.

a. Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Melakukan penggalian potensi di wilayah rentan rawan pangan untuk dapat dikembangkan sehingga pencegahan kerawanan pangan lebih efektif, terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat.	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) untuk mengetahui pemetaan daerah rentan rawan pangan di Kabupaten Kediri dilihat dari sisi ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
2	Penguatan stabilitas harga dan meningkatkan akses pangan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan cadangan pangan (lumbung pangan masyarakat), pengembangan dan peningkatan kapasitas pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) melalui Pasar Mitra Tani (PMT), serta pemantauan harga dan stok pangan di tingkat produsen, distributor/penggilingan dan konsumen.	Pemantauan harga dan stok pangan di tingkat produsen, distributor/penggilingan dan konsumen terus dilakukan guna memberikan gambaran kondisi stabilitas harga dan pasokan terkini. Dalam rangka stabilisasi harga, dilakukan operasi pasar manakala terjadi lonjakan harga pangan, Guna meningkatkan akses pangan, juga dilaksanakan Gelar Pangan Murah di saat menjelang Hari Besar Keagamaan serta penyaluran bantuan 1.000 paket sembako bagi masyarakat miskin.
3	Sosialisasi dan pelatihan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) secara berkelanjutan disertai monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya pendukung pencegahan stunting serta solusi pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga yang beraneka ragam serta bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan di tingkat rumah tangga.	Program IBU ASUH STUNTING yakni pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan masyarakat. Pangan yang dihasilkan dari pekarangan selanjutnya didistribusikan kepada keluarga dengan kasus stunting maupun keluarga berisiko stunting. Intervensi yang dilakukan DKPP yakni dengan memberikan bantuan bibit sayur dan buah serta sarana produksi pertanian bagi Kelompok Wanita Tani di desa yang berkomitmen sebagai Ibu Asuh Stunting.
4	Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk mendorong masyarakat dalam konsumsi pangan berbahan baku lokal non beras serta pelaku usaha kecil dan menengah untuk memproduksi pangan olahan non beras.	Pelatihan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yakni olahan pangan lokal bagi 75 orang kader PKK desa dan UMKM olahan pangan lokal

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
5	Sosialisasi, pembinaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan dan pangan segar di kalangan petani dan pelaku usaha pangan serta peningkatan jaminan mutu dan daya saing produk melalui fasilitasi sertifikasi Prima untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	Pelatihan Keamanan Pangan Segar serta Sosialisasi dan Rapid Test Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Uji residu pestisida pada laboratorium terakreditasi Sertifikasi Prima 3 Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Registrasi PSAT-PDUK

Sumber LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2023

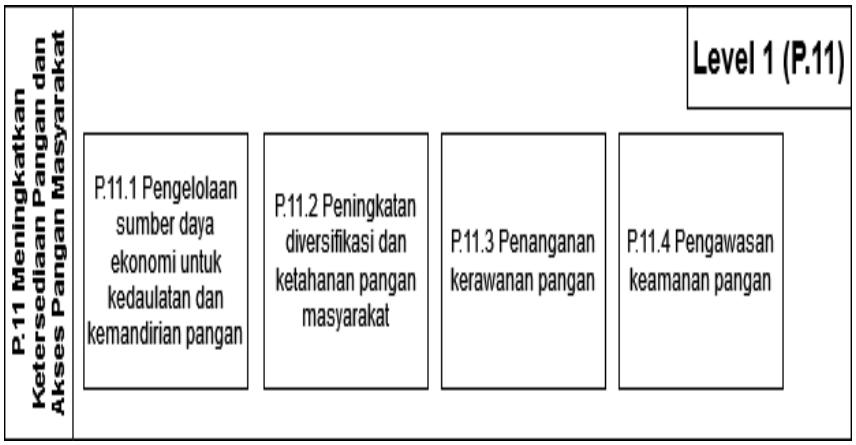
b. Permasalahan dan Tantangan

1. Produksi pangan tidak berbanding lurus dengan pertambahan penduduk sehingga ketersediaan pangan cenderung melandai.
2. Masih terjadi fluktuasi harga pangan yang dapat berdampak pada menurunnya akses pangan masyarakat.
3. Masih tingginya angka stunting dan kemiskinan di Kabupaten Kediri.
4. Ketergantungan pada beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi dan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih perlu ditingkatkan.
5. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pestisida kimia pada pangan segar serta pemakaian bahan tambahan pangan yang sehat dan aman perlu ditingkatkan mengingat masih ditemukan pangan segar yang belum aman dari residu pestisida.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upayanya meningkatkan kinerja di bidang Pangan,, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menetapkan strategi-strategi

pencapaian tujuan. Dalam Peta Proses Bisnis, pencapaian kinerja meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat dapat digambarkan melalui peraga sebagai berikut;



1) Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya khususnya infrastruktur pertanian dalam menuju kemandirian pangan. Sumber daya yang dimaksud adalah sarana prasarana pendukung kemandirian pangan baik fisik maupun kebijakan serta sumber daya manusia pelaksana terwujudnya kemandirian pangan. Dengan melaksanakan program ini, diharapkan tersusun rumusan kebijakan ketahanan pangan yang menjadi acuan pelaksanaan program prioritas di bidang ketahanan pangan. Di samping itu program ini merupakan sarana untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

2) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Diversifikasi berarti penganekaragaman. Sesuai dengan nomenklaturnya, program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bertujuan untuk

meningkatkan penganekaragaman pangan dan ketahanan pangan dari sisi ketersediaan, keterjangkauan serta pemanfaatan pangan. Dalam hal ketersediaan pangan, program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelompok atau lembaga yang mengelola cadangan pangan maupun usaha pangan masyarakat. Terkait dengan keterjangkauan atau akses pangan, program ini mewadahi upaya meningkatkan stabilitas harga dan pasokan pangan melalui pemantauan dan penyediaan informasi harga dan stok pangan serta fasilitas distribusi atau penyaluran pangan. Dalam program ini terdapat ruang untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal sehingga ketergantungan terhadap konsumsi beras dapat berkurang dan di sisi lain dapat menciptakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

3) Penanganan Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan bertujuan untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan yang terjadi di Kabupaten Kediri. Untuk mengetahui kondisi kerentanan maupun ketahanan pangan di Kabupaten Kediri, dilakukan analisis dan penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) mengklasifikasikan desa/kelurahan menjadi 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi (Prioritas 1-6) berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab situasi ketahanan pangan dan gizi. Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pagan sedang,

dan Prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5 dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi Prioritas 4 tahan pangan rendah, Prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 adalah tahan pangan tinggi. Dari hasil pemetaan daerah rentan pangan, diperoleh data potensi dan acuan yang akan menjadi sasaran intervensi kegiatan pelatihan pencegahan kerawanan pangan. Dengan kegiatan ini diharapkan potensi yang ada di daerah rentan pangan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga resiko kerawanan pangan berkurang dalam untuk jangka panjang dapat mewujudkan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Keamanan pangan segar merupakan aspek penting dalam pemanfaatan pangan (*food utilization*). Program Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan memastikan bahwa pangan segar yang dikonsumsi masyarakat bebas dari cemaran kimia, biologis dan residu pestisida. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan melalui peningkatan wawasan dan kemampuan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dalam Penerapan Penanganan yang baik terhadap PSAT dari mulai budidaya, pre market dan post market melalui pelatihan dan sosialisasi. Pengujian sampel PSAT juga dilakukan dengan sasaran petani dan pedagang PSAT untuk mengetahui kandungan residu pestisida. Kegiatan ini melibatkan partisipasi kader PKK kecamatan dan desa. Dalam rangka peningkatan kualitas jaminan mutu dan daya saing produk PSAT, dilakukan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi Prima 3 dan rekomendasi ijin edar PSAT-PDUK.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 4.1.1 : **Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat**	**Ketersediaan pangan utama**	**144,65 kg/ kapita/ tahun**	**128,08 kg/ kapita/ tahun**	**88,54%**	**11.426.512.336**	**11.188.059.111**	**97,91%**
Sasaran OPD DKPP: **Meningkatnya ketersediaan dan akses pangan di tingkat perseorangan**	**ketersediaan dan akses pangan di tingkat perseorangan Ketersediaan energi dan ketersediaan protein**	**2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/ kapita/ hari**	**3.294 kkal/ kapita/ hari dan 82,81 gram/ kapita/ hari**	**137,25% dan 131,44%**	**11.426.512.336**	**11.188.059.111**	**97,91%**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	**1 rumusan**	**1 rumusan**	**100%**	**104.669.254**	**100.966.501**	**96,46%**
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koefisien variasi harga pangan utama	**8%**	**8%**	**100%**	**1.591.020.034**	**1.562.691.539**	**98,22%**
	Skor Pola Pangan Harapan	**94,8**	**94,4**	**99,58%**			
	Jumlah cadangan pangan masyarakat	**100 ton**	**220,5 ton**	**220,5%**			
PROGRAM PENANGANAN	Jumlah penanganan	**4**	**4**	**100%**	**172.110.000**	**167.111.970**	**97,10%**

KERAWANAN PANGAN	desa rentan pangan						
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan segar	**76%**	**100%**	**131,58%**	**351.199.095**	**333.942.830**	**95,09%**

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	**KETERANGAN**
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**

Sasaran 4.1.1 : **Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat**	**128.08**	**149.40**	**85.49%**	**88.54%**	**97.17%**	**-**	**Tidak Efektif**
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	100%	100	100.00%	100%	96.46%	3.54%	Menunjang
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8	5	160.00%	100.00%	98.22%	41.81%	Sangat Menunjang
	94.4	100	94.40%	99.58%			
	220.5	95.40	231.13%	220.50%			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2 Desa	2	100.00%	100.00%	97.10%	2.90%	Menunjang
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100%	85	117.63%	131.58%	95.09%	36.49%	Sangat Menunjang

Dari penjabaran analisa diatas, terdapat beberapa program yang mendukung capaian sasaran kinerja yakni program yang telah melampaui target dan efisien seperti (mohon diisi) dan terdapat beberapa program yang kurang mendukung capaian sasaran kinerja yakni

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah

pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ **Indikator**	**Ketersediaan Pangan Utama (KPU)**	**Ketersediaan Pangan Tingkat Perseorangan (KKal/Kapita/ Hari)**
Kabupaten Kediri	128,08 kg/kapita/tahun	3.294 kkal/ kapita/ hari
Provinsi Jawa Timur	No Data	2111,80 kkal/kapita/hari (2021)
Agregat Nasional	No Data	2.087,64 kkal/kapita/hari

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih di bawah capaian Provinsi Jawa Timur. Ini dikarenakan Kabupaten Kediri bukan merupakan daerah sentra produksi padi di Jawa Timur. Jawa Timur merupakan penyumbang produksi beras terbesar di Indonesia seperti daerah sentra produksi padi di Ngawi, Lamongan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, Tuban, Madiun, Nganjuk, Ponorogo dan Gresik. Adapun dibandingkan dengan data capaian ketersediaan pangan nasional, ketersediaan pangan utama di Kabupaten Kediri masih lebih tinggi.

g. Faktor Pendukung

Adanya upaya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras serta penyaluran bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Badan Pangan Nasional menjadi salah satu faktor peningkatan ketersediaan pangan di Kabupaten Kediri. Selain hal diatas, faktor-faktor pendukung dapat dipetakan sebagai berikut;

1. Pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar).

2. Koordinasi dan kolaborasi aktif dengan instansi vertikal (Badan Pangan Nasional) dan instansi horizontal (Bulog) dalam penyaluran pangan.
3. Adanya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

h. Faktor Penghambat

Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional belum bisa menjamin kesejahteraan peternak. Kegiatan beternak lebih dianggap sebagai tabungan sementara jangka pendek dan tidak berkelanjutan.Selain itu mahalnya harga pakan pabrikan terutama untuk ayam petelur seringkali tidak sebanding dengan harga jual telur sehingga potensi kerugian cukup besar. Usaha peternakan yang tradisional, kurang menerapkan intervensi teknologi dan belum berwawasan agribisnis dipandang kurang menarik bagi generasi milenial sebagai salah satu pilihan mata pencaharian. Usaha peternakan dianggap kurang menguntungkan dan kurang menjanjikan kesejahteraan.

1. Mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga menyebabkan produksi gabah berkurang. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang sulit diprediksi juga mempengaruhi produksi gabah;
2. Permasalahan produksi juga terjadi di daerah lain sehingga ketersediaan beras menurun mengakibatkan beras masuk dari daerah lain ke Kabupaten Kediri juga berkurang;
3. Stok Bulog Nasional sampai dengan akhir musim panen berikutnya (Februari 2023) tidak sesuai target yakni sebesar 1,2 juta ton hanya terpenuhi 300 ribu ton.

Ini berdampak pada penurunan stok Bulog di daerah. Meskipun capaian ketersediaan pangan utama tahun 2022 menurun dari tahun 2021, namun masih surplus sebesar 45,24 kg/kapita/tahun dibandingkan kebutuhan konsumsi beras per kapita Kabupaten Kediri sebesar 72,24 kg/kapita/ tahun. Ini menunjukan ketersediaan pangan utama Kabupaten Kediri masih sangat aman.

i. Kesimpulan

Dengan permasalahan yang ada, capaian Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Kediri pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan sebesar 10,6 kg/kapita/tahun dibanding tahun 2022 dari yang awalnya 117,48 kg/kapita/tahun menjadi 128,08 kg/kapita/tahun. Capaian tersebut berada dibawah target yang sudah ditetapkan yakni 145,22%. Capaian tersebut ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.426.512.336,00 dengan realisasi sebesar Rp 11.188.059.111,00.

j. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memajukan dan mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu kontributor PDRB sektor pertanian, DKPP Kabupaten Kediri terus berupaya meningkatkan kapasitas peternak dan kelompok ternak dalam peternakan yang berwawasan agribisnis mulai hulu sampai dengan hilir. Salah satunya dengan memberikan hibah pengembangan peternakan serta menyelenggarakan pelatihan manajemen peternakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian kelompok ternak dalam mengembangkan usaha peternakannya. Ini diharapkan dapat menjadi jalan menuju kesejahteraan peternak.

Dari sisi ketahanan pangan, DKPP Kabupaten Kediri berupaya memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar). Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan Bulog terkait stok pangan di Kabupaten Kediri.

Dari sisi konsumsi pangan, konsumsi beras diupayakan menurun melalui diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur dan buah serta sarana produksi pertanian untuk dibudidayakan di pekarangan. Dengan ini ketahanan pangan di tingkat keluarga dapat terwujud. Kegiatan ini sekaligus sebagai salah satu upaya penurunan angka *stunting* karena konsep pemanfaatan pekarangan mengarah pada pemberdayaan masyarakat untuk bahu membahu menyediakan sumber gizi bagi keluarga stunting atau keluarga berisiko stunting.



Gambar 13 : Kegiatan Bupati bersama Gapoktan

12. Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat.

Sebagai penyedia pangan serta lapangan pekerjaan, pertanian yang merupakan salah satu sektor vital dalam menghadapi perkembangan bertambahnya populasi manusia, terutama dalam pembangunan berkelanjutan. Kondisi pertanian di Indonesia memiliki permasalahan serius antara lain terkait lahan, irigasi, benih, pupuk, alat mesin pertanian, penyuluh lapangan (sumber daya petani), tenaga kerja, hingga permasalahan tata niaga pertanian.

Menurut Kementerian Pertanian, petani adalah pelaku utama pembangunan. Dalam hal ini, petani memiliki peran yang besar terhadap penyediaan pangan yang berperan penting sebagai kebutuhan primer. Kementerian Pertanian sendiri juga mencanangkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045.

Merujuk kajian dari Kementerian Pertanian terdapat beberapa hal yang menjadi kunci dalam menningkatkan kesejahteraan petani dengan pendekatan kesisteman (systemic approach) dengan parameter sebagai berikut;

1. Merevisi regulasi yang menghambat
2. Membangun infrastruktur
3. Mekanisasi pertanian
4. Perbaikan teknis produksi Pendampingan dan penguatan SDM
5. Penanganan pasca panen
6. Serta pengendalian harga

Menurut Kementerian Koordinator bidang Perekonomian prinsip-prinsip untuk meningkatkan kesejahteraan petani melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui penetapan pengaturan tata ruang, terutama pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan, penyediaan benih unggul yang berkualitas, penyediaan pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan, meminimalkan impor hasil pertanian, dan harga hasil pertanian lebih ditingkatkan.

Masyarakat Kabupaten Kediri mayoritas masih bekerja di sektor agrikultur. Sekitar 17% masyarakat Kabupaten Kediri bekerja dengan waktu penuh di sektor tersebut, ditambah dengan masyarakat lain yang bekerja paruh waktu.. Migrasi profesi dari sektor

pertanian akhir-akhir ini meningkat. Selain itu, tidak banyak anak muda di usia produktif yang bekerja di sektor pertanian.

Salah satu faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan petani adalah inovasi teknologi di bidang pertanian. Mulai dari penggunaan bibit unggul, penggunaan alat mesin pertanian, dan pemupukan. Bibit unggul merupakan bibit yang memiliki mutu terjamin sehingga dapat menjamin keberhasilan usaha tani. Alat dan mesin pertanian dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam mengolah lahan pertanian. Pemupukan dilakukan untuk memberikan nutrisi pada tanaman guna meningkatkan produksi.

Melihat hal diatas serta menurunnya tren dalam pembangunan sektor pertanian secara langsung disebabkan oleh banyak hal. Terutama hal-hal yang menyangkut kebutuhan petani secara umum. Tingkat perekonomian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Kediri menjadi perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Kediri.

Inovasi di bidang pertanian yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah DITO (Desa Inovasi Tani Organik). Bupati Kediri, Mas Dhito menyampaikan, pertanian organik memiliki nilai ekonomi jauh menguntungkan dibandingkan pertanian konvensional. Sebab, dengan tani organik biaya produksi dapat ditekan karena petani tidak lagi bergantung dengan pupuk kimia. Selain itu pula harga jual produksi tani organik lebih tinggi daripada harga jual produksi tani konvensional.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melihat kesejahteraan petani adalah hal yang wajib untuk diperhatikan. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) digunakan sebagai indikator kesejahteraan, dimana perhitungan NTP

dihitung dengan indeks yang diterima petani dibandingkan dengan indeks yang dikeluarkan oleh petani.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Meningkatkan kemampuan pembudidaya melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Sudah dilaksanakan bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan pembenihan, ikan hias dan pembesaran
2	Membentuk asosiasi untuk mempermudah kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan	Menstimulasi pembentukan asosiasi-asosiasi perikanan maupun asosiasi yang terlibat lainnya
3	Lebih menggalakkan kegiatan yang berwawasan agribisnis dengan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan sekaligus juga dapat meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan	Telah dilaksanakan kegiatan kontak bisnis dan pembinaan kelembagaan, diharapkan agar pola bisnis perikanan dapat berkembang
4	Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui optimalisasi inseminasi buatan (IB) melalui program SI KOMANDAN	Kegiatan telah dilaksanakan, dengan inseminasi buatan diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak
5	Pembinaan dan fasilitasi pengurusan ijin edar pelaku usaha produk hasil peternakan serta mengikutsertakan pelaku usaha produk hasil peternakan dalam event-event pameran.	Pembinaan telah dilaksanakan baik secara formal maupun informal
6	Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan pemanfaatan lahan pekarangan, untuk menjaga ketersediaan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.	Pembangunan infrastruktur pertanian khususnya pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) dan Irigasi Tanah Dangkal (ITD) dengan sumur submersible - Telah dilaksanakan GEMAR TABUR (Gerakan Menanam Tanaman Buah dan Sayur di pekarangan
7	Untuk mengembalikan kesuburan lahan, dengan cara pemanfaatan bahan organik dan pengembangan pertanian sehat ramah	Telah dilaksanakan pelatihan pertanian organik, meliputi pelatihan pembuatan pupuk organik baik padat dan cair, pembuatan

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
	lingkungan, untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk / pestisida kimia.	pestisida nabati (pesnab), pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan serangan OPT pada tanaman budidaya (misalnya pemanfaatan burung hantu/ Tyto alba untuk mengendalikan serangan hama tikus pada tanaman pangan)
8	Pengaturan pola tanam sesuai permintaan pasar dan mengatasi "market glut" (harga jatuh saat panen raya) dengan cara membuka pasar, mengembangan komoditas dengan varietas lain yang punya pangsa pasar berbeda, menumbuhkan industri olahan	- Telah dilaksanakan pelatihan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) sehingga diharapkan petani mampu mengatur pola tanam untuk mengatasi dampak perubahan iklim sekaligus mengatasi harga jatuh saat musim panen raya) - Telah dilaksanakan pelatihan olahan/ hilirisasi komoditas unggulan Kab. Kediri khususnya nanas
9	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pertanian, baik sarana produksi maupun infrastruktur, khususnya irigasi dan jalan usaha tani.	Telah dilaksanakan pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) di beberapa lokasi dan Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di beberapa lokasi

Sumber LKjIP Dinas Perikanan 2022, LKjIP Dinas Pertanian dan Perkebunan 2022 dan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

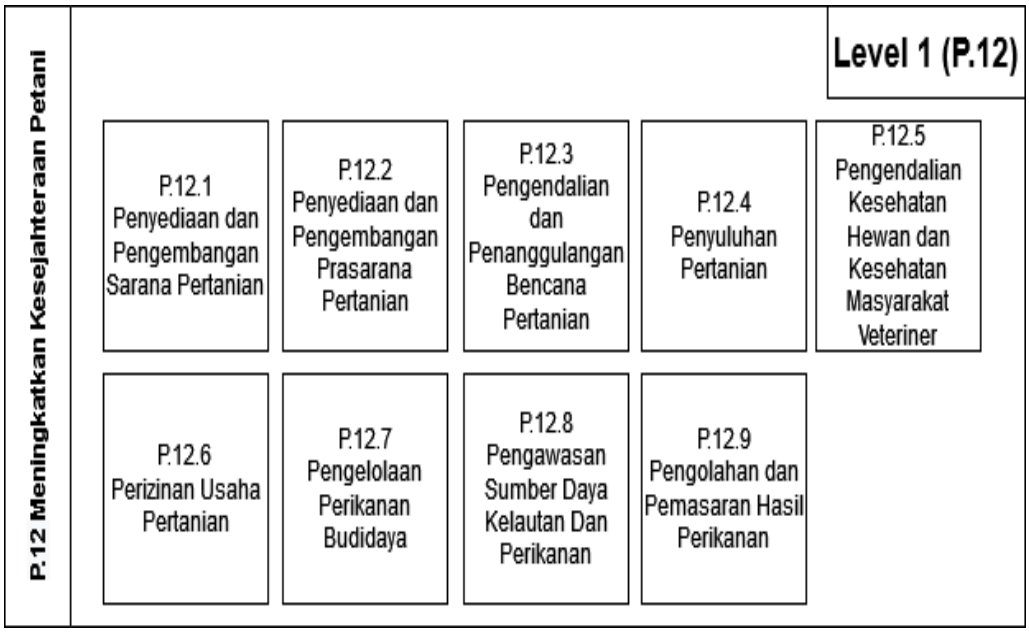
b. Permasalahan

1. Terjadinya anomali iklim, memberi pengaruh negatif yaitu tidak adanya kepastian ketersediaan air dan munculnya berbagai macam OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan positif bagi tanaman yaitu musim kering yang cukup panjang membuat rasio bunga menjadi buah lebih tinggi untuk beberapa tanaman buah – buahan.
2. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
3. Pengaruh harga komoditas di pasaran yang fluktuatif
4. Semakin terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi subsidi pupuk.

5. Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional belum bisa menjamin kesejahteraan peternak.
6. Banyaknya produk olahan hasil peternakan yang belum memiliki izin edar serta akses pemasaran produk olahan hasil peternakan perlu ditingkatkan.
7. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal
8. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
9. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
10. Keterbatasan induk ikan yang berkualitas (lele, nila, gurami, patin, dan ikan hias)
11. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan
12. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
13. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal
14. Belum optimalnya promosi produk perikanan baik offline maupun online sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal

15. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
16. Keterbatasan pengetahuan terkait keamanan pangan bagi pengolah perikanan
17. Terbatasnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait packaging yang benar dan menarik
18. Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan
19. Rendahnya tingkat konsumsi ikan
20. Terbatasnya diversifikasi olahan perikanan

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan



1) Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilaksanakan dengan tujuan indikator persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring / evaluasi dalam memanfaatkan sarana pertanian, dengan program ini seperti pemberian bantuan

alsintan, saprodi pertanian, pelatihan - pelatihan diharapkan dapat menjaga/ meningkatkan produktivitas tanaman, baik tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani

2) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan dengan tujuan indikator persentase jaringan irigasi tingkat usaha tani dalam kondisi baik, pembangunan infrastruktur pertanian (RJIT, JUT, embung dan Irigasi Tanah Dangkal/ ITD dengan sumur submersible dapat meningkatkan Indeks Pertanaman/ IP padi, mengurangi biaya produksi usaha tani/ efisiensi usaha tani dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani

3) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dilaksanakan dengan tujuan indikator cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian khususnya serangan OPT terhadap tanaman budidaya, pengendalian OPT dapat dilakukan baik dengan pestisida kimiawi maupun dengan agensia hayati/ musuh alami dan dapat menjangkau seluruh kelompok tani di Kabupaten Kediri.

4) Penyuluhan Pertaniaan

Penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan tujuan capaian indikator yaitu persentase cakupan bina kelompok tani di seluruh wilayah Kab. Kediri,

meningkatkan kapasitas SDM petani maupun petugas dalam bidang pertanian dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani (poktan, gapoktan, KWT, P4S

5) Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

   Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diharapkan dapat menjaga kualitas ternak ataupun hewan-hewan lain yang dapat menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Kediri. Dengan terjaganya kesehatan hewan dapat secara langsung pula mendongkrak kondisi sosial ekonomi para peternak.

6) Perizinan Usaha Pertanian

   Dalam upaya memberikan pelayanan serta sebagai penguatan basis data pertanian di Kabupaten Kediri, maka perizinan usaha perlu untuk diterbitkan. Perizinan yang dilakukan disini sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku bahkan dengan proses bisnis yang sederhana asalkan tetap berada dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

7) Pengelolaan Perikanan Budidaya

   Pengelolaan perikanan budidaya dilaksanakan dengan tujuan indikator capaian yaitu jumlah produksi perikanan (kolam, ikan hias dan benih ikan) selama satu tahun. Diharapkan dari hal tersebut, para petani perikanan dapat meningkat kesejahteraannya.

8) Pengawasan Sumber Daya Keluatan dan Perikanan

Kinerja program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu persentase cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan umum darat. Hal tersebut dilakukan agar para petani perikanan dapat bekerja dengan baik dan dapat berkembang.

9) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Upaya untuk meningkatkan kualitas produksi dan nilai tambah dari hasil produksi perikanan didapati bahwa terdapat beberapa yang terus dilakukan. Diharapkan dengan hal tersebut, dapat meningkatkan hasil nilai tambah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 4.1.2 : **Meningkatnya Kesejahteraan Petani**	**Nilai Tukar Petani**	**104**	**104,44**	**100,42%**	**32.893.182.895**	**28.733.916.174**	**87,35%**
Sasaran OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan: **Meningkatnya produktivitas tanaman pangan utama, sayuran utama, buah-buahan utama**	**Tingkat produktivitas bahan pangan utama**	**7,93**	**7,89**	**99,49%**	**10.183.071.300**	**10.166.431.515**	**99,84%**

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
dan perkebunan utama							
	Tingkat produktivitas perkebunan utama	**101,81**	**102,55**	**100,73%**	**7.851.691.870**	**7.086.037.813**	**90,24%**
	Tingkat produktivitas sayuran utama	**7,17**	**7,17**	**100%**	**784.541.197**	**761.018.700**	**97,00%**
	Tingkat produktivitas buah-buahan utama	**16,62**	**21,01**	**126,41%**	**2.711.643.253**	**2.690.850.301**	**99,23%**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompoktani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	100%	**100%**	**100%**	**16.964.710.495**	**16.435.564.403**	**96.88%**
	Persentase pemanfaatan benih / bibit unggul pertanian	81,09%	**82,03%**	**101,16%**			
	Jumlah Desa yang melaksanakan Inovasi Tani Organik	50	**52**	**104%**			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	73%	**73%**	**100%**	**12.028.406.500**	**8.800.347.022**	**73,16%**

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (Serangan OPT)	93%	**93%**	**100%**	**1.182.377.100**	**1.137.116.831**	**96,17%**
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	100%	**100%**	**100%**	**2.717.688.800**	**2.360.887.918**	**86,87%**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	- Service per Conception	1.26	1.6	126.98%	11,516,149,100.00	11,166,739,910.00	96.97%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - Calving Interval	14 Bulan	14 bulan	100.00%			
	- Conception Rate	82%	74.00%	90.24%			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan pemanfaatan prasarana peternakan dan kesehatan hewan yang tersedia	100%	100%	100.00%	265,920,000.00	260,892,200.00	98.11%

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penanganan kasus penyakit hewan	100%	100%	100.00%	1,320,829,595.00	1,230,646,912.00	93.17%
	Jumlah unit usaha produk hewan yang tersertifikasi NKV	5 unit	7 unit	140.00%			
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan bersertifikat BPOM	5 unit	5 unit	100.00%	196,557,940.00	179,867,800.00	91.51%
	Persentase toko obat hewan yang berizin	70%	70%	100.00%			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pembesaran (ton)	23.757	23.996,40	101,00	3.019.617.900	2.980.435.736	98,70
	Ikan Hias (ribu ekor)	369.177	369.804,79	100,17			
	Benih (juta ekor)	21.225,196	21.457,55	101,09			
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi	100%	100%	100	23.724.000	23.724.000	100

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	43	46	106,98	273.586.200	271.675.000	99,30

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	**Keterangan**
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 4.1.2 : **Meningkatnya Kesejahteraan Petani**	**104,44**	**105**	**99,47%**	**100,42%**	**87,35%**	**13,07%**	Menunjang Penuh
Sasaran OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan: **Meningkatnya produktivitas tanaman pangan utama, sayuran utama, buah-buahan utama dan perkebunan utama**	**7,89**	**8,02**	**98,37%**	**99,49%**	**99,84%**	**-0,35%**	Menunjang
	02,55	**101,82**	**100,72%**	**100,72%**	**90,24%**	**10,48%**	Menunjang Penuh
	7,17	**7,81**	**91,80%**	**100%**	**97,00%**	**3,00%**	Menunjang
	21,01	**17,97**	**116,92%**	**126,41%**	**99,23%**	**27,18%**	Menunjang Penuh
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100%	100%	100%	100%	96,88	3,12%	Menunjang
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	73%	76%	96%	100%	73,16%	26,84	Menunjang
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	93%	96%	96,87%	100%	96,17%	3,83%	Menunjang
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100%	100%	100%	100%	86,67%	13,13%	Menunjang
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	100%	100%	100.00%	100.00%	98.11%	1.89%	Menunjang

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
SARANA PERTANIAN							
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7 unit	10	70.00%	140.00%	93.17%	20.16%	Sangat Menunjang
	5 unit	6	83.33%	100.00%	91.51%	8.49%	Menunjang
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	70%	80%	87.50%	100.00%			
Sasaran OPD DInas Perikanan: **Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan**	98,85	97	101,91	100,87	98,03	2,84	Menunjang Penuh
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pembesaran : 23.996,40 ton	Pembesaran : 26.416 ton	90,84	100,75	98,70	2,05	Sangat Menunjang
	Ikan hias : 369.804,79 ribu ekor	Ikan hias : 428.590 ribu ekor	86,28				
	Benih ikan : 21.457,55 juta ekor	Benih ikan : 21.868,342 juta ekor	98,12				
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100%	100%	100	100	100	0	Menunjang

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	46 kg/kap/tahun**	43 kg/kap/tahun	106,98	106,98	99,30	7,68	Sangat Menunjang

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/**Indikator**	**Nilai Tukar Petani (NTP)**
Kabupaten Kediri	104.4
Provinsi Jawa Timur	109.44
Agregat Nasional	115.11

Capaian Persentase Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan

Provinsi dan juga Nasional dianggap cukup lebar. Hal ini merujuk pada perbandingan komposisi petani di Kabupaten Kediri yang mayoritas adalah Petani Gurem (kepemilikan lahan dibawah 0,5 hektar) data BPS menyatakan 171488 (84,33%) Rumah Tangga Petani berstatus Gurem dibandingkan 203141 total Rumah Tangga yang bergerak di sektor pertanian.

Merujuk pada data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jawa Timur terjadi surplus produktivitas Jagung dan Padi di beberapa kawasan lumbung seperti Tulungagung, Nganjuk Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Madiun, dan Magetan. Jagung di kawasan pandalungan tapal kuda mengalami surplus yang cukup signifikan. Surplus tersebut turut menyumbang indeks harga penerimaan petani dan menyumbang pendapatan dan nilai tukar para petani. Dalam hal ini, jika melihat data BPS, jumlah Petani Gurem mencapai 50% dari total petani di Jawa Timur yang tentu memengaruhi proses bisnis para petani tersebut.

Sedang merujuk data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia NTP tingkat Nasional mayoritas diisi oleh petani-petani yang bergerak di bidang bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai yang mencapai titik harga tertinggi pada tahun 2023. Sedangkan petani di Kabupaten Kediri yang bergerak di bidang bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai menyumbang sedikit kontribusi diantara mayoritas petani yang bergerak pada tanaman jagung, padi, dan tebu.

g. Faktor-faktor Penunjang

Semakin tingginya angka penyuluh pertanian dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dan memahami kondisi pertanian di Kabupaten Kediri mampu memberikan

pengertian dan pengarahan kepada para petani baik dari sisi manajemen pengelolaan pertanian melalui sapta-usaha tani ataupun sisi-sisi lainnya seperti pertanian organik serta tani kreatif lainnya.

Optimalnya penggunaan angka obat-obatan dalam upaya pengendalian hama juga turut serta menjadi faktor utama tercapainya NTP. Distribusi pupuk yang optimal juga turut serta menjadi faktor penunjang pencapaian target NTP.

Dari aspek lain, munculnya pertanian kreatif seperti greenhouse, tani organik, serta pertanian-pertanian lainnya juga menjadikan mampu memberikan nilai tambah bagi para petani. Pemanfaatan lahan-lahan pekarangan dengan hidroponik selain sebagai upaya menjaga produksi tanaman pangan juga dapat digunakan untuk meningkatkan nilai para petani.

Perkembangan tani organik yang dikembangkan menyebabkan menurunnya ketergantungan petani pada obat-obatan hama dan pupuk kimia sintesis. Hal tersebut juga menyebabkan para petani tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar, namun dapat menggunakan barang-barang ramah lingkungan yang mudah diproduksi di sekitar kita.

Sarana dan Prasarana yang semakin ditingkatkan dengan upaya revitalisasi talud dan pengembangan irigasi di sektor lainnya menyebabkan pengairan sawah semakin baik. Pembangunan jalan talud yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan juga memberikan dampak signifikan terhadap penurunan faktor produksi, terutama pada beban operasional panen. Pendekatan lain seperti sarana dan prasarana

alsintan juga memiliki dampak yang signifikan dalam mendorong peningkatan pertanian di Kabupaten Kediri.

h. Faktor-faktor Penghambat

Masih tingginya anomali iklim dari musim kemarau menjadi musim penghujan memberikan ketidakpastian pada beberapa aspek baik itu jenis tanaman, ketersediaan air irigasi, serta memudahkan perkembang-biakan hama-hama dan penyakit tanaman. Tumbuh dan berkembangnya OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) juga turut andil dalam menghambat pencapaian target yang telah ditentukan.

Angka alih fungsi lahan dari pertanian menuju lahan industri ataupun hunian juga masih menjadi permasalahan. Menurunnya angka kawasan pertanian buah-buahan mangga di kawasan Kecamatan Banyakan, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Tarokan dikarenakan pembangunan bandara menjadi permasalahan tersendiri. Selain itu, peralihan lahan pertanian atas nama pribadi yang tinggi juga menyebabkan turunnya produktivitas pertanian.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya kualitas lahan di Kabupaten Kediri diakibatkan karena akumulasi penggunaan pupuk berlebihan yang berakibat pada degradasi kesuburan tanah. Hal tersebut secara umum dapat menghambat proses pertanian karena tanah yang terdegradasi akan membutuhkan pupuk dan faktor-faktor penyubur lainnya dalam jumlah yang lebih besar. Hal tersebut tentu berakibat pada besarnya angka produksi yang dikeluarkan oleh para petani.

Meskipun sarana dan prasarana sudah banyak disediakan di banyak tempat, namun di beberapa tempat sarana dan prasarana masih belum tersedia. Hal tersebut

tentu mengakibatkan dampak biaya produksi yang tinggi, terutama biaya irigasi dan panen. Selain itu, masih ada kelompok tani yang belum mendapat bantuan alsintan pertanian modern.

i. Kesimpulan

Capaian Nilai Tukar Petani sebesar 103,54 yang mampu berjalan diatas target 103 tentu dapat tercapai karena banyaknya kontribusi dari berbagai pihak terutama para pelaku ekonomi di bidang pertanian. Koordinasi dan kontribusi yang intensif dengan para petugas dan penyuluh ini menyebabkan pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Kediri meningkat sebesar 5,6 menjadi 105,4.

Hal tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan serta dukungan dari faktor-faktor pendukung yang secara simultan memberikan topangan terhadap meningkatnya PDRB sektor pertanian serta Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Kediri.

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan serta OPD terkait akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian hortikultura dengan berbagai macam alternatif pembangunan sektor pertanian. Pendekatan-pendekatan peningkatan nilai ekonomis pertanian masih menjadi perhatian utama bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan diawal. Utamanya melihat peningkatan target NTP menjadi 104 pada tahun 2023.

Masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sehingga pada tahun yang akan datang perlu

dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya perbanyakan induk ikan yang berkualitas (lele sangkuriang dan nila sultana)
2. Meningkatkan kemampuan pembudidaya melalui pelatihan dan bimbingan teknis
3. Terus menggalakkan upaya promosi produk perikanan baik offline maupun online
4. Membentuk asosiasi untuk mempermudah kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan
5. Melaksanakan bimtek mutu dan keamanan pangan bagi kelompok pengolah dan pemasar perikanan (poklahsar)
6. Mengusulkan kepada DKP Jawa Timur agar mendapat fasilitasi sertifikasi keamanan pangan
7. Menggalakkan *Makin Kece Sekali* (Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi)
8. Melaksanakan kegiatan Cooking Class olahan perikanan
9. Lebih menggalakkan kegiatan yang berwawasan agribisnis dengan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan sekaligus juga dapat meningkatkan kesadaran pembudidaya ikan untuk meningkatkan efisiensi usaha perikanan
10. Memfasilitasi kelompok dengan Perbankan (BPD, BRI, Bank Daerah) untuk memperoleh modal dan penguatan modal kelompok
11. Kegiatan yang dilakukan tidak berhenti dalam satu tahun namun berkesinambungan dari tahun ke tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan

Untuk masa mendatang hasil evaluasi dan analisis di atas akan dijadikan masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijaksanaan/ program/ kegiatan sejenis agar pencapaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan.



Gambar 14 : Alat berat sedang melakukan normalisasi sungai di Kecamatan Banyakan sebagai upaya perbaikan jalan irigasi

13. Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah

Ekspektasi masyarakat akan infrastruktur yang berkualitas kini menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kediri. Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur yang dapat diandalkan kini menjadi dambaan bagi masyarakat. Karena dalam proses perekonomian pula, infrastruktur menjadi hal dasar yang harus dipenuhi sebelum berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya.

Upaya menurunkan kesenjangan antar wilayah dengan pemerataan di masing-masing kecamatan dengan proporsi yang telah diperhitungkan. Seperti kawasan-kawasan jalan dengan *jeglongan sewu* (ribuan lubang jalan) secara langsung berusaha diperbaiki. Selama ini, banyak jalanan di Kabupaten Kediri dalam kondisi buruk dikarenakan masih tingginya kesenjangan pembangunan. Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti

bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat, sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berjalan dengan optimal.

Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lain yang menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan Infrastruktur ini juga mempengaruhi produksi, inflasi, dan investasi. Menurut Kementerian PUPR infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena demikian pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Sebagaimana dalam beberapa dekade terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan infrastruktur.

Kementerian PUPR menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan, bahan pokok, dan bahan-bahan ekonomis lainnya melalui pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan irigasi. Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat peningkatan sarana infrastruktur daerah adalah hal yang wajib untuk diperhatikan. Dengan strategi yang telah ditetapkan adalah pembangunan jalan serta sarana pelengkap untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan produktivitas masyarakat, pembangunan infrastruktur sumber

daya air dalam menunjang pertanian, serta pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sesuai Perbup RDTR dan Perda RTRW.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Dilakukan peningkatan kegiatan koordinasi atas lintas sektor	Koordinasi Komite Irigasi antara Dinas PUPR, Bappeda dan Dinas Pertanian dan Perkebunan
2	Monitoring, dan Evaluasi serta sosialisasi/pembinaan kepada pelanggar pemakai air, pengguna jalan dan pemanfaatan ruang.	Sosialisasi dan pembinaan kepada pelanggar pemakai air di Daerah Irigasi Kendal Desa Semanding dan Sitimerto Kecamatan Pagu oleh UPT PUPR Pagu
3	Menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan kualitas aparatur yang sesuai dengan bidang tugasnya baik melalui satker sendiri atau mengikuti undangan dari satker lain.	Bimbingan Teknis E-paksi (Aplikasi survei berbasis android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventarisasi aset jaringan irigasi, aset non jaringan irigasi, dan kinerja aset irigasi)
4	Lebih selektif dalam menggunakan Penyedia Jasa agar tidak terjadi kegagalan dalam pekerjaan.	Melakukan penilaian kinerja penyedia jasa.
5	Lebih ditingkatkan /intens/sering berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.	Koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Koordinasi terkait penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Provinsi.
6	Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;	Pendidikan Profesi Insinyur beberapa pejabat struktural, fungsional dan pelaksana di Dinas PUPR.
7	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam monitoring infrastruktur dengan cara segera menindaklanjuti aduan masyarakat di aplikasi Halo MasBup

Sumber LKjIP DPUPR 2022 dan LKjIP Dinas Perkim 2022.

b. Permasalahan dan Tantangan

Secara umum permasalahan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur daerah telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan tenaga PNS sehingga memperlambat penyelesaian beban kerja.
2. Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi terjadinya banjir karena menurunnya volume tampungan sungai.
3. Maraknya kegiatan penambangan di ruang sungai telah menyebabkan degradasi dasar sungai, terganggunya morfologi sungai, longsornya tebing sungai yang mengancam sentra-sentra produksi pangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum terbangun.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam upaya kepedulian lingkungan tempat tinggal mereka, hal ini ditunjukkan dengan sangat banyaknya badan sungai yang digunakan sebagai tempat dan buangan sampah serta masih tingginya air limbah rumah tangga yang belum di treatment yang langsung dibuang mengalir ke sungai.
5. Belum optimalnya pengguna jalan dalam pemanfaatan jalan yaitu dengan melewati jalan Kabupaten melebihi tonase jalan yang yang telah ditetapkan, yang bisa memungkinkan memperpanjang jalan yang rusak. Untuk menanggulangi masalah tersebut dilakukan dengan pemeliharaan rutin dan berkala jalan, serta survey kondisi jalan.

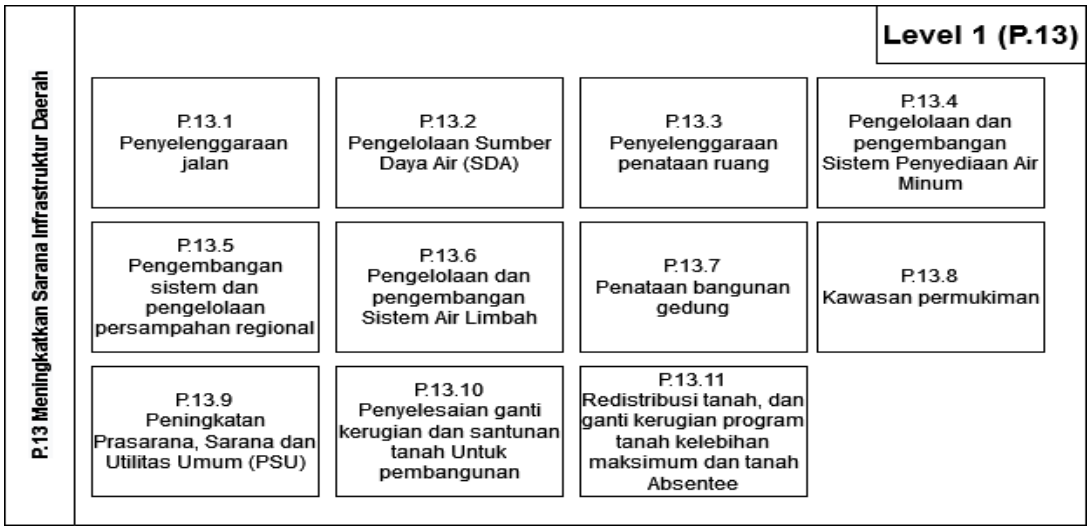
6. Masih terbatasnya jalan trotoar dan belum ada jalur sepeda. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri adalah dengan melakukan Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) yang bisa bisa menjadi dasar kajian kelayakan pada pengembangan jalan dan Infrastruktur pendukungnya.
7. Belum tersedianya database bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai acuan pelaksanaan arah program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kinerja sarana infrastruktur daerah, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang diidentifikasi sebagai berikut;

1. Terjadinya anomali iklim, memberi pengaruh negatif yaitu tidak adanya kepastian ketersediaan air dan munculnya berbagai macam OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan positif bagi tanaman yaitu musim kering yang cukup panjang membuat rasio bunga menjadi buah lebih tinggi untuk beberapa tanaman buah – buahan.
2. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
3. Pengaruh harga komoditas di pasaran yang fluktuatif
4. Semakin terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi subsidi pupuk.
5. Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional belum bisa menjamin kesejahteraan peternak.
6. Banyaknya produk olahan hasil peternakan yang belum memiliki izin edar serta akses pemasaran produk olahan hasil peternakan perlu ditingkatkan.

7. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal
8. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal
9. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Adapun program yang mendukung sasaran Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah adalah sebagai berikut;

1) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Tujuan nya adalah Menjaga kelestarian fungsi dan memulihkan kondisi fisik prasarana dan sarana sumber daya air dan menjaga kelestarian sumber daya air,

mengurangi konflik pemanfaatan air antar pengguna dan serta meningkatkan pendayagunaan sumber daya air.

Maksudnya adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Manfaatnya pengelolaan sumber daya air adalah : Fungsi sosial, kepentingan umum, kepentingan individu. Fungsi lingkungan hidup, sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

2) Penyelenggaraan Jalan

Tujuan Penyelenggaraan Jalan adalah Memperlancar lalu lintas , Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Manfaatnya Penyelenggaraan Jalan adalah memperlancar arus distribusi barang dan jasa dengan mempermudah pengiriman sarana produksi dan mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar dengan memberikan aksesibilitas; membuka isolasi kawasan; meningkatkan aksesibilitas jasa pelayanan sosial termasuk kesehatan.

3) Penyelenggaraan Penataan Ruang

Tujuan dari perencanaan tata ruang adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah antara lain mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota, mewujudkan keserasian pembangunan kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang kabupaten/kota yang berkualitas

4) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum. Diharapkan dengan hal tersebut, masyarakat dapat mengakses kebutuhan air minum dengan mudah, bersih, dan sehat.

5) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Sistem dan pengelolaan persampahan regional adalah dapat dipantau melalui sebuah sistem mulai dari inputan (sampah masyarakat), proses (upaya untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu) dan output atau keluaran. Dengan demikian, terdapat upaya pengembangan sistem melalui pembangunan TPS-3R di kawasan-kawasan pemukiman masyarakat. DIharapkan dengan pembangunan

TPS-3R tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan dengan lingkungan yang bersih pada tingkat pemukiman.

6) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem AIr Limbah

Sistem air limbah domestik (cucian, BAB, BAK, dan limbah lainnya) memerlukan satu pemrosesan yang perlu dikelola secara terpadu. Pengembangan tersebut mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dengan SPAL-D (sistem Pengolahan air Limbah - Domestik). Diharapkan dengan pengolahan SPAL-D tersebut dapat meningkatkan kualitas tanah dan air disekitar masyarakat dari cemaran-cemaran akibat limbah domestik. Seperti contohnya di kawasan Kecamatan Badas dan Kecamatan Pare didapati tingginya cemaran bakteri *e-coli* yang berdampak pada kecukupan gizi dan pertumbuhan masyarakat (*stunting*) pada air permukaan (sungai) yang perlu dengan segera untuk ditindaklanjuti dengan pembangunan SPAL-D.

7) Penataan Bangunan Gedung

Upaya untuk menjaga pemukiman menjadi aman, nyaman, dan sesuai dengan peruntukannya dilaksanakan melalui penataan bangunan gedung. Selain untuk mengembangkan pemukiman yang sehat, penataan bangunan gedung juga digunakan agar pembangunan sesuai dengan spesifikasi teknis dari ketentuan-ketentuan terkait. Diharapkan dengan hal tersebut dapat meningkatkan etika dan estetika pemukiman di wilayah masyarakat.

8) Kawasan Permukiman

Pola pembangunan yang kurang seimbang antara daerah pedesaan dan perkotaan, upaya membuat keseimbangan ini hendaknya dilihat dalam kebutuhan secara utuh karena kenyataan saat ini pembangunan infrastruktur di kedua kawasan ini relatif timpang sehingga memunculkan berbagai masalah. Muncul pandangan bahwa kawasan perdesaan tidak lebih baik jika dibandingkan kawasan perkotaan yang seharusnya tidak terjadi. Idealnya semua kebutuhan pengembangan perdesaan seperti tersedianya infrastruktur yang mendukung perdesaan. Diharapkan dengan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas permukiman di kawasan perdesaan.

9) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Permukiman dengan kehidupan lingkungan dan masyarakat yang menduduki, mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. PSU tersebut perlu untuk ditingkatkan baik itu pada tingkat pedesaan ataupun kawasan perkotaan. PSU ini terdiri atas Lampu Jalan, Drainase, dan hal-hal lain yang menunjang kehidupan masyarakat dan lingkungan pada pemukiman tersebut. Diharapkan dengan pembangunan tersebut dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat pada pemukiman tersebut.

10) Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuK Pembangunan

Dalam pembangunan sebuah gedung maupun prasarana lain, terdapat belanja modal yakni belanja kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Hal tersebut sebagaimana hak dari masyarakat pemilik lahan untuk mendapatkannya.

Diharapkan dengan hal tersebut, hak-hak masyarakat terutama yang terdampak dapat dipenuhi disamping tetap melanjutkan pembangunan/

11) Redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah obyek landreform oleh pemerintah melalui tanah kelebihan maksimum maupun tanah *absentee,* kepada pihak-pihak yang dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan baik asalkan memenuhi syarat. Program *landreform* ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terutama yang mendapatkan bantuan dari *landreform* tersebut.

d. Realisasi Sasaran dan Program

Sasaran 5.1.1 : ***Meningkatnya sarana infrastruktur daerah***	***Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik***	**88,91%**	**79,08**	**88,94%**	**63.082.283.562,00**	**62.811.507.872,00**	**99,57**
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	**81,10 %**	**69,18**	**85,30%**	**8.537.589.200,00**	**8.525.087.700,00**	**99,85**
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	**62,50%**	**62,50%**	**100%**	**1.501.039.100,00**	**1.435.819.335,00**	**95,66**
Sasaran OPD DPUPR: **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Meningkatnya panjang jalan Jaringan Kabupaten dalam kondisi baik.**	**1.088,44**	**968,18**	**88,94%**	**63.082.283.562,00**	**62.811.507.872,00**	**99,57**

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Meningkatnya panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik**	**141.786,32**	**120.946**	**85,30%**	**8.537.589.200,00**	**8.525.087.700,00**	**99,85**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Tersusunnya Peraturan Penataan Ruang yang mendukung Peningkatan Infrastruktur**	**2**	**2**	**100%**	**1.501.039.100,00**	**1.435.819.335,00**	**95,66**
	Cakupan Desa atau Kelurahan yang telah layanan air minum	82%	86%	104.88%	5,588,499,698.00	4,364,474,167.00	78.10
	Persentase Rumah Layak Huni	33.25%	41.14%	123.73%			
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	82.00%	86%	104.88%	5,588,499,698.00	4,364,474,167.00	78.10
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	50%	72.22%	144.44%	3,803,400,000.00	3,801,039,374.00	99.94
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan SPALD yang aman	6.43%		0.00%	4,871,600,000.00	4,869,496,691.00	99.96
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	100%	100%	100%	175,888,366,432.00	173,548,590,943.00	98.67
Program Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	3,550,011,300.00	3,128,330,722.00	88.12

	yang memiliki izin						
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	100%	100%	59,044,038,822.00	58,096,962,497.00	98.40
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	50%	25%	50%	5,908,061,400.00	5,580,899,256.00	94.46
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Penyelesaian Redistribusi tanah yang telah ditetapkan	50%	70.67%	141.34%	696,767,300.00	580,004,283.00	83.24

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien

Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**TUJUAN JANGKA MENENGAH**			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANG**
Sasaran 5.1.1 :Meningkatnya sarana infrastruktur daerah							
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	968,18 KM	1.097,98 KM	88,17	88,94	99,57	(10,63)	Cukup Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	120.946 M	161.192,34 M	75,03	85,18	99,85	(14,59)	Cukup Menunjang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2 buah	5 buah	62,50	100	95,66	4,34	Menunjang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	86%	93.15 %	92%	104.88%	78.10%	26.78%	Sangat Menunjang
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	72.22%	100%	72%	144.44%	99.94%	44.50%	Sangat Menunjang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		14,14 %		0.00%	99.96%	-99.96%	Kurang Menunjang
Program Penataan Bangunan Gedung	100%	100%	100%	100%	98.67%	1%	Menunjang
Program Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	88.12%	12%	Menunjang
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	100%	100%	98.40%	2%	Menunjang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah	25%	100%	25%	50%	94.46%	-44%	Kurang Menunjang

Untuk Pembangunan							
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	70.67%	100%	71%	141.34%	83.24%	58.10%	Sangat Menunjang

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ **Indikator**	**Persentase Jalan dalam Kondisi Baik**
Kabupaten Kediri	79.08%
Provinsi Jawa Timur	89,61%

Capaian Persentase Nilai Tukar Petani Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada diatas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. (Narasi silahkan diganti atau disesuaikan)

g. Faktor Pendukung

Pekerjaan umum yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini berfokus pada aspek-aspek lokasi yang memiliki perhatian tinggi masyarakat. Seperti contohnya Pembangunan akses Bandara, Pemeliharan Jalan baik Pemeliharaan Berkala Jalan, Pelebaran Jalan menuju Standar pada ruas jalan Kabupaten, serta tempat-tempat lainnya yang terfokus pada lokasi-lokasi yang mendapat sorotan masyarakat.

Sebagaimana hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri senantiasa berupaya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sejak awal. Komitmen yang tinggi menyebabkan proses-proses pelaksanaan berjalan dengan optimal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor pendukung dari pelaksanaan program kegiatan tersebut adalah Adanya dukungan dan sinkronisasi yang baik antara stakeholder pengguna air minum sehingga target sasaran bisa tercapai. Luasnya wilayah Kabupaten Kediri sehingga masih ada desa-desa yang belum tertangani. Selain itu pula, Adanya dukungan dan sinkronisasi yang baik antara stakeholder pengguna air minum sehingga target sasaran bisa tercapai.

h. Faktor Penghambat

Faktor cuaca yang tidak menentu dengan intensitas curah hujan yang meningkat pada tahun 2023 ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan umum di Kabupaten Kediri menjadi terhambat. Guna menjaga kualitas fisik dari pembangunan jalan, jembatan dan talud, pekerjaan harus dihentikan ketika hujan turun. Namun demikian, intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai perencanaan.

Penetapan Rencana Tata Ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri dan Rencana Detail Tata Ruang Banyakan – Grogol memerlukan waktu yang cukup lama, karena diperlukan penyesuaian terhadap peraturan – peraturan yang terbaru,selain itu pada proses penetapan melibatkan banyak sektor dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, begitu juga dengan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Kediri. Akhirnya pada akhir tahun 2023, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kediri tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Banyakan – Grogol dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 tahun 2023.

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang masih didapati oleh Pemerintah Kabupaten Kediri ada pada lokasi geografis. Luasnya wilayah Kabupaten Kediri sehingga masih ada desa-desa yang belum tertangani, baik persentase perumahan layak huni dan cakupan layanan air minum masih belum dapat menjangkau daerah-daerah yang berada di tempat-tempat yang bersebaran.

i. Kesimpulan

Kinerja DPUPR pada Tahun 2023 ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pengerjaan peningkatan kualitas di berbagai tempat *site* yang menjadi sorotan masyarakat menyebabkan upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan masih belum dapat tercapai. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas jalan, jembatan, dan irigasi di Kabupaten Kediri telah terlaksana dengan baik terutama dengan berkurangnya keluhan masyarakat

Terkait Peraturan juga sudah disahkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peraturan Bupati Tentang Rencana Detail Tata Ruang Banyakan-Grogol.

Melihat dari hal diatas capaian pada tahun 2022 ini, Cakupan Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum adalah 85,23% melebihi target yang telah ditetapkan yakni 78,28% dengan realisasi anggaran 5.941.065.156,00 dari anggaran yang telah ditetapkan 6.282.966.300,00. Capaian persentase rumah layak huni pada tahun 2022 ini adalah 29,95 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 16,48% dari realisasi anggaran 13.306.280.110,00 dari anggaran sebesar 13.312.796.450,00.

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan kinerja sarana infrastruktur daerah yang banyak terkendala dalam urusan regulasi maupun cuaca yang diidentifikasikan sebagai berikut;

1. Terkait Regulasi Tata Ruang telah disahkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Bupati Tentang Rencana Detail Tata Ruang Banyakan – Grogol.
2. Terkait Cuaca, memang tidak dapat diprediksi tapi kadang -kadang bisa mempengaruhi rencana penyelesaian pekerjaan jalan maupun Irigasi yang sedang dalam proses .



Gambar 15 : Bupati Kediri bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Pembangunan Bandar Udara Dhoho di Kecamatan Tarokan

14. Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah

Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan.

Menurut Kementerian Perhubungan, transportasi pribadi maupun transportasi umum sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Perkembangan transportasi yang cepat ini seyogyanya beriringan dengan peningkatan pelayanan transportasi. Hal ini membuat masyarakat desa mengalami kesulitan dalam mengakses layanan-layanan transportasi.

Transportasi dewasa ini menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, ekspektasi dan tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan transportasi daerah semakin tinggi. Tuntutan terkait pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi daerah di Kabupaten Kediri semakin tinggi.

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat peningkatan sarana infrastruktur daerah adalah hal yang wajib untuk diperhatikan.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Penerapan Area Traffic Control System (ATCS) pada semua persimpangan di wilayah Kabupaten Kediri.	Mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimalisasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan dengan menambah titik lokasi ATCS di 8 titik lokasi persimpangan jalan di wilayah Kab kediri sesuai dg anggaran yang disediakan
2	Melakukan implementasi pengembangan E-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Mengoptimalkan pengembangan E-Goverment melalui pegnembangan sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor (SINKRON) di UPTD PKB, dan sistem layanan aduan masyarakat lewat HALO MASBUP.
3	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat baik terkait pelayanan di UPTD PKB maupun pelayanan terkait pemenuhan sarana prasarana LLAJ guna meningkatkan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dengan mengoptimalkan kebutuhan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor baik di UPTD PKB maupun sarana prasarana LLAJ melalui kegiatan pengujian Kendaraan bermotor dan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten

Sumber LKjIP Dinas Perhubungan 2023

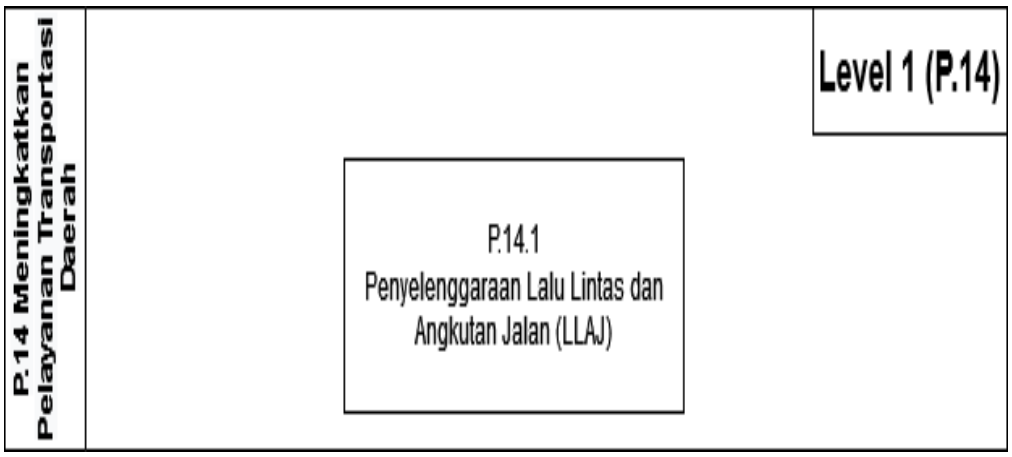
b. Permasalahan dan Tantangan

Terdapat dua hal yang menjadi dasar infrastruktur yang menunjang perekonomian di Kabupaten Kediri. Infrastruktur perhubungan yang telah dikembangkan. Secara umum permasalahan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan sarana infrastruktur daerah telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Kediri belum memiliki area / kawasan tertib lalu lintas yang sesuai dengan kualifikasi Penghargaan Wahana Tata Nugraha, dan belum ada taman lalu lintas.
2. Minat Masyarakat menggunakan angkutan umum menurun.
3. Potensi pasir yang masih besar di wilayah Kab Kediri dan ketidakdisiplinan sopir angkutan pasir khususnya dari arah Blitar.
4. Jumlah sarana dan prasarana perparkiran masih kurang.
5. Belum memiliki SDM yang berlatar belakang IT dari SDM tenaga teknis bidang Perhubungan.
6. Penanganan masalah dampak lingkungan dari sektor Transportasi belum optimal.
7. Belum memadainya sarana prasarana di perlintasan sebidang.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perhubungan upaya pencapaian peningkatan didukung dengan sub-proses dibawah ini:



Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi daerah melalui kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengutamakan keselamatan dan menyinergikan segala potensi guna memaksimalkan kinerja LLAJ.

Adapun maksud dari penyelenggaraan LLAJ adalah mensinergikan sistem penyelenggaraan LLAJ yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya antara Dinas Perhubungan dan OPD terkait;

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 5.1.2 : ***Meningkatnya pelayanan transportasi daerah***	***Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan***	**70**	**86.25**	**123,70**	9,348,175,529.00	9,219,487,750.00	98.62
Sasaran OPD Dinas Perhubungan: **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**Cakupan Kinerja pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**70**	**70**	**100**			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan	40	40	100	9,348,175,529.00	9,219,487,750.00	98.62
	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	32,86	21,40	65,12			
	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	86,67	98,57	113,73			
	Persentase angkutan jalan yang memenuhi	97	94,31	97,23			

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
	standar keselamatan						

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	**Keterangan**
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**		
	TUJUAN JANGKA MENENGAH	**EFISIENSI SUMBER DAYA**	

	REALISASI KINERJA	TARGET RPJMD	CAPAIAN RPJMD	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI	KETERANGAN
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 5.1.2 : ***Meningkatnya pelayanan transportasi daerah***	**86,59**	**70**	**123,70**	**123,70**	**82,89**	**-40**	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	63,57	85%	123,6	99,29	99,13	0	Cukup Menunjang

f. Benchmarking/ Perbandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah perbandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/**Indikator**	**IKM Dinas Perhubungan**	**Cakupan Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**
Kabupaten Kediri	86,59	70
Kota Kediri	82,89	22,40
Provinsi Jawa Timur	88,11	No Data
Agregat Nasional	No Data	No Data

Capaian Kinerja Perhubungan Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada di atas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

g. Faktor Pendukung

Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan di UPTD PKB dengan pemberian AC, kursi dan beberapa perabotan penunjang lainnya. Dalam hal perparkiran, terdapat adanya pertambahan anggaran dari sisa belanja bagi hasil pihak ketiga karena sesuai dengan realisasi PAD parkir berlangganan. Hal tersebut turut serta meningkatkan layanan perparkiran di Kabupaten Kediri.

h. Faktor Penghambat

Secara umum, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hanya saja perbedaan harga antara harga real dengan satuan harga dalam SIPD menyebabkan penyerapan anggaran masih belum dapat berjalan optimal.

i. Kesimpulan

Capaian IKM layanan perhubungan telah mencapai 86,59. Melebihi target yang telah ditetapkan yakni 70. Hal tersebut tentu akan senantiasa ditingkatkan secara simultan untuk lebih baik lagi kedepannya. Dengan melihat capaian akhir RPJMD dengan Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan sebesar 85.

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat ketercapaian target diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perhubungan masih merasa perlu untuk menyusun strategi penyerapan anggaran dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran, perlu adanya penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan public, meningkatkan pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai, mensosialisasikan WBS di bidang layanan perhubungan kepada masyarakat, melakukan reviu SOP secara berkala, menindaklanjuti hasil SKM, meningkatkan pelayanan yang berintegritas.



Gambar 16 : Kegiatan Bupati dalam sektor pariwisata

15. Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata

Adanya pariwisata dengan kearifan lokal tidak hanya menarik wisatawan karena destinasinya saja. Melainkan juga dengan kearifan budaya lokal yang dapat membangkitkan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja. Sebenarnya, Indonesia sudah lama mengembangkan seni budaya dengan kearifan lokal dalam berbagai event dan festival yang dapat menarik wisatawan.

Merujuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dijelaskan bahwa optimalisasi pariwisata sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, Pemerintah mengembangkan desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

Meninjau penjelasan dari Kementerian Sekretariat Negara peran strategis pariwisata dalam perekonomian diprediksi akan semakin meningkat pada masa-masa mendatang, karena pariwisata mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (*The World's Largest Industry*), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan daerah, devisa negara, persentase PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata dijelaskan sebagai lokomotif perkembangan perekonomian pasca Covid-19 di berbagai tempat di seluruh dunia.

Selain hal diatas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menjelaskan tentang empat pilar fokus yang perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun empat pilar tersebut adalah;

1. Pengelolaan bisnis pariwisata yang berkelanjutan dengan kenyamanan wisatawan,
2. Partisipasi ekonomi masyarakat berkelanjutan jangka panjang,
3. Keberlanjutan budaya yang harus selalu dikembangkan, diadaptasi dengan teknologi dan dijaga,
4. Serta aspek dampak pariwisata terhadap lingkungan.

Tingginya antusias masyarakat akan wisata yang berkualitas menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Antusias yang tinggi di masa-masa modern ini akibat munculnya sosial media, menarik perhatian banyak pihak untuk datang dan berwisata pada tempat-tempat tersebut. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri berupaya agar antusiasme masyarakat tersebut tidak menghilang namun dapat

dimanfaatkan dengan baik, terutama dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Kediri.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Upaya internalisasi dan integralisasi berbagai sektor pembangunan (pariwisata, pendidikan, perdagangan, pertanian dan peternakan, dan sektor-sektor yang lain) sehingga tercipta sinergitas yang saling mendukung satu sama lain.	Upaya internalisasi dan integralisasi berbagai sektor pembangunan telah dilakukan dengan satuan kerja Pendidikan di Kampung Inggris, Pertanian dan Peternakan dengan Wisata Nanas, dan Perdagangan dengan Konsep Wisata Pasar Wates dan Pasar Ngadiluwih

b. Permasalah dan Tantangan

Dalam upaya mengoptimalkan pariwisata berbasis seni budaya lokal di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengidentifikasikan permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kompetensi SDM kepariwisataan yang ditandai dengan masih minimnya tenaga kerja bersertifikat.
2. Tata kelola daya tarik wisata belum optimal, terutama pada bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan upaya perbaikan.
3. Belum diterapkannya digitalisasi pada pengelolaan obyek wisata dan masih rendahnya kesadaran insan-insan pariwisata terhadap pelestarian lingkungan.
4. Sarana dan prasarana di obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan untuk memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan.

5. Perlu terciptanya konektivitas antar daya tarik wisata, sebab belum ada transportasi wisata antar Daya Tarik Wisata.
6. Masih minimnya return tourist adalah wisatawan akan terkesan sehingga ingin datang dan datang lagi di Kabupaten Kediri.
7. Perlunya mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
8. Perlunya peningkatan kerjasama kepariwisataan dan kebudayaan untuk peluang investasi yang aman dan kondusif.
9. Masih belum lenyapnya virus Covid-19 di Indonesia yang sewaktu-waktu bisa timbul kembali menjadi pandemi dan regulasi PPKM dengan tertutupnya objek wisata.

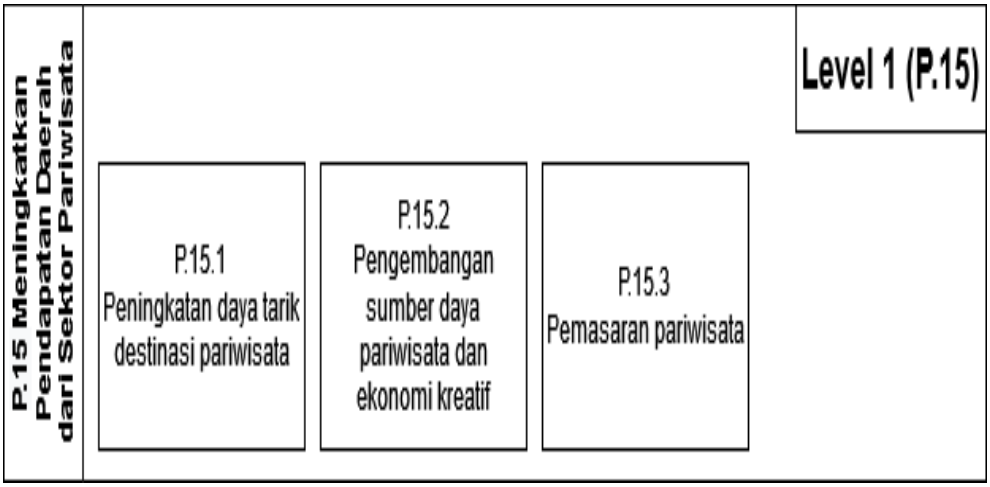
Kendati dengan permasalahan yang ada di atas tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melihat ada banyak sekali peluang-peluang yang harus dimanfaatkan, terutama dapat meningkatkan peran pembangunan berbasis kepariwisataan yang memiliki dampak ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka pertumbuhan leisure (konsumsi berbasis wisata) yang juga menambah potensi pasar pariwisata di Kabupaten Kediri.
2. Besarnya potensi seni budaya daerah dan luasnya daerah pemasaran merupakan peluang untuk berkembangnya kesenian daerah Kabupaten Kediri.
3. Tingginya peran serta masyarakat dalam membangun pariwisata di Kabupaten Kediri.

4. Peningkatan konsep eduwisata di Kampung Inggris, Kecamatan Pare.
5. Besarnya komitmen pimpinan dalam membangun pariwisata berbasis seni budaya di Kabupaten Kediri.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Melihat kompleksnya permasalahan terkait infrastruktur di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyusun rencana dan upaya pencapaian peningkatan dengan upaya dibawah ini:



1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

   Mengembangkan Destinasi Pariwisata baru dan Meningkatkan Kualitas sarana prasarana yang ada di kawasan wisata beserta pendukung (penunjang) sekitarnya, karena Destinasi Wisata harus unik/khas dan beda , tidak hanya bagus.

2) Pemasaran Pariwisata

Mempromosikan potensi wisata unggulan dan seni budaya ke dalam dan luar Kabupaten Kediri, melalui berbagai media yang ada (cetak, audio, audio visual, jejaring sosial, dan media sosial lainnya) agar menarik stakeholder pariwisata berskala lokal, regional ,nasional maupun internasional agar membuka usaha kepariwisataan di Kabupaten Kediri.

3) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan kualitas SDM di bidang pariwisata , kesenian , dan budaya dengan Fasilitasi Pembinaan, Pelatihan, Pembekalan dan Sertifikasi di bidang ketenagakerjaan agar mengembangkam profesionalisme dan kualitas sesuai bidangnya di Kabupaten Kediri .

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 6.1.1 : **Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata**	**Pertumbuhan PAD Pariwisata**	3%	70.74%	2358.00 %	6,887,418,139.00	6,632,212,936.00	96.29%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	7.50%	12.19%	162.53%	4.136.439.386	95,77%	66,76
Program Pengembangan Sumber Daya	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi	8.00%	21.44%	268.00%	248.417.141	92,86%	175,14

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	kreatif yang berkompetensi dasar						
Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	1 Hari	1 Hari	100%	2.247.356.409	97,69%	2,31

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 6.1.1 : **Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata**	**70.74%**	**9%**	**786.00%**	**2358.00%**	**96.29%**	**2261.71**	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	12.19%	15%	81,26%	162.53%	95,77%	66,76	Sangat Menunjang
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	21.44%	9%	238,22%	268.00%	92,86%	175,14	Sangat Menunjang
Program Pemasaran Pariwisata	1 Hari	2 Hari	50%	100%	97,69%	2,31	Menunjang

f. Faktor Pendukung

Fasilitas penunjang kenyamanan wisatawan di objek-objek wisata daerah semakin menarik perhatian para wisatawan, hal tersebut secara langsung meningkatkan kenyamanan wisatawan di objek-objek wisata tersebut. Selain itu pula, diakhirinya status darurat Covid-19 dan dibukanya objek wisata Simpang Lima Gumul (SLG), Gunung Kelud, dan Gunung Wilis secara langsung menambah kunjungan wisata.

g. Faktor Penghambat

Secara umum, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun status darurat Covid-19 bisa diberlakukan kembali jika virus Covid-19 tidak terkendali, sehingga kunjungan wisata yang direncanakan akan mengalami penurunan yang tinggi.

h. Kesimpulan

Capaian pertumbuhan PAD Pariwisata mencapai 94,59%, melebihi target yang telah ditetapkan yakni 1%. Hal tersebut ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar 2.000.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar 2.898.646.000,00.

Dengan capaian tersebut tentu akan senantiasa ditingkatkan secara simultan untuk lebih baik lagi kedepannya. Dengan melihat capaian akhir RPJMD dengan melihat target akhir pertumbuhan PAD Pariwisata mencapai 9%. Kendati demikian, pertumbuhan pada beberapa tahun kedepan akan mengalami kenormalan sama halnya seperti pra-Covid-19.

i. Rencana Tindak Lanjut

Melihat ketercapaian target diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih merasa perlu untuk meningkatkan peran pariwisata di Kabupaten Kediri, terutama dengan semakin meningkatnya target pertumbuhan pada tahun depan, yang mana memiliki peningkatan yang cukup optimal.



Gambar 17 : Sumber Mata Air

16. Sasaran Strategis 16

Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Merujuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lingkungan yang lestari penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan generasi selanjutnya. Agar tetap mendapatkan hidup layak, salah satu yang harus diupayakan generasi kini yakni merawat lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan iklim. Utamanya dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Untuk urusan penanganan isu perubahan iklim, tergambar salah satunya pada inisiasi pemerintah.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lingkungan keberlanjutan adalah kondisi lingkungan ideal yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Dalam perkembangannya, tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi saja, hal tersebut melibatkan hukum internasional dan nasional, perencanaan kota dan transportasi, gaya hidup lokal dan individual, serta konsumerisme etis. Cara hidup yang lestari dapat dilakukan dengan menyesuaikan gaya hidup individu dengan melestarikan sumber daya alam.

Keinginan masyarakat Kabupaten Kediri untuk menghasilkan kualitas lingkungan yang baik terus menerus diupayakan. Hal tersebut selain digunakan untuk kenyamanan masyarakat, digunakan pula untuk menunjang indikator-indikator yang lain seperti usia harapan hidup, produktivitas pertanian, kualitas air minum dsb. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Lingkungan	Menyelenggarakan tanam pohon bersama, menyelenggarakan kesadaran kebersihan dan penggiatan daur-ulang baik di sekolahan maupun lingkungan
2	Berkoordinasi dengan SKPD lain terkait urusan-urusan lingkungan Adiwiyata dan Adipura	Koordinasi dilakukan dengan Dinas PUPR terkait Penataan Ruang, terutama kawasan tutupan lahan Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan yang menjadi peserta Adiwiyata baik tingkat Kabupaten maupun Tingkat Provinsi

b. Permasalahan dan Tantangan

Dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengidentifikasikan permasalahan dan tantangan peningkatan kualitas lingkungan sebagai berikut:

1. Masih adanya masyarakat yang membuang limbah domestik dan Perusahaan yang membuang limbah ke dalam badan sungai, hal tersebut belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan belum adanya pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.
2. Jumlah kendaraan dan peningkatan genset perusahaan yang semakin tinggi dan meningkatkan jumlah emisi udara.
3. Penerapan sanksi administrasi belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya opsi pembinaan bagi perusahaan.
4. Masyarakat masih kurang peduli apabila terjadi pencemaran lingkungan di sekitarnya sehingga tidak melapor, hal tersebut juga dikarenakan belum adanya pegawai pengawas lingkungan hidup yang dapat secara *proaktif* memantau kualitas dan pencemaran lingkungan di masyarakat.
5. Belum optimalnya integrasi data terhadap RTRW, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Andalalin, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), TDUP, dsb.
6. Selama 10 tahun Kabupaten Kediri belum mendapatkan piagam Adipura diakibatkan kurangnya kolaborasi antar *stakeholder*, dimana selama ini pemahaman yang berkembang adalah Adipura menjadi tanggung-jawab Dinas Lingkungan Hidup saja.

7. Hal yang sama juga terjadi pada piagam Adiwiyata, dimana masih tingginya pemahaman dari tenaga kependidikan yang melihat adiwiyata sebagai program tambahan yang merepotkan dan mengganggu rutinitas belajar-mengajar.
8. Pengelolaan taman kota dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan personil yang terbatas. Perlunya kesadaran masyarakat akan kelestarian dan kebersihan taman lingkungan adalah tanggung-jawab bersama.
9. Masih tumpang-tindihnya kewenangan SOP dan Proses Bisnis dalam penebangan pohon, terutama dari institusi eksternal seperti PLN, PT Telkom, dsb. Padahal, angka permohonan penebangan pohon semakin meningkat akhir-akhir ini.
10. Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah dikarenakan belum optimalnya OPD kewilayahan dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan bersama.
11. Laboratorium Lingkungan Hidup yang masih belum dapat digunakan secara optimal baik dari SDM maupun kelaikan peralatan

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upaya pencapaian sasaran, didukung dengan pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam Proses Bisnis sebagaimana berikut;

P.16 Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Level 1 (P.16)				
	P.16.1 Perencanaan lingkungan hidup	P.16.2 Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	P.16.3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	P.16.4 Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	P.16.5 Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	P.16.6 Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	P.16.7 Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	P.16.8 Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	P.16.9 Penanganan pengaduan lingkungan hidup	P.16.10 Pengelolaan persampahan

Dalam upaya melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup tengah merencanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

   Program ini memuat kegiatan pengendalian pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan kualitas udara di Kabupaten Kediri, dimana indikator kinerja dari program ini adalah Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu. Kinerja pengukuran kualitas lingkungan didukung oleh kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. (untuk diberikan penjelasan tujuan, maksud, dan manfaatnya)

2) Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

program ini berisi tentang fasilitasi, koordinasi dan verifikasi terhadap pemenuhan komitmen izin penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten. Indikator kinerja dari program ini adalah Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3. pada tahun 2021 telah terbit Peraturan Pemerintah nomor 22 tentang PPLH sebagai turunan dari Undang-undang Cipta Kerja. Berdasarkan PP 22 tersebut bahwa kabupaten tidak ada kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi teknis terkait LB3 sehingga kegiatan pada program ini banyak berkaitan dengan pengawasan dan koordinasi. (untuk diberikan penjelasan tujuan, maksud, dan manfaatnya)

3) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

   Program ini memuat kegiatan pengawasan dan pembinaan pada usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan terhadap komitmen dalam pengelolaan lingkungan.(untuk diberikan penjelasan tujuan, maksud, dan manfaatnya)

4) Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

   Program ini memuat kegiatan penanganan pengaduan lingkungan dari berbagai kanal pengaduan seperti halo masBup, Media sosial, SP4N lapor, dan surat aduan. Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Penanganan pengaduan/kasus pencemaran lingkungan yang dapat diselesaikan(untuk diberikan penjelasan tujuan, maksud, dan manfaatnya)

5) Pengelolaan Persampahan.

Program ini memuat kegiatan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja Prosentase sampah. Kegiatan pengelolaan persampahan berupa penanganan dan pengurangan baik yang dilakukan pemerintah daerah maupun oleh kelompok masyarakat dibawah binaan pemerintah daerah. (untuk diberikan penjelasan tujuan, maksud, dan manfaatnya)

6) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Program ini memuat kegiatan pengelolaan RTH dan konservasi sumber daya alam guna mendukung peningkatan pencapaian target indeks kualitas air dan indeks kualitas udara serta mempertahankan luasan tutupan lahan(untuk diberikan penjelasan tujuan, maksud, dan manfaatnya.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 7.1.1 : **Meningkatnya kualitas lingkungan**	**IKA**	62.82	62.97	100.24%	29,448,030,507.00	27,924,119,609.00	94.83%
	IKU	77.56	86.12	111.04%			
	IKTL	37.42	40.49	108.20%			

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	67%	83%	123.88%	1,710,370,235.00	1,655,881,731.00	96.81%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	77.38%	100%	129.23%	2,137,461,510.00	1,976,856,049.00	92.49%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan	0.04%	0.035%	87.50%	10,342,898,300.00	10,103,114,672.00	97.68%
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	224 Usaha/Kegiatan	163 usaha/kegiatan	72.77%	66,730,500.00	65,640,137.00	98.37%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	69%	108%	156.52%	229,087,609.00	157,254,514.00	68.64%

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
HIDUP (PPLH)							
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	30%	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	19.74%	17.35%	87.89%	193,302,403.00	165,281,943.00	85.50%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	3 Kali	1 kali	33.33%	18,220,200.00	6,380,000.00	35.02%
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	85.00%	100%	117.65%	49,135,000.00	16,984,700.00	34.57%

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase sampah yang dikelola	56.54%	29.68%	52.49%	14,700,824,750.00	13,776,725,863.00	93.71%

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	**Keterangan**
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 7.1.1 :	**62.97**	**62.97**	**100.00%**	**106.49%**	**94.83%**	**11.67%**	
Meningkatnya kualitas lingkungan	**86.12**	**77.68**	**110.87%**				
	40.49	**37.42**	**108.20%**				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	83%	100%	83.00%	123.88%	96.81%	27.07%	Sangat Menunjang
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	80.98%	123.49%	129.23%	92.49%	36.75%	Sangat Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0.035	0.05	70.00%	8750.00 %	97.68%	8652.32 %	Cukup Menunjang
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	163 usaha/kegiatan	374	43.58%	72.77%	98.37%	- 25.60%	Cukup Menunjang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	108%	77.33%	139.66%	156.52%	68.64%	87.88%	Sangat Menunjang

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
HIDUP (PPLH)							
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0	100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Kurang Menunjang
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	17.35%	33.84%	51.27%	87.89%	85.50%	2.39%	Kurang Menunjang
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1 kali	3	33.33%	33.33%	35.02%	-1.68%	Kurang Menunjang
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100%	90%	111.11%	117.65%	34.57%	83.08%	Sangat Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	29.68%	100%	29.68%	52.49%	93.71%	-41.22%	Kurang Menunjang

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah perbandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ Indikator	**(IKLH)**	**(IKU)**	**(IKA)**
Kabupaten Kediri	67,42	86,12	62,97
Kota Kediri	65,38	88,44	62,86
Kabupaten Tulungagung	66,51	85,45	57,06
Kabupaten Malang	69,34	83,45	65
Kabupaten Jombang	63,71	81,98	55,14
Provinsi Jawa Timur	69,59	84,73	55,86
Agregat Nasional	72,54		

Capaian Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri berada di atas capaian Kinerja Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri masih berada di atas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup mendapatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,72 lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan yakni 53. Disamping itu, capaian Indeks Kualitas Air juga mendapatkan capaian 62,22 atau dibawah target yang sudah ditetapkan yakni 66,77, capaian Indeks Kualitas Udara mendapatkan 80,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 77,5, capaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 39,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 37,45. Capaian tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran 23.613.748.225 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 24.595.969.625,00.

g. Faktor Penunjang

Secara umum, faktor-faktor penunjang pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri adalah dengan kuatnya kolaborasi dan sinergi antar sektor, baik itu sektor pemerintahan, sektor swasta, lapisan masyarakat, sekolahan, serta sektor-sektor lainnya yang mendukung pengupayaan peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri. Selain itu, kuatnya dukungan masyarakat terutama dari lapisan LSM pecinta alam dan lingkungan dalam ikut serta mendukung melalui kegiatan-kegiatan penghijauan, menanam pohon di pekarangan, dsb.

Upaya perbaikan kualitas udara dan peningkatan vegetasi melalui kegiatan penanaman pohon kakija, selain itu pula peningkatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) dan pengawasan konservasi sera pengawasan dan penataan industri yang dilaksanakan dengan optimal pada tahun 2022 ini. Hal tersebut menunjang meningkatnya kenaikan kualitas udara dengan peningkatan vegetasi baik di kawasan perkotaan melalui kegiatan penanaman kakija, peningkatan RTHKP dan kegiatan konservasi.

h. Faktor Penghambat

Secara umum pula, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengupayaan peningkatan lingkungan hidup di Kabupaten Kediri terbatas pada kurangnya kesepahaman dan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan baik dan dapat melanjutkan kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan. Penurunan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) dikarenakan adanya keterbatasan pengawasan terhadap industri, terutama industri kecil.

Selain demikian, terdapatnya aliran Sungai Brantas yang membawa cemaran aliran air dari daerah-daerah hulu mulai dari kawasan Batu, Malang, Blitar, Tulungagung hingga ke Kediri. Tidak dapat dipungkiri bahwa cemaran-cemaran tersebut turut memengaruhi perhitungan Indeks Kualitas Air yang diukur oleh Kementerian KLHK dengan sampel air dari Sungai Brantas.

i. Kesimpulan

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 64,72 lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan yakni 53. Disamping itu, capaian Indeks Kualitas Air juga mendapatkan capaian 62,22 atau dibawah target yang sudah ditetapkan yakni 66,77, capaian Indeks Kualitas Udara mendapatkan 80,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 77,5, capaian Indeks Kualitas Lahan sebesar 39,94 melampaui target yang telah ditetapkan yakni 37,45. Capaian tersebut ditunjang dengan realisasi anggaran 23.613.748.225 dari anggaran yang ditetapkan sebesar 24.595.969.625,00.

j. Rencana Tindak Lanjut

Meninjau dari kompleksnya permasalahannya diatas, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama yang berkepentingan dan terlibat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di Kabupaten Kediri. Sosialisasi terkait pengelolaan lingkungan kepada industri kecil, peningkatan kepedulian lingkungan melalui sosialisasi dan bimtek pengelolaan sampah serta peningkatan kesadaran budaya ramah lingkungan kepada masyarakat. Upaya lain yang akan ditingkatkan adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH (Ruang Terbuka Hijau) kawasan perkotaan.



Gambar 18 : Kegiatan Bupati dalam penyelenggraan kegiatan penanggulangan bencana

17. Sasaran Strategis 17

Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana

Sesuai dengan UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penanggulangan Bencana pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada keseluruhan manajemen risiko bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Merujuk data kajian BNPB, kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya gempabumi dan disusul tsunami yang menerjang Aceh dan sekitarnya pada 2004 dan lainnya seperti Gunung Kelud tahun 2014. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak.

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sinergitas antar unsur-unsur masyarakat dalam wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kebencanaan di Kabupaten Kediri saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal tersebut terjadi karena Kabupaten Kediri memiliki tingkat rawan bencana yang cukup tinggi, mulai dari bencana gunung meletus, tanah longsor, serta bencana-bencana lainnya.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Penguatan kapasitas masyarakat dan penggiat bencana	Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), Jambore relawan dan TSBD, apel gabungan siaga bencana, gladi bencana
2	Penguatan data kebencanaan	Optimalisasi Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten (SIKK), data mitigasi bencana, data penanganan kedaruratan bencana dan data rehabilitasi dampak bencana
3	Penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya penanganan kedaruratan bencana	Pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara efektif dengan menggunakan jejaring dan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam rangka penanganan kedaruratan bencana
4	Pembuatan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan dokumen rencana kontijensi cuaca ekstrem	Proses membuat perbub untuk legalitas dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Renkon Cuaca Ekstrem

b. Permasalahan dan Tantangan

Perkembangan penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri menjadi perlu untuk ditingkatkan. Apalagi dengan lokus Kabupaten Kediri yang masuk dalam kawasan rawan bencana.

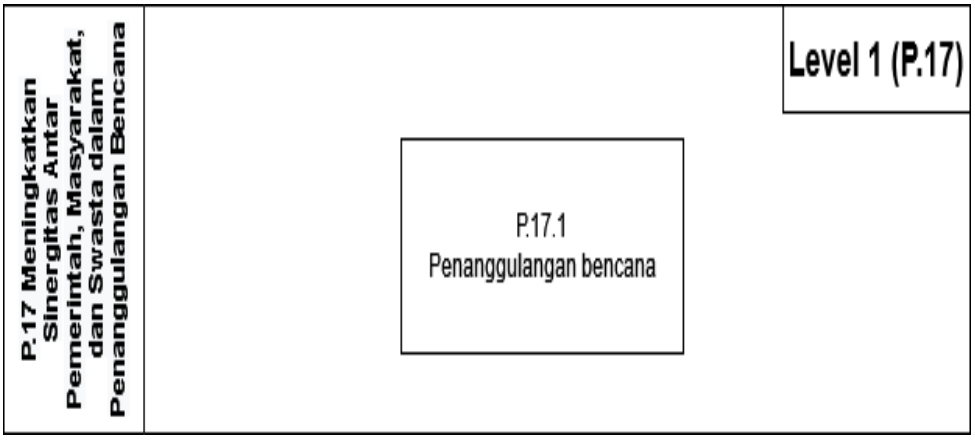
1. Pentingnya peran lintas sektor, penggiat bencana, komunitas, kelompok sosial, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga usaha dan LSM dalam penanggulangan bencana sebagaimana mekanisme koordinasi antara para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam bentuk forum.
2. Jangkauan wilayah rawan bencana yang luas juga merupakan ancaman. Bisa dikarenakan jalan yang rusak, sumber informasi yang belum terjamin kebenarannya,

kurangnya koordinasi dan sarana untuk menjangkau wilayah tersebut belum memadai.

3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman tentang paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (Protap) kebencanaan sampai ke tingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah pemerintahan desa.
4. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait saat proses kedaruratan bencana sampai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan kompleksnya permasalahan dalam pengupayaan perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dengan identifikasi sebagai berikut;



Penanggulangan Bencana Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, urusan bencana menjadi urusan bersama yang berarti seluruh upaya

pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui sinergitas seluruh pemangku kepentingan, baik dari pihak Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta. Sinergitas ini penting dilakukan untuk dapat meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Untuk melakukan sinergitas ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri diharapkan mengacu kepada aturan yang berlaku di nasional dan provinsi agar alur koordinasi tetap berjalan dengan baik, , maka kebijakan dan praktik penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh karena itu pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan, dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respon yang efektif terhadap bencana.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**ANGGARAN**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 7.1.2 : ***Meningkatnya Sinergitas Antar Pemerintah,***	***Indeks Risiko Bencana (IRB)***	**122,65**	**104,53**	**84,79%**	**4.246.568.258**	**3.823.395.373**	**90,03**

Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana							
Sasaran OPD BPBD: **Meningkatnya ketahanan daerah dalam upaya mengurangi risiko bencana**	**Prosentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan IKD**	**0,63**	**0,63**	**100%**	**4.246.568.258**	**3.823.395.373**	**90,03**
Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Ketersediaan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	100%	100%	100%	4.246.568.258	3.823.395.373	90,03

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%

Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 7.1.2 : ***Meningkatnya Sinergitas Antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana***	**104,53**	**122,65**	**85,22%**	**84,79%**	**90,03**	**-5,24**	**Kurang Menunjang**
Sasaran OPD BPBD: **Meningkatnya ketahanan daerah dalam upaya mengurangi risiko bencana**	0.63	0,63	100%	100%	**90,03**	9,97	Menunjang
Program Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	**90,03**	9,97	Menunjang

f. Benchmarking/ Perbandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah perbandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Kabupaten Kediri	104,53	0,63
Kota Kediri	79,10	0,77
Kabupaten Tulungagung	111,34	0,65
Kabupaten Malang	118,63	0,64
Provinsi Jawa Timur	101,65	0,61

Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase BPBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun demikian jarak antara capaian BPBD Kabupaten Kediri masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Indeks Risiko Bencana ataupun Indeks Ketahanan Daerah BPBD Provinsi tidak terlalu lebar berdasarkan variabel yang ada dan bisa diukur sesuai kenyataan di lapangan.

g. Faktor Pendukung

Secara umum, pelaksanaan upaya meningkatkan sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana telah mengalami kemajuan. Dalam perkembangannya, komitmen dan sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam melaksanakan kegiatan berjalan dengan optimal. Simulasi bencana yang dilakukan di kawasan-kawasan bencana di Kabupaten Kediri berjalan dengan baik.

h. Faktor Penghambat

Hambatan pelaksanaan upaya meningkatkan sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana tidak dipungkiri terjadi. Kendati demikian, hambatan-hambatan tersebut tidak signifikan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan baik.

i. Kesimpulan

Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) telah melewati target yang telah ditentukan. Target IRB sebesar 122,65 pada tahun 2023 ini dengan capaian IRB sebesar 104,53. Capaian tersebut ditunjang dari berbagai macam dimensi dalam upaya menurunkan resiko bencana di Kabupaten Kediri.

j. Rencana Tindak Lanjut

Melihat dari kondisi diatas, tindak lanjut yang akan dilakukan telah dipetakan sebagaimana berikut;

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor, masyarakat, swasta, dan dunia pendidikan dalam upaya pengurangan risiko bencana.
2. Mengoptimalkan pencatatan data kebencanaan.
3. Membuat peta detail wilayah yang per ancaman dan per resiko bencana
4. Berusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas personil BPBD



Gambar 19 : Bupati kediri bersama komunitas seniman

18. Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Pelestarian Seni Budaya Daerah

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melihat momentum kebangkitan ekonomi dan mengedepankan pelestarian tradisi lokal serta lingkungan. Fungsi dari pelestarian budaya lokal adalah sebagai identitas lokal.

Selain itu pula, Kemenparekraf mendorong pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) berbasis budaya dan kearifan lokal untuk membangkitkan perekonomian di sektor parekraf pascapandemi. Karena pada kenyataannya, perekonomian dari sektor kepariwisataan kini tengah menjadi potensi terutama dalam kondisi pasca pandemi Covid-19.

Pengembangan pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga dukungan dan sinergi berbagai pihak yakni pemerintah, pengusaha, pengelola objek wisata, masyarakat, media hingga kampus. Sinergi harus terus diperkuat mengingat keberhasilan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata, selalu diperlukan dukungan dan sinergi berbagai pihak.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Melanjutkan sesuai dengan perencanaan kinerja	Kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kinerja

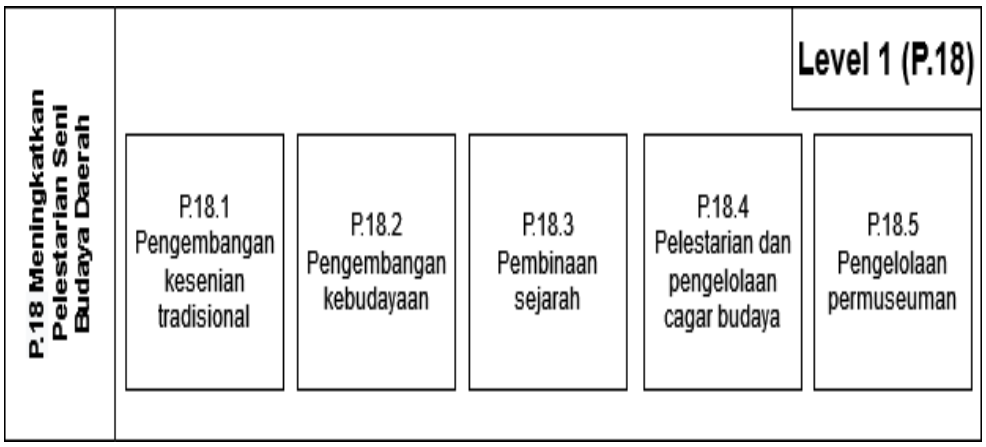
b. Permasalahan dan Tantangan

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya tata kelola organisasi berbasis seni dan budaya.
2. Minimnya event paguyuban seni dan budaya yang modern sebagai sarana promosi dan sounding budaya di Kabupaten Kediri.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Peta Proses Bisnis telah menetapkan beberapa program untuk menunjang peningkatan pelestarian seni budaya daerah sebagai berikut;



1) Pengembangan Kesenian Tradisional

untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai – nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Kediri. Untuk itu masyarakat Kabupaten Kediri perlu mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan. Para pelaku budaya terutama pelestari, penggiat dan maestro budaya yang memiliki dedikasi, prestasi untuk memotivasi agar budaya daerah menjadi lebih maju.

2) Pengembangan Kebudayaan

Sebagai upaya untuk meningkatkan kebudayaan tradisional menjadi tahapan yang lebih maju dan berkembang, maka perlu untuk dikembangkan. Tujuan dari program ini adalah upaya agar kebudayaan tersebut menjadi terstandarisasi dengan menggunakan peralatan-peralatan modern dalam pengembangannya. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan dukungan/partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan karena sesuai dengan zaman.

3) Pembinaan Sejarah

Upaya pembinaan sejarah di Kabupaten Kediri perlu untuk ditingkatkan. Terutama karena pada Abad ke-11 Kerajaan Kediri berdiri dengan kesejahteraan yang cukup tinggi. Oleh karena demikian, upaya ini bertujuan agar pengembangan pembinaan sejarah dapat ditingkatkan. Terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memahami sejarah di Kediri. Baik itu sejarah zaman kerajaan, zaman islam, maupun zaman kontemporer hindia belanda.

4) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sebagaimana pernah berdiri Kerajaan Kediri pada abad ke-11, peninggalan-peninggalan kerajaan berupa artefak-artefak kerajaan menjadi lebih tinggi. Dengan hal tersebut, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Kediri menjadi perhatian untuk dilestarikan dan dikelola. Dengan hal tersebut, diharapkan cagar-cagar budaya yang ada di Kabupaten Kediri dapat bertahan dengan baik.

5) Pengelolaan Permuseuman

Museum di Kabupaten Kediri yakni Museum Bagawanta Bhari di merupakan salah satu museum yang dikelola di Kabupaten Kediri. Selain itu pula, telah dibangun Museum Sri Aji Joyoboyo di Kecamatan Pagu. Diharapkan dengan pengelolaan tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke museum.

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROG	**INDIKATOR**	**KINERJA**	**ANGGARAN**

RAM		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 8.1.2 : **Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah**	**Cakupan event budaya skala kabupaten**						
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan grup kesenian yang diberdayakan	20%	240.50%	1202.50 %	1.834.114.493	1.779.772.440	97,03%
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal yang dilestarikan	34%	33.33%	98.03%	2.524.612.978	2.490.375.970	98,64%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	15%	41.17%	274.47%	1.131.272.833	1.090.481.791	96,39%
Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100%	100.00%	505.500.000	499.672.454	98,85%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100%	100.00%	903.485.000	892.981.000	98,84%
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarpras museum yang dipelihara	100%	100%	100.00%	160.000.000	140.066.000	87,54%

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Keterangan	Kategori
Capaian Kinerja > 100% dan Efisien	Sangat Menunjang
Capaian Kinerja = 100% dan Efisien	Menunjang
Capaian Kinerja 60% > 100%	Cukup Menunjang
Capaian Kinerja < 60%	Kurang Menunjang

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	**KETERANGAN**
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 8.1.2 : **Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah**							

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	**KETERANGAN**
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	240.50%	25%	962%	1202.50 %	97,03%	1105,47	Sangat Menunjang
Program Pengembangan Kebudayaan	33.33%	38%	87,71%	98.03%	98,64%	-0,61	Sangat Menunjang
	Program Pembinaan Sejarah 41.17%	30%	1117%	274.47%	96,39%	178,08	
Program Pembinaan Sejarah	100%	100%	100%	100.00%	98,85%	1,15	Menunjang
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	100%	100%	100.00%	98,84%	1,16	Menunjang
Program Pengelolaan Permuseuman	100%	100%	100%	100.00%	87,54%	12,46	Menunjang

f. **Benchmarking/** Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/ **Indikator**	**Cakupan Event Skala Provinsi/Nasional**	**Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Kabupaten Kediri	**35.86%**	**30.35**
Kota Kediri	No Data	No Data
Kabupaten Tulungagung	No Data	No Data
Kabupaten Malang	No Data	No Data
Provinsi Jawa Timur	No Data	No Data
Agregat Nasional	No Data	No Data

g. Faktor Penunjang

Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Kediri secara umum ditunjang dengan kondisi *post-pandemi*. Kondisi tersebut memberikan *surplus* wisatawan karena pada saat merebaknya Pandemi Covid-19 masyarakat tidak dapat pergi berwisata. Selain itu pula, tidak diperkenankannya penyelenggaraan *event* yang berpotensi mengundang massa dalam jumlah banyak. Melihat hal tersebut, kondisi pasca pandemi ini dengan berbagai macam kelonggaran telah meningkatkan penyelenggaran *event* seni budaya skala kabupaten.

h. Faktor Penghambat

Secara umum, tidak ada faktor penghambat yang signifikan, kecuali adanya rasionalisasi anggaran atas prioritas pembangunan yang menyebabkan beberapa event tidak dapat dilaksanakan.

i. Kesimpulan

Capaian cakupan event budaya skala kabupaten sebagai indikator. Dalam pelaksanaannya pada Tahun 2023, capaian indikator tersebut pada tahun 2023 ini sebesar 35,86% melampaui target yang telah ditetapkan yakni 7%. Hal tersebut ditunjang juga dengan alokasi anggaran sebesar 7,058,985,304.00 dengan realisasi sebesar 6,893,349,655.00.

j. Rencana Tindak Lanjut

Dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan tetap melaksanakan kinerja sesuai dengan Renstra dan RPJMD, melihat semakin tingginya target yang ada pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 20 : Lomba Kediri Half Marathon

19. Sasaran Strategis 19

Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah

Dalam rangka meningkatkan peran pemuda dan menyongsong bonus demografi Kabupaten Kediri, para pemuda harus memiliki dampak dan daya dukung terhadap pembangunan daerah. Hal tersebut berusaha diupayakan agar fenomena bonus demografi di Indonesia utamanya di Kabupaten Kediri dapat terlaksana dengan baik, dimana para pemuda menjadi produktif dan bukannya membebani pembangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjelaskan terdapatnya tiga lapisan yang digunakan untuk mendukung pembangunan pemuda, yakni:

1. Lapisan Pengembangan individu, yang dipetakan dalam domain pendidikan dan domain kesehatan dan kesejahteraan. Pada lapisan ini Pembangunan pemuda

memastikan terpenuhinya layanan dasar pada pemuda untuk memastikan produktivitasnya.

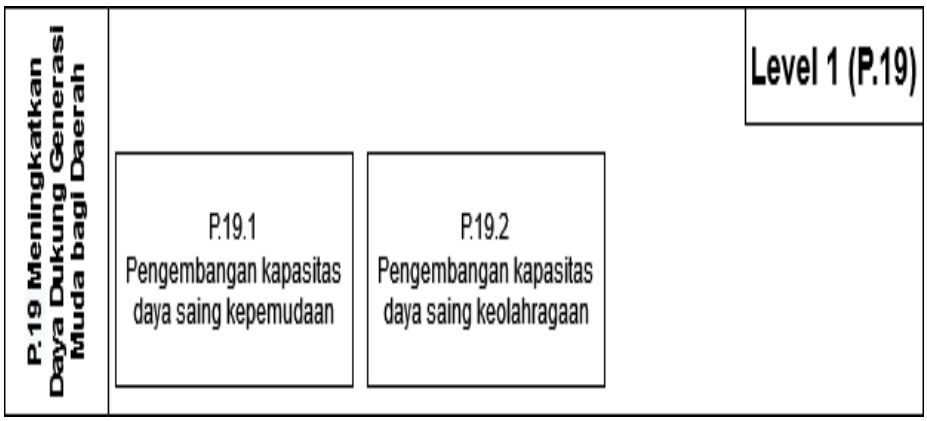
2. Lapisan Pengembangan Penghidupan dan Kesejahteraan, dimana pemuda diharapkan mendapat akses terhadap pekerjaan yang lebih baik sehingga terpenuhi penghidupan yang sejahtera. Pada lapisan pengembangan penghidupan dan kesejahteraan dipetakan dalam domain lapangan dan kesempatan kerja.
3. Lapisan partisipasi dalam bidang kehidupan, pemuda diharapkan dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Penyelenggaraan event/kejuaraan olahraga pelajar yang kompetitif dan selektif	Penyelenggaraan Kediri Half Marathon berskala Nasional yang diikuti kurang lebih 500 pelajar sebagai seleksi bibit unggul atlet atletik
2	Pemberian jaminan kesejahteraan bagi atlet pelajar yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional	Pemberian beasiswa dan uang pembinaan bagi atlet berprestasi sebanyak 40 atlet
3	Penambahan Kuota Peserta Kewirausahaan bagi Pemuda	Seleksi Pemuda Pelopor

b. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Peta Proses Bisnis telah menetapkan beberapa program untuk menunjang pencapaian sasaran kepemudaan dan olahraga daerah sebagai berikut;



1) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pengembangan, pembinaan dan peningkatan kualitas dan prestasi kepemudaan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi kepemudaan dengan melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan kepemudaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran kelompok pemuda dan lembaga-lembaga kepemudaan dengan sasaran yang lebih difokuskan pada bagaimana pemuda dapat ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan SDM pemuda yang berkualitas dalam upaya meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan sebagaimana yang diharapkan yaitu dapat menghasilkan pemuda pelopor, pemuda produktif yang berdaya saing.

2) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pengembangan, pembinaan dan peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga dengan melakukan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan keolahragaan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran pelatih lokal dan atlet pelajar sehingga

dapat menghasilkan SDM olahraga yang mampu meningkatkan prestasi olahraga baik pada tingkat Provinsi, Regional, Nasional maupun pada tingkat Internasional.

c. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 8.1.1 : **Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah**	**Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai**	**85**	**59.5**	**70.00**	**1.327.587.700**	**1.262.823.400**	**95.12%**
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang dibina/dilatih	52	52.25	100.48%	13.247.000	12.094.000	91,30%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	65	62.35	95.92%	1.314.340.700	1.250.729.400	95,16%

d. Analisa **Efisiensi**, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut

efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut:

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 8.1.1 : **Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah**	**59.50%**	**100%**	**59.50%**				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	52.25	55	95.00	100.48%	91.30%	9.18%	Sangat Menunjang
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	62.35	80	77.94	95.92%	95.16%	0.76%	Cukup Menunjang

KEOLAHRAGAAN							

e. Faktor Penunjang

Intensifnya koordinasi dan kolaborasi antar pihak, terutama pada pihak-pihak yang berkepentingan terkait pembangunan kepemudaan dan olahraga. Selain itu pula, pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati Kediri akan menjadi kawah candradimuka pembinaan dan pengembangan daya saing keolahragaan di Kabupaten Kediri, dukungan yang penuh dari Bupati Kediri dalam upaya meningkatkan kualitas atlet Kabupaten Kediri dengan apresiasi atlet Porprov/POPDA juga turut serta berhasil meningkatkan kualitas keolahragaan di Kabupaten Kediri. Bupati Kediri juga berhasil menarik kembali atlet-atlet berprestasi yang berasal dari Kabupaten Kediri untuk berlomba membawa nama Kabupaten Kediri. Penyelenggaraan event olahraga berskala Nasional yaitu Kediri Half Marathon, memberikan suntikan energi positif jiwa kompetitif bagi atlet pelajar

Pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda agar mandiri dan berdaya saing juga turut serta mendongkrak keberdayaan pemuda. Revitalisasi peran Karang Taruna yang berdaya saing telah diupayakan untuk meningkatkan peran pemuda dalam tiga lapisan pembangunan pemuda yakni pembangunan kebutuhan dasar, pembangunan pemberdayaan pemuda, pembangunan peran dan kontribusi para pemuda di Kabupaten Kediri.

f. Faktor Penghambat

Secara umum, faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pengupayaan daya dukung kepemudaan bagi daerah terdapat pada hal-hal teknis dalam hal koordinasi,

kolaborasi, dan sinergi. Kendati demikian, hambatan-hambatan teknis tersebut sudah ditindaklanjuti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

g. Kesimpulan

Pemerintah Kabupaten Kediri telah menetapkan Persentase Prestasi bidang Kepemudaan dan Olahraga yang Dicapai berhasil mendapatkan 59,50% berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni 85%. Kendati demikian, pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kapasitas pemuda dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.262.823.400,00 dari anggaran Rp 1.327.587.700,00 yang telah ditetapkan.

h. Rencana Tindak Lanjut

Dengan melihat kompleksnya permasalahan kepemudaan di Kabupaten Kediri, Penyelenggaraan event/kejuaraan olahraga pelajar yang kompetitif dan selektif; Pemberian jaminan kesejahteraan bagi atlet pelajar yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional; dan Penambahan kuota peserta pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda.



Gambar 21 : Kegiatan dialog Bupati bersama masyarakat Desa

20. Sasaran Strategis 20

Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1) desa memiliki tujuan dalam rangka pembangunan desa yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Kementerian Desa dan PTT meninjau bahwa implementasi UU Desa secara umum telah berhasil dilaksanakan. Hal tersebut terbukti dengan penggunaan tiga persen Dana Desa untuk operasional pemerintahan desa dan juga hingga penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan agar dapat menjawab tantangan ancaman krisis pangan global.

Selain daripada amanat regulasi diatas, peran desa dalam meningkatkan kesejahteraan menjadi sangat penting. meningkatnya angka urbanisasi, pergeseran penduduk dari kawasan perdesaan menuju kawasan perkotaan. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Kediri saja, banyak tempat kini sedang mengalami hal tersebut.

a. Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2022	Upaya Tindak Lanjut Tahun 2023
1	Lebih meningkatkan disiplin yang mencakup kepada ketaatan terhadap ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Melakukan Upaya sinergitas antara DPMPD, Kecamatan dan Kepala Desa agar kegiatan BUMDes di Desa lebih dioptimalkan lagi
2	Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak pelaksanaan kegiatan/program dan lebih mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;	Kedepannya diharapkan peran dan fungsi Lembaga kemasyarakatan desa harus mendapatkan perhatian seperti peran KPM, LPM, dan Karang taruna
3	Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.	Kerjasama antar sekretariat dan bidang di DPMPD akan terus ditingkatkan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efisien dan efektif lagi
4	Peningkatan kerja sama tim / antar bidang sehingga lebih solid dan tidak terjadi pengkotak – kotakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.	Kerjasama antar lintas OPD di Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus ditingkatkan agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih maksimal lagi

Sumber Data: LKjIP DPMPD Tahun 2022

b. Permasalahan dan Tantangan

Cukup banyak faktor yang menyebabkan desa semakin ditinggalkan oleh masyarakatnya. Pembangunan yang kurang masif serta minimnya akses terhadap peluang ekonomi menyebabkan banyak masyarakat desa yang harus meninggalkan

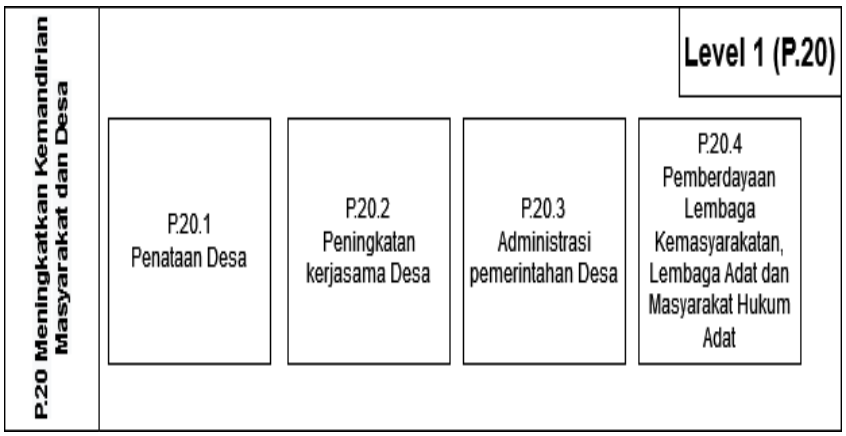
desa untuk pergi mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Kondisi tersebut menjadi perhatian penuh bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Terdiri atas 343 desa yang sedang mengalami permasalahan-permasalahan yang sama.

Perkembangan pembangunan perdesaan di Kabupaten Kediri secara umum terhambat atas masalah-masalah sebagaimana diidentifikasi dibawah ini:

1. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan menuju pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an dan saat ini menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan;
2. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
3. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

c. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Peta Proses Bisnis telah menetapkan beberapa program untuk menunjang pencapaian sasaran kemandirian masyarakat dan desa sebagai berikut;



Dengan kompleksnya permasalahan diatas, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa telah merencanakan upaya-upaya yang telah diidentifikasikan sebagai berikut:

1) Penataan Desa

Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah **Desa yang meliputi** pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan **desa**. Penataan Desa dilaksanakan demi mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penataan Desa bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik

Penataan Desa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan Untuk meningkatkan daya saing desa**.**

2) Peningkatan Kerjasama Desa

Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat

3) Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi Desa merupakan suatu kegiatan pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa guna mengatur, mengelola, dan memantau kegiatan di wilayah desa. Administrasi Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif

4) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) bahwa jenis Kelembagaan Masyarakat Desa meliputi RT, RW, PKK, Karang taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Maksud dibentuknya LKD dan LAD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa

d. Realisasi Sasaran dan Program

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
Sasaran 9.1.1 : ***Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa***	***Persentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM***	**47%**	**84%**	**179**	**15.567.339.000**	**14.846.757.843**	**95.37%**
Sasaran OPD DPMPD: **Meningkatnya Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat**	**Jumlah BumDes terbentuk/Aktif**	**295**	**252**	**85**	**15.567.339.000**	**14.846.757.843**	**95.37%**
Terwujudnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan	**Jumlah Desa Mandiri**	**12**	**50**	**416**			
	Jumlah Desa Maju	**150**	**240**	**160**			
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Desa	**Persentase Lembaga Desa Aktif**	**84**	**83**	**98,8**			
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa	**Persentase Laporan Keuangan yang Tepat**	**86**	**86**	**100**			

SASARAN/PROGRAM	**INDIKATOR**	**KINERJA**			**ANGGARAN**		
		TARGET	**REALISASI**	**CAPAIAN**	**TARGET**	**REALISASI**	**CAPAIAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (4/3*100)**	**6**	**7**	**8 (7/6*100)**
	Waktu						
Program Penataan Desa	Tingkat penyelenggaraan penataan desa	90	90	100	10.924.000	10.499.500	96,11
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama antara desa yang terfasilitasi	85	85	100	22.110.000	21.059.000	95,25
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	90	90	100	7.801.866.100	7.480.004.174	95,87
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang dibina	90	90	100	2.080.910.000	2.004.367.762	96,32

e. Analisa Efisiensi, Capaian Rencana Jangka Menengah

Analisa Program yang menunjang pencapaian sasaran dapat dipetakan dalam dua hal utama yakni capaian kinerja dan penggunaan sumber daya. Capaian kinerja digunakan agar diketahui bahwa bahwa program tersebut telah efektif dalam operasionalisasinya dan penggunaan sumber daya diartikan agar program tersebut efisien dalam operasionalisasinya. Untuk memudahkan pemetaan program yang menunjang pencapaian sasaran, maka disusun matriks pemetaan sebagai berikut;

Kategori	Keterangan
Sangat Menunjang	Capaian Kinerja > 100% dan Efisien
Menunjang	Capaian Kinerja = 100% dan Efisien
Cukup Menunjang	Capaian Kinerja 60% > 100%
Kurang Menunjang	Capaian Kinerja < 60%

SASARAN/PROGRAM	**PENCAPAIAN SASARAN**						
	TUJUAN JANGKA MENENGAH			**EFISIENSI SUMBER DAYA**			**KETERANGAN**
	REALISASI KINERJA	**TARGET RPJMD**	**CAPAIAN RPJMD**	**CAPAIAN KINERJA**	**CAPAIAN ANGGARAN**	**EFISIENSI**	
1	**3**	**4**	**5 (3/4*100)**	**6**	**7**	**8 (6-7)**	**9**
Sasaran 9.1.1 : ***Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa***	**84**	**47**	**179**	**179**	**93.57**	**82%**	
Program Penataan Desa	90	90	100%	100	96,11	3,89	Menunjang
Program Peningkatan Kerjasama Desa	85	85	100%	100	95,25	4,75	Menunjang
Program Administrasi Pemerintahan Desa	90	90	100%	100	95,87	4,13	Menunjang
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	90	90	100%	100	96,32	3,68	Menunjang

f. Benchmarking/ Pembandingan

Sebagai bentuk dan upaya untuk mengetahui kualitas kinerja di Kabupaten Kediri, perlu bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk membandingkan hasil kinerja dengan kawasan yang setara maupun tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Berikut adalah pembandingan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Instansi Pemerintah lainnya;

Instansi/**Indikator**	**Indeks Desa Membangun**	**Nilai SDGs Desa**
Kabupaten Kediri	0,7585	44,70
Kabupaten Nganjuk	0,7591	49,01
Kabupaten Tulungagung	0,7894	44,42
Kabupaten Malang	0,8388	45,28
Provinsi Jawa Timur	0,7807	43,75
Rata-rata Nasional	0,6535	No Data

g. Faktor-faktor Pendukung

Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya capaian IDM di Kabupaten Kediri terjadi karena kuatnya koordinasi dan pengembangan masyarakat di kawasan pedesaan. Koordinasi antar Pemerintah Desa dengan Dinas PMPD sangat intensif. Perkembangan desa yang mandiri dan desa maju semakin tinggi di Kabupaten Kediri.

Hal yang mendasari meningkatnya nilai Desa Maju dan Desa Mandiri di Kabupaten Kediri adalah kuatnya sikap kegotong-royongan. Selain itu, meningkatnya nilai realisasi investasi di Kabupaten Kediri juga turut menunjang partisipasi angkatan kerja yang simultan mendukung tercapainya desa maju dan desa mandiri di Kabupaten Kediri.

Tidak dapat dipungkiri pula kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan perekonomian semakin tinggi. Semakin meningkatnya perkembangan ini menyebabkan nilai IDM meningkat. Pertumbuhan yang endogen dari masyarakat ini semakin lama semakin meningkat.

h. Faktor Penghambat

Secara umum, hambatan dalam pelaksanaan IDM di Kabupaten Kediri sama seperti hambatan-hambatan lainnya. Seperti kendala-kendala dalam hal komunikasi dan koordinasi yang secara langsung dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas PMPD dengan OPD terkait.

i. Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas desa akan terus dikembangkan dan dilanjutkan. Perkembangan peningkatan kesejahteraan melalui potensi-potensi perekonomian dari desa akan tetap dikembangkan. Baik menggunakan pengembangan endogen maupun pengembangan eksternal, akan senantiasa dipelajari dan dikembangkan difasilitasi serta didampingi. Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pembangunan desa memerlukan koordinasi baik dengan OPD terkait, *stakeholder* terkait, serta masyarakat secara umum.

Rencana Tindak Lanjut

Melihat perkembangan capaian IDM (Indeks Desa Membangun) di Kabupaten Kediri yang cukup baik, Pemerintah Kabupaten Kediri masih merasa perlu berbagai macam upaya untuk meningkatkan potensi-potensi dari kawasan perdesaan untuk meningkatkan predikat desa-desa yang ada di masyarakat. Oleh karena demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait baik. Baik dengan Dinas PMD Jawa Timur ataupun Kementerian Desa PDTT untuk menyelaraskan perencanaan dan pembangunan.

Table 21
MATRIKULASI FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENUNJANG KEBERHASILAN SERTA RENCANA TINDAK LANJUT

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Misi 1 **Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**				
	Sasaran:	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Adanya Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, 2. Rehabilitasi Ruang Kelas, 3. Pengangkatan guru PPPK 4. Adanya e-Library Panjalu dengan antusias tinggi	1. Support keluarga dan lingkungan kurang, Pergaulan bebas, 2. Terbatasnya operator dan kader Sekolah, 3. kurangnya motivasi belajar guru untuk lebih adaptif 4. Kurangnya Prasarana Perpustakaan dengan *coverage* Kabupaten yang luas	1. Optimalisasi beasiswa SMA, 2. SMK Boarding School, 3. Kejar Paket Inovatif, 4. Pendirian Sekolah Blank Zonasi dan Regrouping SD 5. Menambah judul dalam e-Library dan mempromosikannya
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	1. Besarnya Komitmen Pimpinan terhadap pencapaian UHC 2. Besarnya komitmen pimpinan terhadap pencapaian SSGI 3. Meningkatnya Kesadaran Gaya Hidup Sehat Masyarakat Pasca Covid–19	1. Kurangnya SDM bidang kesehatan yang bekerja dengan kesesuian keahliannya 2. Dasar Hukum yang seringkali berubah 3. Keluarga Sehat perlu	1. Pemenuhan SDM Kesehatan 2. Mengambil Kebijakan Merujuk pada SDGs (yang bersifat umum dan menjadi

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
				diimplementasikan dan memerlukan bantuan berbagai sektor	rujukan Bappenas) 3. Distribusi FKTP dan FKRTL agar lebih merata 4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Layanan sesuai dengan Prinsip Siskenas (Sistem Kesehatan Nasional)
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	1. Program Strategis Nasional yang bersifat Padat Karya 2. Tingginya angka pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat UMKM 3. Meningkatnya jumlah WUB 4. Meningkatnya Pertanian Kreatif	1. Investasi yang masuk di Kediri bersifat Padat Modal dengan ICOR yang tinggi. Tingkat ILOR juga tinggi. 2. Akurasi data alih kerja menuju wirausaha masih rendah 3. Pelatihan dan Pembinaan bersifat sektoral di masing-masing SKPD	1. Kerjasama antara SKPD terkait peran aktif dalam pemberian informasi Lowongan Kerja, Pelatihan, dan Pembinaan 2. Kerjasama kepada SKPD yang mengurusi UMKM maupun Industri
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	1. Adanya Kebijakan Bantuan Sosial dari Tingkat Pusat yang menjangkau lebih banyak 2. Adanya Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas PPKS 3. Meningkatnya jumlah kelompok Tribina (BKB, BKL, BKR) 4. Meningkatnya Jumlah Kit Sarana	1. Belum terakomodirnya permintaan pelatihan di masing-masing tempat 2. Adanya kendala teknis peraturan dan ketentuan terkait tindak-lanjut aduan masyarakat terkait masalah sosial 3. Kurangnya Kader SDM 4. Kurangnya Jumlah Kader KB	1. Memperbanyak Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan bagi PSKS 2. Mengidentifikasi kebutuhan PMKS 3. Perlunya sosialisasi melalui Pemerintah Desa terkait layanan rehabilitasi sosial

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
				5. Partisipasi Kelompok Tribina Rendah	4. Meningkatkan Pelatihan Kader 5. Mengoptimalkan kinerja Kader-Kader KB 6. Meningkatkan Komunikasi Informasi Edukasi terkait Keluarga Tribina
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	1. Harmonisnya hubungan antar kelompok masyarakat dan politik	1. Hambatan bersifat rendah dan dapat diatasi dengan baik	1. Melanjutkan kegiatan-kegiatan dan menjaga hubungan yang baik masyarakat
	Misi 2 **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**				
	Sasaran:	Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan bersih	1. Disusunnya Dokumen Arsitektur Kinerja 2. Tingginya Antusiasme Masyarakat dalam Mengisi SKM 3. Rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh SKPD terkait 4. Meningkatnya Peran dan Fungsi APIP	1. Rendahnya Koordinasi antar sektor yang mengampu SAKIP 2. Banyak rencana tindak lanjut IKM yang belum ditindaklanjuti 3. Kurangnya kelengkapan dokumen aset yang diamankan 4. Belum optimalnya pengelolaan pengaduan (WBS)	1. Menindaklanjuti Konsep Arsitektur Kinerja 2. Mendampingi dan mengawal upaya tindak lanjut Laporan IKM 3. Inventarisasi Aset dengan SKPD terkait 4. Sosialisasi Indeks Persepsi Anti Korupsi yang ditingkatkan
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	1. Antusiasme Sosialisasi Peraturan Disiplin ASN 2. Antusiasme penyelenggaraan 13 seri webinar	1. Sistem Informasi Kepegawaian Nasional/Daerah masih dalam tahap pengembangan 2. Kurangnya motivasi ASN untuk melanjutkan pendidikan	1. Meningkatkan Sosialisasi dengan aturan terbaru 2. Mempercepat pengembangan Sistem Informasi

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
					Kepegawaian 3. Memberikan dorongan/Motivasi kepada ASN agar melanjutkan pendidikan
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	1. Dilaksanakannya Rencana Aksi Indeks SPBE oleh masing-masing SKPD	1. Proses Pengumpulan data masih belum konsisten 2. Pemanfaatan media sosial dan KIE lainnya masih belum optimal diterima oleh masyarakat	1. Melanjutkan Smart City dan Quick Wins 2. Meningkatkan komubnikasi indomrasidan edukasi publik oleh PPID
	Misi 3 **Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**				
	Sasaran:	Meningkatnya investasi di daerah	1. Adanya PSN Bandara Dhoho 2. Adanya Kesadaran dan Antusiasme Pelaku Usaha untuk melapor	1. Belum adanya kawasan industri di Kabupaten Kediri 2. Belum adanya IPRO (Investment Project Ready to Offer)	1. Menyusun Kajian IPRO 2. Melaksanakan kajian RIPIK (Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten) Kediri
		Meningkatnya daya beli masyarakat	1. Meningkatnya Koperasi yang Self Declare 2. Meningkatnya Jumlah Wirausaha dengan Pelatihan dan Pendampingan di Gerai Inkubasi 3. Program Pengendalian Harga Komoditas Penting dapat dilakukan Lintas Sektor	1. Laporan terkait Kegiatan Koperasi terkadang belum lengkap 2. Rendahnya Pengetahuan Akuntabilitas dan Tata Kelola Bisnis pada UMKM 3. Beberapa Pasar Tradisional masih dalam tahap Pembangunan	1. Mendorong Koperasi melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai ketentuan seperti RAT 2. Melaksanakan Bimtek proses bisnis akuntabel kepada UMKM 3. Melaksanakan Kinerja sesuai dengan ketentuan dan

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
					perencanaan
	Misi 4 **Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan**				
	Sasaran:	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	1. Pemantauan Harga yang berkesinambungan 2. Penyaluran cadangan Pangan Langsung melalui Bapanas dan Bulog	1. Adanya Perubahan Iklim yang menurunkan produksi pertanian 2. Rendahnya ketersediaan Pupuk di Beberapa Tempat 3. Tingginya biaya produksi usaha tani	1. Pemantauan Harga Stok Barang akan terus dilaksanakan 2. Membudayakan Masyarakat Menanam di Rumah 3. Membudayakan Masyarakat meningkatkan konsumsi gizi dan protein
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1. Munculnya Upaya Kreatif seperti Tani Organik dan Greenhouse 2. Prasarana dan Sarana yang meningkat pada JUT (Jalan Usaha Tani) dan Irigasi 3. Meningkatnya Jumlah Angka Penyuluh Pertanian	1. Masih tingginya Anomali Iklim 2. Distribusi Pupuk yang tidak merata 3. Tingginya biaya produksi usaha tani 4. Distribusi Sumber Daya Perikanan belum merata 5. Belum optimalnya Penanganan Penyakit Ikan	1. Memfasilitasi Tani-tani Kreatif 2. Memfasilitasi Pupuk Organik yang sesuai Standar (SNI/Permentan) 3. Meningkatkan Sosialisasi dan Penyuluhan Pembudidayaan Ikan dengan Baik 4. Bimbingan Teknis Pasca Panen dan Digitalisasi Produk Ikan 5. Hilirisasi Produk Pertanian
	Misi 5				

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah				
	Sasaran:	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	1. Fokus pembangunan pada aspek-aspek lokasi yang menjadi prioritas pembangunan. Seperti di bandara ataupun lokasi-lokasi yang menjadi perhatian masyarakat 2. Tingginya komitmen dari Bupati Kediri untuk meningkatkan kualitas infrastruktur daerah 3. Adanya PSN dan proyek-proyek nasional yang meningkatkan kualitas capaian infrastruktur	1. Faktor Cuaca yang tidk menentu menyebabkan pemabngunan Talu dan Irigasi menjadi terhmabat. 2. Terdapatnya perubahan rencana tata ruang karena ada PSN (Proyek Strategis Nasional	1. Meningkatkan kuantitas cakupan air minum 2. Meningkatkan Utilitas Permukiman 3. Memprioritaskan aduan masyarakat dalam hal infrastruktur. 4. Memitigasi cuaca dan tetap mengerjakan pekerjaan sesuai target.
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	1. Penambahan PAD dari Sektor Parkir 2. Peningkatan Rambu-rambu dan Sarana dan Prasarana lain terkait Perhubungan	1. Adanya beberapa Satuan Harga di SIPD yang tidak sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan 2. Rasionalisasi anggaran terkait .kelengkapan jalan	1. Menindaklanjuti hasil IKM dan IKLI 2. Menambah jaringan rambu-rambu
	Misi 6 **Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal**				
	Sasaran:	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	1. Pasca Covid-19 meningkatkan kunjungan wisata 2. Banyaknya hari libur pada Tahun 2023 3. Aksesibilitas Jalan dan Jembatan menuju kawasan wisata yang baik	1. Kurangnya Komunikasi Informasi mengenai Wisata di Kabupaten Kediri	1. Berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk meningkatkan Komunikasi dan Informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Kediri
	Misi 7 **Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana**				

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Sasaran:	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	1. Masih asri dan terjaganya kawasan sumber air terutama setelah digunakan kawasan wisata (menjadi lebih bersih dan terawat) 2. Meningkatnya Vegetasi dan tutupan lahan yang dapat menyerap polusi udara 3. Meningkatnya Pembangunan Taman dan RTH	1. Fluktuasi data IKA disebabkan karena Aliran Air Sungai Brantas yang berasal dari Kawasan Batu, Malang, Blitar, dan Tulungagung membawa cemaran Amonia, Pupuk, dan Pestisida –	1. Meningkatkan Pengawasan terhadap Dunia Usaha terhadap Limbah Air, Udara, dan Padat 2. Penguatan konsolidasi dengan masyarakat terutama Kondisi Lingkungan 3. Peningkatan Pembangunan RTH dan Taman 4. Peningkatan Jumlah Pohon dan koordinasi dengan SKPD terkait
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	1. Optimalnya Meningkatkan Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta Penanggulangan Bencana dengan sektor Masyarakat, Swasta, Lembaga-lembaga lain 2. Simulasi Bencana berjalan dengan baik dan dipahami oleh Masyarakat	1. Hambatan bersifat koordinatif, namun dapat diatasi dengan baik	1. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi dengan Pihak Swasta, Masyarakat, dan Dunia Pendidikan 2. Mengoptimalkan Data Kebencanaan 3. Membuat Peta Detail dengan Ancaman Bencana 4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM BPBD
	Misi 8 **Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda**				

No		Tujuan/Sasaran	Faktor Penunjang	Faktor Penghambat	Rencana Tindak Lanjut
	Sasaran:	Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	1. Tingginya antusiasme masyarakat terkait kebudayaan daerah	1. Hambatan bersifat koordinatif, namun dapat diatasi dengan baik	1. Melaksanakan kinerja sesuai dengan perencanaan
		Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	1. Antusiasme para pemuda dalam mengikuti pelatihan keterampilan dan mengasah kemampuan 2. Pembinaan atlet pelajar dengan ahli dari sport science dengan fasilitas olahraga yang sesuai standar	1. Meningkatnya Anggaran Kepemudaan, Koordinasi Lintas Sektor terkait Kepemudaan 2. Jaminan Kesejahteraan bagi Atlet yang mewakili Kabupaten Kediri 3. Menarik Atlet Kabupaten Kediri yang mewakili Kabupaten/Kota lain	1. Pelatihan kepemudaan dari berbagai sektor 2. Pelatihan Pemuda Naik Kelas (UMKM) 3. Pemberian Beasiswa sekolah bagi Atlet berprestasi
	Misi 9 **Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat**				
	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	1. Intensifnya koordinasi antara pihak yang tinggi 2. Pemerintahan Desa yang proaktif menindaklanjuti saran masukan pendamping desa	1. Hambatan bersifat teknis, namun dapat diatasi dengan baik	1. Koordinasi dengan SKPD terkait akan lebih ditingkatkan baik dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat

3.4. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Table 22
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KEDIRI YANG MAJU, BERKARAKTER NASIONALIS-RELIGIUS, SERTA SEJAHTERA BERDASARKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG BIROKRASI YANG MELAYANI.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumber daya dan manajemen pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi informatika
			Fasilitasi layanan pendidikan inklusi
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
			Meningkatkan kompetensi dan ketersediaaan SDM bidang kesehatan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
			Penataan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa
			Penambahan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
			Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul

	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai	Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah
			Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
			Perlindungan ketenagakerjaan
			Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
			Penyediaan *job training*
			Standarisasi sarana prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
			Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan
Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Penguatan dan peningkatan ekonomi berbasis keluarga	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contohnya pandemi)
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan *life skill* dan *economic skill*
			Pengembangan program usaha bersama berbasis keluarga
			Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan kesiapsiagaan terhadap korban sosial dan bencana
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
			Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak
		Penguatan Program Keluarga Berencana	Penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sehat sampai dengan desa
			Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh di kegiatan masyarakat
			Fasilitasi alat kesehatan keluarga (contohnya KB)
			Penyediaan layanan konseling keluarga
Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Penguatan dan kampanye nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di semua tingkatan masyarakat	Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat
			Menyisipkan semangat nasionalisme kebangsaan di setiap kegiatan Perangkat Daerah

			Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sebagai mitra dan media propaganda positif di
	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban
			Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
			Monitoring bersama masyarakat secara berkala
Misi 2: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Percepatan penerapan kebijakan reformasi birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislatif
			Manajemen perubahan dengan mengubah pola komunikasi pemimpin-rakyat
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan
			Penguatan kapasitas perencanaan daerah
			Optimalisasi peran Dewan Riset Daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
			Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Peningkatan profesionalitas dan produktivitas ASN	Pemberian *reward and punishment* di jajaran birokrasi
			Penataan dan penguatan organisasi
			Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur
			Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Insentif untuk Tenaga Kontrak, Guru Honorer, serta
			Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja
	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik	Penyiapan *roadmap* dan *masterplan* digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik
			Pengembangan *e-government*
			Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik
			Pengembangan *Smart*-Pertanian melalui program Desa Inovasi Tani Organik (DITO)
			Pengembangan ekonomi digital (*e-commerce*)

			Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan teknologi informasi berbasis *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Robotics*, *Cloud Computing* sehingga masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu *big data*
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio
			Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi masyarakat
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik
			Inovasi pelayanan publik jemput bola
			Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah
			Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan publik
			Penyediaan Mall Pelayanan di kecamatan atau desa
			Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan
			perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan komunikasi dan informasi publik NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Penyediaan mobil siaga
Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah			
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Meningkatnya daya beli masyarakat	Peningkatan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi

			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
			Peningkatan Akses pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi ke daerah daerah yang potensial
			Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan *stakeholder* potensial lainnya
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata di wilayah Kabupaten Kediri
			Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Kabupaten Kediri
			Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
			Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	*Roadmap* pengembangan potensi sektor Industri Kabupaten Kediri
			Fasiltasi kemitraan usaha industri kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
	Meningkatnya investasi di daerah	Peningkatan iklim kondunsif yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah yang meyerap tenaga kerja lokal	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Pengembangan peta digital potensi investasi Kabupaten Kediri
			Peningkatan promosi potensi penanaman modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
			Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
Misi 4: Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan			
Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
			Pengembangan kawasan agropolitan

pertanian dan pangan daerah	masyarakat		Pengembangan kawasan pertanian organik
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan sistem pemasaran produk agro
			Pengembangan komoditas unggulan peternakan
			Pengembangan Desa Inovasi Tani Organik (DITO) di setiap kecamatan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran organik
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumber daya
			Peningkatan keamanan pangan
		Peningkatan produksi perikanan	Pengembangan perikanan berkelanjutan
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk
			Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan dan perairan secara umum
Misi 5: Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah			
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Memantapkan penyediaaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan
			Pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (Kampung Inggris, SLG, kawasan bandara, PDP Margo Mulyo, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi)
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri
			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan dan wilayah Kabupaten Kediri guna
			Pengembangan peta digital ruang wilayah Kabupaten Kediri dalam mendukung kebijakan SATU DATA

		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan rumah layak huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman
			Penataan kawasan kumuh perkotaan
	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
			Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor
			Peningkatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
			Peningkatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Misi 6: Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal			
Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
			Pengembangan DEWI (Desa Wisata) & *Roadmap* Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonektivitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam *trip* sehari (kerjasama dengan PUPR)
			Pengembangan Desa Wisata Pintar (S*mart* DEWI) berbasis karakter lokal didukung promosi *e-commerce* (kerjasama dengan Kominfo)
Misi 7: Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Mitigasi Bencana			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	Meningkatnya kualitas lingkungan	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan Kominfo)
			Pengawasan lingkungan di tingkat kecamatan, seperti satgas yang didukung ketentraman dan ketertiban (trantib)

			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan
			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif dan *Smart* DEWI
	Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanggulangan bencana	Optimalisasi dan penguatan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta berbasis desa tangguh bencana	Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)
			Kerjasama pengembangan desa tangguh dengan sektor pertanian, wisata, dan informasi
Misi 8: Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda			
Meningkatkan potensi seni budaya dan peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Pengembangan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
			Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal
			Pembangunan sarana *event* seni budaya di tiap kecamatan
			Penyelenggaraan *event* seni budaya berskala nasional dan internasional
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat
	Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
			Meningkatkan sarana prasarana olahraga
Misi 9: Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Mendorongdaya saing ekonomi masyarakat dan desa	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Penguatan kapasitas pemerintahan desa
			Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa

			Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
			Sinergitas program pemerintah dengan desa

Sumber : RPJMD Kab. Kediri Th, 2021-2026

3.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2022 berpedoman pada visi Bupati dan Wakil Bupati berikut:

”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani”

Penjabaran makna dari visi Kabupaten Kediri yaitu :

MAJU

Suatu kondisi harapan yang akan diwujudkan untuk masyarakat Kediri dengan semakin meningkatnya daya saing daerah yang diiringi dengan kemajuan pembangunan kawasan, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan, layanan publik, serta dukungan teknologi yang unggul.

BERKARAKTER NASIONALIS RELIGIUS

merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, norma agama, sosial budaya sehingga menempatkan pribadi sebagai manusia yang beradab dalam bingkai Pancasila.

SEJAHTERA

merupakan kondisi masyarakat Kediri yang memiliki taraf hidup yang baik dan mampu memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak melalui kegiatan keseharian yang mapan.

EKONOMI KERAKYATAN

merupakan sistem ekonomi yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat banyak melalui kegiatan ekonomi yang menitikberatkan pada peran masyarakat dengan mempergunakan sumber daya ekonomi lokal yang tumbuh

menjadi satu kesatuan bangunan ekonomi daerah.

BIROKRASI YANG MELAYANI

merupakan kondisi birokrasi pemerintahan yang memenuhi sebagian besar reformasi birokrasi, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja untuk bertransformasi menjadi pelayan publik yang baik sekaligus mitra dan pengayom masyarakat menuju kesejahteraan dan kemajuan Kediri.

Visi tersebut dijabarkan lebih rinci dengan tujuan dan sasaran pada masing misi-misi sebagai berikut :

Table 23
TUJUAN DAN SASARAN MASING-MASING MISI

Tujuan	Sasaran
Misi 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	a. Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat c. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Lokal d. Meningkatnya Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta
Tujuan	**Sasaran**
	Pengendalian Penduduk
Tujuan	**Sasaran**
Meningkatkan Harmonisasi dan Kondusivitas Daerah	Meningkatnya Penerapan Nilai Nasionalisme, Agama, dan Semangat Demokrasi di Masyarakat
Misi 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	a. Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah b. Meningkatnya Pelayanan Publik dan Informasi Publik Berbasis IT c. Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum
Misi 3 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ekonomi Daerah	a. Meningkatnya Daya Dukung Perekonomian Lokal dan Nilai Tambah Potensi Unggulan Daerah b. Meningkatnya Investasi Daerah
Misi 4 Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	
Meningkatnya Daya Dukung dan Kemandirian Sektor Pertanian dan Pangan Daerah	ningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian dalam Arti Luas
Misi 5 ningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	
Menurunkan Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah
Misi 6 Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal	
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Daerah	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata bagi Perekonomian Daerah
Misi 7 Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana	
Tujuan	**Sasaran**

Meningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kelestarian Sumber Daya Alam	a. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup b. Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana
Tujuan	**Sasaran**
Misi 8 Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	
Meningkatkan Potensi Seni Budaya dan Peran Generasi Muda untuk Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kelestarian Seni Budaya Lokal dan Daya Dukung Generasi Muda bagi Daerah
Misi 9 Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	
Mendorong Daya Saing Ekonomi Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa

Dengan menganalisis hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023, maka tema pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2023 adalah : **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Transformasi Ekonomi dengan Keberpihakan pada Ekonomi Kerakyatan dalam Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Industri, Perdagangan dan Pertanian untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"** dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik;
b. Penanggulangan kemiskinan;
c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
d. Pemulihan ekonomi pasca Covid-19;
e. Penyelesaian infrastruktur dan konektivitas;
f. Kesiapsiagaan bencana; dan
g. Peningkatan kondusivitas, stabilitas dan keamanan daerah.

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2023 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kediri sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi

   Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan pertanian, UMKM, Koperasi dan Pariwisata, yang diwujudkan melalui program pembangunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengembangan kawasan agropolitan, revitalisasi pertanian, pengembangan pola kemitraan inti plasma yang berwawasan pasar, pengembangan smart pertanian melalui pemanfaatan inovasi teknologi, optimalisasi lahan kurang produktif, pengembangan UMKM, penguatan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan ekonomi digital, peningkatan investasi dan daya saing produk unggulan berbasis sumber daya lokal dan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan *artificial inteligence*, pengembangan pariwisata daerah, serta optimalisasi perusahaan daerah.

2. Pembangunan Konektivitas

   Pemerintah daerah diharapkan aktif dalam membaca segala peluang investasi dan dampak positif, serta mampu memprediksi dan meminimalisir dampak negatif atas pelaksanaan pembangunan konektivitas antar wilayah, diantaranya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono- Kediri-Tulungagung, Jaringan Jalur Strategis antar wilayah pusat sub wilayah pengembangan wilayah Kediri sekitarnya, serta berupaya maksimal dalam peningkatan jaringan jalan strategis antar kecamatan, antar desa, dan desa

dengan ibukota kecamatan, guna mendukung aktivitas perekonomian warga masyarakat Kabupaten Kediri.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

   Pemerintah daerah tetap konsisten dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan melalui program peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, serta perlindungan perempuan dan anak.

4. Pembangunan Karakter

   Pemerintah daerah dituntut aktif dalam upaya pembangunan karakter yang sejalan dengan revolusi mental dan nilai-nilai kearifan lokal dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penanaman nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan, pencegahan paham radikalisme dan terorisme, peningkatan nilai-nilai toleransi dan kerukunan SARA, serta penanaman nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, aspiratif, kepedulian dan pengembangan budaya lokal.

5. Pembangunan Infrastruktur

   Pemerintah daerah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur pada pusat produksi, pusat distribusi dan pelayanan dasar melalui optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana irigasi, peningkatan infrastruktur pada lahan kering, kurang produktif, kawasan non budidaya dan kawasan terisolir, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan infrastruktur energi alternatif, pembangunan embung untuk pertanian, penanggulangan bencana dan energi air, serta pembangunan infrastruktur di kawasan ekonomi khusus seperti di Kampung Inggris, SLG, Kawasan Bandara, PDP Margo Mulyo dan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi.

6. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

   Peningkatan ketahanan bencana dan pelestarian lingkungan hidup harus dilakukan pemerintah daerah melalui penegakan peraturan lingkungan hidup, penanganan dan pengelolaan persampahan, peningkatan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau, serta mitigasi dan deteksi dini daerah rawan bencana untuk dapat melindungi keselamatan warga masyarakat Kabupaten Kediri.

7. Pembangunan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik

   Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, serta pelayanan publik harus dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan daerah yang profesional, serta berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi yang ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tabel berikut :

Table 24
PENJELASAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kesesuian Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Indiktor Kinerja	Perangkat Daerah Leading Sector
1.	**Pembangunan Ekonomi**			
	Nasional : "Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan" **Provinsi :** "Pembangunan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan

	Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata” **Kabupaten Kediri :** “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, UMKM, Koperasi, dan Pariwisata”	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Desa yang melaksanakan inovasi Tani Organik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian (serangan OPT)	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian dengan kondidi baik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah desa yang melaksanakan Inovasi Tani Organik	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan budaya lokal dan kesenian lokal yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase peningkatan group kesenian yang diberdayakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

		Pelestarian Dan Penge lolaan Cagar Budaya	Prosentase cagar budaya yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengelolaan Permuseuman	Prosentase sarpras museum yg dipelihara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembang an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Prosentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yg berkompetensi dasar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	Kopusmik
		Program Pengembangan UMKUM	Persentase Usaha Mikor yang meningkat omsetnya	Kopusmik
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama (beras) per penduduk (kg/kapita/tahun)	DKPP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan yang dilakukan	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan budidaya yang dilakukan	Dinas Pertanian dan Perkebunan

		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembinaan dan pendampingan pelaku usaha perikanan budidaya yang dilakukan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Penyelenggaraan Jalan	Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik	Dinas PUPR
2.	**Pembangunan Konektivitas**			
	Nasional : "Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan" **Provinsi :** "Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Pelayanan Infrastruktur" **Kabupaten Kediri :** "Pembangunan Konektivitas antar Wilayah"	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan	Dinas Kesehatan
3.	**Pembangunan Sumberdaya Manusia**			
	Nasional : "SDM Berkualitas dan Berdaya Saing" **Provinsi :** "Peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemnafaatan artificial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan STBM	Dinas Kesehatan
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi	
			Indeks Keluarga Sehat	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) terakreditasi	

	intelligence **Kabupaten Kediri :** "Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan"		Persentase Nakestrad dan Hattra yang memiliki izin	
			AKI	
			AKB	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentase Pemberian Rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko. Alkes Dan Optikal, UMOT	Dinas Kesehatan
			Prosentase Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Bersertifikat P-IRT	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	Dinas Kesehatan
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan program rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Presentase Pengembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	Dinas Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja

		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Dinas Tenaga Kerja
		Program hubungan indrustrial	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
		Program pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	Dinas Pendidikan
			Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	
			Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang terakreditasi A	
			Cakupan Layanan Pendisikan Non formal/kesetaraan	
			Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase penerapan kurikulum merdeka belajar pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Rasio guru pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal dengan peserta didik	Dinas Pendidikan

		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase izin pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat	Dinas Pendidikan
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	DP2KBP3A
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	DP2KBP3A
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	DP2KBP3A
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB aktif	DP2KBP3A
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	DP2KBP3A
		Program Kawasan Permukiman	Terpenuhinya jumlah KK yang menerima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Kediri	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

			Terpenuhinya relokasi pembangunan Rumah Layak huni bagi warga dampak dari retakan tanah di Dukuh Badut Dusun Besuki Desa Jugo Kecamatan Mojo	Dinas Kesehatan
4.	**Pembangunan Karakter**			
	Nasional : "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" **Provinsi :** "Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal" **Kabupaten Kediri :** "Revolusi Mental dan Nilai-nilai Kearifan Lokal"	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Prosentase Konflik sosial terselesaikan	Lintas Sektor
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan agama dan kepercayaan	Bakesbangpol
		Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5.	**Pembangunan Infrastruktur**			
	Nasional : "Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar" **Provinsi :** "Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan EBT" **Kabupaten Kediri :** "Peningkatan Infrastruktur pada Pusat Produksi, Pusat Distribusi, dan Pelayanan Dasar"	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah industri yang terstandarisasi	Dinas Perdagangan
6.	**Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana**			

	Nasional : "Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" **Provinsi** "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungngan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim" **Kabupaten Kediri :** "Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup"	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan(%)	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan / kasus pencemaran lingkungan yang dapat diselesaikan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi resiko bencana	BPBD
7.	**Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik**			
	Nasional : Stabilitas Polhukhankam dan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	Satpol PP

	Transformasi Pelayanan Publik **Provinsi :** Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur **Kabupaten Kediri :** Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Profesional	Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu.	DPMPTSP
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat,
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	BKD
		Program Sumber daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kualifikasi dan Kompetensi	BKD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum

Sumber :

3.6. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Table 25
Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya
Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rekomendasi DPRD **Tahun N-1**	**Perangkat Daerah**	**Tindak Lanjut**	**Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan**
1. Pengelolaan Keuangan Daerah a. **Pengelolaan Pendapatan Daerah** 1) Peningkatan PAD juga perlu dibarengi dengan kebijakan maupun program yang mampu menyentuh masyarakat secara langsung dan tepat sasaran agar menumbuhkan	**BAPENDA**	Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan kebijakan maupun program yang mampu menyentuh masyarakat secara langsung dengan diberlakukannya Keputusan Bupati Kediri Nomor: 788.45/37 /478.08/2022 Tentang	Selain melakukan penghapusasn Sanksi Administrasi atas Keterlambatan pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kediri Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan inovasi berupa digitalisasi pajak daerah baik digitalisasi

kepercayaan bagi masyarakat. Kepercayaan merupakan modal utama kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika masyarakat patuh, secara simultan akan mempengaruhi PAD. Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan inovasi dan akuntabilitas pengelolaan pajak serta retribusi daerah.		Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan pembayaran Pajak Daerah di Kabupaten Kediri	pelayanan maupun digitalisasi pembayaran melalui bank jatim, open channel dan market place. Sehingga diharapkan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2) Optimalisasi Peran BUMD juga perlu dilakukan, di sisi lain untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan demi menopang APBD Kabupaten Kediri, BUMD juga diharapkan mampu memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah secara luas dengan senantiasa melakukan kolaborasi dan inovasi dengan mengikuti perkembangan kondisi masyarakat dan pasar saat ini. Adanya keberadaan BUMD di Kabupaten Kediri ini juga diharapkan dapat memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Bilamana terdapat BUMD yang belum optimal dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pengkajian guna memberikan solusi optimalisasi peran BUMD guna	**BAGIAN PEREKONOMIAN**	Proses perubahan bentuk hukum melalui Rancangan Peraturan Daerah BUMD dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah/ Perseroan Daerah serta perubahan Peraturan Daerah terkait Investasi BUMD yang ditindaklanjuti oleh BPKAD	Hasil dari proses diharapkan memiliki output Peraturan Daerah BUMD diharapkan dapat meningkatkan kinerja pendapatan atau laba sesuai dengan karakteristik dari masing-masing BUMD yang akan berdampak dan berkontribusi dalam PAD secara optimal

meningkatkan PAD.			
3) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 3.059.858.480.150,76 dibandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.923.110.843.869,24 mengalami peningkatan sebesar persentase 5,72%. Capaian tersebut patut diapresiasi, mengingat kondisi tahun 2022 sempat terjadi inflasi secara nasional akibat kenaikan BBM yang juga berdampak terhadap perekonomian di Kabupaten Kediri. Namun Pemerintah Kabupaten Kediri masih perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.	**BAPENDA**	Pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp. 649.630.917.159,76 sedangkan tahun 2023 sebesar Rp.736.776.599.509,67 atau naik sebesar 13,41%. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan pajak daerah sebesar 7,74%, retribusi daerah sebesar 6,08%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,15%, lain-lain PAD yang sah sebesar 18,20%. Pemerintah daerah kabupaten kediri berupaya terus menerus untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor sehingga menuju kemandirian keuangan daerah.	Pemerintah kabupaten Kediri berupaya terus menerus meningkatkan potensi PAD dengan: • Peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungut Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri dengan digitalisasi pembayaran pajak daerah serta penyempurnaan aplikasi pelayanan pemungutan pajak daerah. • Peningkatan pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri sedang melaksanakan monitoring dan pengawasan secara berkala melalui Digitalisasi pelaporan pajak daerah oleh wajib pajak daerah; Digitalisasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Percepatan dan perluasan digitalisasi dalam sektor pendapatan (QRIS, Virtual account, market

			place, serta melalui e-channel bank jatim) dapat dijumpai pada pajak daerah serta retribusi retribusi pariwisata (tiket wisata non tunai)
4) Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2.378.321.143.873,00, mengalami peningkatan dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2022 sebesar 2.349.272.944.082,00 atau mengalami peningkatan sejumlah 101,24 %. Namun kondisi demikian mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2021 sebesar Rp. 2.401.475.948.751,00. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kediri perlu tetap menjalin relasi baik dengan Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kediri juga perlu melakukan upaya peningkatan kemandirian ekonomi, utamanya ditujukan kepada pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat supaya upaya pembangunan di Kabupaten Kediri tidak bergantung paling besar pada anggaran dari transfer oleh Pemerintah Pusat.	**BPKAD**	• Alokasi anggaran pendapatan transfer telah menyesuaikan APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)dan telah dilakukan koordinasi, pemantauan dan pemenuhan syarat salur dengan kementerian keuangan dan lembaga terkait. • Rekonsiliasi Pendapatan	Percepatan pelaksanaan digitalisasi.

5) Sebagian besar pendapatan daerah ditopang oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang lain guna meningkatkan kemandirian daerah.	**BAPENDA**	Penganggaran target pajak dan retribusi telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah	Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan asli daerah dari sektor pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak daerah. upaya-upaya yang dilakukan diantaranya: a. Mengadakan pendataan ulang terhadap obyek pajak atau obyek retribusi baru; b. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pajak dan retribusi daerah; c. Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak/retribusi dengan memberikan kemudahan akses WP/WR (penerapan sistem pembayaran online via bank/Non Tunai) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang

			Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank di Kabupaten Kediri; d. Menegakkan hukum untuk membangun ketaatan WP/WR dan e. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pajak daerah dengan penerapan sistem e-tax.
6) Analisis data dan Optimalisasi aplikasi keuangan yang kongkrit dan spesifik dengan mengidentifikasi Anggaran di SKPD yang tingkat penyerapannya kecil perlu dicari akar masalahnya agar ditahun yang akan datang tingkat penyerapannya bisa optimal.	**BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA**	Tingkat persentase realisasi penyerapan anggaran SKPD Tahun 2023 sebesar 93,39% atau sebesar Rp. 3.288.924.911.656,40 **lebih besar** dibandingkan dengan penyerapan anggaran Tahun 2022 sebesar 91,99% atau sebesar Rp. 3.154.101.883.074,31 (Data LRA). Kegiatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran telah dilaksanakan Tahun 2023 melalui kegiatan TEPRA yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.	Tingkat penyerapan anggaran Tahun 2023 menjadi lebih optimal
b. **Pengelolaan belanja daerah**			
1) Berdasarkan LKPJ Tahun 2022, disebutkan bahwa realisasi terhadap belanja tak terduga berada di persentase 22,29 % atau sebesar Rp. 3.063.084.500,00. Kondisi ini mengalami penurunan yang tajam	**BPKAD**	Realisasi penyerapan BTT untuk keadaan darurat, keperluan mendesak dan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan	

dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 34.261.986.572,00, dimana pada tahun 2021 konsentrasi terhadap belanja tak terduga difokuskan untuk pemulihan akibat adanya kondisi covid-19. Adanya penurunan yang cukup tajam ini dapat dinilai sebagai sesuatu yang baik sebab menunjukkan adanya kemajuan terhadap kondisi yang ada di Kabupaten Kediri. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu tetap waspada terhadap segala kemungkinan buruk yang ada dengan tetap melakukan update terhadap segala input dari luar guna mengantisipasi terhadap segala sesuatu hal yang buruk.		Bupati No.1 tahun 2021 Tentang Sistem dan Prosedur Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga	
2) Persentase Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kediri yakni 91,99% atau sebesar Rp 3.154.101.883.124,31 dari target anggaran tahun 2022 yakni 3.428.699.159.232,00. Kondisi ini mengalami peningkatan anggaran dibandingkan pada tahun 2021, dimana besaran anggaran pada tahun 2021 yakni Rp. 2.937.424.451.914,08. Kondisi ini perlu diapresiasi sebab adanya peningkatan belanja di suatu daerah menunjukkan peningkatan daerah	**BPKAD**	• Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penyerapan belanja secara periodik. • Melaksanakan Rekonsiliasi belanja ke SKPD setiap bulan	Mengurangi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun

	dalam melakukan pembangunan. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran disesuaikan dengan prioritas, potensi, dan kemampuan daerah.			
3)	Realisasi belanja modal masih berada dibawah persentase 80%, dimana persentase untuk belanja modal di Kabupaten Kediri hanya berada di persentase 77,40% atau sebesar Rp. 370.827.255.677,20 dari total anggaran sejumlah Rp. 479.089.556.904,00. Kurang optimal atau rendahnya penyerapan anggaran perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten perlu menganalisis faktor-faktor penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran, mungkin dari persoalan internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD), persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan persoalan lain-lain. Kami merekomendasikan beberapa langkah perbaikan termasuk merevisi beberapa peraturan agar permasalahan yang ada dapat diatasi, baik	**BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA**	Realisasi belanja modal Tahun 2023 sebesar 93,83% atau sebesar Rp. 483.080.137.961,09 dari total anggaran sejumlah Rp. 514.825.900.280,00 **lebih besar** dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2022 sebesar 77,40% atau sebesar Rp. 370.827.255.677,20 dari total anggaran sejumlah Rp. 479.089.556.904,00 (Data LRA). Upaya yang telah dilakukan UKPBJ dalam mengoptimalkan penyerapan belanja modal adalah dengan menginisiasi terbitnya Surat Edaran Sekda terkait percepatan pengadaan barang/jasa Tahun 2023, mengoptimalkan penggunaan katalog elektronik lokal, dan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara dini pada akhir tahun anggaran 2022.	Realisasi belanja modal Tahun 2023 menjadi lebih optimal (lebih dari 80%)

dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah.			
4) Rendahnya belanja modal yang hanya berada di persentase 77,40% perlu dijadikan perhatian yang serius sebab masih banyak ditemui permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya di Kabupaten Kediri. Kondisi ini perlu diantisipasi guna menanggulangi persoalan yang serius di tataran masyarakat utamanya pada saat musim hujan akan membahayakan bagi masyarakat dan pengguna jalan yang lain. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengoptimalkan upaya untuk mendengarkan aspirasi masyrakat atau pelaporan mengenai jalan atau infrastruktur yang lainnya yang mengalami kendala, baik itu yang dilontarkan secara langsung maupun aspirasi yang dituangkan melalui media sosial atau media komunikasi yang lainnya. Pemerintah Kabupaten Kediri juga diharapkan tidak lupa melakukan	**PUPR**	Dinas PUPR setiap tahun Anggaran selalu menganggarkan Program Penyelenggaraan Jalan dimana salah satu Sub Kegiatannya adalah Pemeliharaan Rutin Jalan untuk melakukan rehab ringan jalan-jalan yang rusak ringan akibat kelebihan tonage atau cuaca (Hujan). Sumber aduan masyarakat bisa melalui aplikasi online, Hallo Masbup, Radio Andika, laporan masyarakat langsung ke DPUPR dan secepat mungkin segera ditanggapi perbaikannya.	Pelaksanaan Pembangnan Jalan, Rekontruksi Jalan dan Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR tahun 2022 dari Anggaran kurang lebih 130 Milyar telah terealisasi sebesar 91,25 persen.

pendataan dan lekas untuk melakukan pembenahan dan perbaikan demi menjaga keamanan dan stabilitas umum.			
5) Selama ini banyak pemerintah daerah berlomba-lomba menghabiskan anggaran meskipun dampak penyerapannya tidak optimal. Hal ini menjadi keprihatinan bersama. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan upaya peningkatan efektivitas Belanja Daerah dengan memfokuskannya pada pos-pos anggaran yang mengedepankan kepentingan publik Seperti alokasi belanja yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah harus terus dipupuk dan dilaksanakan secara disiplin.	**BAPPEDA**	"Pemerintah Daerah terus berupaya mengoptimalkan kemampuan penyerapan anggaran di masing-masing OPD, langkah langkah dimaksudantara lain didasarkan pada : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Berjalanyang sangat membantu bagi OPD untuk melaksanakan penyerapananggaran sebelum Perubahan APBD dilaksanakan terutama untuk dana-dana spesific grant c. Klarifikasi dengan OPD, mengevaluasi dana-dana yang kemungkinantidak terserap untuk dilakukan perubahan APBD pada tahun berjalan d. Evaluasi serapan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan oleh timTEPRA."	
6) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan optimalisasi kerjasama	**BAPPEDA**	Pemerintah Kabupaten Kediri terus mengembangkan kerjasama dengan	

dengan akademisi/perguruan tinggi ataupun pihak ketiga guna melakukan riset dan/pengukuran terhadap efektivitas dan dampak yang diterima oleh publik dari adanya pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri dari penyerapan anggaran guna upaya pembangunan di Kabupaten Kediri. Ouput yang ada juga dapat digunakan sebagai bahan kajian, diskusi, dan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pembangunan dari adanya penggunaan anggaran yang ada di Kabupaten Kediri supaya dapat tepat sasaran dan berhasil guna.		akademisi/ perguruan tinggi ataupun pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
7) SiLPA yang masih cukup tinggi menandakan penyerapan anggaran dari SiLPA sebelumnya tidak optimal, dana SiLPA cenderung statis tidak mengalami perubahan yang signifikan, Hal ini perlu dikaji secara menyeluruh dengan analisa laporan keuangan yang memadai agar penyerapan bisa maksimal. Oleh karena itu diperlukan aplikasi keuangan yang modern, sebagai alat untuk menganalisa secara spesifik sektor apa saja yang penyerapannya kecil.	**BPKAD**	• Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menggunakan Aplikasi SIPD. Dan untuk pemantau penyerapan realisasi Belanja Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penyerapan belanja secara periodik. • Melaksanakan Rekonsiliasi belanja ke SKPD setiap bulan	Mengurangi penumpukan realisasi belanja di akhir tahun.

8) Belanja Daerah harus disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Penyusunan belanja daerah harus diprioritaskan untuk menunjang efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangannya.	**BAPPEDA**	Terima kasih atas saran yang diberikan. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 senantiasa memperhatikan prinsip integritas, efisiensi, efektifitas, akuntabel, dan transparan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
9) Peningkatan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 diharapkan diikuti peningkatan kualitas SDM dan profesionalitas pegawai sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat dan program pembangunan meningkat.	**BKD**	1. menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan keilmuan, keterampilan dan perilaku kerja pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kegiatan pengembangan kompetensi telah terintegrasi dengan tugas dan kinerja dalam program-program Panjalu Jayati *Corporate*	Meningkatkan Indeks Profesio nalitas ASN

		University (Panji Corpu); 2. penyelenggaraan diklat baik melalui metode fasilitasi maupun pengiriman peserta ke lembaga/badan diklat (Diklat Pengawas, Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)). Pelatihan Manajerial bertujuan memberikan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan organisasi. 3. program Tim Kediri Lintas Sektor yang beranggotakan PNS Milenial dibawah pengelolaan BKD dimana tim ini akan memberikan rekomendasi solusi atas permasalahan-permasalan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan di Kabupaten Kediri; 4. melakukan pengukuran kinerja secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja pegawai yang saat ini menggunakan E-kinerja BKN; 5. mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta melakukan monitoring	

		dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan	
10) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan upaya peningkatan efektivitas Belanja Daerah dengan memfokuskannya pada pos-pos anggaran yang mengedepankan kepentingan publik Seperti alokasi belanja yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah dan bantuan sosial. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah harus terus dipupuk dan dilaksanakan secara disiplin.	**BAPPEDA**	Untuk mengoptimalkan belanja operasional, setiap bulan dilakukan evaluasi atas realisasi belanja sekaligus memaksimalkan penggunaan anggaran untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, alokasi belanja pegawai untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS/ASN/DPRD/Kepala Daerah dan belanja pegawai BLUD	
11) Efisiensi dalam Pengelolaan belanja perjalanan Dinas.	**BAPPEDA**	Evaluasi penyerapan anggaran dilakukan setiap bulan pada seluruh OPD. Terkait realisasi penyerapan anggaran tergantung pada rekening anggaran kas pada masing-masing OPD sesuai time schedule kegiatan. Pemberian Reward and Punishment akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, termasuk	

		pertimbangan indeks profesionalitas ASN	

a. Bidang Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2. Implementasi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah c. **Bidang Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa** 3) Fasilitas belajar mengajar di Pondok Pesantren perlu di perhatikan agar santri dapat maksimal dalam belajar agama di Pondok Pesantren.	**BAGIAN KESRA**	Penyaluran bantuan Dengan mekanisme hibah	Dengan adanya bantuan hibah, Pondok Pesantren dapat merenovasi dan menambah sarana prasarana dengan harapan para santri dapat belajar dengan maksimal
4) Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) perlu dibina terus menerus baik sarana dan prasarana dan fasilitas Honorarium kesejahteraan bagi guru guru TPQ perlu diperhatikan.	**BAGIAN KESRA**	Penyaluran bantuan dengan mekanisme hibah	Dengan adanya bantuan hibah, TPQ dapat merenovasi dan menambah sarana prasarana dengan harapan para santri dapat belajar dengan maksimal
5) Realisasi pemberian insentif (Bisyaroh) kepada guru agama non- formal pada TA 2021 untuk dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah daerah serta menambah fasilitas belajar mengajar di pondok pesantren agar santri dapat maksimal dalam belajar agama.	**DINAS PENDIDIKAN**	Penerima Bisyaroh Guru Keagamaan Tahun 2023 sebanyak 8**.000** orang beserta BPJS Ketenagakerjaan, Tahun 2024 dianggarkan 9.000 orang penerima. Penyaluran **BPPDGS** dari BKK Provinsi serta **damping 10% APBD Kab**;	Kesejahteraan Guru Keagamaan Sarana Prasarana Pendidikan yang Layak

6) Pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tempat ibadah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	**BAGIAN KESRA**	Penyaluran bantuan dengan mekanisme	Dengan adanya bantuan hibah
7) Sinkronisasi kerukunan umat beragama, diharap pemerintah terus mengadakan pembinaan agar hubungan antar umat beragama tetap harmonis, serta penanggulangan kelompok radikal yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama.	**BAGIAN KESRA** **BAKESBANGPOL**	1. Kegiatan Sosialisasi terkait Ideologi wawasan kebangsaan, Pemahaman terkait Radikalisme dan terorisme, Etika dan Budaya Politik serta Kerukunan Umat Beragama. 2. Pemberian Bantuan Keuangan Hibah ke Lembaga FKUB dan Banpol 3. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). 4. Pembinaan Karakter Bangsa dengan Wasbang, serta Fasilitasi Purna Paskibraka serta membentuk wadah Purna Paskibraka (PPI)	1. Pemantapan pemahaman, sinergitas serta peranan Masyarakat luas dalam pemahaman Wasbang, Radikalisme serta faham Terorisme yang benar, serta meningkatnya sinergitas dalam membangun Kerukunan Umat beragama dan pemahaman akan Etika dan Budaya Politik serta. 2. Organisasi Kemasyaraatan (FKUB) dapat lebih berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan, Pemantapan Kerukunan Umat Beragama serta fasilitasi terkait Rekomendasi Pendirian Tempat Ibadah 3. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam Pencegahan dan deteksi dini atas semua Konflik di Masyarakat dengan pendekatan Kearifan Lokal dari dan oleh masyarakat sendiri. 4. Nilai kebangsaan, Perekatan Jiwa Nasionalisme serta Wawasan atas bangsa bagi masyarakat

			khususnya anak Muda dan Pelajar dapat ditingkatkan ditengah Modernisasi kearah Individualisme serta Peranan Anak muda dapat diwujudkan dengan berpartisipasi aktif pada Paskibraka dan Purna Paskibraka.

b. Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara.

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
a. Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara. 8) Partisipasi Masyarakat. a) Pemerintah Kabupaten Kediri harus memfasilitasi setiap aspirasi masyarakat terkait program-program pemerintah maupun janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kediri sebagai wujud komitmen pemimpin daerah sebagai pelayan masyarakat.	**BAKESBANG-POL**	Aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah. Salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi aspirasi tersebut adalah memberikan ruang menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, misalnya melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, program Jumat Ngopi dan aplikasi Halo Masbup.	Secara prinsip visi misi Bupati telah dilaksanakan melalui program dan giat seluruh SKPD Pemkab Kediri. Dalam rangka menampung aspirasi, Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol meyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik, sarasehan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta forum group discussion yang melibatkan ormas dan parpol di Kabupaten Kediri.

		Peningkatan layanan informasi publik melalui PPID Utama (Kabupaten) dan PPID Pembantu (seluruh OPD)	
b) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menghadirkan keterbukaan dan transparansi kepada masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Hal tersebut selaras dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.	**KOMINFO**		Meningkatnya keterbuka an dan transparansi kepada masyarakat
c) Partisipasi dapat diwujudkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, oleh karena itu jajaran Pemerintah Kabupaten Kediri harus mampu menunjukkan kinerja terbaiknya.		Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah pondasi yang vital dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Kepercayaan tersebut bisa ditingkatkan melalui transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kualitas layanan publik, membuka ruang	Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol berupaya memfasilitasi hibah pilkada agar penyelenggaraan pilkada terlaksana sesuai aturan dan berlangsung lancar, aman dan damai,

	BAKESBANG-POL	partisipasi masyarakat, menjalin komunikasi yang efektif serta komitmen terhadap keadilan dan hukum	sekaligus untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan politik. Setiap tahun Bakesbangpol juga memfasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik agar parpol dapat berperan lebih maksimal dalam pelaksanaan pendidikan politik, untuk menunjang Indeks Demokrasi Indonesia di Kabupaten Kediri
9) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan.			
a) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah.	**SATPOL PP**	Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Satpol PP telah berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah yang dilaksanakan dalam bentuk program / kegiatan antara lain : a. Deteksi Dini b. Patroli Wilayah secara rutin di seluruh wilayah Kabupaten Kediri c. Sosialisasi terkait Trantibum linmas d. Pengamanan	Permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

		kegiatan, unjuk rasa e. Optimalisasi Satlinmas di Des f. Koordinasi dengan Instansi terkait g. Penegakan Hukum berupa Tin dakan Yustisi (sanksi Adminis trasi dan Sanksi Pidana Ring an) dan Tindakan Non Yustisi (Teguran Lisan s/d Surat Peringatan)	
b) Aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu,		Peningkatan monitoring dan aspirasi publik melalui aplikasi monitoring media online dan medsos Meningkatkan diseminasi dan publikasi informasi melalui media pemerintah, yaitu website, medsos (instagram, FB, youtube, tiktok dan twitter), vidiotron, media	

berita bohong, atau fakta yang direkayasa yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban umum.		pengumuman seperti bando, baliho	Informasi fakta tersampaikan kepada masyarakat
c) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengoptimalkan pemanfaatan kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyebarkan berbagai informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran disinformasi yang dapat menimbulkan disorientasi di lingkungan masyarakat.	**KOMINFO** **KOMINFO**		Menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi

Rekomendasi DPRD **Tahun N-1**	**Perangkat Daerah**	**Tindak Lanjut**	**Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan**

c. Bidang Kesejahteraan Masyarakat. 10) Peningkatan Mutu, Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan. a) Bidang SDM pendidik dan motivasi siswa. Manajemen mutu pendidikan dalam sisi operasional perlu untuk dioptimalkan, karena di taraf konsep dan perencanaan sudah disusun dengan baik namun di sisi operasional masih banyak kendala	**DINAS PENDIDIKAN**	Dalam bidang Operasional SDM Pendidik, penggunaan **Platform Merdeka Mengajar /PMM** sebagai cara meningkatkan kompetensi guru dan juga penilaian kinerja guru; Dalam upaya meningkatkan motivasi siswa maka optimalisasi **kinerja guru BK** melakukan pemetaan psikologi peserta didik dan memberi motivasi yang tepat terkait karir dan pendidikannya dan menciptakan **iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas** di masing-masing satuan pendidikan.	Kualitas SDM Pendidikan
b) Di sektor Pendidikan, kabupaten kediri tahun 2022 capaian kinerja yang harus diperhatikan adalah terkait harus ditingkatkan mengenai beberapa hal sebagai berikut; Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket) bagi Anak Putus Sekolah, Penambahan kuota penerima bantuan/beasiswa,		Pendataan APS Tahun 2022 meliputi 26 Kecamatan di Kabupaten Kediri diperoleh APS usia 7-45 Tahun sebanyak **5.485** orang, data tersebut diakomodir oleh PKBM wilayah Kecamatan masing-masing sebagai warga belajar Kesetaraan PKBM Paket A, Paket B atau Paket C pada Tahun 2023 dan dimasukkan DAPODIK untuk memperoleh NISN;	

Penambahan kuota Guru PPPK, penerima Insentif GTT/PTT dan Bisyaroh Guru Keagamaan.		Penambahan kuota penerima bantuan beasiswa pada Tahun 2023 sebanyak **9.013** anak menerima Bantuan Sosial Pendidikan bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi (GNOTA) jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, dimulai tahun 2023 lebih difokuskan **beasiswa penuh** untuk SMA Dharma Wanita Pare Boarding School dan Mahasiswa STIKES Pamenang Pare;	Aksesibilitas Anak Putus Sekolah
		Kebijakan untuk PPPK guru 2023 adalah menyelesaikan guru Non ASN yang lulus passing grade tahun 2021 peserta Prioritas 1 (P1) sebanyak **250** orang. Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait untuk pemenuhan kebutuhan PPPK guru tahun 2024 sebanyak **100** formasi;	Aksesibilitas Beasiswa Pendidikan
		Tahun 2023, penerima insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidkan	

		Non ASN maksimal TMT bekerja 31 Desember 2020 sebanyak **5.467** orang; Penerima Bisyaroh Guru Keagamaan Tahun 2023 sebanyak **9.000** orang beserta BPJS Ketenagakerjaan.	
c) Permasalahan Pemerataan memberikan sarana, prasarana, dan mutu pendidikan yang sama di setiap sekolahan yang ada di Kabupaten		Melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan, pendampingan pemutakhiran data sarana dan prasarana dan penilaian kerusakan bangunan pada Dapodik guna pertimbangan penilaian usulan **DAK Fisik,** penambahan anggaran rehabilitasi SDN dan SMPN sumber dana **DAU,** serta penyaluran **POKKIR DPRD** untuk pembangunan/ rehabilitasi sarana prasana sekolah swasta/madrasah. Dinas Pendidikan menjadikan **Rapor Pendidikan** sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, lalu membenahi	Ketersediaan Guru ASN

Kediri. Dalam operasionalnya, ditemui cukup banyak kendala yang harus dioptimalkan lagi pengembangannya .		kualitas pendidikan secara menyeluruh.	Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN
		Dinas Pendidikan mendorong optimalisasi pelibatan orang tua dalam dunia pendidikan melalui **kegiatan parenting** dan komite sekolah.	
d) Permasalahan Efisiensi Manajemen utamanya Mulai dari perencanaan yang efektif, pengendalian yang akuntabel, laporan yang transparan, dan evaluasi yang berkelanjutan.			Kesejahteraan Guru Keagamaan
e) Peningkatan peran serta Orang tua dan Wali murid dalam upaya untuk mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik, dukungan masyarakat dan wali murid menjadi penting untuk dilaksanakan. Namun begitu masih ditemui kendala-kendala yang menyebabkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tidak dapat		Merujuk Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Perbup Kediri Nomor 26 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan PPDB di Kabupaten Kediri bahwa zonasi menjadi prioritas	Sarana Prasarana Pendidikan yang Layak

dilaksanakan dengan baik. f) Pemerintah Kabupaten Kediri harus mampu memfasilitasi akses pendidikan bagi calon peserta didik secara adil dan merata, salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi yang tidak diskriminatif dan menyelenggarakan pendidikan gratis terutama bagi pengimplentasian program wajib belajar 12 tahun, serta melakukan perluasan terhadap akses pendidikan bagi peserta didik tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. g) Peningkatan akses pendidikan bagi calon peserta didik dengan mendukung		pada PPDB di Kabupaten Kediri yang dilaksanakan secara online. Hal ini terbukti persentasi jalur zonasi mendominasi (50%) dibandingkan jalur yang lain. Namun, sebaran sekolah di Kabupaten Kediri secara geografis tidak merata sehingga ada peserta didik yang tinggal pada beberapa desa tidak tertampung di SMPN *(blank area)*. Untuk mengatasi hal itu, maka tahun 2023 didirikan **SMPN 2 Ngasem**, kuota **jalur prestasi** (peringkat rombel) serta **kebijakan khusus pada blank area** juga menjadi fokus pada PPDB. Pendidikan vokasi dapat dilakukan dengan studi kenal alam dan lingkungan, **PKBM berbasis ketrampilan** dengan pelatihan yang diinginkan oleh peserta didik. PKBM sebanyak **34 Satuan Pendidikan** tersebar di 26 kecamatan menyediakan ruang perpustakaan untuk proses belajar peserta didik yang berisi buku-buku penunjang	Kualitas Manajemen Pendidikan Peran Orangtua/Wali dalam Pendidikan

penyelenggaraan pendidikan informal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. h) Peningkatan akses pendidikan dan Perpustakaan bagi calon peserta didik juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program paket A, B dan C. i) Peningkatan daya saing peserta didik diformulasikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan didasarkan pada bakat dan minat peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. j) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta Peningkatan Infrastruktur khususnya untuk mengimplementasikan program		pelajaran maupun yang lainnya. Sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka **pembelajaran berbasis diferensiasi** sesuai dengan bakat minat dan potensi peserta didik dalam Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan juga tercantum dan dilaksanakan pemantauan dalam pelaksanaannya. Melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan, pendampingan pemutakhiran data sarana dan prasarana dan penilaian kerusakan bangunan pada Dapodik guna pertimbangan penilaian usulan **DAK Fisik,** penambahan anggaran rehabilitasi SDN dan SMPN sumber dana **DAU,** serta penyaluran **POKKIR DPRD** untuk pembangunan/ rehabilitasi sarana prasana sekolah swasta/madrasah. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial resmi Pemkab, Dinas	PPDB Sistem Zonasi

pendidikan wajib belajar 12 tahun.		Pendidikan agar bisa mengakses beasiswa GNOTA untuk program D-I, D-III maupun S-1, juga **beasiswa penuh program D-III** di STIKES Pamenang Pare.	
k) Perlu dioptimalkan dan didayagunakan secara menyeluruh dan sosialisasi yang meluas dalam program bantuan keuangan bagi anak didik di Kabupaten Kediri yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bagi anak didik yang kurang mampu berkaitan biaya.		Melaksanakan pendataan kebutuhan sarana prasarana satuan pendidikan, pendampingan pemutakhiran data sarana dan prasarana dan penilaian kerusakan bangunan pada Dapodik guna pertimbangan penilaian usulan **DAK Fisik,** penambahan anggaran rehabilitasi SDN dan SMPN sumber dana **DAU,** serta penyaluran **POKKIR DPRD** untuk pembangunan/ rehabilitasi sarana prasana sekolah swasta/madrasah.	
l) Fasilitas belajar mengajar perlu dipetakan dan dianalisis kembali mana-mana yang rusak dan harus diperbaiki termasuk sarana dan prasarana praktek		Tahun 2023 untuk menekan pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai di lingkup Dinas	Aksesibilitas Pendidikan Informal Aksesibilitas Pendidikan Nonformal dan Sarana Prasarana Pendidikan yang Layak Kualitas Keluaran Pendidikan

dan ruang perpustakaan siswa.		Pendidikan Kabupaten Kediri telah dilaksanakan kegiatan **roadshow pembinaan GTK** dengan sasaran PNS sejumlah **2.800** guru dari jenjang TK, SD dan SMP.	Sarana Prasarana Pendidikan yang Layak
m) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menggalakkan diklat kepegawaian bagi ASN guna meningkatkan kinerja aparatur. Dengan adanya peningkatan terhadap kinerja ASN, maka dapat menekan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.		Tahun 2023, penerima insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidkan Non ASN sebanyak **5.467** orang; Insentif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN pada **tahun 2024 meningkat 50%** dari yang diterima pada tahun 2023.	Aksesibilitas Beasiswa Pendidikan
n) Kesejahteraan guru menjadi salah satu permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri.		**Beasiswa penuh** untuk SMA Dharma Wanita Pare Boarding School dan Mahasiswa STIKES Pamenang Pare bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi (GNOTA);	

Hal itu dikarenakan hingga saat ini kesejahteraan guru masih belum dapat terpenuhi. o) Upaya lain yang dapat dilakukan guna meningkatkan rata- rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) dengan cara memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi anak tidak mampu/anak yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik.		Usulan program PIP melalui kesetaraan PKBM dan optimalisasi **Satuan Pendidikan PKBM berbasis Ketrampilan** bagi anak putus sekolah.	Sarana Prasarana Pendidikan yang Layak Kualitas SDM Pendidikan Aksesibilitas Beasiswa Pendidikan

			Sarana Prasarana Pendidikan yang Layak

			Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN

			Aksesibilitas Beasiswa Pendidikan

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	**Perangkat Daerah**	**Tindak Lanjut**	**Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan**
11) Pelayanan Kesehatan a) Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Usia Harapan Hidup secara global/internasional. Dengan fakta tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut skema pembangunan kesehatan di Kabupaten Kediri, terutama yang berkaitan dengan Usia Harapan Hidup (UHH).	**DINAS KESEHATAN**	a. Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Kediri masih berada dibawah capaian Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Namun demikian jarak antara capaian Kabupaten Kediri dengan Provinsi dan juga Nasional tidak terlalu lebar. Pemerintah Kabupaten Kediri	a. Peningkatan Usia Harapan Hidup

		masih berada diatas capaian agregat dari 631 instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Trend usia harapan hidup di Kabupaten Kediri dari tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Pada awal periode, usia harapan hidup berada pada angka 72,2 tahun dan kemudian mengalami kenaikan yang bertahap setiap tahun hingga mencapai 73,46 tahun pada tahun 2022. Tren positif ini merupakan indikator penting bagi kesejahteraan dan perkembangan Kabupaten Kediri. Peningkatan usia harapan hidup berarti masyarakat dapat menikmati masa hidup yang lebih panjang dan memiliki peluang yang lebih baik untuk berkontribusi pada	

		pembangunan wilayah. b. Pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan telah melakukan integrasi penduduk Kab Kediri ke dalam kepesertaan JKN. Nopember 2023 Capaian UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Kediri adalah sebesar 96,48% (1.615.033 jiwa) dengan segmen kepesertaan APBN 809.577 jiwa, APBD 296.271 jiwa, BP 26.916 jiwa, PBPU 187.092 jiwa, PPU BU 221.763 jiwa dan PPU PN 74.267 Jiwa	
b) Belum maksimalnya capaian UHC (Universal Health Coverage) pada Tahun 2022 disebabkan karena dengan jumlah penduduk Kabupaten			b. Pemenuhan Target Capaian UHC (Universal Health Coverage) Kab Kediri

Kediri sebesar 1.674.140 jiwa jumlah peserta terdaftar BPJS Kesehatan sebanyak 1.318.223 peserta (78,74%) sehingga masih ada 355.917 jiwa yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Keterbatasan anggaran daerah dalam membiayai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional belum maksimal didukung dengan peran serta masyarakat, pekerja swasta, BUMN, BUMD dan pihak swasta (badan usaha) Kabupaten Kediri. c) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan peninjauan ulang dan melakukan perbaikan terhadap validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), guna menghindari terjadinya pemberian program pelayanan		c. Pemutakhiran (verifikasi dan validasi) terhadap data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) DTKS telah dilakukan secara periodik setiap bulan oleh masing-masing desa melalui aplikasi SIK'S-NG (Sistem InformasiKesejahteraan Sosial Next Generation) Kementerian Sosial d. Koordinasi dan sinkronisasi secara berkala telah dilakukan agar program kesehatan pemerintah Kabupaten Kediri selaras dengan program kesehatan pemerintah provinsi Jawa Timur dan	

kesehatan yang tidak tepat sasaran. d) Dalam rangka menciptakan harmonisasi antara program pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat pusat terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala terhadap program yang dicanangkan.		Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui pelaksanaan rapat/pertemuan koordinasi serta evaluasi program pelayanan Kesehatan e. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan baik di rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, posyandu, dan klinik kesehatan di Kabupaten Kediri telah dilakukan melalui pemenuhan sarana prasarana, alat kesehatan, SDM agar sesuai dengan standar dengan melaksanakan kredensial tenaga medis	c. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kab Kediri yang mutakhir sehingga pemberian program pelayanan kesehatan yang berbasis DTKS dapat tepat sasaran. d. Dengan koordinasi dan sinkronisasi program pelayanan Kesehatan Pemda Kab Kediri yang dilakukan secara

e) Jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, posyandu, dan klinik kesehatan di Kabupaten Kediri dari tahun 2021 ke tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan dan tersebar merata di seluruh kecamatan, sehingga kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan di tingkat puskesmas, mulai dari SDM administrasi, SDM tenaga kesehatan, peralatan kesehatan, infrastruktur bangunan, hingga melaksanakan evaluasi internal		dan tenaga Kesehatan di puskesmas. Selain itu juga dilakukan pemantauan mutu internal (pengukuran dan pelaporan indikator nasional mutu/INM) dan pemantauan mutu eksternal melalui penyelenggaraan akreditasi di RS, puskesmas dan klinik. Di Tahun 2023 seluruh RS dan puskesmas di Kab Kediri telah terakreditas f. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan perluasan terhadap penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk kurang mampu	berkala dengan pemerintah provinsi dan pusat diharapkan terdapat harmonisasi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. e. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Kediri baik di puskesmas, rumah bersalin, klinik dan Rumah Sakit memiliki kualitas pelayanan yang sesuai dengan standar.

secara rutin dan terukur. Hal tersebut bertujuan untuk menegakkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan mewujudkan layanan kesehatan prima. f) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan perluasan terhadap penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pemberian Jamkesda tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk meningkatkan pemerataan dan		dengan penyediaan pembiayaan kesehatan di luar Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Perbup Nomor 1Tahun 2023 g. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dilakukan dengan penyediaan akses pelayanan Kesehatan Tingkat pertama di puskesmas dan jaringannya serta FKTP lain (klinik, TPMD, TPMDG) yang bermutu sesuai standar.	

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak tercover sebagai PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) baik dari pusat maupun provinsi. g) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kediri dilakukan dengan penyediaan akses pelayanan kesehatan rujukan (RS) yang bermutu dan terjangkau h. Melaksanakan uji kompetensi jabatan fungsional Kesehatan serta Merencanakan dan melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan Melaksanakan perencanaan kebutuhan pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintahMemberikan pelayanan penerbitan SIP dan SIK	f. Adanya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di luar JKN akan meningkatkan pemerataan dan perluasan penerima pelayanan kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu yang tidak tercover sebagai

		i. Peran Dinas Kesehatan sebagai fasilitator dalam pemenuhan komitmen atas terbitnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) kepada pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP). Kegiatan yang dilakukan: 1.Penyuluhan Keamanan Pangan kepada Pelaku usaha IRTP 2.Pemeriksaan ke sarana industry rumah tangga pangan (IRTP) j. Koordinasi dan sinkronisasi program kesehatan di Kabupaten Kediri dilakukan secara berkala melalui kegiatan Rapat Kerja Kesehatan (Rakerkes) baik	Penerima Bantuan Iuran JKN g. Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat baik Tingkat pertama maupun rujukan (Rumah Sakit) dapat terpenuhi dan tersedia sesuai dengan standar.
h) Peningkatan Kapasistas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di kabupaten/kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan			

Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. i) Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.		Tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional (Rakerkesnas). Juga melalui kegiatan monitoring evaluasi atas pelaksanaan dan capaian target kinerja program yang telah ditetapkan k. Menurunkan prevalensi stuntingdengan mewujudkan desa bebas stunting Memberikan pelayanan antenatal care sesuai standart.	

j) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi secara berkala terhadap program yang dicanangkan oleh pusat dengan provinsi sehingga program yang berjalan dapat sinkron dan harmonis.			h. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional kesehatan serta pengembangan karir pejabat fungsional Kesehatan. Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan melalui pengadaan CASN, perekrutan tenaga BLUD dan tenaga lainnya Untuk melindungi masyarakat dari sarana kesehatan yang tidak memenuhi syarat serta i. Memberikan penge tahuan kepada produsen tentang cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), bahan tambahan pangan yang diperbolehkan beserta bahaya pangan, Menjamin mutu dankeamanan

k) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memberikan konsen terhadap isu kesehatan yang saat ini terjadi, seperti isu penanggulangan stunting.			pangan dengan memastikan bahwa produsen pangan sudah menggunakan CPPOB pada proses produksinya, Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan produsen industry rumah tangga pangan (IRTP) j. Program kesehatan di Kabupaten Kediri dapat berjalan sinkron dan harmonis dengan program yang dicanangkan oleh pusat dengan provinsi Jawa Timur

			k. Penurunan stunting dengan prioritas intervensi spesifik Penurunan AKI dan AKB

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
12) Gender dan Perlindungan Anak, Peran Pemuda dan Masalah Sosial.	DP2KBP3A		
a) Dalam rangka meningkatkan wawasan gender, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan aktivitas produktif lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Kediri harus memfasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan di tingkat desa. Dengan memfasilitasi aktivitas organisasi kepemudaan di tingkat desa, maka dapat memupuk kesadaran warga di lapisan bawah (grassroots) mengenai urgensi wawasan gender serta perlindungan perempuan dan anak.		Jambore Anak	Memfasilitasi pemenuhan hak anak tentang pemanfaatan waktu luang
b) Dalam rangka meningkatkan wawasan gender,		Penguatan remaja kreatif melalui Skill & e-Commerce	Memberikan edukasi kepada remaja perempuan dari keluarga

perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan aktivitas produktif lainnya, maka Pemerintah Kabupaten Kediri harus memfasilitasi adanya wawasan gender sedini mungkin kepada masyarakat sehingga dapat menekan adanya persoalan gender kedepannya serta menyelamatkan generasi depan dari pergaulan bebas.			pra sejahtera untuk berkembang dan lebih kreatif dengan memanfaatkan media digital
		- Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak - Optimalisasi peran satgas PPA	Memberikan edukasi tentang bagaimana upaya pencegahan, dampak dan penanganan terjadinya kekerasan
c) Memberikan pendidikan seks kepada anak-anak yang dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal guna mensosialisasi terhadap batasan-batasan tubuh yang dapat diakses oleh orang lain sehingga dapat meminimalisir adanya kejahatan seks, utamanya bagi anak-anak dan perempuan.			
d) Menumbuhkan sikap saling melindungi dan menghormati antar masyarakat melalui penyadaran publik terhadap hakikat hidup dan berkehidupan.		Surat Edaran tentang Perlindungan Anak dan Upaya Pencegahan Perkawinan anak	Pembatasan aktivitas jam malam dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak serta alur pengurusan dispensasi perkawinan sebagai upaya pencegahan perkawinan anak
e) Mengoptimalkan adanya implementasi kebijakan dan penegakan hukum mengenai		Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, Pelaksanaan	Terfasilitasinya pendampingan hukum bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum

perlindungan perempuan dan anak dari segala perbuatan yang dapat merugikan tanpa pandang bulu.		Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	**Perangkat Daerah**	**Tindak Lanjut**	**Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan**
13) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan pendataan dan pemutakhiran data PMKS sebagai basis data terlaksananya program penanganan PMKS. Adapun program penanganan PMKS yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi pemberian pelatihan keterampilan dan praktik kerja bagi anak terlantar, pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pemberian pelatihan dan keterampilan eks korban narkotika, serta pemberian pendidikan dan pelatahian (diklat) bagi anak putus sekolah di panti sosial remaja terlantar (PSRT). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melaksanakan	DINAS SOSIAL	- Tahun 2023 akan dilaksanakan pemutakhiran data disabilitas dan lansia Kabupaten kediri - Mengadakan pelatihan bagi disabilitas sesuai permintaan Musrenbang - Memberikan fasilitasi bagi anak putus sekolah untuk mendapatkan pelatihan keterampilan di UPT PSBR Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	- Data yang valid akan memudahkan pengambilan kebijakan dan analisis kebutuhan bantuan - PMKS mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat

program penanganan PMKS secara efektif, agar permasalahan PMKS di Kabupaten Kediri dapat teratasi dengan baik. b) Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di bidang sosial yang merupakan urusan wajib, maka Pemerintah Kabupaten Kediri harus berperan aktif dalam menertibkan, membina, serta melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). c) Indikator keberhasilan pelayanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah berapa jumlah PMKS yang berhasil dientaskan, tidak hanya sekedar jumlah PMKS yang dilayani. Oleh karena itu, program ke depan harus berorientasi pada pengentasan PMKS.		Memberikan layanan rehabilitasi dasar meliputi penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan layanan kedaruratan, penyediaan layanan penelusuran keluarga, dan reunifikasi keluarga bagi orang terlantar yang ada di wilayah Kabupaten Kediri	PMKS mendapatkan layanan sesuai SPM bidang sosial

		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PMKS yang telah menerima bantuan dan pelatihan keterampilan	Mengetahui kondisi dan perkembangan usaha PMKS yang telah mendapatkan layanan

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	**Perangkat Daerah**	**Tindak Lanjut**	**Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan**
14) Angka Kemiskinan dan Permukiman a) Angka kemiskinan kita masih belum turun signifikan. Prosentase angka	BAPPEDA	Strategi penanggulangan kemiskinan salah satunya dilakukan	Pemerintah Daerah memiliki Data Kemiskinan yang valid dan tepat sasaran berdampak

	kemisikinan di Kabupaten Kediri tahun 2022 tidak mencapai target, dimana mestinya sesuai target adalah 9,832% akan tetapi realisasi masih diangka 10,65%. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengurangi akngka kemeskinan dngan program yang nyata sehingga dapat mencapai target dalam RPJMD yakini 8,044%.		dengan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin baik penganggur maupun setengah penganggur melalui program padat karya yang disesuaikan dengan peta wilayah kemiskinan sebagaimana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan	dalam penurunan jumlah keluarga fakir miskin.
b)	Pemerintah Kabupaten Kediri berperan aktif dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin yang ada di Kabupaten Kediri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri dapat merumuskan dan mengusulkan kriteria kemiskinan yang sesuai dengan kondisi riil di daerah yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin.	DINAS SOSIAL	Pemutakhiran Data Kemiskinan terus dilaksanakan secara periodikdi masing-masing Desa melalui aplikasi SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) Kementerian Sosial RI Peningkatan koordinasi dan	Pemerintah Daerah memiliki Data Kemiskinan yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa serta dapat melihat peta kemiskinan daerah sebagai dasar dalam perencanaan program kegiatan Untuk menyamakan persepsi dan intervensi program kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial Peserta pelatihan dan penerima Bansos memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha sehingga akan dapat

		sinkronisasi Data Kemiskinan dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial)	membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga.
c) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait sinkronisasi data dan penggunaan data warga miskin dalam berbagai program pemerintah.	DINAS SOSIAL	Koordinasi lintas sektor SKPD terkait program kegiatan penanggulangan kemiskinan di bawah koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pemerintah Daerah memiliki data kemiskinan yang dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan desa serta dapat melihat peta kemiskinan daerah sebagai dasar dalam perencanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan
d) Pada tahun 2021, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan sebesar 0,06 persen dibanding tahun 2020. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan terhadap jumlah penduduk miskin, yaitu banyak perusahaan yang menutup usahanya dan terpaksa merumahkan para karyawan karena pandemi Covid-19, sehingga kebutuhan warga tidak dapat terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan	DINAS SOSIAL	Pelatihan keterampilan bagi keluarga fakir miskin dan pemberdayaan bagi penerima Bansos yang memiliki motivasi mengembangkan usahanya. Pengembangan Aplikasi Simnangkis (Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan) dan pemutakhiran Data kemiskinan secara periodik melalui Aplikasi SIKS NG	Memiliki data Rutilahu/RST sehingga memiliki data bedah rumah yang tepat sasaran

	penguatan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu membuat sistem data base terkait program-program penanggulangan kemiskinan secara online, agar dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) dan warga Kabupaten Kediri.			
e)	Data rumah tidak layak huni di Kabupaten Kediri masih sangat tinggi, ke depan untuk mempercepat supaya dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan dalam programnya mengalokasikan lebih banyak sasaran program bedah rumah dan menambah alokasi volume dan biayanya.	DINAS SOSIAL Perkim	Melakukan inventarisasi dan verfikasi Data Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)/Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Merupakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri dengan penanganan sebanyak 1.878 rumah pada tahun 2023	Permasalahan penanganan rumah tidak layak huni yaitu masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Kediri dan terbatasnya kemampuan daerah dalam pengalokasian anggaran. Namun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri selalu mencari sumber dana atau program dari pemerintah pusat untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan

			Swadaya (BSPS) melalui Kementerian PUPR
f) Bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi guna membantu memperoleh data kemiskinan yang ada di masyarakat. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan dengan melalui program KKN atau magang merdeka.	DINAS SOSIAL	Koordinasi dengan Perguruan Tinggi atau stakeholder terkait untuk bekerjasama dan verikasi/validasi agar memperoleh data kemiskinan yang valid	Pemerintah Daerah memiliki data kemiskinan yang valid dan tepat sasaran
g) Memberikan bantuan bagi warga miskin baik melalui bantuan tunai maupun non tunai guna memenuhi kebutuhan hidup.		Memberian bantuan sosial dan pengembangan usaha kepada keluarga fakir miskin, disabilitas, lansia dan orang dengan kecacatan berat dll.	Peserta menerima Bansos memiliki motivasi untuk mengembangkan usaha sehingga akan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga serta kebutuhan dasarnya terpenuhi
h) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memberikan perhatian terhadap upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dengan melakukan perlindungan ekonomi maupun dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem rawan terjadi permasalahan yang	DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL	Memberikan bantuan sosial permakanan dan pember dayaan masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem berupa pelatiha-pelatihan keterampilan sehingga meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka sehingga kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi.	Peserta penerima Bansos memiliki motivasi untuk berwira usaha sehingga akan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga

berkaitan dengan rawan pangan, dimana dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya persoalan sosial lain yang lebih kompleks, seperti terjadinya stunting pada anak.			

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
d. Bidang EKONOMI. 1) Perdagangan. a. Perbaikan dan pembangunan Infrastruktur Jalan terutama jalan akses perdagangan dan pembangunan saluran irigasi untuk meningkatkan sarana prasarana dalam menunjang perekonomian masyarakat di sektor Pertanian perlu terus ditingkatkan.	PUPR DIPERTABUN	Telah dilakukan pemeliharaan / peningkatan jalan secara berkala terutama untuk akses jalur perdagangan dan pembangunan Saluran Irigasi secara berkelanjutan telah dilaksanakan disemua Wilayah Kabupaten Kediri sesuai kewenangan Dipertabun telah melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan infrastruktur pertanian khususnya saluran irigasi, yaitu dengan pembangunan/ rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), baik di kawasan agropolitan maupun non agropolitan, karena keterbatasan anggaran maka pelaksanaannya menurut skala prioritas	Memperlancar jalur aksesibilitas transportasi perekonomian dan mempertahankan serta meningkatkan produksi pangan. Dengan terbangunnya / terehabnya saluran irigasi pertanian maka petani bisa tercukupi kebutuhan air irigasi untuk usaha taninya, sehingga produksi dan produktivitas tanaman tetap terjaga.
b. Memberikan ruang bagi UMKM masyarakat supaya dapat masuk di supermarket yang ada di Kabupaten Kediri.	DINAS KOPUSMIK	Melaksanakan kegiatan kemitraan pemasaran dengan toko modern yang ada di kediri	Untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Kabupaten Kediri dengan memberikan fasilitasi pemasaran produknya melalui pemasaran di toko modern/supermarket

c. Mempromosikan produk unggulan maupun produk UMKM di Kabupaten Kediri baik melalui offline maupun online dengan memanfaatkan kanal-kanal informasi maupun media sosial pemerintah.	DINAS KOPUSMIK	Melaksanakan kegiatan pameran dalam daerah, bersinergi dengan SKPD lain contoh Dinas Pendidikan dan BKD pada saat kegiatan peringatan hari guru dan seleksi PPPK diberikan ruang untuk memasarkan produk UMKM bagi peserta kegiatan, serta memanfaatkan media sosial dari Pemerintah Kabupaten Kediri baik melalui IG (kumkmkabkediri ataupun dinaskominfo_kedirikab)	Untuk menjaga pertumbuhan dan eksistensi usaha UMKM serta untuk meningkatkan pendapatkan UMKM dengan meberikan fasilitasi pemasaran dalam daerah dapat membangun komunikasi antara konsumen dengan pembeli ataupun calon pembeli sedangkan melalui pemasaran online melalui media sosial Pemerintah Kabupaten Kediri di harapkan dapat memperluas jaringan pasar UMKM tidak hanya di Kabupaten Kediri serta dapat membantu UMKM untuk memberikan pelayanan pemasaran produk secara gratis
d. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di pasar tradisional, guna menghapus kesan kumuh dan meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan ritel modern;	DINAS PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan akan melanjutkan revitalisasi pasar bertahap. Pada tahun 2025 akan dilanjutkan revitalisasi di Pasar Ngadiluwih.Sampai tahun 2024 sebanyak 8 pasar telah direvitalisasi dari total 15 pasar yang dikelola Pemkab Kediri	Dengan revitalisasi pasar diharapkan dapat mengatasi masalah kesan kumuh di pasar rakyat dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang sesuai SNI sehingga menciptakan pasar rakyat yang nyaman dan mampu bersaing dengan ritel modern

e. Dalam rangka melindungi pedagang yang ada di pasar tradisional, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan penertiban terhadap ritel modern dengan menerapkan sistem zonasi.	DINAS PERDAGANGAN	Melakukan pengaturan zonasi sesuai Perbub No. 11 Tahun 2023, melalui Pertek bagi yang mengajukan PBG/SLF toko swalayan, Melakukan Pembinaan dan Pengawasan bersama Tim Teknis terhadap swalayan yang sudah berdiri.	Sebagai upaya Penataan Zonasi dan jarak untuk lokasi pendirian toko swalayan dalam rangka melindungi pedagang/pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Kediri
f. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menyediakan informasi terkait komoditi dan potensi perdagangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri secara up to date melalui website yang memadai. Penyediaan informasi berbasis website tersebut bertujuan agar masyarakat luas dapat mengakses informasi mengenai komoditi unggulan Kabupaten Kediri secara lebih mudah, sehingga dapat memulihkan daya beli masyarakat terhadap komoditi pertanian.	DINAS PERDAGANGAN	Menyediakan Aplikasi Simarko.kedirikab.go.id	Menampilkan data harga harian Bahan Pokok dan Barang Penting dari 12 pasar kabupaten yang dapat di akses semua masyarakat dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan

2) Penanaman Modal a. Seiring dengana adanya pembangunan tol yang melintasi jalur karesidenan Kediri maka dapat meningkatkan iklim berusaha dan berinvestasi. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kebijakan, kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.	DPMPTSP	a. Upaya fasilitasi/kemudahan investasi pada tahun 2023, DPMPTSP telah menyusun draft Perda Penanaman Modal. (progres: sudah diajukan ke Bagian Hukum, menunggu pembahasan Bersama legislatif). Selain itu dengan adanya pengurusan perizinan berusaha melalui oss.go.id yang telah terintegrasi dengan Kementerian/ Lembaga dengan memperhatikan resiko usaha yang diajukan. Pengajuan perizinan berusaha memiliki resiko Menengah Tinggi dan Tinggi, wajib diverifikasi Sektor Teknis terkait. Sehingga meminimalisir resiko dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.	peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah

b. Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan semenjak keberadaan bandara di Kabupaten Kediri dan adanya rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung. Untuk merespon hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.		b. Dalam rangka upaya fasilitasi/kemudahan investasi pada tahun 2023, DPMPTSP telah menyusun draft Perda Penanaman Modal. (progres: sudah diajukan ke Bagian Hukum, menunggu pembahasan Bersama legislatif). Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: (1) kebijakan dasar penanaman modal (2) kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah (3) perencanaan penanaman modal (4) pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah (5) pelayanan penanaman modal (6) data dan sistem informasi penanaman modal (7) pemberdayaan usaha (8) hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal (9) pengendalian pelaksanaan penanaman modal (10) insentif dan kemudahan	mendekatkan pelayanan perizinan ke masyarakat dan memberikan kepastian hukum (SK izin) atas usaha yang dilakukan.

		penanaman modal (11) promosi penanaman modal (12) ketentuan dan sanksi. Selain itu dilakukan juga pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada obyek pengawasan yang diusulkan oleh OPD Teknis. Pada Tahun 2023 juga, Pelayanan perizinan keliling telah dijadwalkan di seluruh kecamatan Kabupaten Kediri	
c. Pemerintah Kabupaten Kediri harus memprioritaskan investor lokal dan warga sekitar terkait keberadaan bandara dan rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung untuk menghindari persoalan yang dapat terjadi di kemudian hari. Pemberian prioritas kepada investor lokal dan warga sekitar tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Kediri.		c. Pada Tahun 2023, DPMPTSP Kabupaten Kediri telah menyelenggarakan sosialisasi perizinan kepada 400 pengusaha lokal di Kabupaten Kediri. Dalam sosialisasi tersebut ada muatan terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Kediri. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas investasi yang ada dengan mengembangkan	memberikan pengetahuan penanaman modal dan potensi peluang investasi yang dapat dikembangkan pengusaha lokal sehingga memperluas investasi yang ada di Kabupaten Kediri .

15) Pariwisata & Kebudayaan a. Pemerintah Kabupaten Kediri dapat mendorong optimalisasi potensi wisata tidak hanya di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan saja, namun juga hingga ke tingkat RT. Dengan melibatkan seluruh elemen Masyarakat, besar harapan kami agar program-program di sektor ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan, serta menjadi potensi pendapatan yang besar bagi Masyarakat kita. Selain itu, upaya untuk mengoptimalkan promosi pariwisata-pariwisata berbasis kearifan lokal juga dapat dilakukan melalui inovasi-inovasi sehingga dapat lebih menarik para wisatawan untuk datang berwisata dan membeli produk-produk asli Masyarakat Kabupaten Kediri.	DINAS PARBUD	A. Dalam rangka optimalisasi potensi wisata banyak kegiatan yg kita lakukan diantaranya: 1. Pameran Pembangunan pada Gempita Kemerdekaan 2. Pameran di dalam dan Luar Daerah 3. Pameran Produk Unggulan di Anjungan TMII Jakarta 4. Perlombaan Pemilihan Putra Putri Batik Kabupaten Kediri Tahun 2022 5. Suvenir/ Cendera Mata khas Kab. Kediri 6. Gelar Seni Budaya Daerah Kabupaten Kediri 7. Festival Makanan Khas Jawa Timur 8. Pemilihan Duta Wisata Inu Kirana Kbupaten Kediri 9. Pemilihan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur 10. KEDIRI ART PERFORMANCE 11. Lomba Foto dan Video Desa Wisata	Kegiatan dimaksud dengan tujuan selain pengenalan pada wisata di Kabupaten Kediri dan upaya peningkatan kunjungan wisata, yang secara tidak langsung akan meningkatkan lapangan pekerjaan serta pengenalan produk daerah lewat pameran-pameran yang diikuti.

b. Memberikan dan mengoptimalkan pendidikan kebudayaan kepada anak sekolah supaya menyelamatkan budaya asli bangsa serta menjaga kelestarian warisan kebudayaan bangsa.	DINAS PARBUD	B. Dalam upaya memberikan dan mengoptimalkan pendidikan kebudayaan kepada anak sekolah supaya menyelamatkan budaya asli bangsa serta menjaga kelestarian warisan kebudayaan bangsa, kegiatan yng kita lakukan diataranya: 1. CBMS (cagar budaya masuk sekolah) 2. Lomba Karya Tulis Sejarah Budaya 3. Lawatan Sejarah	Kegiatan dimaksud dengan tujuan pengenalan budaya daerah sejak dini dan pelestarian kebudayaan daerah

c. Pemerintah Kabupaten Kediri juga diharapkan memberikan fasilitas bagi aktor penggerak wisata untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan pariwisata lokal melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan atau studi banding dengan wilayah lain yang memiliki potensi yang serupa dan lebih maju.		C. Upaya memberikan fasilitas bagi actor penggerak wisata untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan pariwisata lokal banyak kegiatan yg kita lakukan diantaranya: 1. Exhibisi Kesenian Kabupaten Kediri di ISI Denpasar dan Yogyakarta 2. Pagelaran Kesenian di Wilayah Kab kediri 3. Exhibisi Kesenian Jaranan Jowo dan Gelar Seni di Taman Budaya dan Sriwedari 4. Festival Musik di UPT Taman Budaya Surabaya 5. Dialog Budaya Penghayat 6. Exibishi Kesenian di ISBI Bandung 7. Exibishi Kesenian Jaranan Jawa di Solo 8. Gelar Seni dan Budaya Daerah Kab Kediri di Anjungan Jatim TMII 9. Study banding Seni Budaya Dewan Kesenian dan Kebudayaan KabupatenKediri (DK-4) di Daerah Istimewa Jogjakarta 10. Bedah Buku Satra dan Sosialisasi Menjaring Aspirasi Sastrawan Kabupaten Kediri	Kegiatan dimaksud dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan pariwisata lokal dan pengenalan kesenian di Luar daerah sehingga mampu menarik keinginan wisatawan berkunjung di Kabupaten Kediri

d. Melakukan peningkatan promosi serta pembinaan terhadap aktor-aktor penggerak wisata.		1. Pelatihan Tata kelola Desa Wisata 2. Sertifikasi Kompetensi Pramuwisata 3. Pelatihan Penyusunan Paket Wisata 4. Pelatihan Tata Kelola Homestay	Kegiatan dimaksud dengan tujuan peningkatan promosi serta pembinaan terhadap aktor-aktor penggerak wisata
e. Pemerintah Kabupaten Kediri juga diharapkan dapat membantu melakukan promosi wisata daerah dengan menampilkan di media sosial pemerintah atau melalui rekomendasi yang diberikan saat adanya kunjungan kerja, dsb		1. Direct Promotion Pelaku Usaha Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kediri di Kota Bandung 2. promosi lewat medsos di IG, Youtube terkait potensi wisata Kab. Kediri	Kegiatan dimaksud dengan tujuan promosi wisata daerah dengan menampilkan di media sosial pemerintah atau Melalui rekomendasi yang diberikan saat adanya kunjungan kerja

f. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang paling dasar misalnya berupa akses jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata,		1. Radio Komunikasi (HT) Untuk Operasional Obyek Wisata 2. Gapura Air Terjun Dolo di Kawasan Wisata Besuki 3. Mushola di Kawasan Wisata Gunung Kelud 4. Perbaikan Loket KW Gunung Kelud 5. Toilet di Kawasan Wisata Gunung Kelud 6. Perbaikan Tangga Menuju Air Terjun Irenggolo di Kawasan Wisata Besuki 7. Penampung Air Bersih di Kawasan Wisata Gunung Kelud 8. Kios PKL di Dolo Kawasan Wisata Besuki 9. Pengadaan Proyektor Film di Kawasan	Kegiatan dimaksud dengan tujuan ketersediaan insfastruktur dan kenyamanan wisatawan di Tempat Wisata
g. Memberikan ruang bagi UMKM untuk dapat menunjukkan karya atau berjualan di sekitar wilayah wisata di Kabupaten Kediri.	DINAS KOPUSMIK	Adanya fasilitasi ruang penjualan bagi pelaku usaha (UMKM) di setiap tempat pariwisata	Untuk tempat promosi serta penjualan produk langsung kepada konsumen (pengunjung lokasi wisata) sehingga pendapatan UMKM meningkat

h. Mengutamakan adanya UMKM dari masyarakat wilayah Kabupaten Kediri di wilayah wisata sehingga dapat membantu menggerakkan ekonomi	DINAS PARBUD DINAS KOPUSMIK	Fasilitasi ruang penjualan di utamakan untuk masyarakat di sekitar tempat wisata	Untuk memberikan fasilitas tempat usaha sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar tempat wisata untuk mendorong masyarakat lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatannya
4) Pertanian dan Ketahanan Pangan a) Dalam mewujudkan misi revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan perlu adanya program kebijakan Bupati Kediri untuk memberi stimulus kepada anak-anak muda agar mau bertani didesanya masing-masing dengan memberi bantuan pelatihan, modal, lahan, bibit, pupuk dan meneyediakan pasar pasca panen. Misalnya dengan membuat program satu desa satu kelompok pemuda tani yang betul-betul dibina dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.	DIPERTABUN DKPP	1. Selama tahun 2023, DKPP mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan yang kurang produktif melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan program IBU ASUH STUNTING. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat mulai tingkat rumah tangga untuk menyediakan sumber pangan dan gizi bagi keluarga sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan bibit/benih tanaman sayur dan sarana produksi pertanian pekarangan kepada	1. Mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan di tingkat rumah tangga sekaligus dukungan untuk penurunan angka stunting 2. Menstimulus potensi dan minat generasi muda untuk mengembangkan usaha peternakan dalam rangka peningkatan produksi peternakan dan kesejahteraan peternak.

		320 orang kader PKK desa, ibu rumah tangga dan kelompok wanita tani di 16 lokasi. Dengan pelaksanaan kegiatan KRPL dan IBU ASUH STUNTING yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi sumber pangan dan sumber pendapatan keluarga serta mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penanganan stunting. 2. Dalam rangka upaya pengembangan usaha peternakan, terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan (pengolahan hasil peternakan) yang melibatkan kelompok muda sebagai peserta yang bertujuan mendorong motivasi peternak muda dalam mengembangkan	

		usaha peternakan yang modern dan berteknologi. Pelatihan ini sekaligus juga memberikan gambaran analisis usaha peternakan sehingga menarik minat pemuda untuk memilih beternak sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Selain itu pada tahun 2023 diselenggarakan Lomba Anugerah Peternak Milenial dan Lomba Video Peternakan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat generasi milenial untuk berperan di bidang peternakan.	
b) Memfasilitasi peningkatan usaha peternakan skala rumah tangga dan mendorong berdirinya kelompok ternak yang dikelola secara baik, mandiri dan berkelanjutan.	DKPP	Dalam rangka upaya peningkatan usaha peternakan, tahun 2023 telah dilaksanakan hibah uang untuk pengembangan peternakan bagi 155 kelompok ternak produktif. Selain itu terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan peningkatan produksi peternakan ruminansia dan non	Menstimulus pengembangan usaha peternakan dalam rangka peningkatan produksi peternakan dan kesejahteraan peternak

		ruminansia serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan yang bertujuan mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan peternak.	

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
E. Bidang Hukum dan Pemerintahan. 1) Tata Kelola Pemerintahan a. Reformasi birokrasi yang merupakan misi bupati kediri belum sesuai yang ditargetkan di tahun 2022. Realisasi reformasi birokrasi tercapai 65,66 dari target 68. Kami mendorong untuk terus Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.	BAGIAN ORGANISASI	b. Terdapat perubahan metode pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB yakni menggunakan pendekatan RB General (Tata kelola Pemerintahan) danRB Tematik (Berdampak kepada masyarakat). Pada tahun 2023, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kediri dengan kerjasama dan kolaborasi untuk menindaklanjuti Rencana Aksi maupun Rekomendasi KemenPANRB dari berbagai Perangkat	

		Daerah yang terkait mendapatkan nilai 77,00 dengan predikat BB melampaui target yang telah ditetapkan yakni 72.	
b) Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public masih jauh dari yang ditargetkan. Kedepan program ini harus segera di prioritaskan mengingat program ini adalah bagian dari upaya mewujudkan pelayanan public yang efektif dan akuntable sebagai bagian dari apa yang sudah direncanakan dalam RKPD.		b. Transformasi digital dengan kerjasama dan kolaborasi untuk menindaklanjutire komendasi KemenPANRB dari berbagai Perangkat Daerah berhasil meningkatkan nilai SPBE menjadi 4,27 (sangat baik) didalamnya terdapat pelayanan public digital.	

2) Pelayanan Ketenagakerjaan a) Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 sebesar 68,73% ini masih berada dibawah target yang telah ditetapkan yakni 70,9%. menurunnya partisipasi angkatan kerja juga terjadi tidak hanya di Kabupaten Kediri saja tapi ada di banyak tempat baik skala nasional ataupun internasional. Tingginya angka alih fungsi tenaga kerja dari sektor formal menjadi sektor informal ketika Covid-19, menyebabkan partisipasi angkatan kerja menurun.	DINAS TENAGA KERJA	Pada tahun 2022 masih masa-masa Pandemi Covid 19, langkah yang diambil adalah melakukan pelatihan berbasis kompetensi kepada masyarakat pencari kerja dalam penyiapan tenaga kerja di Bandara Dhoho serta dalam rangka.	Memberikan dorongan kepada pencari kerja (khususnya lulusan SMK),Dinas Tenaga Kerja berupaya melalui Bursa Kerja dan diawali dengan pemberian motivasi kepada pencari kerja dengan tujuan mereka mempunyai mental lebih guna menghadapi tantangan di dunia usaha maupun dunia industri.
b) Pelayanan Ketenagakerjaan Memfasilitasi pelatihan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan pencari kerja terutama pada tiga sektor yang di masa pandemi Covid-19 terbukti tetap tumbuh positif, yakni Sektor Pertanian, Perdagangan dan Industri Pengolahan.		Dinas Tenaga Kerja setiap tahun melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna dan keluarganya di Desa Batuaji Kec. Ringinrejo dan Desa Sepawon Kec. Plosoklaten.	Memberikan pembekalan ketrampilan dan manajemen pengelolaan modal yang diperoleh dari hasil bekerja di luar negeri.

c) Berdasarkan Indek Kinerja Utama dalam bidang ketenagakerjaan, program pengurangan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 tidak mencapai target. Dimana target pada tahun 2022 adalah 5% tapi justru yang terjadi tingkat pengangguran dikabupaten kediri naik menjadi 6,83%. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dari kami fraksi Gerindra untuk mendorong pemerintah bekerja lebih keras untuk mengurangi angka pengangguran agar nanti dapat mencapai target dalam RPJMD yakni 4,6%.		Dalam rangka mengurangi pengangguran, dilaksanakan kegiatan Bursa Kerja, Kegiatan Padat Karya dan pelatihan berbasis kompetensi.	Pada masa tersebut masih terdampak Covid 19, banyak perusahaan yang masih belum banyak membuka lowongan kerja. Upaya dari Dinas Tenaga Kerja melalui pelatihan-pelatihan, Bursa Kerja serta Program Padat Karya dengan harapan mengura ngi angka pengangguran dan meningkatkan kesejah teraan masyarakat.

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3) Pembinaan Hukum a) Sosialisasi program kegiatan yang terkait pembangunan bidang hukum kepada masyarakat dan meningkatkan hubungan yang sinergis antar SKPD termasuk instansi vertikal (Kejaksaan, Kepolisian, TNI dan Linmas Desa).	BAGIAN HUKUM	1. Telah dilaksanakan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat dan perangkat desa serta pejabat di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri akan aturan – aturan hukum yang berlaku, sebanyak 8 Kecamatan dengan	Tujuan Penyuluhan Hukum Terpadu : a. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan perangkat desa serta pejabat di SKPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang lebih baik dan menghayati hak dan

		narasumber dari Instansi vertikal antara lain : 1. BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Kediri dengan materi Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN); 2. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan materi Keadilan Restoratif ; 4. Polres Kediri dengan materi	kewajibannya sebagai Warga Negara; b. Mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap aturan hukum serta menghormati hak asasi manusia.

		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan 5. DPRD Kabupaten Kediri dengan materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.	

b) Peraturan Daerah yang sudah terbit disosialisasikan, dibukukan dan disebarluaskan kepada masyarakat yang berkepentingan agar masyarakat mudah mengakses, mengetahui dan sadar akan hukum dan peraturan peraturan yang telah di tetapkan.	BAGIAN HUKUM	2. Telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan maksud sebagai wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, sebanyak 2 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dengan Narasumber : 1. Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan materi Pembinaan / Pembentukan Desa / Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Kediri;	Tujuan Publikasi Informasi Hukum adalah memberikan informasi dan dokumentasi berupa produk hukum daerah dengan menggunakan media cetak / elektronik maupun langsung : 1. Publikasi Informasi hukum melalui media cetak dilaksanakan 3 (kali) penerbitan dalam setahun; 2. Penerbitan buku himpunan produk hukum dilaksanakan 4 (empat) bulan sekali dalam setahun sedangkan penerbitan Lembaran Daerah dilaksanakan setahun sekali; dan

		2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan materi Dukungan APBDesa Dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum; 3. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dengan materi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 4. Polres Kediri dengan materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota); dan 5. DPRD dengan materi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014	3. Publikasi elektronik melalui Alamat website JDIH : www.jdih.kedirikab.go.id

		tentang Desa.	
c) Menyediakan informasi hukum melalui media cetak, elektronik maupun langsung.	BAGIAN HUKUM	Telah dilaksanakan publikasi Informasi hukum melalui: a. Penerbitan buku himpunan produk hukum daerah b. Penerbitan Lembaran Daerah; c. Media elektronik melalui website JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum)	

d) Terkait dengan bidang hukum dan tata kelola pemerintahan, menerapkan prinsip-prinsip good governance, terutama berkaitan dengan prinsip integritas, agar kemudian dapat dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan performance maupun kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri sehingga dapat berorientasi kepada kinerja yang maksimal	BAGIAN ORGANISASI	a. Telah ditindaklanjuti rekomendasi atas implementasi SAKIP dari Kementerian PANRB terutama dalam penjenjangan kinerja yang terhubung antara kinerja individu yang memengaruhi kinerja OPD yang tersingkron melalui aplikasi e-Kinerja dan e-SAKIP yang terintegrasi Bersama dengan kolaborasi antara Bagian Organisasi, Bappeda, BKD, dan Inspektorat. b. Untuk kedisiplinan dan integritas (Survei Penilaian Integritas) pegawai ditindaklanjuti oleh BKD dan Inspektorat	Keselarasan kinerja pegawai yang memengaruhi kinerja organisasi, terutama dengan penyelarasan Matriks Peran Hasil hingga Perjanjian Kinerja Organisasi

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya dan Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian sebagai berikut:

1. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Kediri
   - Penugasan dari Kementerian/Lembaga PNK : Kementerian Pertanian (DAK Non Fisik)
     1. Dasar Penugasan (Permen/Kepmen)
        a. Permentan Nomor 08 Tahun 2023
     2. Program dan Kegiatan
        a. Program Ketahanan Pangan dan Pertanian
        b. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)
        c. Output : Terlaksananya 1. Pengadaan sarana perbenihan; 2. Demplot; 3. Pertanaman; 4. Kegiatan pasca panen; 5. Operasional P2L
        d. Rincian Kegiatan :
           - Pengadaan Sarana Perbenihan : a. Bangunan rumah benih; b. Penyediaan media tanam dan sarana produksi; c. Penyediaan benih sayuran; d. Penyediaan peralatan perbenihan
           - Demplot : a. Penyediaan peralatan dan pengolahan demplot; b. Penyediaan peralatan pengairan; c. Penyediaan media tanam dan sarana produksi; d. Pembuatan plang nama
           - Pertanaman : a. Penyediaan media tanam dan sarana produksi; b. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman
           - Kegiatan Pasca Panen : a. Penjualan hasil panen dalam bentuk segar
           - Operasional P2L : a. Pertemuan koordinasi; b. Pelatihan; c. Pendampingan; d. Pengawalan; e. Pelaporan
     3. Anggaran
        a. Alokasi Anggaran : Rp. 130.000.000,-
        b. Realisasi Anggaran: Rp. 128.200.000,- ; 98,6 %
     4. Kegiatan

a. Target Kegiatan : Terlaksananya kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di 2 kelompok tani
b. Realisasi Kegiatan : Terlaksananya kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di 2 kelompok tani

5. Permasalahan dan Kendala
   a. Permasalahan : Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) tidak bisa terserap 100% karena menyesuaikan dengan SIPD
   b. Kendala : Nihil
6. Saran dan TindakLanjut
   a. Saran : 2 kelompok tani yang telah mendapat kegiatan Pekarang Pangan Lestari (P2L) diharapkan dapat memanfaatkan bantuan yang telah diberikan secara optimal dan melakukan pengembangan kegiatan untuk semua anggota kelompok tani
   b. Tindak Lanjut : akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kelompok tani yang mendapat kegiatan Pertanian Pangan Lestari (P2L) TA 2023.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Kediri

- Penugasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

1. Dasar Penugasan :

   Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

2. Program dan Kegiatan
   a. Program : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
   b. Kegiatan :
      1) Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Provinsi Jawa Timur.
      2) Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur.
      3) Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur “Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa”.
   c. Output :

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya.
2) Memberikan dampak secara langsung bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan dan usaha Iainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di tengah Pandemi COVID-19.
3) Pemulihan dan memperkuat perekonomian desa dengan Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya desa untuk mewujudkan desa berdaya.

Rincian Kegiatan :

1) PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN (JATIM PUSPA) PROVINSI JAWA TIMUR

   Program Jatim Puspa di fokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan ekonomi dampak wabah Covid-19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya.

   a) Sasaran : Sasaran Program Jatim Puspa adalah Anggota Rumah Tangga (ART) perempuan KPM Graduasi PKH usia produktif yang mempunyai usaha atau akan memulai usaha.
   b) Lokasi :
      - Desa Kedungsari : 60 KPM
      - Desa Tarokan : 55 KPM
      - Desa Puhjarak : 27 KPM

      Jumlah total : 142 KPM

      Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa untuk modal usaha bagi ART perempuan KPM, yang diwujudkan dalam bentuk barang, dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
   c) Anggaran :

a. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 407.750.000,- dengan rincian masing-masing Desa, sebagai berikut :
   - Desa Tarokan sebesar : Rp. 156.875.000,-
   - Desa Kedungsari : Rp. 170.000.000,-
   - Desa Puhjarak : Rp. 80.875.000,-

b. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 407.750.000,-, 100 % dengan rincian masing-masing Desa, sebagai berikut :
   - Desa Tarokan sebesar : Rp. 156.875.000,-
   - Desa Kedungsari : Rp. 170.000.000,-
   - Desa Puhjarak : Rp. 80.875.000,-

d) Kegiatan :

a. Dalam kegiatan fasilitasi program Jatim Puspa dengan target sasaran 3 Desa telah terlaksana 100% berikut adalah laporan kegiatan fasilitasi yang dilakukan.

b. Dilaksanakan Verifikasi Dokumen Program Jatim Puspa Tahun 2023 di Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan, Desa Tarokan Kecamatan Tarokan dan Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan pada tanggal 06 Februari 2023.

c. Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pencairan Program Jatim Puspa :
   1. Hari Rabu, tanggal 08 Maret 2022.
   2. Yang membuka acara : Kepala DPMPD Kabupaten Kediri
3. Narasumber : DPMD Provinsi Jawa Timur, DPMPD Kabupaten Kediri
4. Peserta yang diundang terdiri dari unsur :
   - Kasi PMD Kecamatan
   - Kepala Desa
   - Sekretaris desa

e) Tempat pelaksanaan : di Ruang Pertemuan DPMPD Kabupaten Kediri.

a. Tim Kabupaten/ Sekretariat menghadiri Sosialisasi/ Musyawarah Desa Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2023 sebagai berikut:

   Tim Kabupaten/ Sekretariat, camat menghadiri Musyawarah Desa sebagai Narasumber ke 3 Desa Lokasi Program Jatim Puspa dengan jadwal sebagai berikut:

1. Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan : 13 April 2023
2. Desa Tarokan Kecamatan Tarokan : 13 April 2023
3. Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan : 17 April 2023

b. Orientasi Program Jatim Puspa Tahun 2023
   1. Hari Rabu s/d Jumat, tanggal 03 s/d 05 Mei 2023.
   2. Narasumber : Bappeda Provinsi, DPMD Provinsi, Inspektorat Provinsi, Pajak Pratama, Polda dan
   3. Peserta yang diundang terdiri dari unsur : Pejabat/ Staf DPMD Kabupaten, Kepala Desa Lokasi Program, Sekretaris Desa Bendahara Desa
   4. Tempat pelaksanaan : Fave Hotel Sidoarjo

c. Tim Kabupaten/ Sekretariat, Kasi PMD Kecamatan menghadiri penyerahan bantuan Program kepada KPM ke 3 Desa Lokasi Program Jatim Puspa dengan jadwal sebagai berikut:
   1. Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan : 04 September 2023
   2. Desa Tarokan Kecamatan Tarokan : 04 September 2023
   3. Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan : 04 September 2023

d. Melakukan monitoring ke Lokasi Desa sasaran termasuk mengunjungi ke KPM Penerima Program Jatim Puspa Tahun 2023 Lokasi :
   1. Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan : 30 November 2023
   2. Desa Tarokan Kecamatan Tarokan : 30 November 2023
   3. Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan : 29 November 2023
   4. Secara umum hasil monitoring dan evaluasi tim Kabupaten bantuan barang sudah tersalurkan semuanya ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sasaran program, bantuan barang sudah dimanfaatkan oleh KPM dan sebagian kecil ada KPM yang perkembanganya belum maksimal karena ada keterbatasan penjualan akibat banyaknya pesaing.

f) Permasalahan dan Kendala :

a. Permasalahan :
   1) Sumber data awal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan data Graduasi PKH Kabupaten Kediri Tahun 2020 – 2021.

2) Dari data tersebut diatas dilakukan verifikasi oleh desa sehingga ditemukan banyak data yang sudah tidak layak menerima bantuan karena sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, data tidak ditemukan dan tidak memiliki anggota ART perempuan.
3) Diupayakan updating data dengan melakukan penambahan data KPM Graduasi PKH di Kabupaten Kediri selain data graduasi PKH Tahun 2020 – 2021

b. Kendala :

Data yang diverifikasi oleh desa ditemukan banyak data yang sudah tidak layak menerima bantuan karena sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, data tidak ditemukan dan tidak memiliki anggota ART perempuan.

g) Saran dan Tindak Lanjut :

a. Saran

Update sumber data awal dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur data Graduasi Kabupaten Kediri,

b. Tindaklanjnut

Pada saat dilakukan verifikasi data oleh desa tidak banyak ditemukan data yang tidak layak menerima bantuan karena sudah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, data tidak ditemukan dan tidak memiliki anggota ART perempuan.

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA PROVINSI JAWA TIMUR.

a. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pemberdayaan Bum Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa. BKK ini diharapkan dapat mengungkit Bum Desa sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Desa.
b. Sasaran Bum Desa penerima Program Pemberdayaan Bum Desa adalah Bum Desa yang sudah berbadan hukum dengan klasifikasi Bum Desa Maju dan Berkembang berdasarkan Data Desa Center (DDC) Provinsi Jawa Timur.
c. Desa penerima BKK Pemberdayaan Bum Desa Tahun 2023 sebanyak 6 Desa, yaitu :
   - Desa Kasreman Kec. Kandangan.

- Desa Mukuh Kec. Kayenkidul.
- Desa Sumberbendo Kec. Pare.
- Desa Duwet Kec. Wates.
- Desa Tiron Kec. Banyakan.
- Desa Bulusari Kec. Tarokan.

d. Masing-masing Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang penggunaannya sebesar 96% untuk dana penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada Bum Desa, sedangkan 4% untuk biaya operasional Desa.

e. Penggunaan BKK Pemberdayaan Bum Desa dari masing-masing Desa sebagai berikut :

Table 26
Penggunaan BKK Pemberdayaan BUM Desa

No.	Desa	Kecamatan	Nama Bumdesa	Unit Usaha
1	Tiron	Banyakan	BUM DESA TIRON MAJU BERSAMA TIRON	Toko kelontong
2	Bulusari	Tarokan	BUM DESA SIDO MUKTI BULUSARI	Pengelolaan sampah
3	Kasreman	Kandangan	BUM DESA GOTONG ROYONG KASREMAN	Perdagangan
4	Mukuh	Kayen kidul	BUM DESA ASTA NUGRAHA MUKUH	Toko
5	Duwet	Wates	BUM DESA KARYA MAKMUR DUWET	Perdagangan / Toko
6	Sumberbendo	Pare	BUM DESA MAHKOTA SEJAHTERA SUMBER BENDO	Perdangan

a. Tim Kabupaten/ Sekretariat menghadiri Musyawarah Desa sebagai Narasumber ke 6 Desa Lokasi Program Pemberdayaan BUM Desa yaitu:

- Desa Kasreman Kecamatan Kandangan : 06 Juni 2023
- Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul : 06 Juni 2023

- Desa Sumberbendo Kecamatan Pare : 07 Juni 2023
- Desa Duwet Kecamatan Wates : 07 Juni 2023
- Desa Tiron Kecamatan Banyakan : 08 Juni 2023
- Desa Bulusari Kecamatan Tarokan : 08 Juni 2023

b. Rapat koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Pencairan Program Jatim Puspa

f) Pelaksanaan program BKK Pemberdayaan BUMDesa

a. Pembukaan Kegiatan :
   1. Hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023
   2. Yang membuka acara: Kepala Dinas yang diwakili oleh Sekretaris DPMPD Kabupaten Kediri
   3. Narasumber : DPMD Provinsi, DPMPD Kabupaten dan Tenaga Ahli P3MD
   4. Peserta yang diundang terdiri dari unsur : Kasi PMD Kecamatan , Kepala Desa, Ketua BUM Desa, PIC/ Pendamping Desa
   5. Tempat pelaksanaan : di Ruang Sekartaji DPMPD Kabupaten Kediri

b. Fasilitasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
   1. Hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2023
   2. Yang membuka acara: Tenaga Ahli P3MD
   3. Peserta yang diundang terdiri dari unsur : Pendamping Desa (PIC BUM Desa) dan Bendahara BUM Desa
   4. Tempat pelaksanaan : Ruang Sekretariat TAPM Kab. Kediri

c. Melakukan monitoring dan evaluasi BKK pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul, Desa Bulusari Kecamatan Tarokan dan Desa Tiron Kecamatan Banyakan pada Tanggal 13 Desember Tahun 2023

d. Penerima manfaat BUM Desa dalam kategori maju serta siap menerima bantuan program serta sanggup melaksanakan kegiatan sebagaimana ketentuan program.

e. Sudah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada, 4% atau 4.000.000 untuk biaya operasional dan 96 % atau 96.000.000 Untuk penyertaan modal BUM Desa, dan dibelanjakan sesuai dengan

kebutuhan yang telah disepakati pada musyawarah identifikasi kebutuhan sebagaimana petunjuk pedoman yang ada program.

f. Desa telah menerima transfer sejumlah Rp 100.000.000 langsung masuk pada rekening Desa.

g) Permasalahan

kebijakan PPKM yang berdampak ada pergeseran kegiatan tatap muka menjadi via zoom meeting sehingga penerimaan materi dan pemahaman seringkali tidak optimal, waktu pelaksanaan program yang terbatas.

h) Solusi / upaya pemecah permasalahan

Upaya yang telah dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan zoom meeting dengan baik dan jika kondisi sudah normal kegiatan dan bimtek bisa dilakukan secara langsung melalui tatap muka, efektivitas dan efisensi waktu yang ada.

3) PROGRAM DESA BERDAYA PROVINSI JAWA TIMUR “PENGEMBANGAN DESA TEMATIK MELALUI EKONOMI KREATIF, INOVATIF DAN PRODUKTIF BERBASIS BUM DESA”

a. Maksud Program Desa Berdaya adalah untuk pemulihan dan memperkuat perekonomian desa dengan Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya desa untuk mewujudkan desa berdaya.

b. Sasaran Program Desa Berdaya adalah Desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa sebagai Desa Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022.

c. Lokasi Program Desa Berdaya, yaitu :

- Desa Doko Kec. Ngasem.
- Desa Tulungrejo Kec. Pare.
- Desa Tertek Kec. Pare.

d. Pelaksanaan

a) Masing-masing Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dapat digunakan untuk :

- Penggunaan dana BKK Desa Desa Berdaya minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk kegiatan Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, sedangkan untuk biaya operasional maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).

b) 3 Desa yang menjadi sasaran program dapat dilaporkan capaian sebesar 100%.

c) Kegiatan fasilitasi dilakukan mulai dari perencanaan, pendampingan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dilakukan secara berkala.

d) Mendampingi Provinsi dalam rangka Launching Desa di Desa Doko Kecamatan Ngasem pada tanggal 06 Agustus 2023

e) Mendampingi Provinsi dalam rangka Launching Desa di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare pada tanggal 20 November 2023

f) Mendampingi Provinsi dalam rangka Launching Desa di Desa Tertek Kecamatan Pare pada tanggal 10 Desember 2023

e. Permasalahan

Kurangnya kemampuan SDM karena ini merupakan suatu hal baru yang harus segera diwujudkan dan Pemberian anggaran waktunya terlalu pendek

BAB V

P E N U T U P

Substansi pokok yang harus ada dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri selama satu tahun anggaran 2023.

Dari paparan pada bab-bab di atas dapat dipahami bahwa ada dua hal pokok yang sudah dijelaskan. *Pertama,* Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah memaparkan dan menjelaskan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. *Kedua,* Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri telah memaparkan dan menjelaskan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kediri yang sudah bekerja sama dalam penyusunan LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri ini. Dan kepada DPRD Kabupaten Kediri mohon berkenan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kediri Tahun 2023 ini.